



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEPALA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025



LKPJ 2025



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

LKPJ

TAHUN 2025

Sarilamak, 12 Februari 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025** dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota tepat pada waktunya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara substansi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Adapun sistematika dan format penyusunan laporan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah ini. Tanpa dukungan, koordinasi, dan kerja sama yang baik dari semua pihak terkait, laporan ini tidak akan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan serta saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sarilamak, 12 Februari 2026
BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM.....	2
1.2 VISI DAN MISI	4
1.3 DATA UMUM DAERAH	8
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	8
1.3.2 Jumlah Penduduk.....	9
1.3.3 Jumlah PNS	10
1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	11
1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	12
1.3.6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	12
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
DAERAH.....	13
2.1 PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD.....	13
2.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	14
2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	17
2.3.1 Belanja Operasi.....	18
2.3.2 Belanja Modal	20
2.3.3 Belanja Tidak Terduga	21
2.3.4 Belanja Transfer	21
2.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG PEMBIAYAAN	22
2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	22
2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	22
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG	
MENJADI KEWENANGAN DAERAH	23
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	23
3.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	24
3.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	52
3.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan	
Ruang.....	123
3.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan	
Pemukiman	138

3.1.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban	
Umum Serta Perlindungan Masyarakat	141
3.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.....	172
3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
.....	185
3.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.....	187
3.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan	
Perlindungan Anak.....	190
3.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.....	200
3.1.2.4. Urusan Pertanahan.....	210
3.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	210
3.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan	
Pencatatan Sipil.....	221
3.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan	
Desa	231
3.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan	
Keluarga Berencana	238
3.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	253
3.1.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	267
3.1.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan	
Menengah	277
3.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	286
3.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga.....	296
3.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	307
3.1.2.15 Urusan Persandian.....	310
3.1.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.....	313
3.1.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	321
3.1.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	336
3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	340
3.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	341
3.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	348
3.1.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	351
3.1.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.....	378
3.1.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	381
3.1.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	390
3.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	392
3.1.4.1. Sekretariat Daerah	392

3.1.4.2 Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	438
3.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	461
3.1.5.1. Urusan Perencanaan	461
3.1.5.2. Urusan Keuangan	474
3.1.5.3. Urusan Kepegawaian.....	499
3.1.5.4. Urusan Penelitian Dan Pengembangan	508
3.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	511
3.1.6.1 Inspektorat Daerah.....	511
3.1.7. Unsur Kewilayahan	528
3.1.7.1. Urusan Kecamatan.....	529
3.1.8 Unsur Pemerintahan Umum	645
3.1.8.1 Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	646
3.2 TANGGAPAN ATAS REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN 2024	656
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	667
4.1 TUGAS PEMBANTUAN.....	667
BAB V PENUTUP	668

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Agregat Kependudukan Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 2 Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	11
Tabel 3 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	12
Tabel 4 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	12
Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024	23
Tabel 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24
Tabel 7 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada RSUD dr. Achmad Darwis	52
Tabel 8 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan	59
Tabel 9 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	124
Tabel 10 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	139
Tabel 11 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran	141
Tabel 12 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	151
Tabel 13 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163
Tabel 14 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial	172
Tabel 15 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024	185
Tabel 16 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja...	187
Tabel 17 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	190
Tabel 18 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Dinas Pangan	201
Tabel 19 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	210
Tabel 20 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	222
Tabel 21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	231

Tabel 22 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	238
Tabel 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan	253
Tabel 24 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika.....	267
Tabel 25 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	277
Tabel 26 Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	286
Tabel 27 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	296
Tabel 28 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	307
Tabel 29 Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	310
Tabel 30 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313
Tabel 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	322
Tabel 32 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	336
Tabel 33 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2024	340
Tabel 34 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan	341
Tabel 35 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	348
Tabel 36 Urusan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	351
Tabel 37 Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	368
Tabel 38 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	378
Tabel 39 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ...	381
Tabel 40 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ...	390
Tabel 41 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2024.....	392
Tabel 42 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan	393
Tabel 43 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	397
Tabel 44 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum.....	401
Tabel 45 Urusan Pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan SDA	404
Tabel 46 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan	412
Tabel 47 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	416
Tabel 48 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Umum	419

Tabel 49 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Organisasi	427
Tabel 50 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.....	430
Tabel 51 Urusan Sekretariat Daerah Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	433
Tabel 52 Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.....	438
Tabel 53 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2024.....	461
Tabel 54 Urusan Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	462
Tabel 55 Urusan Keuangan pada Badan Keuangan.....	474
Tabel 56 Urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	499
Tabel 57 Urusan Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	508
Tabel 58 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025.....	511
Tabel 59 Urusan Pengawasan pada Inspektorat.....	511
Tabel 60 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Kewilayahan Tahun 2024.....	528
Tabel 61 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Gunuang Omeh	529
Tabel 62 Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan Pada Kecamatan Bukik Barisan	537
Tabel 63 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Suliki	547
Tabel 64 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Guguak	554
Tabel 65 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Mungka	562
Tabel 66 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Akabiluru	570
Tabel 67 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Payakumbuh.....	579
Tabel 68 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Luak	589
Tabel 69 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	596
Tabel 70 Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	604
Tabel 71 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Harau.....	611
Tabel 72 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	624
Tabel 73 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Kapur IX	633
Tabel 74 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024	646
Tabel 75 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	646

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. LKPJ disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan selanjutnya dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode berikutnya.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan dan upaya penyelesaian pada setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah beserta pelaksanaannya, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan memuat capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian terhadap tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi, serta penugasan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, LKPJ disusun berdasarkan format dan sistematika yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri serta disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna dan selanjutnya dibahas oleh DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD sebagai bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan kebijakan daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025.

Penyampaian LKPJ oleh Bupati kepada DPRD merupakan perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus sebagai mekanisme checks and balances antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada dasarnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan laporan kemajuan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran serta menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Melalui LKPJ ini diidentifikasi berbagai hambatan, tantangan, kekuatan, dan kelemahan dalam pencapaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun-tahun berikutnya.

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan LKPJ ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.2 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu pandangan, gagasan, maupun wawasan yang berorientasi pada cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan pada masa depan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat demi kepentingan daerah, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik.

Berdasarkan pemikiran ini dirumuskanlah visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu:

“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu **Kabupaten Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai wilayah administrasi pemerintah, **Lima Puluh Kota** juga dengan segala kesatuannya, yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota 5 (lima) tahun mendatang merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

Bermartabat bermakna terwujudnya masyarakat yang memiliki harkat dan harga diri yang tinggi, yang tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari yang dilandasi nilai-nilai adat Minangkabau, agama Islam, serta budaya lokal yang luhur. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang:

1. Menjunjung tinggi norma adat dan agama, sejalan dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) sebagai dasar tatanan kehidupan sosial di ranah Minang;
2. Menjaga, melestarikan, dan menghidupkan warisan budaya, baik berupa situs, tradisi, maupun nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman;
3. Menjadikan keluarga sebagai pilar utama pembentukan karakter, tempat menanamkan nilai moral, etika, disiplin, dan ketaatan beragama, sehingga melahirkan generasi yang memiliki sikap teladan;
4. Menghargai keberagaman budaya, saling menghormati, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural.

Dengan demikian Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan menjadi contoh yang taat aturan, santun, religius, berbudaya, dan tangguh dalam menjaga identitas diri, sehingga memiliki kedudukan terhormat di mata daerah lain maupun pada tataran nasional.

Maju bermakna terwujudnya masyarakat dan daerah yang berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun tata kelola pemerintahan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang:

1. Memiliki daya saing tinggi, mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, bahkan global melalui pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
2. Berdaya ekonomi kuat, ditandai dengan meningkatnya produktivitas, kesejahteraan, pemerataan pembangunan.
3. Berpendidikan baik, dengan akses dan kualitas pendidikan yang merata, serta menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, adaptif, dan kreatif.
4. Sehat jasmani dan rohani, ditopang oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
5. Memiliki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan, seperti jalan, jembatan, sarana transportasi, teknologi informasi, dan fasilitas publik lainnya.
6. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian pembangunan daerah diarahkan untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan, seimbang antara kemajuan fisik, ekonomi, sosial, dan kualitas sumber daya manusianya.

Sejahtera bermakna tercapainya kondisi masyarakat yang hidup dengan layak, aman, dan terpenuhi kebutuhannya di berbagai aspek. Sejahtera tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan dan terbukanya lapangan kerja, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang memadai. Masyarakat yang sejahtera berarti memiliki kualitas hidup yang baik, merasakan ketenteraman, serta dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis. Dengan demikian, kesejahteraan mencakup keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, serta kebahagiaan hidup, sehingga masyarakat tidak hanya cukup secara materi tetapi juga merasa nyaman, bahagia, dan berdaya dalam menjalani kehidupannya.

Berkelanjutan bermakna terwujudnya pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh generasi saat ini tanpa mengurangi hak generasi mendatang. Masyarakat dan daerah yang berkelanjutan adalah masyarakat dan daerah yang:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Memastikan pemerataan manfaat pembangunan, agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal;
3. Melestarikan tata ruang, ekosistem, dan keanekaragaman hayati sebagai penyangga kehidupan;
4. Membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim;
5. Mendorong pola hidup ramah lingkungan melalui edukasi, partisipasi, dan kebijakan hijau;
6. Menjaga warisan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari keberlanjutan identitas daerah.

Sedangkan misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 7 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Misi ini bertujuan agar masyarakat memiliki akhlak yang mulia berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah dan selalu menjunjung serta melestarikan kebudayaan lokal ditengah globalisasi yang semakin berkembang pesat. Penguatan akhlak dilakukan dengan menanamkan nilai nilai kejujuran, toleransi, disiplin, serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial, menjadi kunci dalam menciptakan individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat juga penting dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual masyarakat. pelestarian dan pengembangan budaya menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi. Masyarakat didorong untuk mengenali, menghargai, dan melestarikan seni, tradisi, serta adat istiadat yang menjadi bagian dari warisan leluhur. Peningkatan kesadaran akan pentingnya budaya juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, festival budaya, serta penguatan peran komunitas budaya dalam kehidupan sosial.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi ini merupakan persyaratan yang penting untuk kemajuan suatu daerah dan mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal tersebut sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, terbuka dan transparan. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara tersebut dapat mewujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif. Misi ini bertujuan untuk mengembangkan individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat berkontribusi secara efektif dalam berbagai bidang. Fokus pembangunan diarahkan pada perluasan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta penciptaan lingkungan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja terampil dan berdaya saing. Upaya ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat keadilan sosial dan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan antar kelompok masyarakat, pembangunan sumber daya manusia akan berjalan secara inklusif dan menyeluruh. Misi ini menjadi landasan dalam membangun pondasi kemajuan daerah yang kokoh, dengan sumber daya manusia sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan masa depan.

4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan. Pada misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dengan menguatkan sektor UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah (IKM), serta sektor pariwisata. Misi ini mencerminkan upaya meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Keberhasilan misi ini diukur melalui berbagai indikator, antara lain: Proporsi jumlah UKM dan IKM non-pertanian, Rasio Kewirausahaan, serta Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, yang mencerminkan kekuatan ekonomi rakyat. Tingkat Pengangguran Terbuka, Proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan menunjukkan inklusivitas dan daya serap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita ADHB, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi indikator utama performa makroekonomi daerah. Untuk mendukung ketahanan ekonomi, diukur juga ROA BUMD, Rasio PDRB sektor jasa keuangan, Ekspor barang dan jasa, Rasio pajak daerah terhadap PDRB, serta nilai transaksi saham per kapita. Pada sektor pangan dan pertanian, tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta persentase dan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok menjadi cerminan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, misi ini menekankan penguatan struktur ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika pasar serta mendukung keadilan sosial dalam pembangunan.

5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing. Pada misi ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi daerah yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diukur melalui Rasio PDRB

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi indikator penting untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi.

6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Pada misi ini pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni, serta mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana. Prioritas utama diberikan pada pemenuhan akses masyarakat terhadap sarana dasar seperti air minum yang aman, sanitasi layak, sistem pengelolaan sampah yang efektif, dan hunian yang memadai. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, serta pengendalian pencemaran dan degradasi lingkungan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar adaptif terhadap potensi bencana dan mampu meminimalkan risiko terhadap kehidupan masyarakat. Tata ruang dan pemanfaatan lahan dilakukan secara cermat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan, misi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya wilayah yang tangguh, berkelanjutan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga.

7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari. Misi ini bertujuan untuk memperkuat potensi dan kapasitas masyarakat di tingkat nagari (desa) agar dapat mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan wilayah. Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran nagari dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan misi ini diukur melalui peningkatan Persentase Desa Mandiri, yang mencerminkan kemampuan nagari dalam mengelola potensi secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara astronomis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0° 25' 28,71" Lintang Utara (LU) sampai dengan 0° 22' 14,52" Lintang Selatan (LS) dan 100° 15' 44,10" sampai 100° 50' 47,80" Bujur Timur (BT) serta dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi, mulai dari datar, bergelombang dan berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 110–2.261 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Daerah terendah (118 Mdpl) berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan daerah tertinggi (837 Mdpl) berada di Kecamatan Gunung Omeh. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) buah gunung, yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), dan Gunung Sanggul (1.495 m). Selain itu juga terdapat 17 (tujuh belas) buah sungai yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sungai terpanjang adalah Batang Sinamar (96,13 km) yang melintasi Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Sedangkan sungai terpendek adalah Batang Nenan (5 km) di Kecamatan Bukik Barisan.

Bila ditinjau dari aspek penggunaan lahan, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hutan dengan luas 168,145 ha atau 50,13%, yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 114,667 ha, Hutan Suaka Alam dan Wisata seluas 20.673 ha, serta Hutan Produksi seluas 32,805 ha. Sedangkan penggunaan lahan lainnya diperuntukkan sebagai lahan basah yang digunakan untuk sawah beririgasi produktif seluas 14.090 ha, sawah beririgasi tidak produktif seluas 6.641 ha, sawah nonirigasi seluas 1.555 ha, daerah rawa seluas 221 ha, kolam/tebat/embung seluas 1.320 ha, waduk/danau seluas 1.814 ha, lahan kering untuk perkebunan seluas 38.150 ha, pemukiman/pekarangan seluas 7.790 ha, kawasan industri seluas 171 ha, serta kawasan pertambangan 395 ha. Selain itu terdapat pula lahan terlantar/semak belukar seluas 54.525 ha dan areal untuk penggunaan lainnya seluas 36.953 ha.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Pada tahun 2025 perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 406.228 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 202.793 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 203.435 jiwa.

Tabel 1 Agregat Kependudukan Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Suliki	7.676	7.881	15.557
2	Guguak	18.486	18.990	37.476
3	Payakumbuh	19.789	19.782	39.571
4	Luak	14.852	15.322	30.174
5	Harau	29.679	29.282	58.961
6	Pangkalan Koto Baru	15.709	15.120	30.829
7	Kapur IX	14.949	14.675	29.624
8	Gunung Omeh	7.334	7.360	14.694

9	Lareh Sago Halaban	20.644	20.685	41.329
10	Situjuah Limo Nagari	12.164	12.261	24.425
11	Mungka	14.237	14.434	28.671
12	Bukik Barisan	11.981	12.271	24.252
13	Akabiluru	15.293	15.372	30.665
	Jumlah	202.793	203.435	406.228

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puluh Kota Tahun 2025

1.3.3 Jumlah PNS

Pegawai atau Aparatur merupakan salah satu komponen penting dalam sistem Pemerintahan Daerah yang selalu mengalami dinamika dan perkembangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, keadaan Pegawai setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, baik yang disebabkan oleh mutasi luar daerah, pensiun, maupun meninggal dunia. Keadaan jumlah Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2025 berjumlah sebanyak 8.706 orang yang menduduki jabatan struktural, fungsional dan pelaksana dengan rincian: Pejabat Struktural sebanyak 379 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 6.158 orang, dan Pelaksana sebanyak 2.169 orang.

Berikuta adalah Data jumlah PNS di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 43 Perangkat Daerah:

No	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	15	42	62
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	14	17	37
3	Badan Keuangan	20	12	45	77
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	10	67	89
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	8	24	15	47
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	24	33	65
7	Dinas Kesehatan	9	975	121	1105
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	25	26	58
9	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	10	15	51	76
10	Dinas Pangan	5	13	12	30
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7	13	47	67
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	45	73	129
13	Dinas Pemadam Kebakaran	12	22	127	161
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	7	8	24	39
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	18	13	34
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	4249	567	4829
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	25	33	67
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	21	28	57
19	Dinas Perhubungan	13	2	154	169
20	Dinas Perikanan	7	29	12	48
21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8	22	16	46
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	17	18	41
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	48	38	94

24	Dinas Sosial	6	18	32	56
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7	30	61	98
26	Inspektorat	7	74	8	89
27	Kecamatan Akabiluru	8	-	6	14
28	Kecamatan Bukik Barisan	8	-	5	13
29	Kecamatan Guguak	9	-	9	18
30	Kecamatan Gunuang Omeh	7	-	3	10
31	Kecamatan Harau	8	-	9	17
32	Kecamatan Kapur Ix	9	-	9	18
33	Kecamatan Lareh Sago Halaban	8	-	9	17
34	Kecamatan Luak	9	-	11	20
35	Kecamatan Mungka	8	-	5	13
36	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	7	-	7	14
37	Kecamatan Payakumbuh	7	-	14	21
38	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	9	1	6	16
39	Kecamatan Suliki	8	-	7	15
40	RSUD dr. Achmad Darwis	12	296	106	414
41	Satuan Polisi Pamong Praja	17	24	88	129
42	Sekretariat Daerah	18	58	152	228
43	Sekretariat PRD	5	11	43	59
	Jumlah	379	6158	2169	8706

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Tabel 2 Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

No	Jenis	2025		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	149.433.202.237,00	140.241.668.028,44	93,84
	a. Pajak Daerah	63.463.838.243,00	61.669.681.814,00	97,17
	b. Retribusi Daerah	49.795.515.029,00	42.919.451.289,00	86,25
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.844.398.220,00	4.794.398.220,00	98,96
	d. Lain-lain PAD yang Sah	31.365.450.745,00	30.858.136.705,44	98,38
2	Pendapatan Transfer	1.173.510.080.812,00	1.174.495.981.630,00	100,08
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.123.709.342.093,00	1.122.455.480.033,00	99,88
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.800.738.719,00	52.040.501.597,00	104,49
	Total	1.329.141.182.095,00	1.320.593.986.932,44	99,35

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2025

1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Tabel 3 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

No.	Jenis	2025		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
A.	Belanja Operasi	1.090.313.146.458,00	1.050.036.722.632,58	96,30
	1. Belanja Pegawai	814.820.448.836,00	795.877.699.541,32	97,67
	2. Belanja Barang dan Jasa	243.249.766.545,00	224.373.551.504,26	92,23
	3. Belanja Hibah	29.942.781.077,00	27.520.146.567,00	91,90
	4. Belanja Bantuan Sosial	2.300.150.000,00	2.265.325.020,00	98,48
B.	Belanja Modal	82.807.007.589,00	75.350.919.827,00	90,99
	1. Belanja Modal Tanah	1.115.500.000,00	49.553.000,00	4,44
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.051.187.132,00	26.203.407.405,00	93,41
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.004.814.602,00	33.356.540.342,00	92,64
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.763.597.840,00	8.895.676.217,00	82,64
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.796.258.015,00	6.781.362.863,00	99,78
C.	Belanja Tidak Terduga	8.771.614.748,00	2.040.328.994,00	23,26
	1. Belanja Tidak Terduga	8.771.614.748,00	2.040.328.994,00	23,26
D.	Belanja Transfer	170.262.228.608,00	165.743.354.672,00	97,34
	1. Belanja Bagi Hasil	6.881.613.308,00	6.498.573.844,00	94,43
	2. Belanja Bantuan Keuangan	163.380.615.300,00	159.244.780.828,00	97,46
	Total	1.352.153.997.403,00	1.293.171.326.125,58	95,63

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2025

1.3.6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 4 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

No	Jenis	2025		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan	23.012.815.308,00	23.012.815.308,00	100,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	23.012.815.308,00	23.012.815.308,00	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	-
3	Pembiayaan Netto	23.012.815.308,00	23.012.815.308,00	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2025

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD

Beberapa asumsi kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025. Kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai kegiatan terkait pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mengurangi perkiraan penerimaan dengan belanja wajib dan mengikat dan belanja-belanja di luar pencapaian visi dan misi tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan kualitas sumber daya manusia

Hal ini ditunjukkan dari IPM yang masih rendah, dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang juga rendah, Tengah. Kualitas SDM ini menjadi penting untuk segera diselesaikan karena SDM yang berkualitas menjadi pondasi pembangunan daerah menjadi lebih baik.

2. Perekonomian daerah yang kuat dan stabil

Pertumbuhan ekonomi kuat dan stabil, karena sangat terpengaruh kondisi ekonomi global. Namun demikian penting ke depan untuk meletakkan pondasi perekonomian daerah yang kuat, berbasis sektor unggulan, dan ekonomi kerakyatan, agar perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tangguh meskipun kondisi ekonomi global terguncang. Karena dengan perekonomian yang baik, dapat menghindarkan tumbuhnya kemiskinan dan pengangguran baru.

3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumberdaya alam sebagai suplai perekonomian daerah, maka penting untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup kedepan. Selain itu, dengan menjaga sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik, dapat mengurangi risiko bencana alam, yang dapat berdampak pada munculnya kemiskinan baru.

4. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur masih menjadi isu strategis yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung stabilitas perekonomian daerah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemerataan pembangunan.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Hal ini menjadi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik akan mendorong roda pembangunan ke arah

yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan yang dimulai dari perencanaan, dan penganggaran yang baik, agar tercipta akuntabilitas kinerja yang optimal.

2.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Untuk perubahan Kebijakan Umum APBD pada pendapatan daerah Tahun 2025, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

Perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2025 dihitung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah dihitung dengan memperhitungkan potensi pendapatan, realisasi tahun sebelumnya dan realisasi semester pertama tahun 2025.
2. Dana perimbangan diproyeksi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk memaksimalkan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berikut arah kebijakan pendapatan yang diterapkan:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, PD pemungut serta Pemerintahan Nagari, BPN, PPAT dan pihak lainnya.
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penjualan barang milik daerah yang tidak bermanfaat.
5. Penyempurnaan sistim administrasi yang menuju kepada sistem elektronik.
6. Melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban serta memberikan intervensi terhadap objek pajak berupa pengaturan tarif pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi pemungutan pajak.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
8. Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
9. Peningkatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemungutan.

Target pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.357.905.038.595 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 137.846.254.440,00
2. Pendapatan Transfer	Rp 1.220.058.784.155,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 0,00
Jumlah	Rp 1.357.905.038.595,00

Sementara pada RKPD Perubahan Tahun 2025 untuk target pendapatan daerah pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.288.665.053.226 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus enam puluh lima juta lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp69.239.958.369 (enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan daerah yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran Awal APBD 2025	Rencana Pada Perubahan 2025	Bertambah/ berkurang
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.357.905.038.595	1.288.665.053.226	(69.239.958.369)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	137.846.254.440	141.382.072.618	3.535.818.178
4.1.01.	Hasil Pajak Daerah1)	61.932.116.163	63.463.838.243	1.531.722.080
4.1.02.	Hasil Retribusi Daerah 1)	40.316.844.857	41.989.835.082	1.672.990.225
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.659.098.147	4.844.398.220	185.300.073
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.938.195.273	31.084.001.073	145.805.800

4.2.	Pendapatan Transfer	1.220.058.784.155	1.145.085.081.562	(74.973.702.593)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.167.519.000	1.095.729.342.843	(80.438.176.157)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.891.265.155	49.355.738.719	5.464.473.564
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	2.197.899.046	2.197.899.046
4.3.03.	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan	0	2.197.899.046	2.197.899.046

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan proyeksi perubahan pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1. Target Pendapatan Asli Daerah diproyeksi naik sebesar Rp3.535.818.178 (tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dari anggaran awal APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp137.846.254.440 (seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp141.382.072.618 (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) dimana kenaikan ini mengacu kepada capaian realisasi semester pertama Tahun 2025 diasumsikan dapat melebihi dari target APBD awal Tahun 2025.
2. Target Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp74.973.702.593 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). Penurunan ini akibat penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan penyesuaian alokasi anggaran DBH CHT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.7/2025 tentang Pemotongan DAU Tahun 2025 atas daerah yang masih Terdapat Sisa DAK Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Disamping itu berdasarkan Keputusan Gubernur No. 903-1301-2025, juga dilakukan penyesuaian atas Pendapatan Transfer Antar Daerah serta berdasarkan audit Laporan Keuangan Daerah terdapat SILPA DAK Non Fisik BOKB, BOK, PPA dan Dana BOS yang kan diperhitungkan pada penyeluran alokasi tahun 2025.

Target lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD 2025 tidak ada dialokasikan, sehingga pada Perubahan RKPD 2025 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dialokasikan kembali sebesar Rp2.197.899.046 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) yang bersumber dari pengembalian hibah KPU dan Bawaslu.

2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah Daerah setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi pendukung dan penunjang. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tak Terduga; dan
4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa/nagari.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 161 ayat 2 yang berbunyi perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Pada saat ini hal yang mendasar dilakukannya perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah adalah berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, sekaligus kebijakan nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Merujuk kepada Inpres tersebut, maka kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja untuk pemenuhan mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan satu tahun.
3. Memprioritaskan alokasi belanja untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
 - b. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem
 - c. Pengendalian inflasi di daerah
 - d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah
 - e. Dukungan swasembada pangan
 - f. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - g. Sekolah rakyat
 - h. Koperasi Merah Putih
 - i. Makan Bergizi Gratis
4. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar / focus group discussion.
 5. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 6. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
 7. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
 8. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayananan public serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 9. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa pada Kementerian/Lembaga.
 10. Melakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
 11. Mengalokasikan belanja untuk pembayaran utang jangka pendek pada program dan kegiatan yang berkenaan.

Belanja Daerah pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.316.020.567.252 (Satu triliyun tiga ratus enam belas milyar dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp1.379.588.285.556 (Satu triliyun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp74.973.702.593 (Tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2.3.1 Belanja Operasi

Belanja Operasional pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.052.665.938.694 (satu triliyun lima puluh dua milyar enam ratus enam puluh lima juta

sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp1.062.469.226.205 (satu triliyun enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp9.803.287.511 (sembilan milyar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp797.601.929.239 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp794.085.945.585 (tujuh ratus sembilan puluh empat milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp3.515.983.654 (tiga milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp226.801.296.878 (dua ratus dua puluh enam milyar delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp240.110.907.143 (dua ratus empat puluh milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp13.309.610.265 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp25.989.612.577 (dua puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp25.947.023.477 (dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp42.589.100 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada kebijakan perubahan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp2.273.100.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp2.325.350.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp52.250.000 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2.3.2 Belanja Modal

Belanja Modal pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp91.267.984.141 (sembilan puluh satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp140.954.469.735 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp49.686.485.594 (empat puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah pada kebijakan perubahan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.250.232.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana pada APBD awal TA 2025 tidak dianggarkan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada kebijakan perubahan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp29.302.791.641 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp33.670.553.268 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp4.367.761.627- (empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada kebijakan perubahan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp35.845.035.244 (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp33.521.971.666 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp2.323.063.578 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada kebijakan perubahan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp10.991.189.655 (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp59.999.513.700 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp49.008.324.045 (empat puluh sembilan milyar delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat puluh lima rupiah).

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada kebijakan perubahan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp13.873.085.601 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp13.739.431.101 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus satu rupiah) sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp133.654.500 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada kebijakan perubahan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp17.350.000 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2.3.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp170.086.644.416 (seratus tujuh puluh milyar delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar Rp173.664.589.616 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp3.577.945.200 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 tidak mengalami perubahan/sama dengan Anggaran awal yakni sebesar Rp6.706.029.116 (enam milyar tujuh ratus enam juta dua puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah).

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp163.380.615.300 (seratus enam puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) dimana yang semula dianggarkan sebesar

Rp166.958.560.500 (seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga mengalami penurunan sebesar Rp3.577.945.200 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

2.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan mencakup beberapa kebijakan, antara lain: kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dan sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah atau merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

Pada APBD Tahun 2025 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp21.683.246.961 (Dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang berasal dari Sisa lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya, sedangkan proyeksi untuk perubahan kebijakan umum APBD adalah sebesar Rp23.012.815.308 (Dua puluh tiga milyar dua belas juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus delapan rupiah) yang bersumber dari hasil rill audited BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menganggarkan dikarenakan terjadinya defisit Anggaran.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 urusan. Rincian Perangkat Daerah pelaksana urusan berikut anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024

No	Urusan dan Perangkat Daerah Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	884.279.423.976	845.137.398.588,58	95,57
1.1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	565.431.828.664	547.698.321.191	96,86
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	565.431.828.664	547.698.321.191	96,86
1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	259.662.469.290	244.559.772.075,58	94,18
1	Rumah Sakit dr. Achmad Darwis	81.356.997.128	77.585.179.288	95,36
2	Dinas kesehatan	178.305.472.162	166.974.592.787,58	93,65
1.3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.826.300.204	23.663.251.044	82,09
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	28.826.300.204	23.663.251.044	82,09
1.4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	766.353.200	737.696.792	96,26
1	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	766.353.200	737.696.792	96,26
1.5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.634.147.617	21.711.035.489	95,92
1	Dinas Pemadam Kebakaran	8.589.485.997	8.467.862.357	98,58
2	Satuan Polisi Pamong Praja	7.333.657.330	7.129.194.614	97,21
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.711.004.290	6.113.978.518	91,10
1.6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.958.325.001	6.767.321.997	97,26
1	Dinas Sosial	6.958.325.001	6.767.321.997	97,26

3.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp565.431.828.644 dan realisasi keuangan Rp547.698.321.191 atau 96,86 %

3.1.1.1.1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan melaksanakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 70 Sub kegiatan. Rincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN	565.431.828.664	547.698.321.191
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	471.061.829.064	455.468.808.879
1.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.941.300	14.253.000
1.01.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.460.000	5.280.000
1.01.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.350.000	2.875.000
1.01.01.2.01.0007	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.131.300	6.098.000
1.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	470.731.798.564	455.241.442.212
1.01.01.2.02.0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	470.726.818.564	465.941.994.012
1.01.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.980.000	4.534.000
1.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5.030.000	4.843.000
1.01.01.2.03.0005	Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.030.000	4.843.000
1.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.919.200	30.941.000
1.01.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.779.200	6.901.000
1.01.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.140.000	24.040.000
1.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.478.500	161.168.667
1.01.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.482.500	2.480.000
1.01.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.990.000	122.688.667
1.01.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.006.000	36.000.000
1.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.661.500	16.161.000
1.01.01.2.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	41.661.500	16.161.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Program Pengelolaan Pendidikan	94.340.217.600	92.211.415.312
1.01.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.243.056.200	54.943.322.537
1.01.02.2.01.0006	Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.570.168.000	3.558.607.400
1.01.02.2.01.0009	Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	210.850.000	209.774.276
1.01.02.2.01.0014	Sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	2.156.400.000	2.155.799.595
1.01.02.2.01.0025	Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	336.504.000	243.689.949
1.01.02.2.01.0026	Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	221.706.600	180.003.403
1.01.02.2.01.0027	Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	758.585.200	721.694.910
1.01.02.2.01.0028	Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	393.947.000	355.840.200
1.01.02.2.01.0029	Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	36.733.670.000	36.448.006.111
1.01.02.2.01.0031	Sub kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.281.501.000	1.170.227.940
1.01.02.2.01.0035	Sub kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54.900.000	53.485.000
1.01.02.2.01.0036	Sub kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000	9.836.000
1.01.02.2.01.0038	Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	263.540.000	213.930.800
1.01.02.2.01.0039	Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	8.178.000
1.01.02.2.01.0043	Sub kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	54.990.000	47.356.000
1.01.02.2.01.0046	Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	98.400.000	61.982.400
1.01.02.2.01.0047	Sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.331.643.400	2.208.632.995
1.01.02.2.01.0051	Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.675.455.000	5.295.247.741
1.01.02.2.01.0054	Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	12.355.000	9.325.000
1.01.02.2.01.0055	Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.068.441.000	1.991.704.817
1.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.244.079.600	22.849.875.458
1.01.02.2.02.0012	Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	813.487.500	809.941.948
1.01.02.2.02.0014	Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.429.903.500	1.386.440.122
1.01.02.2.02.0024	Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	868.923.800	866.886.360
1.01.02.2.02.0025	Sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	1.988.800.000	1.988.500.087
1.01.02.2.02.0032	Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	60.000.000	43.145.000
1.01.02.2.02.0038	Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	453.316.900	347.163.813
1.01.02.2.02.0039	Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.237.000	9.900.000
1.01.02.2.02.0040	Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	232.723.000	222.259.480

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Sekolah Menengah Pertama		
1.01.02.2.02.0041	Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.375.400	128.878.000
1.01.02.2.02.0042	Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.909.410.000	16.870.418.716
1.01.02.2.02.0048	Sub kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	35.981.500	21.342.000
1.01.02.2.02.0049	Sub kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000	9.916.000
1.01.02.2.02.0051	Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	179.921.000	118.468.932
1.01.02.2.02.0055	Sub kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	36.000.000	26.615.000
1.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.144.808.600	8.856.939.461
1.01.02.2.03.0002	Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	109.650.000	102.920.879
1.01.02.2.03.0007	Sub kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	150.000.000	147.630.000
1.01.02.2.03.0016	Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	130.809.000	124.803.339
1.01.02.2.03.0017	Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	55.432.000	52.778.939
1.01.02.2.03.0018	Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.437.800.000	5.437.190.000
1.01.02.2.03.0019	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	32.827.000	32.114.000
1.01.02.2.03.0022	Sub kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.840.000	30.832.000
1.01.02.2.03.0023	Sub kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	9.890.000	9.785.000
1.01.02.2.03.0025	Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	21.724.500	21.102.705
1.01.02.2.03.0026	Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	9.765.000
1.01.02.2.03.0030	Sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	601.800.000	381.576.515
1.01.02.2.03.0037	Sub kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	25.000.000	24.980.000
1.01.02.2.03.0041	Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	121.228.500	116.184.934
1.01.02.2.03.0046	Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.588.465.600	1.567.020.140
1.01.02.2.03.0047	Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	354.342.000	334.122.699
1.01.02.2.03.0051	Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	465.000.000	464.133.311
1.01.02.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.708.273.200	5.561.277.856
1.01.02.2.04.0010	Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	15.300.000	15.300.000
1.01.02.2.04.0015	Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	39.960.000	22.195.000
1.01.02.2.04.0016	Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	165.363.200	115.233.757
1.01.02.2.04.0017	Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.082.100.000	5.013.665.099
1.01.02.2.04.0027	Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.850.000	40.369.000
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang	10.000.000	9.330.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pendidikan		
1.01.02.2.04.0042	Sub kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	112.200.000	107.201.000
1.01.02.2.04.0055	Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	241.500.000	237.984.000
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.782.000	18.097.000
1.01.04.2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.782.000	18.097.000
1.01.04.2.01.0001	Sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.782.000	18.097.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5460.000 dan realisasi keuangan Rp5.280.000 atau 96,70% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan 2 dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024) dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.350.000 dan realisasi keuangan Rp2.875.000 atau 85,82% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan 1 Laporan perencanaan perangkat daerah dengan capaian kinerja berupa tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.131.300 dan realisasi keuangan Rp6.098.000 atau 99,46% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan 1 laporan perencanaan perangkat daerah dengan capaian kinerja berupa tersusunnya Laporan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp470.726.818.564 dan realisasi keuangan Rp465.941.994.012 atau 98,98% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 4300 orang dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.980.000 dan realisasi keuangan Rp4.534.000 atau 91,04% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan 1 laporan dengan capaian kinerja berupa tersusunnya 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.030.000 dan realisasi keuangan Rp4.843.000 atau 96,28% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.779.200 dan realiasi keuangan Rp6.901.000 atau 78,61% serta realisasi fisik mencapai 79%. Realisasi tidak mencapai 100% merupakan sisa anggaran, karena target sudah terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- b. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.140.000 dan realiasi keuangan Rp24.040.000 atau 53,26% serta realisasi fisik mencapai 100%. Permasalahan sub kegiatan ini karena spesifikasi komputer/PC dan printer yang ditargetkan tidak terealisasi sebab spesifikasi yang di butuhkan tidak tersedia. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.482.500 dan realiasi keuangan Rp2.480.000 atau 99,90% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja berupa penyediaan jasa surat menyurat.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp166.990.000 dan realisasi keuangan Rp122.688.667 atau 73,47% serta realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi tidak mencapai 100% merupakan sisa anggaran, karena target sudah terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.006.000 dan realisasi keuangan Rp36.000.000 atau 79,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Untuk Sub Kegiatan ini, yang bersisa adalah dana untuk honorarium Outsourcing/ pihak ketiga petugas keamanan, dana ini tidak terealisasi karena belum dilakukan proses administrasi terkait kegiatan Outsourcing Petugas Keamanan. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.661.500 dan realiasi keuangan Rp16.161.000 atau 38,79% serta realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi tidak mencapai 100% merupakan sisa anggaran, karena target sudah terlaksana Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

II. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.570.168.000 dan realiasi keuangan Rp3.558.607.400 atau 99,68% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang meliputi 8 paket pembangunan toilet SD, 15 paket bantuan paving block, 6 paket pembangunan DAM, 1 paket pembangunan halaman sekolah, serta 7 paket pembangunan gerbang/pagar sekolah. Capaian kinerja subkegiatan ini berupa meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah.
- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan alokasi anggaran sebesar Rp210.850.000 dan realiasi keuangan Rp209.774.276 atau 99,49% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 4 ruang, dengan

capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.

- c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.156.400.000 dan realiasi keuangan Rp2.155.799.595 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 5 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Mebel Sekolah.
- d. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp336.504.000 dan realiasi keuangan Rp243.689.949 atau 72,42% serta realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi tidak 100% karena sisa kegiatan dan adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp221.706.600 dan realiasi keuangan Rp180.003.403 atau 81,19% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan pelaksanaan kegiatan Lembur untuk angka kredit dan lembur untuk pengentrian PPG, dan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp758.585.200 dan realiasi keuangan Rp721.694.910 atau 95,14% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan bentuk kegiatan adalah Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PPPK, Bimbingan Teknis PPG Guru PAI, Bimbingan Teknis Tahfizh Guru SD Kecamatan Guguak, Bimbingan teknis Tahfizh Guru SD Kecamatan Mungka, Pengelolaan Kinerja Tingkat Sekolah Dasar PPG Guru PAI, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- g. Sub Kegiatan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp393.947.000 dan realisasi keuangan Rp355.840.200 atau 90,33 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi tidak 100% karena sisa anggaran kegiatan dan adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan in adalah terlaksananya Bimbingan Teknis 373 satuan pendidikan dengan capain kinerja yaitu meningkatkan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.733.670.000 dan realiasi keuangan Rp36.448.006.111 atau 99,22% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada 373 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- i. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.281.501.000 dan realiasi keuangan Rp1.170.227.940 atau 91,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sebanyak 7 ruang, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- j. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp54.900.000 dan realisasi keuangan Rp53.485.000 atau 97,42% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis untuk Dapodik SD sebanyak 373 orang dengan capaian kerja berupa meningkatnya Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
- k. Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realiasi keuangan Rp9.836.000 atau 98,36% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Konten Digital Pendidikan, dengan capaian kinerja berupa Pengembangan Konten Digital untuk Anak.
- l. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp263.540.000 dan realiasi keuangan Rp213.930.800 atau 81,18% serta realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi tidak 100% karena sisa dari anggaran kegiatan dan adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- m. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realiasi keuangan Rp8.178.000 atau 81,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dari kegiatan Bimtek yang sudah terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan
- n. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan alokasi anggaran sebesar Rp54.990.000 dan realiasi keuangan Rp47.356.000 atau 86,12% serta realisasi fisik mencapai 100%. Sisa

anggaran merupakan sisa dari kegiatan Bimtek yang sudah terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pencegahan dan menurunnya kasus perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan pendidikan.

- o. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.400.000 dan realiasi keuangan Rp61.982.400 atau 62,99% serta realisasi fisik mencapai 70,53%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Perlengkapan Peserta Didik
- p. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.331.643.400 dan realiasi keuangan Rp2.208.632.995 atau 94,72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 8 ruang, yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Kelas Baru.
- q. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.675.455.000 dan realiasi keuangan Rp5.295.247.741 atau 93,30% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sebanyak 35 ruang, yaitu Pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, atap atau loteng dan keramik ruang kelas dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas.
- r. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.355.000 dan realiasi keuangan Rp9.325.000 atau 75,48% serta realisasi fisik mencapai 100%. Sub kegiatan ini sudah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya. Realisasi tidak 100% karena sisa dari kegiatan Bimtek. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik.
- s. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.068.441.000 dan realiasi keuangan Rp1.991.704.817 atau 96,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 25 paket berupa laptop, proyektor, alat dan baju drumband, serta media pendidikan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp813.487.500 dan realiasi keuangan Rp809.941.948 atau 99,56% serta

realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 14 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.429.903.500 dan realiasi keuangan Rp1.386.440.122 atau 96,96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebanyak 14 ruang, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp868.923.800 dan realiasi keuangan Rp866.886.360 atau 99,77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 7 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah .
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.988.800.000 dan realiasi keuangan Rp1.988.500.087 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 6 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Mebel Sekolah.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000 dan realiasi keuangan Rp43.145.000 atau 71,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Sub Kegiatan ini sudah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya, dan sisa anggran merupakan sisa dari kegiatan Bimtek. Realisasi tidak 100% karena sisa dari kegiatan Bimtek. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik.
- f. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp453.316.900 dan realiasi keuangan Rp347.163.813 atau 76,58% serta realisasi fisik mencapai 100%. Sub Kegiatan ini sudah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya, dan sisa anggran merupakan sisa dari kegiatan Bimtek. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.237.000 dan realiasi keuangan Rp9.900.000 atau 39,23% serta realisasi fisik mencapai 100%. Pada Sub Kegiatan ini perjalanan dinas luar provinsi tidak terlaksana karena adanya tanggap darurat

bencana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan pelaksanaan kegiatan Lembur untuk angka kredit dan lembur untuk pengentrian PPG, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

- h. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp232.723.000 dan realiasi keuangan Rp222.259.480 atau 95,50% serta realisasi fisik mencapai 100%. Pada Sub Kegiatan ini perjalanan dinas luar provinsi tidak terlaksana karena adanya tanggap darurat bencana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berupa Bimtek model kompetensi Kepala Sekolah (63 orang), Bimtek Literasi dan Numerasi Guru (126 orang), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- i. Sub Kegiatan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.375.400 dan realisasi keuangan Rp128.878.000 atau 64,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Sub kegiatan ini telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya, target kinerja sudah tercapai dan sisa anggaran dari kegiatan Bimtek. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah di Sekolah Menengah Pertama.
- j. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.909.410.000 dan realiasi keuangan Rp16.870.418.716 atau 99,77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada 61 satuan pendidikan menengah pertama, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
- k. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.981.500 dan realisasi keuangan Rp21.342.000 atau 59,31% serta realisasi fisik mencapai 100%. Sub kegiatan sudah terpenuhi dari anggaran sebelumnya. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena merupakan sisa anggaran bimtek, target sub kegiatan sudah tercapai. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis untuk Dapodik SMP sebanyak 51 orang dengan capaian kerja berupa meningkatnya Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
- l. Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realiasi keuangan Rp9.916.000 atau 99,16% serta realisasi fisik

mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Konten Digital Pendidikan, dengan capaian kinerja berupa Pengembangan Konten Digital untuk Anak.

- m. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp179.921.000 dan realiasi keuangan Rp118.468.932 atau 65,84% serta realisasi fisik mencapai 80%. Sisa anggaran merupakan sisa kegiatan Bimtek dan pengadaan laptop yang tidak terealisasi karena harga spesifikasi laptop tidak sesuai dengan yang sekarang. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
- n. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.000.000 dan realiasi keuangan Rp26.615.000 atau 73,93% serta realisasi fisik mencapai 100%. Sisa anggaran merupakan sisa kegiatan Bimtek. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pencegahan dan menurunnya kasus perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan pendidikan.

3. Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD)

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.650.000 dan realiasi keuangan Rp102.920.879 atau 93,86% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebanyak 4 unit, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000 dan realiasi keuangan Rp147.630.000 atau 98,42% serta realisasi fisik mencapai 100%. Pada sub kegiatan ini, harga setelah dinegosiasi lebih rendah dari pagu anggaran. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Mebel PAUD sebanyak 1 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Mebel PAUD.
- c. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp130.809.000 dan realisasi keuangan Rp124.803.339 atau 95,41% serta realisasi fisik mencapai 100%. Pada sub kegiatan ini ada perjalanan dinas yang tidak terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD berupa Bimbingan Teknis Pembuatan PAK Akumulasi, Bimbingan Teknis Peningkatan kompetensi guru, dan Bimbingan Teknis Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dalam Administrasi Persuratan dengan capaian

kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.

- d. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.432.000 dan realisasi keuangan Rp52.778.939 atau 95,21% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimtek Akreditasi Jenjang Paud, Bimbingan Teknis Satuan PAU, dan kegiatan Bunda Paud 2025 dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD yang bersumber dari DAK Non Fisik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.437.200.000 dan realiasi keuangan Rp5.437.190.000 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD di 296 satuan pendidikan PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOP PAUD.
- f. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.827.000 dan realiasi keuangan Rp32.114.000 atau 97,83% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis BOP PAUD, dan Sosialisasi BOP PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD.
- g. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.840.000 dan realisasi keuangan Rp30.832.000 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis untuk satuan PAUD sebanyak 100 orang dengan capaian kerja berupa meningkatnya Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
- h. Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.890.000 dan realiasi keuangan Rp9785.000 atau 98,94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Konten Digital Pendidikan, dengan capaian kinerja berupa Pengembangan Konten Digital untuk Anak.
- i. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.724.500 dan realiasi keuangan Rp21.102.705 atau 97,14% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- j. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realiasi keuangan Rp9.765.000 atau 97,65% serta

realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan

- k. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp601.800.000 dan realiasi keuangan Rp381.576.515 atau 63,41% serta realisasi fisik mencapai 75%. Salah satu pembangunan tidak terlaksana karena tidak cukup waktu. Pelaksanaan pembangunan ruang kelas akan dipindahkan ke tahun anggaran 2026. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Ruang Kelas Baru sebanyak 4 ruang, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Ruang Kelas Baru.
- l. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000 dan realiasi keuangan Rp24.980.000 atau 99,92% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pencegahan dan menurunnya kasus perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan pendidikan.
- m. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dengan alokasi anggaran sebesar Rp121.228.500 dan realiasi keuangan Rp116.184.934 atau 95,84 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik sebanyak 1 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
- n. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.588.465.600 dan realiasi keuangan Rp1.567.020.140 atau 98,65% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD sebanyak 2 paket, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD.
- o. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp354.342.000 dan realiasi keuangan Rp334.122.699 atau 94,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini berupa Bimtek Paud, Bimtek Stunting, Gebyar Paud 2025, Sosialisasi sekolah ramah anak (SRA). Capaian kinerja berupa meningkatnya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.
- p. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp465.000.000 dan realiasi keuangan Rp464.133.311 atau 99,81% serta realisasi fisik mencapai 100%. Terdapat kelebihan anggaran karena harga setelah negosiasi lebih rendah dari pagu. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebanyak 6 ruang, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.300.000 dan realiasi keuangan Rp15.300.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peserta Didik Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik.
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.960.000 dan realiasi keuangan Rp22.195.000 atau 55,54% serta realisasi fisik mencapai 100%, anggaran tidak 100% karena perjalanan dinas tidak terlaksana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A/B/C dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan.
- c. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp165.363.200 dan realiasi keuangan Rp115.233.757 atau 69,69% serta realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena adanya beberapa belanja operasional yang sudah terpenuhi (ATK, Bahan Cetak, dan Pemeliharaan Kendaraan) dan pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan sudah tidak bisa di bayarkan karena sudah diangkat PPPK Paruh Waktu. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan.
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.082.100.000 dan realiasi keuangan Rp5.013.665.099 atau 98,65% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan kepada 38 satuan pendidikan non formal/kesetaraan, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.850.000 dan realiasi keuangan Rp40.369.000 atau 96,46% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi

Layanan di Bidang Pendidikan, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.

- f. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realiasi keuangan Rp9.330.000 atau 93,30% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan
- g. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.200.000 dan realiasi keuangan Rp107.201.000,- atau 95,54% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Bimbingan Teknis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
- h. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan anggaran sebesar Rp241.500.000 dan realiasi keuangan Rp237.984.000 atau 98,54% serta realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena harga setelah negosiasi lebih rendah dari pagu anggaran. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan laptop bagi PKBM. Capaian kinerja kegiatan ini adalah berupa meningkatnya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan.

III. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.782.000 dan realiasi keuangan Rp18.097.000 atau 60,76% serta realisasi fisik mencapai 100%. Pada sub kegiatan ini perjalanan dinas luar provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya tanggap darurat bencana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 1 dokumen dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 25 Tahun dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 dengan peserta 100 orang PPPK SD dan 100 orang PPPK SMP, kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jenjang Sekolah Menengah Pertama, Jenjang Sekolah Dasar, Jenjang PAUD, Pamong, Penilik. Dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Sub Kegiatan sudah terlaksana sesuai target	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Sub Kegiatan sudah terlaksana sesuai target	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Sub Kegiatan sudah terlaksana sesuai target	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4300 Orang/bulan	4300 Orang/bulan	Sub Kegiatan sudah terlaksana sesuai target	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Sub Kegiatan sudah terlaksana sesuai target	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Sub Kegiatan sudah terlaksana sesuai target	
				Administrasi Umum				

				Perangkat Daerah				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	Tidak ada permasalahan, kegiatan sudah terlaksana sesuai target, namun ada sisa anggaran	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Untuk Sub Kegiatan ini, pengadaan Komputer PC dan Printer tidak terealisasi, hal ini disebabkan karena tidak tersedia Komputer PC dan Printer yang sesuai dengan spesifikasi yang ada di DPA 2025.	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Sub Kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan target	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada permasalahan, kegiatan sudah terlaksana sesuai target, namun ada sisa anggaran	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Untuk Sub Kegiatan ini, yang bersisa adalah dana untuk honorarium Outsourcing/ pihak ketiga petugas keamanan, dana ini tidak terealisasi karena belum dilakukan proses administrasi terkait	

							kegiatan Outsourcing Petugas Keamanan.	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	Tidak ada permasalahan, kegiatan sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan, namun ada terdapat sisa anggaran	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	39 Unit	39 Unit	Sisa kontrak	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	4 Ruang	Sisa kontrak	
				Pengadaan Mebel Sekolah	5 Paket	5 Paket	Sisa kontrak	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	373 Peserta Didik	373 Peserta Didik	Sisa Kegiatan dan adanya Perjalanan Dinas yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan

				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang	1 Orang	Makan dan Minum Aktifitas Lapangan tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	450 Orang	450 Orang	Adanya Perjalanan dinas yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	373 Satuan Pendidikan	373 Satuan Pendidikan	Adanya Perjalanan dinas lembur yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	373 Satuan Pendidikan	373 Satuan Pendidikan	unsur sekolah	

				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	7 Ruang	7 Ruang		
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	373 Orang	373 Orang	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2 Konten Digital	2 Konten Digital	sisa dari kegiatan	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Adanya Perjalanan dinas yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 Paket	1 Paket		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	8 Ruang	8 Ruang	Adanya Perjalanan dinas yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai

								kinerja yang sudah di targetkan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	35 Ruang	35 Ruang	Sisa kontrak	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25 Paket	25 Paket		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14 Unit	14 Unit		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14 Ruang	14 Ruang	Sisa kontrak	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Unit	7 Unit	Sisa kontrak	
				Pengadaan Mebel Sekolah	6 Paket	6 Paket	Sisa kontrak	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	10 Orang	Perjalanan Dinas Luar Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal

				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	250 Orang	250 Orang	Perjalanan Dinas Luar Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat, Makan dan Minum Rapat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan		
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	51 Orang	51 Orang	sisa kegiatan bintek, dan belanja bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2 Konten Digital	2 Konten Digital	sisa kegiatan bintek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	sisa kegiatan bntek, perjalanan dinas dan pengadaan lektop yang tidak sesuai dengan harga sekarang	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Sisa Kegiatan Bimtek	Kegiatan telah terpenuhi dengan anggaran sebelumnya
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 Unit	4 Unit	adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang

								dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Pengadaan Mebel PAUD	1 Paket	1 Paket	harga setelah negosiasi lebih rendah dari pagu anggaran	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	90 Orang	90 Orang	Adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan		
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	296 Satuan Pendidikan	296 Satuan Pendidikan		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	65 Orang	65 Orang		
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100 Orang		
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2 Konten Digital	2 Konten Digital		
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen		

				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	4 Ruang	4 Ruang	Salah satu pembangunan tidak terlaksana karena tidak cukup waktu.	Pelaksanaan pembangunan ruang kelas dipindahkan ke tahun anggaran 2026.
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 Paket	1 Paket		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	2 Paket	2 Paket	adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	296 Satuan Pendidikan	296 Satuan Pendidikan		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6 Ruang	6 Ruang	Terdapat kelebihan karena harga setelah negosiasi lebih rendah daripada pagu	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				

				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	900 Peserta Didik	900 Peserta Didik	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	30 Orang	Adanya perjalanan dinas yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	Adanya beberapa belanja operasional yang sudah terpenuhi (ATK, Bahan Cetak, dan Pemeliharaan Kendaraan). Pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan sudah tidak bisa di bayarkan karena sudah diangkat PPPK Paruh Waktu	Sudah terpenuhi pada belanja operasional lainnya.
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	-	-
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Adanya perjalanan dinas dan lembur yang tidak terlaksana	untuk tahun berikutnya perlu perencanaan yang lebih matang agar dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan

								untuk mencapai kinerja yang sudah di targetkan
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	siswa kegiatan bintek, dan belanja bintek	melakukan perencanaan kegiatan secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta, dan lokasi kegiatan
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20 Orang	20 Orang	siswa kegiatan bintek, dan belanja bintek	melakukan perencanaan kegiatan secara lebih matang dan terjadwal sejak awal tahun anggaran, termasuk memastikan kesiapan narasumber, peserta, dan lokasi kegiatan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	2 Paket	2 Paket	harga setelah negosiasi lebih rendah dari pagu anggaran	
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				

				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	Perjalanan Dinas Luar Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat, Makan dan Minum Rapat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Tahun 2025 yaitu beberapa sub kegiatan yang hanya terealisasi sebagian baik fisik maupun keuangannya seperti perjalanan dinas luar provinsi, pengadaan ATK, dan lain-lain. Solusi untuk Permasalahan tersebut adalah untuk tahun berikutnya akan dilakukan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan kegiatan direncanakan pada awal tahun anggaran, agar tidak terjadi lagi sisa anggaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

3.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tahun 2025 dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Perangkat Daerah utama pelaksana Urusan Kesehatan. Pelaksana Urusan Kesehatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp259.662.469.290 dan realisasi keuangan Rp244.559.772.075,58 atau 94,18%.

3.1.1.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

RSUD dr. Achmad Darwis merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bidang Kesehatan sebagai unit Organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.356.997.128 dan realisasi keuangan sebesar Rp77.585.179.288 atau 95,36%. RSUD dr. Achmad Darwis melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada RSUD dr. Achmad Darwis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada RSUD dr. Achmad Darwis

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	81.356.997.128	77.585.179.288
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	71.781.890.936	68.374.365.596
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.336.638.157	26.143.603.914
1.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.336.638.157	26.143.603.914
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	601.509.000	599.353.105
1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	601.509.000	599.353.105
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.150.000	103.510.075
1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.150.000	103.510.075

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	44.737.593.779	41.527.898.502
1.02.01.2.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	44.737.593.779	41.527.898.502
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.179.556.192	8.827.963.692
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	8.820.131.192	8.477.088.692
1.02.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.845.813.000	4.744.403.108
1.02.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.797.751.000	2.770.582.585
1.02.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.176.567.192	962.102.999
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	359.425.000	350.875.000
1.02.02.2.02.0032	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	359.425.000	350.875.000
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	395.550.000	382.850.000
1.02.05.2.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	395.550.000	382.850.000
1.02.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	395.550.000	382.850.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.336.638.157 dan realisasi keuangan Rp26.143.603.914 atau 99,27 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan semua ASN.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp601.509.000 dan realisasi keuangan Rp599.353.105 atau 99,64 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 12 bulan.

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.150.000 dan realisasi keuangan Rp103.510.075 atau 97,51 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk 4 unit kendaraan.

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

- a. Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.737.593.779 dan realisasi keuangan Rp41.527.898.502 atau 92,83 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD untuk 1 tahun.

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.845.813.000 dan realisasi keuangan Rp4.744.403.108 atau 97,91% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan yaitu sebanyak 3 unit.
- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.797.751.000 dan realisasi keuangan Rp2.770.582.585 atau 99,03% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit yaitu sebanyak 4 unit.
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.176.567.192 dan realisasi keuangan Rp962.102.999 atau 81,77% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 81,77%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Rumah Sakit.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp359.425.000 dan realisasi keuangan Rp350.875.000 atau 97,62% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit untuk 12 bulan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp395.550.000 dan realisasi keuangan Rp382.850.000 atau 96,79% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk 12 bulan.

C. Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

N o	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	RSUD dr.ACHMAD DARWIS	Pemerintahan Bidang Kesehatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan semua ASN		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Terlaksananya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 12 bulan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk 4 unit kendaraan.		
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD				
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD untuk 1 tahun		

N o	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Program Pemenuhan Uoaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan yaitu sebanyak 3 unit.		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit yaitu sebanyak 4 unit.		
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Rumah Sakit	Ada beberapa alat yang tidak bisa di adakan melalui ecatalog karena alat tersebut masih berstatus akurasi di dalam e catalog, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk proses pengadaan Alat Kesehatan tersebut.	Diusulkan lagi di Anggaran Perubahan Tahun berikutnya

N o	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit untuk 12 bulan		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk 12 bulan.		

D. Permasalahan dan Solusi.

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 terdapat permasalahan pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, karena Ada beberapa alat yang tidak bisa di adakan melalui e-catalog karena alat tersebut masih berstatus akurasi di dalam e catalog, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk proses pengadaan Alat Kesehatan tersebut. Untuk itu maka akan di usulkan lagi di Anggaran Perubahan tahun berikutnya.

3.1.1.2.2. Dinas Kesehatan

A. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan melaksanakan 5 program, 19 kegiatan dan 85 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp178.305.472.162 dan realisasi keuangan sebesar Rp166.974.592.787,58 atau 93,65%. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD dan BOK 2025 terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	178.305.472.162	166.974.592.787,58
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	115.827.161.378	108.938.016.282,58
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.061.797.189	84.488.288.132
1.02.01.2.02.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.061.797.189	84.488.288.132
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.994.217	57.168.100
1.02.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	63.994.217	57.168.100
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.921.250	42.476.731
1.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.877.250	10.787.834
1.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.044.000	31.688.897
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.960.000	257.396.266
1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	186.960.000	173.636.266
1.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	83.460.000
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.650.000	111.538.982
1.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000	42.949.933

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	56.600.000	47.817.129
1.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	12.540.000	10.390.000
1.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.560.000	10.381.920
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	28.248.838.722	23.981.448.071.58
1.02.01.2.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	28.248.838.722	23.981.448.071.58
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	47.363.011.652	45.009.110.202
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	15.327.390.818	13.836.780.532
1.02.02.2.01.0001.	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.208.082.708	325.826.200
1.02.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas	3.587.219.400	3.398.932.619
1.02.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.436.000	8.436.000
1.02.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Rahabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	391.854.300	385.980.660
1.02.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.232.026.176	2.213.098.329
1.02.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	779.337.842	697.096.249
1.02.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	228.423.500	191.912.012
1.02.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.636.349.392	6.373.985.407
1.02.02.2.01.0026	Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	255.661.500	241.513.056
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	31.471.735.334	30.669.233.270
1.02.02.2.02.0001.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186.055.000	169.416.850
1.02.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79.574.000	73.267.000
1.02.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.150.000	12.335.000
1.02.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	112.175.900	81.215.300
1.02.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	135.960.000	124.600.730
1.02.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	174.802.000	123.913.200
1.02.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	35.960.000	34.160.000
1.02.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36.275.000	35.900.000
1.02.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	122.658.000	120.653.818

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	39.415.000	32.130.000
1.02.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50.706.000	48.206.000
1.02.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	104.971.250	84.034.000
1.02.02.2.02.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	110.365.000	105.558.000
1.02.02.2.02.0016	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29.006.300	27.535.250
1.02.02.2.02.0017	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80.128.000	73.121.375
1.02.02.2.02.0018	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	443.700.150	379.314.250
1.02.02.2.02.0019	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	24.370.000	2.860.000
1.02.02.2.02.0020	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	93.510.000	48.490.000
1.02.02.2.02.0021	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.803.100	15.130.500
1.02.02.2.02.0022	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	19.045.700	16.400.000
1.02.02.2.02.0024	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	9.740.000	4.765.000
1.02.02.2.02.0025	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	334.015.640	320.718.000
1.02.02.2.02.0026	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.142.494.094	27.002.770.225
1.02.02.2.02.0027	Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	19.320.000	7.900.000
1.02.02.2.02.0028	Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	10.550.000	8.595.000
1.02.02.2.02.0029	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	151.176.000	148.394.195
1.02.02.2.02.0033	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	452.406.000	345.155.957
1.02.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	23.470.500	7.866.458
1.02.02.2.02.0036	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	44.825.000	31.310.803
1.02.02.2.02.0037	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7.650.000	7.505.000
1.02.02.2.02.0038	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.051.951.700	903.718.489
1.02.02.2.02.0046	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	299.506.000	194.154.400
1.02.02.2.03.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	205.851.100	194.154.400
1.02.02.2.03.0002.	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	205.851.100	194.154.400
1.02.02.2.04.	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	358.034.400	306.107.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.02.02.2.04.0001	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Sera Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	350.914.400	301.842.000
1.02.02.2.04.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	7.120.000	4.265.000
1.02.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	956.376.030	821.377.663
1.02.03.2.01.	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	15.729.600	15.611.000
1.02.03.2.01.0001.	Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.729.600	15.611.000
1.02.03.2.02.	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	427.586.430	377.999.565
1.02.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	123.806.950	84.986.070
1.02.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	303.779.480	293.013.495
1.02.03.2.03.	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	513.060.000	427.767.098
1.02.03.2.03.0001.	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	513.060.000	427.767.098
1.02.04.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	420.899.000	416.022.122
1.02.04.2.01.	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.700.000	81.695.000
1.02.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.700.000	81.695.000
1.02.04.2.03.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P - IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Indutri Rumah Tangga	164.644.000	159.836284
1.02.04.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P - IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	164.644.000	159.836.284
1.02.04.2.06.	Kegiatan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	174.555.000	174.490.838
1.02.04.2.06.0001	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tanggayang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	174.555.000	174.490.838
1.02.05.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	189.191.300	147.875.000
1.02.05.2.01.	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	63.794.000	54.635.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Daerah Kabupaten / Kota		
1.02.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	63.794.000	54.635.000
1.02.05.2.02.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	125.397.300	93.240.000
1.02.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	99.127.300	68.765.000
1.02.05.2.02.0002	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	26.270.000	24.475.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.406.438.802	11.534.258.418
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	13.406.438.802	11.534.258.418
1.02.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.078.376.000	1.015.355.000
1.02.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	939.881.000	799.500.000
1.02.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	24.300.000	16.200.000
1.02.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	240.850.000	199.375.000
1.02.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	434.714.000	364.200.000
1.02.02.2.02.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.703.142.280	3.008.251.262
1.02.02.2.02.0016	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	223.025.000	197.775.000
1.02.02.2.02.0017	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	291.625.000	282.000.000
1.02.02.2.02.0020	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	122.996.000	90.825.000
1.02.02.2.02.0021	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	175.800.000	141.150.000
1.02.02.2.02.0025	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.471.847.800	1.328.577.250
1.02.02.2.02.0033	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	2.900.988.002	2.620.839.906
1.02.02.2.02.0036	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	22.200.000	19.500.000
1.02.02.2.02.0042	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	10.283.000	1.050.000
1.02.02.2.02.0044	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	418.898.000	280.660.000
1.02.02.2.02.0046	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	41.973.000	14.025.000
1.02.02.2.02.0047	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjut usiaan	343.500.000	331.100.000
1.02.02.2.02.0048	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Layanan Imunisasi	962.039.720	823.875.000
1.02.05.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	142.394.000	107.933.100
1.02.05.2.03.	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	142.394.000	107.933.100

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		
1.02.05.2.03.0001	Sub Kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	142.394.000	107.933.100

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi serta keluaran dan capaian kinerja dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.061.797.189 dan realisasi keuangan Rp84.488.288.132 atau 97,04% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah berupa satu dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersedia, dengan capaian kinerja terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.994.217 dan realisasi keuangan Rp57.168.100 atau 89,33% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah berupa satu donkumen, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya pembayaran belanja alat listrik.
 - Terlaksananya belanja alat tulis kantor.
 - Terlaksananya alat/bahan cetak.
 - Terlaksananya belanja lembur,
 - Terlaksananya belanja alat rumah tangga lainnya.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.877.250 dan realisasi keuangan Rp10.787.834 atau 99,18% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya anggaran untuk pembelian konsumsi, dengan capaian kinerja terlaksananya dan terpenuhinya kebutuhan konsumsi untuk tamu yang berkunjung ke Dinas Kesehatan selama 1 tahun.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.044.000 dan realisasi keuangan Rp31.688.897 atau 75,37% serta

realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen pelaksanaan program, dengan capain kinerja terlaksananya rapat koordinasi, belanja makan dan minum rapat serta belanja perjalanan dinas biasa untuk kegiatan program selama 1 tahun.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp186.960.000 dan realisasi keuangan Rp173.636.266 atau 92,87% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya anggaran untuk pembayaran listrik, telepon, internet dan air, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, internet dan air di Dinas Kesehatan selama 1 tahun.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.000.000 dan realisasi keuangan Rp83.460.000 atau 92,73% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya anggaran untuk tenaga jasa pelayanan umum di Dinas Kesehatan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa sopir di Dinas Kesehatan selama 1 tahun.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.950.000 dan realisasi keuangan Rp42.949.933 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan kendaraan kepala dinas dan kebutuhan BBM kendaraan kepala dinas di Dinas Kesehatan selama 1 tahun.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.600.000 dan realisasi keuangan Rp47.817.129 atau 84,48% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan operasional, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan operasional sekretaris dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 di Dinas Kesehatan selama 1 tahun.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.540.000 dan realisasi keuangan Rp10.390.000 atau 82,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya anggaran pemeliharaan peralatan kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan AC, service computer dan laptop/notebook kantor di Dinas Kesehatan selama 1 tahun.

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.560.000 dan realisasi keuangan Rp10.381.920 atau 98,31% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya anggaran pemeliharaan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor berupa pengecatan dinding depan dan pagar, penggantian tiang koridor dan penggantian pintu masuk bagian keuangan di Dinas Kesehatan selama 1 tahun.

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

- a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.248.838.722 dan realisasi keuangan Rp23.981.448.071,58 atau 84,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah berupa dokumen untuk meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan BLUD di 22 puskesmas, dengan capaian kinerja:

- Terlaksananya belanja pegawai BLUD selama 1 tahun.
- Terlaksananya belanja barang dan jasa BLUD selama 1 tahun.
- Terlaksananya belanja peralatan dan mesin BLUD 1 tahun.
- Terlaksananya belanja jalan, jaringan dan irigasi BLUD 1 tahun.
- Terlaksananya belanja gedung dan bangunan BLUD selama 1 tahun.

Pendapatan BLUD Puskesmas dialokasikan sebesar Rp27.271.000.000 dan terealisasi sebesar Rp25.231.055.762 atau 92,52%. Sumber pendapatan terdiri dari Kapitasi, Non Kapitasi, Retribusi Pasien Umum, Jasa giro dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

- Kapitasi Rp20.759.762.727
- Non Kapitasi Rp3.297.678.186
- Retribusi Pasien Umum Rp1.127.364.000
- Jasa giro Rp33.366.900
- lain-lain pendapatan yang sah Rp12.366.900

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.208.082.708 dan realisasi keuangan Rp325.826.200 atau 26,97% serta realisasi fisik mencapai 30%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 paket dokumen Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan RS IKK Sarilamak, 1 paket dokumen AMDAL Pembangunan RS IKK Sarilamak dan 1 bidang lahan akses masuk ke RS IKK Sarilamak, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya persyaratan dokumen pendukung untuk pembangunan rumah sakit baru.

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.587.219.400 dan realisasi keuangan Rp3.398.932.619 atau 94,75%, serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya renovasi dan penambahan ruang puskesmas Banja Laweh.
 - Terlaksananya renovasi dan penambahan ruangan Puskesmas Sialang.
 - Terlaksananya pemasangan paving block Puskesmas Mungka.
 - Terlaksananya pembuatan turap Puskesmas Banja Laweh.
 - Terlaksananya pengadaan I unit kendaraan operasional roda 2 Puskesmas Sialang.
- c. Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.436.000 dan realisasi keuangan Rp8.436.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) tahun 2025, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pembayaran paket pekerjaan pengadaan 22 unit hygrometer / thermohygrometer (pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja tahun 2024).
 - Terlaksananya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan distribusi roda 2 IFK..
- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp391.854.300 dan realisasi keuangan Rp385.980.660 atau 98,50% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana, prasarana yang telah dilakukan perawatan dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya rehab dan pemeliharaan gedung Puskesmas Taram.
 - Terlaksananya rehab dan pemeliharaan gedung Puskesmas Pakan Rabaa.
 - Terlaksananya rehab dan pemeliharaan gedung Puskesmas Pangkalan.
 - Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan ambulance / puskesmas keliling sebanyak 4 (empat) unit yitu Pusling Rimbo Data, Sialang, Pangkalan dan Koto Tinggi.
- e. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.232.026.176 dan realisasi keuangan Rp2.213.098.329 atau 99,15% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehab dan pemeliharaan fasilitas kesehatan, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya renovasi dan perluasan Pustu Bukik Talao Gunung Malintang.
 - Terlaksananya renovasi dan perluasan Pustu Kayu Tanam Labuah Gunung.
 - Terlaksananya lanjutan relokasi Poskesri Koto Tangah Galugua.
 - Terlaksananya lanjutan rehab Pustu Nenan.
 - Terlaksananya renovasi Pustu Mungka Tangah.

- Terlaksananya lanjutan rehab Pustu Taeh Baruah.
 - Terlaksananya relokasi Poskesri Koto Tangah Galugua (pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja tahun 2024).
 - Terlaksananya pembuatan DAM / pagar Poskesri Simpang Padang Talang Anau.
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp779.337.842 dan realisasi keuangan Rp697.096.249 atau 89,45% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pengadaan 1 (satu) dental unit untuk Puskesmas Banja Laweh.
 - Terlaksananya pengadaan 2 unit bidan kit / nursing kit.
 - Terlaksananya pengadaan 4 unit bed pasien.
 - Terlaksananya pembayaran pengadaan alat kesehatan puskesmas / infan T Piece Resuscitator tambah trolley (Pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja tahun 2024).
 - Terlaksananya pembayaran pengadaan alat kesehatan puskesmas / tensi meter automatic (Pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja tahun 2024).
- g. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.228.423.500 dan realisasi keuangan Rp191.912.012 atau 84,02% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan sesuai standar selama 1 tahun, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya verifikasi dan validasi data sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas pada aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) sebanyak 22 puskesmas.
 - Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan dan alat labor pada 22 (dua puluh dua) puskesmas.
- h. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.636.349.392 dan realisasi keuangan Rp6.373.985.407 atau 96,05% serta realisasi fisik mencapai 98%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya obat-obatan, bahan medis habis pakai, vaksin, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan vaksin untuk 22 puskesmas selama 1 tahun.
- i. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp255.661.500 dan realisasi keuangan Rp241.513.056 atau 94,47% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya obat dan vaksin ke

22 puskesmas, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin di 22 puskesmas selama 1 tahun.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan alokasi anggaran sebesar Rp186.055.000 dan realisasi keuangan Rp169.416.850 atau 91,06% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah: jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar sebanyak 4.558 orang, dengan capaian kinerja berupa:
 - Terlaksananya kegiatan pengadaan ATK untuk kegiatan di seksi Kesga dan Gizi.
 - Terlaksananya cetak buku KIA sebanyak 3.635 buah.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan ibu dan anak ke puskesmas dan Dinas Kesehatan propinsi.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.574.400 dan realisasi keuangan Rp73.267.000 atau 92,07% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.673 orang, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya pembelian BBM untuk kegiatan di seksi Kesga dan Gizi.
 - Terlaksananya pengadaan fotocopy
 - Terlaksananya pengadaan cetak bagan MTBS / MTBM
 - Terlaksananya Pertemuan berkala program KIA.
 - Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.
 - Terlaksananya workshop pemanfaatan aplikasi program gizi dan KIA.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.150.000 dan realisasi keuangan Rp12.335.000 atau 40,91% serta realisasi fisik mencapai 66,67%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.668 orang, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya Pertemuan Review Pelayanan Neonatus Esensial.
 - Terlaksananya konsultasi / rapat/ pertemuan program.
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.175.900 dan realisasi keuangan Rp81.215.300 atau 72,40% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 19.794 orang, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

- Terlaksananya Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi bagi Petugas Kesehatan
 - Terlaksananya Workshoop Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Gizi Buruk bagi Petugas Kesehatan
 - Terlaksananya Workshoop Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDDTK) dan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi Petugas Kesehatan.
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp135.960.000 dan realisasi keuangan Rp124.600.730 atau 91,65% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pertemuan peningkatan kapasitas petugas, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya Pertemuan Pengelola UKS.
 - Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Dokter Kecil.
 - Terlaksananya cetak buku catatan kesehatan / raporku sebanyak 2.553 buah.
 - Terlaksananya bimbingan teknis / monev dalam rangka Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) anak sekolah.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dengan alokasi anggaran sebesar Rp174.802.000 dan realisasi keuangan Rp123.913.200 atau 70,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah berupa jumlah yang mendapatkan pelayan sesuai standar, dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya Kampanye Kanker Tingkat Kabupaten dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang.
 - Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bahaya rokok pada anak sekolah serta cerdas PTM pada murid SMP dan SMA tingkat Kabupaten pada 250 murid SMP.
 - Terlaksananya Workshop Upaya Berhenti Merokok bagi 127 orang petugas puskesmas.
 - Terlaksananya koordinasi program ke Dinas Kesehatan Propinsi.
 - Terlaksananya Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pelayanan Kesehatan Usia Produktif ke 22 puskesmas.
 - Terlaksananya pendampingan DPRD ke Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.960.000 dan realisasi keuangan Rp34.160.000 atau 94,99% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 45.097 orang lansia, dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya Pertemuan Berkala Lansia.
 - Terlaksananya Sosialisasi Perawatan Jangka Panjang Lansia Bagi Kader.

- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.275.000 dan realisasi keuangan Rp35.900.000 atau 98,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sebanyak 18.110 orang.
 - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok pada 13 kecamatan sebanyak 325 orang.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi di 22 puskesmas.
 - Terlaksananya konsultasi program ke Dinas Kesehatan Propinsi.
 - Terlaksananya monev dan supervisi kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi ke 22 puskesmas.
- i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.658.000 dan realisasi keuangan Rp120.653.818 atau 98,37% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar, dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Lawan Obesitas pada murid SMA sebanyak 75 orang.
 - Terlaksananya Workshop kader dalam rangka Deteksi Dini PTM tingkat kabupaten untuk 25 orang kader Posbindu selama 2 hari.
 - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program ke Dinas Kesehatan Propinsi.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pelayanan DM dan PANDU PTM ke 22 puskesmas.
- j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.415.000 dan realisasi keuangan Rp32.130.000 atau 81,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pendampingan pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi program dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya Sosialisasi Nagari Peduli Kesehatan Jiwa pada 3 Nagari.
 - Terlaksananya peningkatan kemampuan caregiver dalam perawatan pasien schizophrenia pada 50 orang caregiver ODGJ.
 - Terlaksananya pemantauan ke 22 untuk kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- k. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.706.000 dan realisasi keuangan Rp48.206.000 atau 95,07% serta realisasi fisik mencapai 99%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah berupa jumlah

orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 5.416 orang, dengan capaian kinerja:

- Terlaksananya kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi program TB ke puskesmas dan Rumah Sakit.
- Terlaksananya kegiatan rapat dalam rangka Validasi Data TBC Puskesmas dan RS sebanyak 150 orang.
- Terlaksananya sosialisasi Kolaborasi TB-HIV sebanyak 30 orang.
- Terlaksananya Sosialisasi Program TBC sebanyak 30 orang.
- Workshoop untuk petugas TB, labor dan dokter sebanyak 33 peserta.
- Validasi Data SiTB sebanyak 33 orang.
- Terlaksananya kegiatan supervisi, monitoring evaluasi, validasi data, penyisiran kasus TB ke 22 puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Polres 50 Kota, Klinik Denzipur 2/PS, Klinik Setya Husada di Manggilang, Klinik Lapas Kelas III Suliki dan Klinik Lapas (LPKA) Tanjung Pati.

l. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.365.000 dan realisasi keuangan Rp105.558.000 atau 95,64% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah balita yang ditimbang sebanyak 15.692 orang balita dan jumlah balita stunting sebanyak 2.031 orang, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya belanja BBM untuk kegiatan perbaikan gizi masyarakat.
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi PMT pada Balita dan Ibu Hamil Kurang Gizi.
- Terlaksananya edukasi konseling menyusui bagi PKK.
- Terlaksananya evaluasi konsumsi tablet Fe pada remaja putri.
- Terlaksananya gebyar aksi bergizi.
- Terlaksananya Pertemuan Berkala Gizi.
- Terlaksananya Pertemuan Publikasi Data Stunting.

m. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.006.300 dan realisasi keuangan Rp27.535.250 atau 94,93% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini berupa satu dokumen hasil Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja dan olahraga ke 22 puskesmas.
- Terlaksananya tes kebugaran bagi masyarakat di 2 wilayah kerja puskesmas sebanyak 200 orang.
- Terlaksananya Pertemuan Kesehatan Kerja dan Olahraga bagi petugas puskesmas sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 60 orang.

- n. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.128.000 dan realisasi keuangan Rp73.121.375 atau 91,26% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah berupa terpenuhinya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya perjalanan dalam rangka pembinaan kesehatan lingkungan ke puskesmas.
 - Terlaksananya pembelian BBM untuk kegiatan program kesehatan lingkungan.
 - Terlaksananya pengadaan 2 unit printer untuk kegiatan program kesehatan lingkungan.
 - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program kesehatan lingkungan ke Dinas Kesehatan Propinsi.
 - Terlaksananya sosialisasi kesehatan lingkungan tanggal 11 Desember 2025 dengan jumlah peserta 52 orang.
 - Terlaksananya Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Kesling pada tanggal 9 Desember 2025 dengan jumlah peserta 40 orang.
- o. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp443.700.150 dan realisasi keuangan Rp379.314.250 atau 85,49% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini berupa satu dokumen hasil dari program promosi kesehatan, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pengadaan acrylic wall frame dinding A2 sebanyak 15 buah.
 - Terlaksananya pengadaan acrylic wall frame dinding A3 sebanyak 20 buah.
 - Terlaksananya pengadaan acrylic wall frame dinding A4 sebanyak 20 buah.
 - Terlaksananya cetak spanduk untuk semua program.
 - Terlaksananya cetak baliho.
 - Terlaksananya cetak buku percakapan kader sebanyak 352 buah.
 - Terlaksananya cetak buku pencatatan dan pelaporan sebanyak 360 buku.
 - Terlaksananya cetak lembar balik media KIE untuk posyandu sebanyak 435 buah.
 - Terlaksananya pemasangan running text sebanyak 2 buah.
 - Terlaksananya advokasi pokjanal posyandu.
 - Terlaksananya kegiatan aktifkan posyandu.
 - Terlaksananya gerakan pengendalian penyakit.
 - Terlaksananya rapat koordinasi pokjanal posyandu.
 - Terlaksananya monev / pembinaan ke puskesmas dan kecamatan.
- p. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.370.000 dan realisasi keuangan Rp2.860.000 atau 11,74% serta realisasi fisik mencapai 60%. Keluaran kegiatan ini berupa penguatan program yankestrad seluruh pemegang program, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya Pertemuan Penguatan Program Yankestrad terhadap penanggung jawab program di 22 puskesmas.
 - Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya.
- q. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp93.510.000 dan realisasi keuangan Rp48.490.000 atau 51,86% serta realisasi fisik mencapai 95,17%. Keluaran kegiatan ini terlaksananya monev penanganan KLB dan pelacakan KLB, dan persentase sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:
- Meningkatnya persentase pemenuhan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dalam verifikasi sinyal / rumor.
 - Terlaksananya Pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB / wabah.
 - Terlaksananya investigasi kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
 - Terlaksananya pelacakan penyakit menular lainnya.
 - Terlaksananya kegiatan pelacakan kontak penyakit menular.
 - Terlaksananya pembinaan, supervisi, bimbingan teknis serta monev program P2M.
 - Terlaksananya surveilans aktif penyakit menular ke Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan.
- r. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.803.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp15.130.500 atau 95,74% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah bimbingan teknis, rapat koordinasi, penggalangan kemitraan, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Penggalangan Kemitraan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa pada 38 orang yang dihadiri juga oleh Ketua TP PKK, kecamatan dan nagari.
- s. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.045.700 dan realisasi keuangan Rp16.400.000 atau 86,11% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah skrining kesehatan jiwa, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya Penggerakan Masyarakat dalam upaya promosi kesehatan jiwa dan Napza bagi remaja tingkat kabupaten sebanyak 95 orang siswa di Hotel Mangkuto.
 - Terlaksananya monev dan supervisi pelayanan kesehatan jiwa dan napza ke 22 puskesmas.
- t. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.740.000 dan realisasi keuangan Rp4.765.000 atau 48,90% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini

adalah terlaksananya penanganan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan terhadap masyarakat, dengan capaian kinerja berupa:

- Meningkatnya persentase pemenuhan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP.
 - Meningkatnya persentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan pada kejadian krisis kesehatan.
- u. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp334.015.640 dan realisasi keuangan Rp320.718.000 atau 96,02% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini berupa dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, dengan capain kinerja:
- Terlaksananya sosialisasi tentang Penyakit Menular di tingkat kecamatan yaitu di Nagari Situjuh Batur dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari unsur kecamatan, perangkat nagari, tokoh masyarakat, kader, tokoh agama, PKK, Babinsa, Babinkamtibmas dan tenaga kesehatan.
 - Terlaksananya Sosialisasi Program P2B2/ Zoonosis dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang .
 - Terlaksananya Bimbingan Tekhnis terkait Program KUSTA dan ISPA dengan jumlah peserta sebanyak 46 orang.
 - Terlaksananya monitoring dan pembinaan program di 22 puskesmas, rumah sakit dan klinik.
 - Terlaksananya fogging fokus ke 10 lokasi yaitu:
 - Jorong Kubang Tungkek Nagari Guguak VIII Koto wilayah kerja Puskesmas Dandung-Dandung.
 - Jorong Lubuak Limpato Nagari Lubuak Batingkok wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pati.
 - Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pati.
 - Jorong Kaciak Nagari Taeh Baruah wilayah kerja Puskesmas Koto Baru Simalanggang.
 - Jorong Belubus Nagari Sungai Talang wilayah kerja Puskesmas Dandung-Dandung.
 - Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto ilayah kerja Puskesmas Danmgung-danguang.
 - Jorong Padang Rantang Nagari Koto Tuo wilayah kerja puskesmas Tanjung Pati.
 - Jorong Guguak / MTsN 3 Lima Puluh Kota Nagari Guguak VIII Koto wilayah kerja Puskesmas Dandung-Dangng.

- Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto wilayah kerja Puskesmas Dandung-Dandung.
 - Jorong Parumpunag Nagari Koto Baru Simalanggang wilayah kerja Puskesmas Koto Baru Simalanggang.
- v. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.142.494.094 dan realisasi keuangan Rp27.002.770.225 atau 99,49% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBU dan BP kelas 3, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pembelian BBM untuk kegiatan operasional program.
 - Terlaksananya pengadaan ATK untuk kegiatan program.
 - Terlaksananya bahan cetak dan fotocopy untuk kegiatan program.
 - Terlaksananya belanja pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBU dan BP Kelas 3 sebanyak 62.577 jiwa.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi program ke 22 puskesmas.
- w. Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.320.000 dan realisasi keuangan Rp7.900.000 atau 40,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah kampanye anti narkoba dan pemeriksaan NAPZA di sekolah, dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya Kampanye Anti Narkoba serta pemeriksaan NAPZA di sekolah dengan peserta 120 orang siswa di dua SLTP.
 - Terlaksananya pengadaan bahan habis pakai untuk test Narkoba 6 parameter.
- x. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.550.000 dan realisasi keuangan Rp8.595.000 atau 81,47% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Meningkatnya persentase cakupan pelayanan kesehatan kasus PD3I, meningkatnya persentase cakupan pelaksanaan pelaporan, dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya monev penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) ke puskesmas.
 - Terlaksananya pengiriman specimen penyakit KLB ke laboratorium rujukan.
 - Terlaksananya pengambilan spesimen penyakit KLB ke laboratorium rujukan.
- y. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.176.000 dan realisasi keuangan Rp148.394.195 atau 98,16% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah berupa Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya belanja BBM operasional Forum Kabupaten Sehat (FKS).
 - Terlaksananya belanja ATK Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) di 13 kecamatan dan pokja nagari sehat.

- Terlaksananya Pembinaan Forum Kabupaten Sehat (FKS) di 13 kecamatan dengan peserta FKS, FKKS, Pokja Nagari Sehat dalam rangka Persiapan Penilaian Kabupaten Sehat tahun 2025.
 - Terlaksananya Pertemuan Pembina Kabupaten Sehat dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari FKS, Tim Pembina dari OPD terkait (Bapelitbangda, DP2KBP3A, BPBD, Damkar, PU, LH, Pendidikan, Kesra, Koperindag, Disarpورا).
 - Terlaksananya Pertemuan Fokal Point KKS dengan jumlah peserta 11 orang (Bapelitbangda, DP2KBP3A, BPBD, Damkar, PU, LH, Pendidikan, Kesra, Koperindag, Disarpورا).
 - Terlaksananya Pertemuan Forum Kabupaten Sehat (FKS) Tingkat Kabupaten yang terdiri dari FKS Kabupaten dalam rangka Persiapan Penilaian Kabupaten Sehat tahun 2025 (Pengumpulan Data, entri data ke Aplikasi Swastisaba, kunjungan ke Bapelitbangda).
 - Terlaksananya pengadaan laptop dan printer untuk FKS.
 - Terlaksananya pembinaan FKKS di 13 kecamatan.
 - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program ke Dinas Kesehatan Propinsi.
- z. Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp452.406.000 dan realisasi keuangan Rp345.155.957 atau 76,29% serta realisasi fisik mencapai 95%. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen hasil operasional pelayanan puskesmas, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pengadaan ATK Yankes Primer.
 - Terlaksananya pembelian BBM operasional yankes primer.
 - Terlaksananya rapat tim kredensialing tenaga kesehatan.
 - Terlaksananya rapat Peningkatan Koordinasi Jejaring FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).
 - Terlaksananya piket P3K Nataru awal tahun 2025.
 - Terlaksananya Orientasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di 13 puskesmas untuk petugas puskesmas.
 - Terlaksananya Pertemuan Verifikasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP).
 - Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Labor bagi Petugas Puskesmas..
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi program ke puskesmas.
 - Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Puskesmas bagi Petugas Puskesmas.
 - Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Gigi dan Mulut Bagi Petugas Puskesmas.
 - Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat Bagi Petugas Puskesmas.

- Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Laporan Kunjungan Bagi Petugas Puskesmas.
 - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi ILP.
 - Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Operasional bidang Yankes.
 - Terlaksananya perjalanan dinas mengikuti pertemuan, rapat, konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi.
 - Terlaksananya perjalanan dinas supervisi, monev dan pembinaan yankes primer ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
 - Terlaksananya pendampingan dan pemantauan evaluasi ILP di puskesmas.
 - Terlaksananya belanja modal 1 unit komputer.
- aa. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.470.500 dan realisasi keuangan Rp7.866.458 atau 33.52%, realisasi fisik mencapai 80%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Penguatan FKTP melalui pemantauan mutu dan re-akreditasi 22 puskesmas di Kab.Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya kegiatan Penguatan Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, Evaluasi Re-akreditasi yang sesuai dengan standar dan mengutamakan keselamatan pasien.
 - Terlaksananya pembinaan dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan dan perencanaan perbaikan strategis (PPS) di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- bb. Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.825.000,- dan realisasi keuangan Rp31.310.803,- atau 69,85% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah penanganan KIPI, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya Sosialisasi KIPI dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
 - Terlaksananya pelayanan terhadap kasus KIPI
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi program ke puskesmas.
- cc. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.650.000 dan realisasi keuangan Rp7.505.000 atau 98,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya persentase cakupan puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini KLB untuk mencegah terjadinya KLB di puskesmas.
- dd. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.051.951.700 dan realisasi keuangan Rp903.718.489 atau 85,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini

adalah tersedianya sarana prasarana untuk menunjang Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya belanja BBM untuk kegiatan di PSC 119.
- Terlaksananya belanja makan minum rapat.
- Terlaksananya pakaian dinas lapangan (PDL).
- Terlaksananya jasa tenaga kesehatan.
- Terlaksananya belanja tagihan telepon, air, listrik
- Terlaksananya bimbingan teknis (Pelatihan PCS 119) dengan jumlah peserta 73 orang.

ee. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.506.000 dan realisasi keuangan Rp275.127.870 atau 91,86% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kematian ibu tahun 2025 sebanyak 2 kasus (42,49/100.000 kelahiran hidup) dan jumlah kematian bayi 67 kasus (14,35/1.000 kelahiran hidup), dengan capaian kinerja:

- Terlaksananya jasa pemeriksaan Skrining Hipotirod Kongenital (SHK).
- Terlaksananya Pendampingan Tim Ahli ke Puskesmas.
- Terlaksananya Pertemuan Analisa dan Verifikasi Data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN).
- Terlaksananya Pertemuan Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak.
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas di seksi Kesga dan Gizi.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi program ke 22 puskesmas.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Secara Terintegrasi

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.851.100 dan realisasi keuangan Rp194.154.400 atau 94,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah: jumlah pertemuan, monitoring dan evaluasi kegiatan, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan laptop, komputer simpus, pembelian mikrotik, akses point, kabel, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya Rapat Sosialisasi Permenkes No.6 tahun 2024 dan Penetapan SPM tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 dengan jumlah peserta 65 orang.
- Terlaksananya Pertemuan Verifikasi Data Profil tahun 2025 pada tanggal 23 Januari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- Terlaksananya Pertemuan Penyamaan Persepsi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Tanggal 9 Mei 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
- Terlaksananya Rapat Evaluasi Capaian SPM TW II tahun 2025 pada tanggal 18 Juli 2025 dengan jumlah peserta 80 orang.
- Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi RME e – Puskesmas pada tanggal 28 Juli 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

- Terlaksananya Rapat Evaluasi Capaian SPM TW III tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober 2025 dengan jumlah peserta 65 orang.
- Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Lima Tahunan Puskesmas pada tanggal 28 Oktober 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 85 orang.
- Terlaksananya Rapat Evaluasi Capaian SPM TW IV tahun 2025 pada tanggal 24 Desember 2025 dengan jumlah peserta 80 orang.
- Terlaksananya Rapat Pembinaan Pelaporan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan Ketersediaan Obat pada tanggal 22 Desember 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang.
- Terlaksananya pembelian alat tulis kantor dan photocopy.
- Terlaksananya pembelian 1 unit laptop dan 1 unit komputer simpus untuk kegiatan operasional.
- Terlaksananya pembelian 1 unit mikrotik.
- Terlaksananya pembelian 6 unit akses point.
- Terlaksananya pembelian 1 bok kabel LAN CAT 6.

4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.914.400 dan realisasi keuangan Rp301.842.000 atau 86,02% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah monev program ke Rumah Sakit dan Puskesmas pembinaan/ penilaian ke rumah sakit dan tersusunnya Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) RSUD dr. Achmad Darwis, dengan capaian kinerja berupa:
 - Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program dengan rumah sakit.
 - Terlaksananya monev, bimbingan, pendampingan, supervisi ke puskesmas, Rumah Sakit, puskesmas dan OPD terkait.
 - Terlaksananya Visitasi ke Rumah Sakit.
 - Terlaksananya pembinaan / penilaian ke rumah sakit.
 - Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (DELH) RSUD dr. Achmad Darwis.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.120.000 dan realisasi keuangan Rp4.065.000 atau 59,90% serta realisasi fisik mencapai 80%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah penguatan FKTP melalui pemantauan mutu dan re-akreditasi 22 puskesmas, dengan capaian kinerja berupa:
 - Terlaksananya kegiatan Penguatan Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar dan mengutamakan keselamatan pasien.

- Terlaksananya pembinaan dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota

- a. Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.729.600 dan realisasi keuangan Rp15.611.000 atau 99,25% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah adanya anggaran untuk belanja ATK, kegiatan program, dengan capaian kinerja berupa:
 - Terlaksananya belanja ATK.
 - Terlaksananya kegiatan pengendalian perizinan tenaga kesehatan.

2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota

- a. Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp123.806.950 dan realisasi keuangan Rp84.986.070 atau 68,64% serta realisasi fisik mencapai 88%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan cetak dan ATK, dokumen hasil pembinaan dan pengawasan, dengan capaian kinerja berupa:
 - Terlaksananya belanja ATK.
 - Terlaksananya bimbingan teknis.
- b. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar dengan alokasi anggaran sebesar Rp303.779.480 dan realisasi keuangan Rp293.013.495 atau 96,46% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah honor tenaga administrasi, belanja alat kantor, konsultasi program, dengan capaian kinerja berupa:
 - Terlaksananya belanja pengadaan pembelian BBM operasional.
 - Terlaksananya belanja makan minum tamu.
 - Terlaksananya belanja pengadaan 1 paket CCTV .
 - Terlaksananya belanja jasa tenaga administrasi 2 orang.
 - Terlaksananya belanja pembelian 1 unit AC.
 - Terlaksananya belanja pembelian 1 unit AC aula.
 - Terlaksananya belanja 1 buah dispenser di ruang kepala dinas.
 - Terlaksananya belanja 1 unit meja rapat.
 - Terlaksananya belanja 1 unit tablet kepala dinas.
 - Terlaksananya belanja 3 unit printer.

3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp513.060.000 dan realisasi keuangan Rp427.767.098 atau 83,38% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen pertemuan dan sertifikat pelatihan, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang.
 - Terlaksananya Pelatihan Konseling menyusui dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
 - Terlaksananya Pelatihan Ante Natal Care, Persalinan, Nifas dan SHK dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
 - Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan bagi Kader Posyandu dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
 - Terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dengan peserta sebanyak 54 orang.
 - Terlaksananya Belanja ATK untuk kegiatan di seksi SDM.
 - Terlaksananya bahan cetak untuk kegiatan di seksi SDM.

IV. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.700.000 dan realisasi keuangan Rp81.695.000 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini pengawasan fasilitas kefarmasian, dengan capaian:
- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap apotek dan toko obat sebanyak 55 apotek dan toko obat.
 - Terlaksananya bimbingan tekhnis perizinan dan pengelolaan obat di apotek dan toko obat terhadap pengelolaan sarana kefarmasian sebanyak 70 orang.

2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P – IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp164.644.000 dan realisasi keuangan Rp159.836.284

atau 97,08% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini meningkatnya pengawasan pangan di tengah masyarakat, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan dan kaji ulang Industri Rumah Tangga Pangan.
- Terlaksananya survey pemenuhan perizinan Industri Rumah Tangga Pangan dalam rangka penerbitan SPP – IRT sebanyak 70 sarana.
- Terlaksananya kegiatan pertemuan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan untuk Pengusaha Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 70 pengusaha.

3. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

a. Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp174.555.000 dan realisasi keuangan Rp174.490.838 atau 99,96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini meningkatnya pengawasan pangan di tengah masyarakat, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya rapat koordinasi tentang inventarisasi dan monitoring serta tindak lanjut sarana industri rumah tangga pangan.
- Terlaksananya pemeriksaan sampel pangan sebanyak 31 sampel.
- Terlaksananya pengawasan iklan sebanyak 12 iklan pangan olahan.
- Terlaksananya rapat tindak lanjut pengujian dan desk CAPA (Correction Activ dan Preventive Action) untuk pengusaha IRT-P sebanyak 1 kali.
- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan sebanyak 50 sarana IRT-P.
- Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Penilaian Mandiri Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk pengusaha industri rumah tangga pangan.

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.794.000 dan realisasi keuangan Rp54.635.000 atau 85,64% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah penguatan posyandu, monitoring dan evaluasi program, dengan capaian kinerja:

- Terlaksananya kegiatan jamboree kader.
- Terlaksananya pertemuan tenaga promkes..

- Terlaksananya bimbingan teknis dan monev dalam rangka penguatan posyandu, UKBM dan Penguatan Integrasi Layanan Primer ke puskesmas.

2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.127.300 dan realisasi keuangan Rp68.765.000 atau 69,37%, serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan capaian kinerja berupa:
 - Terlaksananya jumlah puskesmas yang melaksanakan pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - Terlaksananya Monev pola hidup sehat ke 22 puskesmas.
 - Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas kader.
- b. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.270.000 dan realisasi keuangan Rp24.475.000 atau 93,17% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini gebyar kader dasawisma, pemantapan program germas, dengan capaian kinerja berupa:
 - Terlaksananya Gebyar Kader Dasawisma.
 - Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Dasawisma.
 - Terlaksananya bimbingan teknis dalam rangka penguatan posyandu, UKBM dan integrasi layanan primer dalam rangka menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

VI. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Ibu Hamil dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.078.376.000 dan realisasi keuangan Rp1.015.355.000 atau 94,16% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah penyediaan media KIE untuk posyandu, monitoring dan evaluasi program, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya kelas ibu hamil.
 - Terlaksananya pendataan dan pemetaan sebaran ibu hamil per jorong secara berkala.
 - Terlaksananya validasi data ibu hamil setiap bulan.
 - Terlaksananya kelas ibu balita.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp939.881.000 dan realisasi keuangan Rp799.500.000 atau 85,06% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pertemuan peningkatan kapasitas petugas, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya pemeriksaan kesehatan anak sekolah.
 - Terlaksananya cek kesehatan gratis.
 - Terlaksananya pembinaan dokter kecil.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.300.000 dan realisasi keuangan Rp16.200.000 atau 66,67% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini jumlah kegiatan pemantauan usia lanjut (skrining) lansia sesuai standar, dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya kunjungan lansia ke posyandu dan posbindu.
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.850.000 dan realisasi keuangan Rp199.375.000 atau 82,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dengan capaian kinerja:
- Terlaksananya kunjungan rumah terhadap orang dengan gangguan jiwa berat.
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan alokasi anggaran sebesar Rp434.714.000 dan realisasi keuangan Rp364.200.000 atau 83,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya kegiatan ketuk pintu ke pasien yang terduga tuberkulosis.
 - Terlaksananya penjangkaran suspek tuberkulosis.
 - Terlaksananya pengambilan sputum sewaktu.
 - Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi mengenai TB dengan lintas sector dan kader.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.703.142.280 dan realisasi keuangan Rp3.008.251.262 atau 81,24% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gizi sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk balita
 - Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil.
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp223.025.000 dan realisasi keuangan Rp197.775.000 atau 88,68% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya tes kebugaran.
 - Terlaksananya penyuluhan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga dengan melibatkan lintas sektor.

- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp291.625.000 dan realisasi keuangan Rp282.000.000 atau 96,70% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan lingkungan.
 - Terlaksananya kegiatan pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi standar sanitasi.
 - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan(IKL).
- i. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.996.000 dan realisasi keuangan Rp90.825.000 atau 73,84% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan surveilans sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pelacakan pasien yang terduga kasus penyakit menular.
- j. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp141.150.000 atau 80,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan masalah jiwa (ODMK) dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya skrining ke rumah orang dengan masalah kejiwaan.
 - Terlaksananya skrining pelayanan di klaster 2 dan 3.
- k. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.471.847.800 dan realisasi keuangan Rp1.328.577.250 atau 90,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya edukasi kepada masyarakat tentang skrining Penyakit Tidak Menular (PTM).
- l. Sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.900.988.002 dan realisasi keuangan Rp2.620.839.906 atau 90,34% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen hasil Operasional Pelayanan Puskesmas, dengan capaian kinerja berupa:
- Terlaksananya pembayaran Sistem Komputerisasi Terintegrasi (Simpus).
 - Terlaksananya penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas.
 - Terlaksananya lokmin lintas sektor dan lokmin bulanan puskesmas.
- m. Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.200.000

dan realisasi keuangan Rp19.500.000 atau 87,84% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah penanganan KIPI, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya pemantauan kasus KIPI.
- n. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.283.000 dan realisasi keuangan Rp1.050.000 atau 10,21% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sesuai standar, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya survei pengendalian vektor malaria.
 - Terlaksananya pemeriksaan darah massal malaria.
- o. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp418.898.000 dan realisasi keuangan Rp280.660.000 atau 67% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya pemeriksaan tes /skrining Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).
- p. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.973.000 dan realisasi keuangan Rp14.025.000 atau 33,41% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya pemasangan kontrasepsi KB.
- q. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjut usiaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp343.500.000 dan realisasi keuangan Rp331.100.000 atau 96,39% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan lanjutusiaan sesuai standar, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya pelayanan lanjutusiaan minimal 1 kali setahun.
 - Terlaksananya entry data SIGIZI KESGA.
- r. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp962.039.720 dan realisasi keuangan Rp823.875.000 atau 85,64% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah anak yang mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai standar, dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya edukasi kepada orang tua tentang manfaat imunisasi kepada anaknya
 - Terlaksananya pelayanan imunisasi kepada anak bayi.

VII. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan alokasi anggaran sebesar

Rp142.394.000 dan realisasi keuangan Rp107.933.100 atau 75,80% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sesuai standar, dengan capaian kinerja berupa:

- Terlaksananya pelatihan kader agar lebih aktif dalam pelaksanaan kegiatan.
- Terlaksananya penyuluhan ke kelompok rentan (penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak).

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (1.02.01)				
				1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.02.01.2.02)				
				1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1.02.01.2.02.0001)	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan		
				2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.02.01.2.05)				
				2.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (1.02.01.2.02.05.0003)	Tersedianya dokumen kegiatan berupa ATK, alat listrik peralatan rumah tangga	Terpenuhinya pembayaran belanja alat listrik. Terlaksananya belanja ATK untuk kegiatan. Terlaksananya belanja alat rumah tangga lainnya.		
				3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.02.01.2.06)				
				3.1	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (1.02.01.2.02.06.0003)	Tersedianya anggaran untuk pembelian konsumsi tamu	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi tamu Dinas Kesehatan selama 1 tahun		
				3.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.02.01.2.02.06.0009)	Tersedianya anggaran untuk rapat dan konsultasi program.	Terpenuhinya kebutuhan untuk konsultasi program Dinas Kesehatan selama 1 tahun		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (01.02.01.2.08)				
				4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.02.01.2.02.08.0002)	Tersedianya anggaran untuk pembayaran rekening listrik, telepon, internet, TV kabel dan air di Dinas Kesehatan.	Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, telepon, internet, TV kabel dan air di Dinas Kesehatan selama 1 tahun		
				4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.02.01.2.02.08.0004)	Tersedianya anggaran untuk tenaga jasa pelayanan umum di Dinas Kesehatan	Terlaksananya pembayaran tenaga jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa sopir kepala dinas di Dinas Kesehatan selama 1 tahun.		
				5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (10.01.2.09)				
				5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1.02.01.2.02.09.0001)	Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan jabatan.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan kepala dinas dan kebutuhan BBM selama 1 tahun.		
				5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan (1.02.01.2.02.09.0002)	Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional dan terpenuhinya kebutuhan BBM untuk kendaraan operasional di Dinas Kesehatan selama 1 tahun		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya (1.02.01.2.02.09.0006)	Tersedianya anggaran pemeliharaan peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, TV Kabel dan personal komputer kantor, service laptop/ notebook di Dinas Kesehatan selama 1 tahun		
				5.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1.02.01.2.02.09.0010)	Tersedianya anggaran pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan.	Terlaksananya pemeliharaan berupa pengecatan dinding depan dan pagar, penggantian tiang koridor dan penggantian pintu masuk bagian keuangan di Dinas Kesehatan selama 1 tahun		
				6.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (1.02.01.2.10)				
				6.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas (1.02.01.2.10.0001)	Tersedianya anggaran untuk meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan BLUD di 22 Puskesmas	Terlaksananya belanja pegawai BLUD, belanja barang dan jasa BLUD, belanja peralatan dan mesin BLUD, belanja modal untuk gedung dan bangunan BLUD, belanja modal jaringan, irigasi BLUD, belanja modal asset lainnya BLUD selama 1 tahun		
				II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan (1.02.02)				
				1.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.01)				
				1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan	1 paket dokumen rencana induk (master plan) dan	Terpenuhinya persyaratan dokumen pendukung untuk pembangunan rumah sakit		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Prasarana Pendukungnya (1.02.02.2.01.0001)	dokumen AMDAL	baru.		
				1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas (1.02.02.2.01.0006)	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya renovasi dan penambahan ruang Puskesmas Banja Laweh. Terlaksananya renovasi dan penambahan ruang Puskesmas Sialang. Terlaksananya pemasangan paving block Puskesmas Mungka. Terlaksananya pembuatan turap Puskesmas Banja Laweh. Terlaksananya pengadaan 1 unit kendaraan operasional roda 2 Puskesmas Sialang.		
				1.3	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (1.02.02.2.01.0007)	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) tahun 2025	Terlaksananya pembayaran paket pekerjaan pengadaan 22 unit hygrometer/thermohygrometer (pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja tahun 2024)		
				1.4	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (1.02.02.2.01.0009)	Tersedianya sarana dan prasarana yang telah dilakukan perawatan dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya.	Terlaksananya rehab dan pemeliharaan gedung Puskesmas Taram. Terlaksananya rehab dan pemeliharaan gedung Puskesmas Pakan Rabaa. Terlaksananya rehab dan pemeliharaan gedung Puskesmas Pangkalan. Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan ambulance / puskesmas keliling sebanyak 4 (empat) unit yaitu Puskesmas Rimbo Data, Sialang, Pangkalan dan Koto Tinggi.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1.5	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (1.02.02.2.01.0010)	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehab dan pemeliharaan fasilitas kesehatan	Terlaksananya renovasi dan perluasan Pustu Bukik Talao Gunung Malintang. Terlaksananya renovasi dan perluasan Pustu Kayu Tanam Labuah Gunung. Terlaksananya lanjutan relokasi Poskesri Koto Tengah Galugua. Terlaksananya lanjutan rehab Pustu Nenang. Terlaksananya renovasi Pustu Mungka Tengah. Terlaksananya lanjutan rehab Pustu Taeh Baruah. Terlaksananya relokasi POskesri Koto Tengah Galugua (Pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja tahun 2024). Terlaksananya pembuatan DAM / Pagar Poskesri Simpang Padang Talang Anau.		
				1.6	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1.02.02.2.01.0014)	Tersedianya alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas.	Terlaksananya pengadaan 1 unit Dental Unit untuk Puskesmas Banja Laweh. Terlaksananya pengadaan Bidan Kit / Nursing Kit sebanyak 2 unit. Terlaksananya pengadaan bed pasien sebanyak 4 unit. Terlaksananya pengadaan cold chain sebanyak 1 unit. Terlaksananya pembayaran pengadaan alat kesehatan puskesmas / infant T Piece Resusitator dan trolley (pembayaran kewajiban jangka		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							pendek berupa hutang belanja tahun 2024) Terlaksananya pembayaran pengadaan alat kesehatan / Tensi meter automatic (pembayaran kewajiban jangka pendek berupa hutang belanja tahun 2024).		
				1.7	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1.02.02.2.01.0020)	Terpeliharanya alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan sesuai standar selama 1 tahun.	Terlaksananya verifikasi dan validasi data sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) sebanyak 22 puskesmas. Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan / alat labor pada 22 puskesmas selama 1 tahun.		
				1.8	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (1.02.02.2.01.0023)	Tersedianya obat, bahan medis habis pakai dan vaksin.	Terpenuhinya ketersediaan dan keterjangkauan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai selama 1 tahun.		
				1.9	Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (1.02.02.2.01.0026)				
				2.	Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02)				

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (1.02.02.2.02.0001)	Meningkatkan kesehatan ibu hamil Mencegah dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta menurunkan angka stunting Memastikan semua ibu hamil mendapatkan buku KIA Meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui pengadaan buku KIA	Terlaksananya Cetak Buku KIA sebanyak 3.635 buah. Terlaksananya konsultasi, rapat, pertemuan program. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan ibu ke puskesmas		
				2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (1.02.02.2.02.0002)	Memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin sesuai standar pelayanan Menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan menjamin persalinan aman, oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.. Memastikan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta penanganan dini	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.673orang. Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin Terlaksananya pertemuan berkala program KIA. Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terlaksananya workshop pemanfaatan aplikasi program gizi dan KIA. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan ibu dan anak.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						komplikasi pada ibu maternal.			
				2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (1.02.02.2.02.0003)	Memberikan pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir sesuai standar dengan tujuan menurunkan angka kematian bayi, angka kesakitan pada bayi dan meningkatkan kesehatan bayi. Workshop dan pertemuan	Terlaksananya jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 4.668 bayi. Terlaksananya review pelayanan neonatal esensial. Terlaksananya konsultasi program bayi baru lahir ke Dinas Kesehatan Propinsi.		
				2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (1.02.02.2.02.0004)	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Menurunkan angka kesakitan ibu dan anak. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.	Terlaksananya pengadaan BBM untuk balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya jasa pemeriksaan sampel SHK. Terlaksananya pendampingan tim ahli ke puskesmas. Terlaksananya pertemuan analisa dan verifikasi data MPDN. Terlaksananya pertemuan pengkajian kasus kematian ibu dan anak.		
				2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (1.02.02.2.02.0005)	Pertemuan peningkatan kapasitas petugas	Terlaksananya Pertemuan Pengelolaan UKS Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Dokter Kecil Terlaksananya cetak buku		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							catatan kesehatan / raporku sebanyak 2.553 buah Terlaksananya bimbingan teknis / monev dalam rangka Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak Sekolah		
				2.6	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (1.02.02.2.02.0006)	Posbindu PTM, pelatihan kader posbindu	Terlaksananya kampanye kanker tingkat kabupaten dengan peserta 90 orang. Terlaksananya KIE bahaya rokok pada anak sekolah serta cerdik PTM pada 250 murid SLTP. Terlaksananya worksop Upaya Berhenti Merokok sebanyak 127 orang petugas. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program ke Dinas Kesehatan Propinsi. Terlaksananya Bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan usia produktif ke 22 puskesmas. Terlaksananya pendampingan DPRD ke Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang KTR.	Belum seluruh masyarakat aktif dalam kegiatan Posbindu PTM, sehingga cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif masih rendah, pada tahun 2024 cakupan deteksi dini usia produktif sebesar 37.3%. Belum berjalannya dengan baik kegiatan Upaya Berhenti Merokok di puskesmas	Pembentukan Posbindu PTM di jorong dan mengadakan pelatihan posbindu bagi kader. Melakukan pelatihan UBM bagi petugas dan melengkapi alkes untuk kegiatan UBM. Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di hari ulang tahun.
				2.7	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (1.02.02.2.02.0007)	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Pertemuan dan sosialisasi program.	Terlaksananya pelayanan untuk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 45.097 orang Terlaksananya pertemuan berkala lansia Terlaksananya sosialisasi perawatan jangka panjang lansia bagi kader		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				2.8	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (1.02.02.2.02.0008)	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar. Sosialisasi Peraturan Daerah.	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar sebanyak 18.110 orang. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di 13 kecamatan dengan peserta sebanyak 325 orang. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program ke Dinas Kesehatan Propinsi.	Belum seluruh penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar capaian sebesar 83.99%	Meningkatkan promosi kesehatan sehingga setiap orang dengan hipertensi dapat selalu dipantau kesehatan secara teratur.
				2.9	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (1.02.02.2.02.0009)	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Obesitas pada 75 orang murid SLTA. Terlaksananya Workshop Kader dalam rangka Detekdi Dini PTM Tingkat Kabupaten untuk 25 orang kader Posbindu PTM selama 2 hari. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program ke Dinas Kesehatan Propinsi.	Belum seluruh penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Melakukan penanganan DM terkendali. Pada tahun 2025 penanganan DM terkendali baru mencapai 30,8%	Meningkatkan promosi kesehatan sehingga setiap orang dengan Diabetes Melitus dapat selalu memantau kesehatan secara teratur.
				2.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (1.02.02.2.02.0010)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya Sosialisasi Nagari Peduli Kesehatan Jiwa di 3 Nagari Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Caregiver dalam perawatan pasien shizofrenia pada 50 orang caregiver ODGJ. Terlaksananya bintek program ke 22 puskesmas	Belum tercapainya skrining penduduk usia lebih 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa.	Melakukan skrining kesehatan jiwa pada pasien penyakit kronis seperti pasien TB, Hipertensi, DM, Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				2.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (1.02.02.2.02.0011)	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar serta kegiatan monev program.	Terlaksananya kegiatan makan minum rapat dalam rangka validasi data TBC Puskesmas dan RS sebanyak 150 orang. Terlaksananya sosialisasi kolaborasi TB-HIV sebanyak 30 orang. Terlaksananya program TBC sebanyak 30 orang. Terlaksananya bimbingan teknis untuk petugas TB, labor dan dokter sebanyak 33 peserta. Terlaksananya bimbingan program / validasi data SiTB sebanyak 33 orang. Terlaksananya penyalangan kasus TB ke 22 puskesmas, RS dan klinik yang ada di wilayah Kab.Lima Puluh Kota yaitu ke Klinik Polres 50 Kota, Klinik Denzipur 2/PS, Klinik Setya Husada di Manggilang, Klinik Lapas Kelas III Suliki dan Klinik Lapas (LPKA) Tanjung Pati	Belum optimal kerjasama lintas program dan lintas sektor, penjangkaran kasus / suspek belum optimal oleh fasyankes dikarenakan kurangnya kegiatan penjangkaran ke lapangan dan kegiatan investigasi kontak. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program. Komitmen dalam pelaksanaan program masih kurang. Tugas ganda dan rotasi pemegang program.	
				2.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko	Jumlah orang terduga / berisiko menderita HIV	Terlaksananya medical check Up untuk pemeriksaan Viral Load / CD 4 dan PCR bagi	Belum optimalnya kerjasama lintas	Melakukan penyuluhan kepada anak

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Terinfeksi HIV (1.02.02.2.02.0012)	yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	pasien HIV atau anak dari pasien HIV sebanyak 3 orang di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pati, Halaban dan Batu Hampar Terlaksananya Sosialisasi HIV / AIDS Tingkat Kecamatan di Kecamatan Lareh Sago Halaban di Puskesmas Pakan Rabaa dan Kecamatan Mungka di Puskesmas Mungkadengan jumlah peserta 80 orang (40 orang / kecamatan) Terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS tingkat kabupaten sebanyak 66 orang yang terdiri dari petugad HIV, petugas Hepatitis dan pengelola program ibu / anak di puskesmas. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pendampingan pasien HIV ke RS Achmad Muchtar Bukittinggi.	program dan lintas sektor. Masih terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program. Peran komisi Penanggulangan AIDS belum dapat berjalan dengan maksimal.	sekolah / remaja dan masyarakat bekerjasama dengan program promkes. Mengusulkan anggaran, sarana dan prasarana pendukung untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit HIV / AIDS. Meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor. Mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
				2.13 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1.02.02.2.02.0015)	Kegiatan Upaya Gizi Masyarakat untuk memberikan pelayanan perbaikan gizi terhadap ibu hamil, ibu nifas, balita dan remaja putri. Menurunkan angka stunting Menaggulangi masalah gizi.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi PMT pada balita dan ibu hamil kurang gizi. Terlaksananya pertemuan edukasi konseling menyusui bagi PKK Terlaksananya evaluasi konsumsi tablet Fe pada remaja putri Terlaksananya pertemuan berkala gizi Terlaksananya pertemuan publikasi data stunting Terlaksananya jumlah balita		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							yang ditimbang sebanyak 15.962 balita dan jumlah balita stunting sebanyak 2.031 anak.		
				2.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (1.02.02.2.02.0016)	Pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja dan olahraga ke 22 puskesmas. Terlaksananya Tes Kebugaran bagi masyarakat di 2 wilayah kerja puskesmas sebanyak 200 orang. Terlaksananya Pertemuan Kesehatan Kerja dan Olahraga bagi petugas sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 60 orang.		
				2.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (1.02.02.2.02.0017)	Jumlah dokumen hasil penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan ke puskesmas Terlaksananya pembelian printer untuk kegiatan di seksi kesehatan lingkungan. Terlaksananya konsultasi dan rapat ke Dinas Kesehatan Propinsi. Terlaksananya sosialisasi, pertemuan dan evaluasi Kesehatan Lingkungan Tingkat Kabupaten.	Akses jamban hanya 84,46% TPP yang memenuhi syarat 53,7%, rumah sehat 56,36%, dibawah target renstra karena bertambahnya sasaran yang di data oleh sanitarian puskesmas.	Untuk tahun 2026 perlu penambahan SDM pelaksana di seksi Keslingkesjaor dan memaksimalkan peran FKS untuk pelaksanaan kegiatan forum
				2.16	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1.02.02.2.02.0018)	Jumlah media promosi yang dibuat dan gerakan pengendalian penyakit	Terlaksananya pengadaan acrylic wall frame dinding A2 sebanyak 15 buah. Terlaksananya pengadaan acrylic wall frame dinding A3 sebanyak 20 buah. Terlaksananya pengadaan acrylic wall frame dinding A4 sebanyak 20 buah.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Terlaksananya cetak spanduk untuk semua program. Terlaksananya cetak baliho. Terlaksananya cetak buku percakapan kader sebanyak 352 buah. Terlaksananya cetak buku pencatatan dan pelaporan sebanyak 360 buku. Terlaksananya cetak lembar balik media KIE untuk posyandu sebanyak 435 buah. Terlaksananya pemasangan ranning text sebanyak 2 buah. Terlaksananya advokasi pokjanal posyandu. Terlaksananya kegiatan aktifkan posyandu. Terlaksananya gerakan pengendalian penyakit. Terlaksananya rapat koordinasi pokjanal posyandu. Terlaksananya monev / pembinaan ke puskesmas dan kecamatan. Terlaksananya Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta Kebugaran Jasmani. Terlaksananya Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran jasmani.		
				2.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Penguatan program yankestrad seluruh pemegang program dan bida	Terlaksananya Pertemuan Penguatan Program Yankestrad terhadap penanggung jawab program di 22 puskesmas.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					(1.02.02.2.02.0019)	di 22 puskesmas.	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya ke 22 puskesmas.		
				2.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (1.02.02.2.02.0020)	Monitoring dan evaluasi kegiatan surveilans Hasil pengelolaan surveilans kesehatan (penyelidikan epidemiologi dan surveilans aktif) Menurunnya angka kesakitan penyakit menular Mencegah terjadinya KLB	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan KLB Terlaksananya pelacakan KLB Terlaksananya pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB / wabah Terlaksananya investigasi kasis KIPI serta PE penyakit menular. Terlaksananya pembinaan, supervisi dan bimbingan teknis program P2Mke puskesmas. Terlaksananya surveilans aktif penyakit menular ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.	Masih ada puskesmas yang belum mengirimkan sampel PD3I Ketepatan alert untuk kabupaten belum mencapai target	Diharapkan seluruh puskesmas melakukan promosi kesehatan untuk surveilans PD3I Diharapkan aplikasi SKDR dapat dilaksanakan di 22 puskesmas
				2.19	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (1.02.02.2.02.0021)	Penggalangan Kemitraan dalam upaya pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan penggalangan kemitraan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa pada 38 orang peserta. Terlaksananya rapat koordinasi dan bimbingan teknis tingkat kabupaten.		
				2.20	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (1.02.02.2.02.0022)	Penggerakan masyarakat dan upaya promosi kesehatan jiwa	Terlaksananya Pergerakan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan jiwa dan NAPZA bagi remaja tingkat kabupaten dengan peserta sebanyak 95 orang siswa di Hotel Mangkuto.	Belum tercapainya pelayanan kesehatan pada pasien depresi. Belum optimalnya	Melakukan skrining kesehatan jiwa pada pasien penyakit kronis seperti TB, Hipertensi, DM,

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Terlaksananya moneyv dan supervisi pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA ke 22 puskesmas.	pemanfaatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam rehabilitas pasien dengan penyalahgunaan NAPZA	Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, Meningkatkan promosi kesehatan sehingga masyarakat dapat memahami tentang pentingnya deteksi dini gangguan jiwa pada penduduk dengan risiko masalah kesehatan jiwa. Meningkatkan promosi kesehatan tentang penyalahgunaan NAPZA dan rehabilitasi pasien penyalahgunaan NAPZA di IPWL
				2.21	Sub Kegiatan Pengelolaan UpayaPengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (1.02.02.2.02.0024)	Meningkatnya persentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan pada kejadian krisis kesehatan.	Terlaksananya penanganan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan terhadap masyarakat	Karena terjadinya perubahan Perbup no.17 tahun 2025 terkait pembayaran uang saku, transport pada kegiatan	Agar dibuatkan SOP pencairan keuangan setiap tahunnya

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								sosialisasi , bimbingan teknis dan pelatihan apabila peserta ada yang ASN tidak boleh dibayarkan	
				2.22	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1.02.02.2.02.0025)	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar Menurunnya angka kesakitan penyakit menular Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular.	Terbentuknya kader kesehatan di jorong / nagari Terlaksananya monitoring dan evaluasi program ke puskesmas dan rumah sakit. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan rapat koordinasi lintas program. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program ke Dinas Kesehatan Propinsi. Terlaksananya fogging fokus untuk penanggulangan DBD ke 10 lokasi. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pendampingan program penyakit menular.	Dana DAK NF tidak dapat dilakukan perubahan dalamn penggunaan dana dan telah dikunci pelaksanaan sesuai juknis	Diharapkan untuk sumber dana DAK NF dapat dilakukan perubahan. Diharapkan untuk tahun diadakan kegiatan untuk pelayanan imunisasi
				2.23	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (1.02.02.2.02.0026)	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Terlaksananya belanja ATK,cetak untuk kegiatan program. Terlaksananya iuran tagihan dan bantuan PBPU dan PB kelas III tahap I dan II berjumlah 27.104.949.694	Masih terdapat kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran jamkesda murni Rp. 10.546.200 dan bantuan iuran kelas 3 aktif sebanyak Rp. 202.246.306	Dianggarkan untuk tahun 2026 dibutuhkan tambahan anggaran untuk kekurangan pembayaran bantuan iuran jamkesda murni dan bantuan iuran kelas 3 aktif yang belum terbayarkan tahun 2026.

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									Dan tambahan mencapai UHC 98,6%
				2.24	Sub Kegiatan Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (1.02.02.2.02.0027)	Kampanye anti narkoba dan pemeriksaan NAPZA di	Terlaksananya Kampanye Anti Narkoba serta pemeriksaan NAPZA di sekolah dengan peserta 120 orang siswa SMP di dua SLTP.	Belum maksimal pelaksanaan Kampanye Anti Narkoba bagi remaja.	Meningkatkan skrining NAPZA disekolah/
				2.25	Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KBL ke Laboratorium Rujukan / Nasional (1.02.02.2.02.0028)	Pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi PD3I ke puskesmas Terlaksananya pengiriman spesimen penyakit KLB ke laboratorium rujukan	DAK NF tidak dapat dilakukan perubahan dalam penggunaan dana dan telah di kunci pelaksanaan sesuai juknis	Diharapkan pada sumber dana DAK NF dapat dilakukan perubahan.
				2.26	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat (1.02.02.2.02.0029)	Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Terlaksananya belanja BBM operasional Forum Kabupaten Sehat (FKS). Terlaksananya belanja ATK Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) di 13 kecamatan dan pokja nagari sehat. Terlaksananya Pembinaan Forum Kabupaten Sehat (FKS) di 13 kecamatan. Terlaksananya Pertemuan Pembina Kabuapten Sehatn dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Terlaksananya Pertemuan Fokal Point KKS dengan jumlah peserta 11 orang. Terlasananya Pertemuan FKS dalam rangka persiapan penilaian Kabupaten Sehat		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							tahun 2025 (Pengumpulan data, entri data ke aplikasi swastisaba)		
				2.27	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (1.02.02.2.02.0033)	Dokumen hasil Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya pengadaan ATK Yankes Primer. Terlaksananya pembelian BBM operasional yankes primer. Terlaksananya rapat tim kredensialing tenaga kesehatan. Terlaksananya rapat Peningkatan Koordinasi Jejaring FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Terlaksananya piket P3K Nataru awal tahun 2025. Terlaksananya Orientasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di 13 puskesmas untuk petugas puskesmas. Terlaksananya Pertemuan Verifikasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP). Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Labor bagi Petugas Puskesmas.. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program ke puskesmas. Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perkesmas bagi Petugas Puskesmas. Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Gigi dan Mulut Bagi Petugas Puskesmas.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat Bagi Petugas Puskesmas. Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Laporan Kunjungan Bagi Petugas Puskesmas. Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi ILP. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Operasional bidang Yankes. Terlaksananya perjalanan dinas mengikuti pertemuan, rapat, konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi. Terlaksananya perjalanan dinas supervisi, monev dan pembinaan yankes primer ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Terlaksananya pendampingan dan pemantauan evaluasi ILP di puskesmas. Terlaksananya belanja modal 1 unit komputer.		
				2.28	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.0035)	Penguatan mutu dan re-akreditasi di 22 puskesmas Belanja pengadaan personal komputer	Terlaksananya Penguatan Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, evaluasi re akreditasi yang sesuai standard an mengutamakan keselamatan pasien. Terlaksananya pembinaan dan	Tidak terlaksananya belanja pengadaan personal komputer disebabkan karena unit yang di inputkan sesuai	

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							evaluasi mutu pelayanan kesehatan dan perencanaan perbaikan strategis (PPS) di fasilitas kesehatan tingkat pertama .	spesifikasi di Aplikasi SIPD sudah tidak tersedia lagi.	
				2.29	Sub Kegiatan Investasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (1.02.02.2.02.0036)	Penanganan KIPi	Terlaksananya Sosialisasi KIPi Terlaksananya pelayanan terhadap kasus Terlaksananya monitoring dan evaluasi program ke puskesmas. Penanggulangan kasus KIPi dianggarkan sebanyak 6 kasus ternyata kejadian di tahun 2025 hanya 4 kasus		
				2.30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1.02.02.2.02.0037)	Meningkatnya persentase cakupan puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging	Terlaksananya respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini KLB untuk mencegah terjadinya KLB di puskesmas.		
				2.31	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (1.02.02.2.02.0038)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Ketersediaan, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya bimbingan teknis (Pelatihan PSC 119) dengan jumlah peserta 73 orang. Terlaksananya belanja alat kantor dan rumah tangga untuk kegiatan di gedung PSC 119		
				2.32	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (1.02.02.2.02.0046)	Pendampingan tim ahli ke puskesmas Pemeriksaan SHK	Terlaksananya pendampingan Tim Ahli (Spesialis Kebidanan dan Spesial Anak) ke FKTP lainnya dalam pelayanan KIA,		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Pengiriman sample SHK Penkajian kasus kematian ibu dan anak	Kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal dan neonatal ke Puskesmas Terlaksananya pengiriman sampel SHK. Terlaksananya pertemuan pengkajian kasus kematian ibu dan anak. Terlaksananya pertemuan analisa dan verifikasi data .		
				3.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (1.02.02.2.03)				
				3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (1.02.02.2.03.0002)	Jumlah pertemuan, monitoring dan evaluasi kegiatan, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan computer dan laptop, akses point, kabel UTP mikrotik.	Terlaksananya belanja ATK untuk kegiatan Terlaksananya belanka 1 unit computer simpus Terlaksananya belanja laptop untuk kegiatan Terlaksananya belanja 1 unit mikrotik Terlaksananya belanja 6 unit akses point Terlaksananya belanja 1 bok kabel UTP Terlaksananya rapat sosialisasi permenkes no.6 tahun 2024 dan penetapan SPM tahun 2025 dengan peserta 65 orang. Terlaksananya pertemuan verifikasi data profil tahun 2025 dengan jumlah peserta 100 orang. Terlaksananya pertemuan penyamaan persepsi tentang pengadaan barang dan jasa		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							dengan jumlah peserta 100 orang Terlaksananya rapat evaluasi capaian SPM TW II tahun 2025 dengan jumlah peserta 80 orang Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi Rekam Medik Elektronik (RME) e-pusk dengan jumlah peserta 100 orang Terlaksananya rapat evaluasi capaian SPM TW III tahun 2025 dengan jumlah peserta 65 orang Terlaksananya sosialisasi penyusunan usulan kegiatan lima tahunan puskesmas dengan jumlah peserta 85 orang Terlaksananya rapat evaluasi capaian SPM TW IV dengan jumlah peserta 80 orang Terlaksananya rapat pembinaan pelaporan RKO dan ketersediaan obat dengan jumlah peserta 57 orang		
				4.	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.04)				
				4.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program dengan rumah sakit. Terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan dan		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (1.02.02.2.04.0001)	dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya.	pendampingan ke puskesmas, rumah sakit dan OPD terkait. Terlaksananya makan minum rapat evaluasi rujukan dengan jumlah peserta 75 orang. Terlaksananya visitasi ke rumah sakit. Terlaksananya penyusunan dokumen lingkungan hidup (DELH) RSUD dr.Achmad Darwis.		
				4.2	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1.02.02.2.04.0003)	Penguatan FKTP melalui pemantauan mutu dan re akreditasi ke 22 puskesmas .	Terlaksananya penguatan mutu fasilitas tingkat petama (FKTP) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standard an mengutamakan keselamatan pasien. Terlaksananya visitasi ke rumah sakit. Terlaksananya pembinaan dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan di FKTP		
				III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (1.02.03)				
				1.	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten / Kota (1.02.03.2.01)				
				1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (1.02.03.2.01.0001)	Tersedianya anggaran untuk bahan cetak	Terlaksananya belanja ATK untuk kegiatan program. Terlaksananya kegiatan pengendalian perizinan tenaga kesehatan.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota (1.02.03.2.02)				
				1.1 Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1.02.03.2.02.0001)	Tersedianya anggaran untuk bahan cetak dan ATK	Terlaksananya pengadaan pembelian ATK untuk kegiatan. Terlaksananya bahan cetak untuk kegiatan. Terlaksananya bimbingan teknis.		
				1.2 Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (1.02.03.2.02.0002)	Tersedianya anggaran untuk belanja jasa tenaga, belanja modal dan konsultasi program	Terlaksananya belanja pembelian BBM operasional kegiatan. Terlaksananya belanja makan minum tamu. Terlaksananya belanja pengadaan 1 paket CCTV . Terlaksananya belanja jasa tenaga administrasi 2 orang. Terlaksananya belanja pembelian 1 unit AC. Terlaksananya belanja pembelian 1 unit AC aula. Terlaksananya belanja 1 buah dispenser di ruang kepala dinas. Terlaksananya belanja 1 unit meja rapat. Terlaksananya belanja 1 unit tablet kepala dinas. Terlaksananya belanja 3 unit printer.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Tingkat Kabupaten / Kota (1.02.03.2.03)				
				3.1 Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten / Kota (1.02.03.2.03.0001)	Dokumen pertemuan sertifikat dan pelatihan	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa dengan jumlah peserta 26 orang. Terlaksananya Pelatihan Konseling menyusui dengan jumlah peserta 25 orang. Terlaksananya Pelatihan Ante Natal Care, Persalinan, Nifas dan SHK dengan jumlah peserta 30 orang. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan bagi Kader Posyandu dengan jumlah peserta 30 orang. Terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dengan jumlah peserta 54 orang. Terlaksananya belanja ATK. Terlaksananya belanja cetak.		
				IV. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (1.02.04)				

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (1.02.04.2.01)				
				1.1 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tidak Lanjut Pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (1.02.04.2.01.0001)	Meningkatnya pengawasan fasilitas kefarmasian	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap apotek dan toko obat sebanyak 55 apotek dan took obat. Terlaksananya bimbingan teknis perizinan dan pengelolaan obat di apotek dan took obat terhadap pengelola sarana kefarmasian sebanyak 70 orang.		
				2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P - IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Indutri Rumah Tangga (1.02.04.2.03)				
				2.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P - IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri	Meningkatnya pengawasan pangan di tengah masyarakat.	Terlaksananya rapat koordinasi tentang kaji ulang Industri Rumah Tangga Pangan. Terlaksananya survey pemenuhan perizinan industri rumah tangga pangan dalam rangka penerbitan SPP – IRT sebanyak 70 sarana. Terlaksananya kegiatan pertemuan sertifikat penyuluhan keamanan pangan		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Rumah Tangga (1.02.04.2.03.0001)		untuk pengusaha industry rumah tangga pangan sebanyak 70 pengusaha.		
				3.	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (1.02.04.2.06)				
				3.1	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan (1.02.04.2.06.0001)	Meningkatnya pengawasan pangan di tengah masyarakat	Terlaksananya rapat koordinasi tentang inventarisasi dan monitoring serta tindak lanjut sarana industri rumah tangga pangan. Terlaksananya pemeriksaan sampel pangan sebanyak 31 sampel. Terlaksananya pengawasan iklan sebanyak 12 iklan pangan olahan. Terlaksananya rapat tindak lanjut hasil pengujian dan desk CAPA (Correction Action dan Preventiv Action) untuk pengusaha IRT-P sebanyak 1 kali. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan sebanyak 50 sarana IRT-P. Terlaksananya bimbingan teknis penilaian mandiri cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) untuk 70		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							pengusaha industri rumah tangga pangan		
				V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KEEHATAN (1.02.05)				
				1.	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.05.2.01)				
				1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (1.02.05.2.01.0001)	Penyediaan jamboree kader.	Terlaksananya kegiatan jamboree kader. Terlaksananya pertemuan petugas promkes sebanya 2 kali pertemuan. Terlaksananya monev kegiatan ke 22 puskesmas.		
				2.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.05.2.02)				
				2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (1.02.05.2.02.0001)	Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Terlaksananya monev pola hidup sehat ke 22 puskesmas. Terlaksananya peningkatan kapasitas kader. Terlaksananya jumlah puskesmas yang melaksanakan pendatan PHBS.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				2.2	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1.02.05.2.02.0002)	Gebyar kader dasawisma, penguatan posyandu UKBM	Terlaksananya gebyar kader dasawisma. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader Dasawisma. Terlaksananya bimbingan teknis dalam rangka penguatan posyandu, UKBM dan integritas layanan primer.		
				VI.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (1.02.02)				
				1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (2.01)				
				1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (1.02.02.2.02.0001)	Penyediaan media KIE untuk posyandu, monitoring dan evaluasi program.	Terlaksananya kelas ibu hamil. Terlaksananya pendataan dan pemetaan sebaran ibu hamil perjorong secara berkala. Terlaksananya validasi data ibu hamil setiap bulan. Terlaksananya kelas ibu balita.		
				1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (1.02.02.2.02.0005)	Pertemuan peningkatan kapasitas petugas	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan anak sekolah. Terlaksananya cek kesehatan gratis. Terlaksananya pembinaan dokter kecil.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (1.02.02.2.02.0007)	jumlah kegiatan pemantauan usia lanjut (skrining) lansia sesuai standar	Terlaksananya kunjungan lansia ke posyandu dan posbindu.		
				1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (1.02.02.2.02.0010)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya kunjungan rumah terhadap orang dengan gangguan jiwa berat. Terlaksananya pendampingan makan obat.		
				1.5	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (1.02.02.2.02.0011)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya kegiatan ketuk pintu ke pasien yang terduga tuberkulosis. Terlaksananya penjangkaran suspek tuberkulosis. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi mengenai TB dengan lintas sektor dan kader.		
				1.6	Sub Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat (1.02.02.2.02.0015)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk balita. Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil.		
				1.7	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (1.02.02.2.02.0016)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Terlaksananya tes kebugaran Terlaksananya penyuluhan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan melibatkan lintas sektor.		
				1.8	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (1.02.02.2.02.0017)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan lingkungan Terlaksananya kegiatan pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi standar		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							sanitasi. Terlaksananya kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).		
				1.9	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (1.02.02.2.02.0020)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Terlaksananya pelacakan pasien terduga kasus penyakit menular.		
				1.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (1.02.02.2.02.0020)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan masalah jiwa (ODMK)	Terlaksananya skrining ke rumah orang dengan masalah kejiwaan. Terlaksananya skrining pelayanan di klaster 2 dan 3.		
				1.11	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1.02.02.2.02.0025)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	Terlaksananya edukasi kepada masyarakat tentang skring penyakit tidak menular (PTM) Terlaksananya edukasi kepada masyarakat tentang skring penyakit menular.		
				1.12	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (1.02.02.2.02.0033)	Dokumen hasil operasional pelayanan puskesmas.	Terlaksananya pembayaran Sistem Komputerisasi Terintegrasi (Simpus) Terlaksananya penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas. Terlaksananya lokmin lintas sektor dan lokmin bulanan puskesmas.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1.13	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (1.02.02.2.02.0036)	Penanganan kasus KIPI.	Terlaksananya pemantauan dan pendampingan kasusu KIPI		
				1.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria (1.02.02.2.02.0042)	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan malaria sesuai standar	Terlaksananya survei pengendalian vektor malaria. Terlaksananya pemeriksaan darah massal malaria		
				1.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (1.02.02.2.02.0044)	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya pemeriksaan tes / skrining Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).		
				1.16	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (1.02.02.2.02.0046)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.	Terlaksananya pemasangan kontrasepsi.		
				1.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan (1.02.02.2.02.0047)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya pelayanan kelanjutan minimal 1 kali setahun. Terlaksananya entry data SIGIZI KESGA		
				1.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi (1.02.02.2.02.0048)	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Terlaksananya edukasi kepada orang tua tentang manfaat imunisasi kepada anaknya. Terlaksananya pelayanan imunisasi kepada bayi.		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				VII.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (1.02.05)				
				1.	Kegiatan pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.05.2.03)				
				1.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (1.02.05.2.03.01)	Jumlah pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sesuai standar	Terlaksananya pelatihan kader agar lebih aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Terlaksananya penyuluhan ke kelompok rentan (penyandang disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak)		

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan antara lain:

1. Kurang SDM pelaksana untuk kegiatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan
2. Kurangnya anggaran untuk beberapa indikator program Kesehatan Lingkungan.
3. Terjadinya perubahan Perbup No.17 tahun 2025 terkait pembayaran uang saku, uang transport pada kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan apabila pesertanya ASN tidak boleh di bayarkan.
4. Beberapa kegiatan yang bersumber DAK NF dibutuhkan sumber dana lain untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada di juknis DAK NF.
5. Tidak ada sub kegiatan yang menjadi sumber dana seperti pelayanan imunisasi.
6. Masih ditemukan beberapa puskesmas belum mengirimkan sampel campak dan AFP dan campak.

Adapun Solusi yang diharapkan adalah:

1. Penambahan SDM untuk pelaksana kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
2. Usulan penambahamn dana untuk seluruh indikator program Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Olahraga.
3. Agar dilakukan sosiaisasi terhadap setiap regulasi terbaru sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
4. Anggaran yang bersumber DAK NF dapat dilakukan perubahan seperti anggaran DAU.
5. Mengakomodir kegiatan yang tidak masuk ke juknis DAK NF.
6. Melakukan penjaringamn suspek campak dan AFP.

3.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total anggaran sebesar Rp28.826.300.204 dan realisasi keuangan Rp23.663.251.044 atau 82,09%.

3.1.1.3.1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan OPD utama pelaksana urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dengan melaksanakan 9 Program, 14 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana

APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
01.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.826.300.204	23.663.251.044
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.680.881.804	9.180.840.607
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000	6.629.000
1.03.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	1.860.000
1.03.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.769.000
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.293.663.739	8.834.725.408
1.03.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.293.663.739	8.834.725.408
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.091.815	148.373.596
1.03.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000	2.100.000
1.03.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.900.000	8.676.028
1.03.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.992.000
1.03.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	21.908.900
1.03.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.040.000
1.03.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	1.702.000
1.03.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.091.815	77.954.668
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.300.000	87.840.803
1.03.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	68.223.803
1.03.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.300.000	19.617.000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.626.250	103.271.800

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.03.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.700.000	56.663.800
1.03.01.2.09.00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	43.826.250	43.508.000
1.03.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.000	3.100.000
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.017.000.000	1.015.817.278
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.017.000.000	1.015.817.278
1.03.02.2.01.00 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	669.323.000	668.886.625
1.03.02.2.01.00 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	185.000.000	185.000.000
1.03.02.2.01.00 35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	162.677.000	161.930.653
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.553.000.000	102.352.986
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.553.000.000	102.352.986
1.03.03.2.01.00 28	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.553.000.000	102.352.986
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	50.000.000	49.691.000
1.03.04.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.691.000
1.03.04.2.01.00 15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	50.000.000	49.691.000
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	906.000.000	883.561.798
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	906.000.000	883.561.798
1.03.05.2.01.00 22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	906.000.000	883.561.798
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.440.820.560	1.779.361.752
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.440.820.560	1.779.361.752
1.03.08.2.01.00 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.240.820.560	1.599.392.252
1.03.08.2.01.00 23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	200.000.000	179.969.500

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.678.597.840	10.516.837.017
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12.678.597.840	10.516.837.017
1.03.10.2.01.00 32	Pembangunan Jalan	1.500.000.000	1.500.000.000
1.03.10.2.01.00 33	Rekonstruksi Jalan	5.774.128.975	5.642.078.112
1.03.10.2.01.00 40	Pembangunan Jembatan	2.219.580.680	450.662.905
1.03.10.2.01.00 46	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.184.888.185	2.924.096.000
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	135.000.000	134.788.606
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	115.229.000	115.023.606
1.03.11.2.01.00 10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	112.849.000	112.728.606
1.03.11.2.01.00 11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	2.380.000	2.295.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	19.771.000	19.765.000
1.03.11.2.04.00 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	19.771.000	19.765.000
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	365.000.000	364.510.243
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	365.000.000	364.510.243
1.03.12.2.01.00 06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	365.000.000	364.510.243

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.200.000 dan realisasi keuangan Rp1.860.000 atau 84,55% serta relisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah

dokumen Renstra dan Renja yang tersusun, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen perencanaan untuk tahun yang akan datang.

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000 dan realisasi keuangan Rp4.769.000 atau 95,387% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd, dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.293.663.739 dan realisasi keuangan Rp8.834.725.408 atau 95,06% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, dengan capaian kinerja berupa tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000 dan realisasi keuangan Rp2.100.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.900.000 dan realisasi keuangan Rp8.676.028 atau 97,48% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000 dan realisasi keuangan Rp24.992.000 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.000.000 dan realisasi keuangan Rp21.908.900 atau 99,59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.

- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.000.000 dan realisasi keuangan Rp11.040.000 atau 92% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.
- f. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000 dan realisasi keuangan Rp1.702.000 atau 85,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.
- g. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.091.815 dan realisasi keuangan Rp77.954.668 atau 98,56% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000 dan realisasi keuangan Rp68.223.803 atau 90,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.300.000 dan realisasi keuangan Rp19.617.000 atau 92,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.700.000 dan realisasi keuangan Rp56.663.800 atau 66,12% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- b. Sub kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan perizinan alat besar dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.826.250 dan realisasi keuangan Rp43.508.000 atau 99,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.100.000 dan realisasi keuangan Rp3.100.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp669.323.000 dan realisasi keuangan Rp668.886.625 atau 99,93% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi, dengan capaian kinerja berupa persentase jaringan irigasi yang terkelola.
- b. Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp185.000.000 dan realisasi keuangan Rp185.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara, dengan capaian kinerja berupa persentase jaringan irigasi yang terkelola.
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp162.677.000 dan realisasi keuangan Rp161.930.653 atau 99,54% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun dengan capaian kinerja berupa persentase jaringan irigasi yang terkelola.

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.553.000.000 dan realisasi keuangan Rp102.352.986 atau 6,59% serta realisasi fisik mencapai 12%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum.

IV. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000 dan realisasi keuangan Rp49.691.000 atau 99,38% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan yang disusun, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya jumlah sampah yang terkelola.

V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp906.500.000 dan realisasi keuangan Rp883.561.798 atau 97,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala Permukiman yang dibangun, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman).

VI. Program Penataan Bangunan Gedung

1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- a. Sub kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.440.820.560 dan realisasi keuangan Rp 1.599.392.252 atau 71,38 % serta realisasi fisik mencapai 72,29% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota, dengan capaian kinerja berupa berupa meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung dalam kondisi baik.
- b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000 dan realisasi keuangan Rp179.969.500 atau 89,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti

Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung dalam kondisi baik.

VII. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pembangunan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000 dan realisasi keuangan Rp1.500.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah panjang jalan yang dibangun dengan capaian kinerja berupa meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
- b. Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.774.128.975 dan realisasi keuangan Rp5.642.078.112 atau 97,71% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah panjang jalan yang direkonstruksi, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
- c. Sub kegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.219.580.680 dan realisasi keuangan Rp450.662.905 atau 20,30% serta realisasi fisik mencapai 25%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah jembatan yang terbangun, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
- d. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.184.888.185 dan realisasi keuangan Rp2.924.096.000 atau 91,81% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah panjang jalan yang terpelihara, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

VIII. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- a. Sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.849.000 dan realisasi keuangan Rp112.728.606 atau 99,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang difasilitasi sertifikasi, dengan capaian kinerja meningkatnya jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat).
- b. Sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.380.000 dan realisasi keuangan Rp2.295.000 atau 96,43% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah lembaga

jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya, dengan capaian kinerja meningkatnya jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)

2. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.771.000 dan realisasi keuangan Rp19.765.000 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah adanya pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi kabupaten/kota, dengan capaian kinerja persentase monitoring dan evaluasi kegiatan jasa konstruksi (%).

IX. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp365.000.000 dan realisasi keuangan Rp364.510.243 atau 99,87% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota, dengan capaian kinerja jumlah perbup RDTR yang ditetapkan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	96 orang		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket		
				Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan		
				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	30 Unit		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	11 Unit	11 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0.333 KM	0.333 KM		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0.25 KM	0.25 KM		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa				
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5 liter/detik	0 liter/detik		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengeleloaan Persampahan	1 dokumen	1 dokumen		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	22.5 M³/Hari	22.5 M³/Hari		
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
				Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen		
				Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250 Dokumen	75 Dokumen		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	1 KM	5,25 Km		
				Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	2,5 KM	1,956 Km		
				Sub. Kegiatan Pembangunan Jembatan	1 Jembatan	1 Jembatan		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	40 KM	93,5 KM		
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	60 Orang	52 Orang		
				Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	1 Lembaga	1 Lembaga		
				Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				
				Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	10 Paket Pekerjaan	10 Paket Pekerjaan		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 dokumen		

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah:

1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, dimana kegiatan Pembangunan SPAM Nagari Sungai Kamunyang tidak terlaksana karena secara teknis tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di tahun 2026.
2. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dimana Penyusunan Dokumen UKL-UPL Sekolah Rakyat, Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat, dan Pematangan Lahan Sekolah Rakyat tidak terlaksana. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Sekolah Rakyat tidak terlaksana karena luas lahan sekolah rakyat 10 Hektar dan dilakukan dengan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat tidak terlaksana karena site plan dari sekolah rakyat belum di terima dari kementerian sampai akhir tahun. Pematangan lahan tidak terlaksana karena secara teknis tidak bisa dilaksanakan karena waktu pengerjaan yang sangat pendek. Untuk semua kegiatan yang tidak terlaksana akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, dimana Lanjutan Pembangunan Jembatan Lubuak Nago dan Pembayaran Pekerjaan melewati TA. 2024 Pembangunan Jembatan Lubuak Nago tidak terlaksana. Lanjutan Pembangunan Jembatan Lubuak Nago tidak terlaksana karena secara teknis tidak bisa dilakukan karena waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembayaran Pekerjaan melewati TA. 2024 Pembangunan Jembatan Lubuak Nago tidak terlaksana karena Kontraktor tidak melakukan pengurusan pencairan pekerjaan yang melewati tahun. Untuk lanjutan pembangunan jembatan Lubuak Nago akan dilaksanakan di tahun 2026.

3.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp766.353.200 dan realisasi keuangan Rp737.696.792 atau 96,26%.

3.1.1.4.1. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan wajib pelayanan dasar bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melaksanakan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi pada APBD 2025 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman	766.353.200	737.696.792
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	185.690.700	158.101.192
1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	185.690.700	158.101.192
1.04.02.2.03.04	Sub Kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana	185.690.700	158.101.192
1.04.03	Program kawasan permukiman	580.662.500	579.595.600
1.04.03.2.03	Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	580.662.500	579.595.600
1.04.03.2.03.02	Sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni	580.662.500	579.595.600

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut: **Program Pengembangan Perumahan**

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp185.690.700 dan realisasi Rp158.101.192 atau 85,14% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya rumah bagi korban bencana dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan rumah bagi Masyarakat korban bencana sebanyak 2 (dua) Unit.

I. Program Kawasan Permukiman

2. Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan alokasi anggaran sebesar Rp580.662.500 dan realisasi keuangan Rp579.575.600 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan/rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 9 (Sembilan) unit.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman	Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan pemukiman		Program Pengembangan Perumahan				
				Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota				
			Jumlah rumah bagi korban bencana	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	3 unit	2 unit		Agar menjadi prioritas penganggaran pada tahun tahun mendatang karena merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pelayanan dasar
				Program Kawasan Permukiman				
				Kegiatan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha				
			-	Sub Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni	68 KK	9 unit		Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan Program Strategis Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah

D. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian realisasi seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman mencapai lebih dari 96,39% dan realisasi fisik 100%. Dari kondisi ini, secara umum pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2025 tidak menghadapi kendala yang berarti.

3.1.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp22.634.147.617 dan realisasi keuangan Rp21.711.035.489 atau 95,92%.

3.1.1.5.1. Dinas Pemadam Kebakaran

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat dengan melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 25 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	8.589.485.997	8.467.862.357
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.974.702.072	5.892.451.066
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.639.677.972	5.567.424.792
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.627.677.972	5.555.429.792
1.05.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	6.997.000
1.05.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.998.000
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.817.100	80.603.245
1.05.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	20.030.000	20.027.920

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.800.000	17.775.000
1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.187.100	19.179.000
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.800.000	13.621.325
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.207.000	156.858.207
1.05.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.107.000	3.100.000
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.700.000	58.908.131
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.400.000	94.850.076
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.000.000	87.564.822
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	79.579.822
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.985.000
01:05:04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.614.783925	2.575.411.291
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	834.114.990	833,761.983
1.05.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.173.994	274.100.000
1.05.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.500.000	1.460.000
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Kota/Kab	500.000	445.000
1.05.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	521.502.864	521.144.483
1.05.04.2.01.0007	Sub Kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran	36.949.200	36.612.500
1.05.04.2.0	Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
1.05.04.2.03.0001	Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	28.814.900	28.265.000
1.05.04.2.03	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
1.05.04.2.03.0001	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	4.700.000	4.685.000
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.744.917.967	1.707.154.308
1.05.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.728.472.467	1.690.754.308
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran	16.445.500	16.400.000
1.05.04.2.05	Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1.725.000	1.545.000
1.05.04.2.05.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	1.725.000	1.545.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp5627.677.972 dan realisasi Keuangan Rp5.555.429.792 atau 98,72% serta realisasi Fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun dan Pembayaran Tunjangan kinerja PNS, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi Gaji dan Tunjangan ASN serta pembayaran honor bendahara penerimaan, pengeluaran, dan honor pengurus barang.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.000.000 dan realisasi Keuangan Rp6.977.000 atau 99,96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah laporan dan dokumen keuangan akhir tahun yang diselesaikan, dengan capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan dan dokumen keuangan akhir tahun yang diselesaikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama 1 tahun seperti Laporan LPPD, LKPj, LKJIP, Lap. Keuangan Akhir Tahun 2025, Laporan Aset Tahun 2025.
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000 dan realisasi keuangan Rp4.998.000 atau 99,96% serta realisasi Fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi dan capaian kinerja SKPD, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi serta Laporan Pada Semester pertama pada tahun 2025 dalam kebutuhan prognosis 2025 dan capaian kinerja SKPD dinas pemadam kebakaran selama 1 tahun.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.030.000 dan realisasi keuangan Rp20.027.920 atau 99,99% serta realisasi fisik 100%, keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah alat-alat listrik dan jaringan instalasi listrik kantor/posko utama dan posko

pembantu, dengan capaian kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah alat-alat listrik dan jaringan instalasi listrik kantor/posko utama dan posko pembantu.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.800.000 dan realisasi keuangan Rp17.775.000 atau 100% serta realisasi fisik 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan posko-posko Dinas Pemadam kebakaran.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran sebesar Rp19.187.100 dan realisasi keuangan Rp19.179.000 atau 99,96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adalah terlaksananya foto copy, alat tulis kantor serta tersedianya makan rapat dan tamu untuk administrasi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama 1 Tahun, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya Kebutuhan dalam permintaan dokumen, serta kunjungan dari OPD lain.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realisasi keuangan Rp10.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan yang sudah dicetak atau sudah diperbanyak serta Penggandaan SPK, SK serta dokumen Lainnya yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama 1 tahun.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp13.800.000 dan realisasi keuangan Rp13.621.325 atau 98,71% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Pemecahan masalah masalah yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya Jumlah orang yang mengikuti rapat rapat keLuar daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.107.000 dan realisasi Keuangan Rp3.100.000 atau 99,77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah surat masuk dan surat keluar serta tindak lanjut urusan yang ada pada dinas Pemadam kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar Rp67.700.000 dan realisasi keuangan Rp58.908.131 atau 87,01% realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kebutuhan Wajib yang menunjang Kantor Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan serta Posko Pembantu yang ada, dengan capaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitas kerja aparatur Dinas Pemadam Kebakaran.

- c. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp95.400.000 dan realisasi keuangan Rp94.850.076 atau 99,42% dan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembayaran Jasa atau upah pada Tenaga Kontrak Outsourcing yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk penunjang kinerja dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Pemenuhan pembayaran segala Honorarium yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama Tahun 2025.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000 dan realisasi keuangan Rp79.579.822 atau 99,47%, serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terbayarnya kendaraan Operasional yang ada pada posko posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kendaraan jabatan, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase Perawatan dan retribusi pajak kendaraan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.000.000 dan realisasi keuangan Rp7.985.000 atau 99,81% serta realisasi fisik 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselesaikannya Kendala kendala ataupun rusak ringan yang ada Pada Peralatan dan mesin lainnya yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya Perbaikan - perbaikan alat dan peralatan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran.

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp274.173.994 dan realisasi keuangan Rp274.100.000 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terealisasinya 1 Tahun Pembayaran jasa Gaji Pasukan Dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase periode pemenuhan capaian personil pmadam dalam tanggap respon time dalam pelayanan bencana kebakaran dan bencana Non Kebakaran.

- b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000 dan realisasi keuangan Rp1.460.000 atau 97,33% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran baik itu Manusia, Harta Benda, akibat dampak terjadinya bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase capaian kesiapsiagaan personil dalam penanganan, pencegahan dan penyelamatan kejadian.
- c. Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000 dan realisasi keuangan Rp445.000 atau 89,00% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya data Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah persentase penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam kabupaten/kota.
- d. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan alokasi anggaran sebesar Rp521.502.864 dan realisasi keuangan Rp521.144.483 atau 99,93% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Rehabilitasi Posko Pembantu damkar serta Penambahan Posko Pembantu Baru di Kecamatan Akabiluru serta untuk Penunjang kinerja Damkar Ke Masyarakat, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase dalam pemeliharaan dan perbaikan dalam penilaian sarana dan proteksi kebakaran.
- e. Sub kegiatan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.949.200 dan realisasi Rp36.612.500 atau 99,09% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.814.900 dan realisasi keuangan Rp28.265.000 atau 98,09% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya data Penelitian dan Hasil Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase investigasi kejadian kebakaran di kabupaten / kota.

3. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran

- a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.700.000 dan realisasi keuangan Rp4.685.000 atau 99,68% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya data Penelitian dan Pengujian

Penyebab Kejadian Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase investigasi kejadian kebakaran di kabupaten/ kota.

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.744.917.967 dan realisasi keuangan Rp1.707.154.308 atau 97,84% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, sekolah, kelompok, pelaku usaha (UMKM) Tentang Penanggulangan bahaya Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah presentase sosialisasi dan Simulasi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan pada sub kegiatan ini dananya berasal dari DAU yang diarahakan yang diatur pada peraturan Menteri keuangan.
- b. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.445.500 dan realisasi keuangan Rp16.400.000 atau 99,72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terbentuknya dan Terbinanya Relawan Kebakaran di tiap-tiap nagari yang ada di Kabupaten.

5. Kegiatan Penyelenggaran Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mngancam keselamatan manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.725.000 dan realisasi keuangan Rp1.545.000 atau 89,57% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Meningkatkan Pelayananan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dibawah Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Dinas Pemadam Kebakaran	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	69 orang/bulan		
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	9 Paket		
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	9 Paket		
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9 Paket	9 Paket		
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14 Paket	14 Paket		

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	5 paket		
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan		
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	21 Unit		
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit		
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran				
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan		

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	500 Dokumen	500 Dokumen		
				Kegiatan Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran				
				Sub kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran				
				Sub kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
				Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	500 Orang	500 Orang		
				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	1 Laporan		

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan penyelamatan. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.1.5.2. Satuan Polisi Pamong Praja

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD utama/pendukung pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.333.657.330	7.129.194.614
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.004.336.476	5.839.031.862
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.860.000	8.858.000
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.860.000	8.858.000
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.816.187.276	5.165.466.679
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.811.093.276	5.652.423.783
1.05.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.094.000	5.042.000
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.994.000	4.991.000
1.05.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.994.000	4.991.000
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.365.200	52.311.000
1.05.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000
1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.598.000	14.598.000
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.277.200	7.277.100
1.05.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.990.000	3.990.000
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	24.945.900
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.100.000	9.593.379
1.05.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000	8.993.379
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0

1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.830.000	105.812.700
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.850.000	102.832.700
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.980.000	2.980.000
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.329.320.854	1.290.162.752
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	1.253.245.654	1.230.237.752
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	21.680.000	19.257.208
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.935.000	3.908.192
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.035.665.096	1.021.266.952
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	27.452.258	23.605.000
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	106.625.400	106.625.000
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	28.902.800	28.900.000
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	13.985.100	11.675.400
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	61.902.600	46.090.000
1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	19.831.300	16.604.000
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	37.071.300	25.060.000
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	5.000.000	4.390.000
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	14.172.600	13.835.000
1.05.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.800.000	5.660.000
1.05.02.2.03.0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	8.372.600	8.175.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan dengan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan capaian kinerja berupa:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.860.000 dan realisasi keuangan Rp8.858.000 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa jumlah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Kinerja 20%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp5.811.093.276 dan realisasi keuangan Rp5.652.423.783 atau 97,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa Persentase tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 20%.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp5.094.000 dan realisasi keuangan Rp5.042.000 atau 98,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan capaian kinerja berupa jumlah Persentase tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 20%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp4.994.000 dan realisasi keuangan Rp4.991.000 atau 99,94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dengan Target Kinerja 20%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.500.000 dan realisasi keuangan Rp1.500.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase peningkatan Administrasi Umum dengan Target Kinerja dengan Target Kinerja 20%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp14.598.000 dan realisasi keuangan Rp14.598.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik

Kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Administrasi Umum dengan Target Kinerja 20%.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp7.277.200 dan realisasi keuangan Rp7.277.100 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Administrasi Umum dengan Target Kinerja 20%.
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp3.990.000 dan realisasi keuangan Rp3.990.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Administrasi Umum dengan Target Kinerja 20%.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp25.000.000 dan realisasi keuangan Rp24.945.900 atau 99,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Administrasi Umum dengan Target Kinerja 20%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp600.000 dan realisasi keuangan Rp600.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan Target Kinerja 12 Laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp11.500.000 dan realisasi keuangan Rp8.993.379 atau 78,20% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Jumlah Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan Target Kinerja 12 Laporan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp0 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan dengan Target Kinerja 12 Laporan

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp106.850.000 dan realisasi keuangan Rp102.832.700 atau 96,24% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Kinerja 20%.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp2.980.000 dan realisasi keuangan Rp2.980.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan Target Kinerja 20%.

II. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp21.680.000 dan realisasi keuangan Rp19.257.208 atau 88,82% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%
- b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp3.935.000 dan realisasi keuangan Rp3.908.192 atau 99,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja berupa Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.035.665.096 dan realisasi keuangan Rp1.021.266.952 atau 98,61% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran

dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dengan capaian kinerja berupa Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%.

- d. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp27.452.258 dan realisasi keuangan Rp23.605.000 atau 85,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan dengan capaian kinerja berupa Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%.
- e. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp106.625.400 dan realisasi keuangan Rp106.625.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dengan capaian kinerja berupa Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%
- f. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp28.902.800 dan realisasi keuangan Rp28.900.000 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%.
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp13.985.100 dan realisasi keuangan Rp11.675.400 atau 83,48% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani Jumlah pemberian pelayanan dasar kepada Warga Layanan yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani dengan capaian kinerja berupa Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%
- h. Sub Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp15.000.000 dan realisasi keuangan Rp15.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban

Umum yang tersedia dengan capaian kinerja berupa Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%.

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp19.831.300 dan realisasi keuangan Rp16.640.000 atau 83,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian kinerja berupa Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda dengan Target Kinerja 77%.
- b. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp37.071.300 dan realisasi keuangan Rp25.060.000 atau 67,60% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP dengan capaian kinerja berupa Persentase penurunan kasus pelanggaran PERDA dengan Target Kinerja 77%.
- c. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp5.000.000 dan realisasi keuangan Rp4.390.000 atau 87,80% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian kinerja berupa Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda dengan Target Kinerja 77%.

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp5.800.000 dan realisasi keuangan Rp5.660.000 atau 97,59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.
- b. Sub Kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp8.372.600 dan realisasi keuangan Rp8.175.000 atau 97,64% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda.

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Urusan Pemerintahan Bidangn Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	Tidak ada masalah	
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	Tidak ada masalah	
				b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Tidak ada masalah	
				3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

				a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak ada masalah	
				4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	Tidak ada masalah	
				b. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	4 Paket	4 Paket	Tidak ada masalah	
				c. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	5 Paket	Tidak ada masalah	
				d. Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada masalah	
				e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	Tidak ada masalah	
				5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada masalah	
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada masalah	

				c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	36 Laporan	Tidak ada masalah	
				6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	9 Unit	Tidak ada masalah	
				b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	Tidak ada masalah	
				II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30 Dokumen	Tidak ada masalah	
				b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 Dokumen	30 Dokumen	Tidak ada masalah	
				c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	136 Orang	136 Orang	Tidak ada masalah	

				d. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada masalah	
				e. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	22 Laporan	22 Laporan	Tidak ada masalah	
				f. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	31 Laporan	31 Laporan	Tidak ada masalah	
				g. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	30 Laporan	30 Laporan	Tidak ada masalah	
				h. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 Unit	10 Unit	Tidak ada masalah	
				2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota				
				a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	27 Laporan	27 Laporan	Tidak ada masalah	
				b. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada masalah	
				c. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	20 Laporan	20 Laporan	Tidak ada masalah	

				3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Tidak ada masalah	
				b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada masalah	

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan atau Fisik Kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%) dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.1.5.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

A. Program dan Sub Kegiatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp6.711.004.290 terealisasi sebesar Rp. 6.113.978.518 dengan tingkat keberhasilan fisik 100% dan keuangan 91,10 % pada dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.711.004.290	6.113.978.518
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.929.894.566	4.443.313.852
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.928.000	33.895.046
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.928.000	33.895.046
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.492.151.366	4.017.719.787
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.463.116.366	3.997.289.787
1.05.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.035.000	20.430.000
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.477.700	177.640.100
1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.587.000	65.651.100
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.028.700	24.945.500
1.05.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.340.000	1.323.000
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.522.000	85.720.500
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.080.000	105.389.043
1.05.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000
.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.080.000	68.449.047

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	35.940.000
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.257.500	108.669.872
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.467.500	98.929.628
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.790.000	9.740.244
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	1.781.109.724	1.670.664.666
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	350.000.000	341.591.400
1.05.03.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	350.000.000	341.591.400
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.397.649.724	1.296.593.266
1.05.03.2.02.0013	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	4.840.000	4.785.000
1.05.03.2.02.0026	Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	222.764.900	202.267.534
1.05.03.2.02.0027	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	245.787.300
1.05.03.2.02.0028	Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	870.044.824	843.753.432
1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	14.395.000	13.450.000
1.05.03.2.03.0009	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.395.000	13.450.000
1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	19.065.000	19.030.000
1.05.03.2.04.0010	Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	19.065.000	19.065.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.928.000 dan realisasi keuangan Rp33.895.046 atau 99,90% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dihasilkan dengan capaian kinerja berupa 6 Dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.463.116.366 dan realisasi keuangan Rp3.997.289.787 atau 89,56% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa 14 bulan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.035.000 dan realisasi keuangan Rp20.430.000 atau 70,36% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bulan Honorarium Bendahara dan Bendahara Barang yang dihasilkan dengan capaian kinerja berupa 12 bulan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.587.000 dan realisasi keuangan Rp65.651.100 atau 98,59% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah stok bulanan Bahan Logistik Kantor yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.028.700 dan realisasi keuangan Rp24.945.500 atau 99,67% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Item barang cetak dan jumlah lembar pengandaan yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 5 Item.
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.340.000 dan realisasi keuangan Rp1.323.000 atau 98,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Porsi Makan Minum tamu yang di beli dengan capaian kinerja berupa 100 porsi.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.522.000 dan realisasi keuangan Rp85.720.500 atau 99,07% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat keluar daerah dalam provinsi dan luar provinsi yang diikuti dengan capaian kinerja berupa 100 Kali.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja berupa 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp72.080.000 dan realisasi keuangan Rp68.449.047 atau

94,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja berupa 12 bulan.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.000.000 dan realisasi keuangan Rp35.940.000 atau 99,83% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah bulan Honor THL, Jumlah THL yg dibayarkan premi asuransinya dengan capaian kinerja berupa 12 bulan

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp105.467.500 dan realisasi keuangan Rp98.929.628 atau 93,80% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Unit pemeliharaan dan pajak kendaraan yang dibayarkan dengan capaian kinerja berupa 9 Unit.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.790.000 dan realisasi keuangan Rp9.740.244 atau 99,49% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah periode pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja berupa 12 bulan.

II. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan Pelayanan

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000 dan realisasi keuangan Rp341.591.400 atau 97,60% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dihasilkan dengan capaian kinerja berupa 1 Dokumen.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.840.000 dan realisasi keuangan Rp4.785.000 atau 98,86% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dihasilkan dengan capaian kinerja berupa 1 Dokumen.
- b. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp222.764.900 dan realisasi keuangan Rp202.267.534 atau 90,80% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. jumlah periode kegiatan penanganan bencana alam dengan capaian kinerja berupa 12 bulan.

- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000 dan realisasi keuangan Rp245.787.300 atau 81,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dihasilkan dengan capaian kinerja berupa 1 Dokumen.
- d. Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp870.044.824 dan realisasi keuangan Rp843.753.432 atau 96,98% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah periode kegiatan penanganan bencana alam dengan capaian kinerja berupa 12 bulan.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp124.782.000 dan realisasi keuangan Rp124.602.849 atau 99,89% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah perbaikan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana yang dilakukan dengan capaian kinerja berupa 1 Paket

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.065.000 dan realisasi keuangan Rp19.065.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dihasilkan dengan capaian kinerja berupa 1 Dokumen.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Urusan Wajib		I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen		
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		
					2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
					Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan		
					3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Item	5 Item		
					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Porsi	100 Porsi		
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	100 Kali	100 Kali		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
				5.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	
				6.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	
				II.		Program Penanggulangan Bencana			

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan Pelayanan	100%	100%		
					Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2.	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%		
					Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan		
					Sub Kegiatan Pelatihan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan		
					Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJ AKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN			TARGET	REALISASI	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					2.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%		
						Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket		
					3.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%		
						Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terdapat masalah yang berarti. Alokasi Anggaran dan realisasi keuangan/ fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp6.958.325.001 dan realisasi keuangan Rp6.767.321.997 atau 97,26%.

3.1.1.6.1. Dinas Sosial

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dengan melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS SOSIAL	6.958.325.001	6.767.321.997
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.012.013.291	3.921.102.778
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.223.100	13.946.700
1.06.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.214.100	8.211.900
1.06.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.009.000	5.734.800
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.819.214.791	3.734.401.933
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.819.214.791	3.734.401.933
1.06.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.256.000	2.246.000
1.06.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.256.000	2.246.000
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.959.400	51.508.039
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	12.476.000	12.476.000

	Kantor		
1.06.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.079.400	8.079.200
1.06.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.965.000	4.723.430
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.939.000	24.729.409
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.970.000	3.970.000
1.06.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.970.000	3.970.000
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.500.000	22.549.326
1.06.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	22.049.326
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.890.000	92.480.780
1.06.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.600.000	87.690.780
1.06.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.290.000	4.790.000
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	2.593.113.689	2.514.649.781
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	704.154.499	685.492.749
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	11.422.067	11.221.200
1.06.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	10.570.000	10.300.516
1.06.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	50.201.000	44.606.988
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	71.000.000	68.075.443
1.06.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	553.692.432	544.236.602
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	7.269.000	7.052.000
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.888.959.190	1.829.157.032
1.06.04.2.02.0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	471.104.288	449.846.873
1.06.04.2.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1.292.854.902	1.264.749.309
1.06.04.2.02.0010	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	125.000.000	114.560.850
1.06.06	Program Penanganan Bencana	310.216.921	292.427.028
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	310.216.921	292.427.028
1.06.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	221.427.221	213.731.769
1.06.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	75.289.700	73.870.259
1.06.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.500.000	4.825.000
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	42.981.100	39.142.410
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.981.100	39.142.410
1.06.07.2.01.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.981.100	39.142.410

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.214.100 dan realisasi keuangan Rp8.211.900 atau 99,97% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa 2 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.009.000 dan realisasi keuangan Rp5.734.800 atau 95,44% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja berupa 15 laporan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.819.214.791 dan realisasi keuangan Rp3.734.401.933 atau 97,78 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa 37 orang/bulan.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.256.000 dan realisasi keuangan Rp2.246.000 atau 99,56% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa 2 laporan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000 dan realisasi keuangan Rp1.500.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa 12 paket.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.476.000 dan realisasi keuangan Rp12.476.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 12 paket.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.079.400 dan realisasi keuangan Rp8.079.200 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa 12 paket.
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.965.000 dan realisasi keuangan Rp4.723.430 atau 95,13% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.939.000 dan realisasi keuangan Rp24.729.409 atau 99,16% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa 10 laporan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.970.000 dan realisasi keuangan Rp3.970.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 2 unit.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000 dan realisasi keuangan Rp500.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000 dan realisasi keuangan Rp22.049.326 atau 88,20% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp88.600.000 dan realisasi keuangan Rp87.690.780 atau 98,97% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian kinerja berupa 5 unit.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.290.000 dan realisasi keuangan Rp4.790.000 atau 76,15% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan capaian kinerja berupa 9 unit.

II. Program Rehabilitasi Sosial

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.422.067 dan realisasi keuangan Rp11.221.200 atau 98,24% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan permakanan bagi Anak terlantar, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis dengan capaian kinerja berupa 10 orang.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.570.000 dan realisasi keuangan Rp10.300.516 atau 97,45% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan sandang bagi Lanjut Usia terlantar, Anak terlantar, Penyandang Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis dengan capaian kinerja berupa 8 orang.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.201.000 dan realisasi keuangan Rp44.606.988 atau 88,86% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bantuan alat bantu bagi Lanjut Usia terlantar, anak terlantar, dan Penyandang Disabilitas dengan capaian kinerja berupa 40 orang dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Disabilitas dengan capaian kinerja berupa 3 orang
- d. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp71.000.000 dan realisasi keuangan Rp68.075.443 atau 95,88% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia dengan capaian kinerja berupa 12 orang.
- e. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp553.692.432 dan realisasi keuangan Rp544.236.602 atau 98,29% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini

adalah jumlah bantuan permakanan bagi Lanjut Usia terlantar dan lansia potensial dengan capaian kinerja berupa 595 orang.

- f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.269.000 dan realisasi keuangan Rp7.052.000 atau 97,01% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah advokasi dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, dan jumlah Lanju Usia terlantar, Anak terlantar, Penyandang Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 78 Orang.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

- a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp471.104.288 dan realisasi keuangan Rp449.846.873 atau 95,49 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). dengan capaian kinerja berupa 39 Orang. Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 32.974 Orang. Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan capaian kinerja berupa 3 kegiatan. Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Orang Terlantar dengan capaian kinerja berupa 8 Orang. Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dukungan Spikososial dengan capaian kinerja berupa 94 Orang. Jumlah Sosialisasi untuk Korban Bencana dengan capaian kinerja berupa 2 Kegiatan.
- b. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.292.854.902 dan realisasi keuangan Rp1.264.749.309 atau 97,83% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin dengan capaian kinerja berupa 192 Orang. Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dengan capaian kinerja berupa 13 Orang. Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dengan capaian kinerja berupa 80 Orang dan Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 251.846 Orang.
- c. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000 dan realisasi keuangan Rp114.560.850 atau 91,65 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah panti yang dibina dengan capaian kinerja berupa 12 Panti. Jumlah Sosialisasi LKKS dengan capaian kinerja berupa 1 kali. Jumlah Study Tiru LKKS

dengan capaian kinerja berupa 1 Kali dan Jumlah Pertemuan PSM dan TKSK dengan capaian kinerja berupa 1 Kali.

III. Program Penanganan Bencana

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp221.427.221 dan realisasi keuangan Rp213.731.769 atau 96,52% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana dengan capaian kinerja berupa 272 orang.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.289.700 dan realisasi keuangan Rp73.870.259 atau 98,11% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Sandang untuk korban bencana dengan capaian kinerja berupa 41 orang.
- c. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.500.000 dan realisasi keuangan Rp4.825.000 atau 35,74% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan yaitu Mayat terlarat dengan capaian kinerja 2 mayat terlantar.

IV. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.981.100 dan realisasi keuangan Rp39.142.410 atau 91,07% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Peringatan Hari Pahlawan 10 November dan Rehab Tugu Makam Pahlawan Situjuh Gadang dengan capaian kinerja berupa 1 kali peringatan dan 1 Rehab Makam.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS SOSIAL	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		
				b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan		
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan		
				3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
				4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket		
				c. Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		
				e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan		

NO	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit		
				6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit		
				b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit		
				II. Program Rehabilitasi Sosial				
				1. Kegiatan rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Bantuan Permakanan 10 orang untuk: - Anak Terlantar 6 orang - Disabilitas Terlantar 2 Orang - Gelandangan dan	Bantuan Permakanan 10 orang untuk: - Anak Terlantar 6 orang - Disabilitas Terlantar 2 Orang - Gelandangan dan		

NO	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Pengemis 2 Orang	Pengemis 2 Orang		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Bantuan Sandang 8 orang untuk: - Lansia Terlantar 2 Orang - Anak Terlantar 2 Orang - Penyandang Disabilitas 2 Orang - Gelandangan dan Pengemis 2 orang	Bantuan Sandang 8 orang untuk: - Lansia Terlantar 2 Orang - Anak Terlantar 2 Orang - Penyandang Disabilitas 2 Orang - Gelandangan dan Pengemis 2 orang		
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Bantuan Alat Bantu 40 orang untuk: - Lanjut Usia Terlantar 29 Orang - Disabilitas Terlantar 10 Orang - Anak Terlantar 1 orang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia 3 Orang	Bantuan Alat Bantu 40 orang untuk: - Lanjut Usia Terlantar 29 Orang - Disabilitas Terlantar 10 Orang - Anak Terlantar 1 orang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia 3 Orang		
				d. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Lanjut Usia 12 Orang	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Lanjut Usia 12 Orang		
				e. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lansia Potensial 595 orang	Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lansia Potensial 595 orang		

NO	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Advokasi dan Pendampingan anak Berhadapan Dengan Hukum 50 Orang Layanan Rujukan untuk: - Lanjut Usia 2 Orang - Anak Terlantar 15 Orang - Penyandang Disabilitas 6 Orang - Gelandangan dan Pengemis 2 Orang	Advokasi dan Pendampingan anak Berhadapan Dengan Hukum 53 Orang Layanan Rujukan untuk: - Lanjut Usia 2 Orang - Anak Terlantar 15 Orang - Penyandang Disabilitas 6 Orang - Gelandangan dan Pengemis 2 Orang		
				2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
				a. Sub Kegiatan Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	- Bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP) bagi Wanuta Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 39 Orang - KPM yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga 32.974 Keluarga - Rapat Koordinasi dan Evaluasi PKH 2 Kegiatan - Penanganan Orang terlantar 7 Orang - Layanan dukungan Psikososial 50 Orang	- Bantuan Usaha Ekonomi Produkti (UEP) bagi Wanuta Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 39 Orang - KPM yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga 32.974 Keluarga - Rapat Koordinasi dan Evaluasi PKH 2 Kegiatan - Penanganan Orang terlantar 8 Orang - Layanan dukungan Psikososial 94 Orang		

NO	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					- Sosialisasi untuk korban bencana 1 Kegiatan	- Sosialisasi untuk korban bencana 2 Kegiatan.		
				b. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin 192 Orang - Peningkatan Sumber Daya Manusia TSKS 13 orang - Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM 80 orang - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten 251.846 orang	- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin 192 Orang - Peningkatan Sumber Daya Manusia TSKS 13 orang - Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM 80 orang - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten 251.846 orang		
				c. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Pembinaan Panti 12 Panti - Sosialisasi LKKS 1 Kali - Study Tiru LKKS 1 kali - Pertemuan PSM dan TSKS 1 Kali	- Pembinaan Panti 12 Panti - Sosialisasi LKKS 1 Kali - Study Tiru LKKS 1 kali - Pertemuan PSM dan TSKS 1 Kali		
				III. Program Penanganan Bencana				
				1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	204 Orang Permakanan untuk Korban Bencana	272 Orang Permakanan untuk Korban Bencana		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	41 Orang Sandang Untuk Korban Bencana	41 Orang Sandang Untuk Korban		

NO	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Bencana		
				c. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4 Mayat terlantar	2 Mayat terlantar		
				IV. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
				1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Kali Peringatan Hari 10 November dan 1 kali Rehab Tugu Makam Pahlawan Situjuh Gadang	1 Kali Peringatan Hari 10 November dan 1 kali Rehab Tugu Makam Pahlawan Situjuh Gadang		

D. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana. Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar 35.74 %, hal ini disebabkan penambahan anggaran untuk mayat terlantar sebanyak 2 orang pada anggaran perubahan karena pada DPA Awal untuk mayat terlantar di targetkan 2 orang dan telah terealisasi sebanyak 2 orang pada awal tahun (Mayat Bayi terlantar di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak dan mayat ODGJ terlantar di Jorong Piladang Kecamatan Akabiluru).

Beberapa solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana Kota, kegiatan ini akan terlaksana apa bila ada mayat terlantar pada tahun 2025.

3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 urusan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp88.901.936.134 dan realisasi keuangan Rp80.378.835.699 atau 95,62%. Rincian OPD pelaksana urusan berikut anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024

No	Urusan dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	88.901.936.134	80.378.835.699	90,41
2.1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2 381 098 068	2 083 973 949	87,52
1	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2 381 098 068	2 083 973 949	87,52
2.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.761.816.958	3.097.256.818	82,33
1	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.761.816.958	3.097.256.818	82,33
2.3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.060.552.729	2.938.876.977	96,02
1	Dinas Pangan	3.060.552.729	2.938.876.977	96,02

No	Urusan dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.4	URUSAN PERTANAHAN	0	0	0
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	0	0
2.5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.532.024.857	7.183.573.664	95,37
1	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	7.532.024.857	7.183.573.664	95,37
2.6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.229.762.031	4.947.510.653	94,60
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.229.762.031	4.947.510.653	94,60
2.7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.583.033.385	5.530.035.354	97,67
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Nagari	5.357.870.634	5.233.082.288	97,67
2.8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.754.919.322	7.955.562.094	81,55
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.754.919.322	7.955.562.094	81,55
2.9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.786.462.349	14.942.086.814	94,65
1	Dinas Perhubungan	15.786.462.349	14.942.086.814	94,65
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.486.513.417	7.044.986.308	94,10
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.486.513.417	7.044.986.308	94,10
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.955.446.795	4.834.459.578	97,56
1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.955.446.795	4.834.459.578	97,56
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.053.802.030	4.005.348.110	98,80
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.053.802.030	4.005.348.110	98,80
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	10.310.211.788	7.915.342.651	76,77
1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	10.310.211.788	7.915.342.651	76,77
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK SEKTORAL	13.811.600	12.055.862	87,29
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.811.600	12.055.862	87,29
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	209.920.000	209.820.001	99,95
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	209.920.000	209.820.001	99,95
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.700.466.400	2.839.371.461	76,73
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.700.466.400	2.839.371.461	76,73
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.069.836.405	4.827.866.405	95,23
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.069.836.405	4.827.866.405	95,23
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	12.258.000	10.709.000	87,36

No	Urusan dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.258.000	10.709.000	87,36

3.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.381.098.068 dan realisasi keuangan Rp2.083.973.949 atau 87,52%.

3.1.2.1.1. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan. Dengan melaksanakan 2 Program, 2 Kegiatan dan 2 sub kegiatan Rincian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan urusan Tenaga Kerja. Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan,Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Alokasi Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2 381 098 068	2 083 973 949
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.379.908.168	2.082.784.049
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2.379.908.168	2.082.784.049
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	2.379.908.168	2.082.784.049
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.189.900	1.189.900
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.189.900	1.189.900
2.07.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.189.900	1.189.900

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan/sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Tenaga kerja adalah sebagai berikut:

I. Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- a. Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi pada Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.379.908.168 dan realisasi keuangan Rp2.082.784.049 atau 87,52% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 90,64%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan teknisi Sepeda motor, menjahit dan barber shop dengan capaian kinerja berupa jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan kompetensi pada tahun 2025.

II. Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Wilayah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.189.90 dan realisasi keuangan Rp1.189.90 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dengan telah dilatihnya pencari kerja sebanyak orang yang terdata dalam data P3KE Kabupaten lima Puluh Kota pada tahun 2025.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASLAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				
				Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	176 Orang	347 Orang		
				Program Penempatan Tenaga Kerja				
				Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	11 Orang	28 Orang		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp3.761.816.958 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.097.256.818 atau 82,33%.

3.1.2.2.1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi pada APBD 2025. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.761.816.958	3.097.256.818
02.08.02.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	624.102.000	575.160.192
2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	624.102.000	575.160.192
02.08.02.2.03.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	194.419.000	182.266.950
02.08.02.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	209.145.000	189.493.792

02.08.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	220.538.000	203.399.450
02.08.03.	Program Perlindungan Perempuan	189.609.878	112.344.748
02.08.03.2.01.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	129.869.878	76.548.200
02.08.03.2.01.01.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.185.878	12.405.000
02.08.03.2.01.02.	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.684.000	64.143.200
02.08.03.2.02.	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.140.000	16.502.548
02.08.03.2.02.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.140.000	16.502.548
02.08.03.2.03.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.600.000	19.294.000
02.08.03.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.600.000	19.294.000
02.08.04.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	175.898.000	136.508.880
02.08.04.2.01.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.898.000	136.508.880
02.08.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	175.898.000	136.508.880
02.08.06.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	420.003.200	210.983.168
02.08.06.2.01.	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	420.003.200	210.983.168
02.08.06.2.01.01.	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	420.003.200	210.983.168
02.08.07.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.352.203.880	2.062.259.830
02.08.07.2.01.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	302.512.800	158.338.500
02.08.07.2.01.04.	Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program/Kegiatan Pencegahan KTA	302.512.800	158.338.500
02.08.07.2.02.	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.010.271.080	1.880.281.330
02.08.07.2.02.07.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	2.010.271.080	1.880.281.330
02.08.07.2.03.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.420.000	23.640.000

02.08.07.2.03.06.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	39.420.000	23.640.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp194.419.000 dan realisasi keuangan Rp182.266.950 atau 93,75% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan dengan capaian kinerja berupa 10 lembaga.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp209.145.000 dan realisasi keuangan Rp189.493.792 atau 90,60% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas dengan capaian kinerja berupa 125 orang.
- c. Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.538.000 dan realisasi keuangan Rp203.399.450 atau 92,23% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kotayang tersedia dengan capaian kinerja berupa 10 dokumen.

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.185.878 dan realisasi keuangan Rp12.405.000 atau 25,22% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 50%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/Kota dengan capaian kinerja berupa 2 dokumen.
- b. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.684.000 dan realisasi keuangan Rp64.143.200 atau 79,50% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 95%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 19 perangkat daerah.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.140.000 dan realisasi keuangan Rp16.502.548 atau 54,75% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa 20 layanan.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.600.000 dan realisasi keuangan Rp19.294.000 atau 65,18% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 68,5%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan yang mendapat peningkatan kapasitas dengan capaian kinerja berupa 137 orang.

III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.898.000 dan realisasi keuangan Rp136.508.880 atau 77,61% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 85,71%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak dengan capaian kinerja berupa 11 dokumen.

IV. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota:

- a. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp420.003.200 dan realisasi keuangan Rp210.983.168 atau 50,23% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah organisasi pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha dengan capaian kinerja berupa 20 organisasi.

V. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA dengan alokasi anggaran sebesar Rp302.512.800 dan realisasi keuangan Rp158.338.500 atau 52,34% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 83,30%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan KTA dengan capaian kinerja berupa 125 orang.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.010.271.080 dan realisasi keuangan Rp1.880.281.330 atau 93,53% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah

jumlah AMPK yang mendapatkan pelayanan dengan capaian kinerja sebanyak 90 layanan.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.420.000 dan realisasi keuangan Rp23.640.000 atau 59,97% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 75%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK dengan capaian kinerja berupa 150 orang.

C. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET	REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMA-SALAHAN
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,95%		
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	80 %.	80%	
				-	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan keenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	10 lembaga	10 lembaga	
				-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	100 orang	125 orang	
				-	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	10 dokumen	10 dokumen	
				II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	100%	
				1.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,0029 %		
				-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	4 dokumen	2 dokumen	

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMA-SALAHAN
					Kabupaten/Kota	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/Kota				
				-	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 perangkat daerah	19 perangkat daerah		
				2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100 %	100%		
				-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 layanan	20 layanan		
				3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100 %	100 %		
				-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	137 orang		
				II I.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	70%	64,16%		

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMA-SALAHAN
				1.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	70 %	64,16%		
				-	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	12 dokum en	11 dokum en		
				I V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama	Madya		
				1	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	90%			
				-	Sub kegiatanAdvokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah organisasi pemerintah , Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 organis asi	20 organis asi		
				V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100 %	100%		
				1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,033%			
				-	Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan,/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/	150 orang	120 orang		

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMA-SALAHAN
						Program / Kegiatan Pencegahan KTA				
				2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100%	100%		
				-	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 layanan	90 layanan		
				3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga terlatih	100%	100%		
				-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Penyedia Perlindungan dan Penanganan AMPK tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	200 orang	150 orang		

D. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

- a. Permasalahan 1: Realisasi keuangan pada beberapa sub kegiatan rendah, hal ini disebabkan antara lain karena masih ada kebutuhan belanja kegiatan yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 tahun 2024 tentang Standar Anggaran Biaya (SAB) seperti pada kegiatan sosialisasi, biaya transportasi peserta tidak bisa dibayarkan untuk peserta yang ASN.
- b. Permasalahan 2: Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, realisasi keuangan rendah, hal ini disebabkan karena realisasi keuangan tergantung kepada jumlah korban kekerasan perempuan yang ditangani. Jika kasus yang ditangani tidak banyak maka serapan anggaran juga tidak banyak. Saat ini masih ada korban kekerasan perempuan yang masih takut atau pun malu untuk melaporkan kasusnya.

Beberapa solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut diatas adalah:

- c. Solusi dan saran terhadap permasalahan 1: Menyampaikan usulan Standar Anggaran Biaya (SAB), dan memindahkan sebagian anggaran uang transport kegiatan sosialisasi ke kegiatan yang lain pada APBD Perubahan
- d. Solusi dan saran terhadap permasalahan 2: (1) Meningkatkan kinerja layanan UPTD PPA, (2) Meningkatkan penjangkauan kasus ke lapangan / nagari, (3) Memudahkan akses pengaduan oleh masyarakat/korban seperti pengaduan bisa melalui SAPA 129.

3.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp3.060.552.729 dan realisasi keuangan Rp2.938.876.977 atau 96,02%.

3.1.2.3.1. Dinas Pangan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dinas Pangan Tahun merupakan OPD Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan melaksanakan 4 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Dinas Pangan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2.09.0.00.0.00.03	DINAS PANGAN	3.060.552.729	2.938.876.977
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.920.845.945	2.801.521.871
01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.381.994.245	2.277.361.159
01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.381.994.245	2.277.361.159
01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.459.700	134.606.600
01.2.06.0002	Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.336.000	65.198.000
01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.850.000	16.850.000
01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.993.700	9.993.600
01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	3.840.000
01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.780.000	38.725.000
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.460.000	70.544.504
01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	612.000
01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.710.000	4.932.504
01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000	65.000.000
01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.932.000	319.009.608
01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.000.000	134.404.608
01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	184.932.000	184.404.608
03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	104.084.584	102.178.106
03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	87.824.884	65.529.800
03.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	87.424.884	65.529.800
03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.215.000	2.215.000
03.2.02.0004	Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.215.000	2.215.000
03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	34.444.700	34.433.306
03.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1.800.000	1.790.000
03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	25.979.000	25.978.464

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
03.2.04.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita/Tahun	6.665.700	6.664.842
04.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	15.637.000	15.617.000
04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.637.000	15.637.000
04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.637.000	15.637.000
05.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	19.985.200	19.560.000
05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	19.985.200	19.560.000
05.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.820.000	1.820.000
05.2.01.0006	Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan	0	0
05.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.946.100	11.571.000
05.2.01.0009	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan	6.219.100	6.169.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi serta keluaran dan dengan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.381.994.245 dan realisasi keuangan Rp2.277.361.159 atau 95,61% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya penyediaan gaji, tunjangan ASN, Honorarium Pengelola Keuangan dan belanja iuran jaminan/asuransi bagi non ASN selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.336.000 dan realisasi keuangan Rp65.198.000 atau 94,03% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya belanja pembelian printer, laptop, kursi kerja dan kursi tamu diruangan pejabat.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.850.000 dan realisasi keuangan Rp16.850.000 atau 100% serta realisasi fisik

mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik, belanja perlengkapan dinas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya bahan logistik kantor selama 12 bulan.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.993.700 dan realisasi keuangan Rp9.993.600 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya biaya penggandaan, blanko kwitansi, buku lembaran disposisi, cetak map dinas dan biaya penjilidan selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.500.000 dan realisasi keuangan Rp3.840.000 atau 85,33% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman jamuan tamu selama 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu selama 12 bulan.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.780.000 dan realisasi keuangan Rp38.725.000 atau 99,86% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam kota, dalam provinsi dan luar provinsi selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd selama 12 bulan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran keuangan Rp750.000 dan realisasi keuangan Rp612.000 atau 81,60% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya belanja materai selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.710.000 dan realisasi keuangan Rp5.805.354 atau 86,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya belanja tagihan telepon dan tagihan listrik selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.000.000 dan realisasi keuangan Rp65.000.000 atau 98,48% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terbayarkannya honor Tenaga Harian Lepas (sopir, petugas keamanan dan tenaga administrasi) selama 12

Bulan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp141.000.000 dan realisasi keuangan Rp134.404.608 atau 95,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adalah Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas selama 1 tahun dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama 1 tahun.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp184.932.000 dan realisasi keuangan Rp184.404.608 atau 99,71% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adalah Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun.

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.824.884 dan realisasi keuangan Rp65.529.800 atau 74,96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adalah Terlaksananya Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 3 kali, pengadaan prasarana pendukung GPM seperti tenda, sound system, meja, kursi dan blower.

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.215.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.215.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan gudang pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.790.000 atau 99,44% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub

kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan dan penetapan target konsumsi perkapita/tahun

- b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.979.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp25.978.464 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan B2SA Goes To School pada 2 Sekolah Dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota

III. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.637.000 dan realisasi keuangan Rp15.637.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adalah Terlaksananya Kegiatan Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan tersedianya buku tentang kerentanan dan ketahanan pangan tingkat nagari yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

IV. Program Pengawasan dan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota pada Pengawasan dan Keamanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.820.000 dan realisasi keuangan Rp1.820.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota pada Pengawasan dan Keamanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp0 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adalah Tidak Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota pada Pengawasan dan Keamanan Pangan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota pada Pengawasan dan Keamanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar

Rp11.946.100 dan realisasi keuangan Rp11.571.000 atau 96,8% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Uji Rapid Test Kit Pangan Segar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pestisida Test Kit : 1 Paket
 - b. Natrium Benzoat Test Kit : 1 Paket
 - c. Rhodamin B Test Kit : 1 Paket
 - d. Methanyl Yellow Test Kit : 1 Paket
 - e. Boraks Test Kit : 1 Paket
 - f. Masker Medis : 2 Kotak
 - g. Sarung Tangan : 2 Kotak
 - h. Jas Labor : 2 pcs
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota pada Pengawasan dan Keamanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.219.100 dan realisasi keuangan Rp6.219.100 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota pada Pengawasan dan Keamanan Pangan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS PANGAN	Pemerintahan Bidang Pangan	Permendagri No 86 Tahun 2017	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	95,6%	NIHIL	NIHIL
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 paket	7 paket	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100%	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	NIHIL	NIHIL
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %\$	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik 12 bulan	Pembayaran rekening listrik 12 bulan	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor 4 orang THL	Honor 4 orang THL	NIHIL	NIHIL
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100%		

				Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- 3 unit kendaraan roda 4 6 unit kendaraan roda 2	- 3 unit kendaraan roda 4 6 unit kendaraan roda 2	NIHIL	NIHIL
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
				Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100 %	100 %		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- 3 kali GPM	- 3 kali GPM	NIHIL	NIHIL
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	- 92,47%	-		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Loka	- 20 KK	- 20 KK	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	- 90,9%	- 92,9%	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya lokal	- Terlaksananya Kegiatan B2SA Goest To School sebanyak 2 Kali	2 Kali	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	- 1 Laporan	- 1 Laporan	NIHIL	NIHIL

				Program Penanganan Kerawanan Pangan				
				Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %		
				Sub Kegiatan Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	- 1 Buku	- 1 Buku	NIHIL	NIHIL
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	-		
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- 100 %	- 87 %		
				Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	- 1 Laporan	- 1 Laporan	NIHIL	NIHIL
				Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	- 5 Izin Edar	- 2 Izin Edar	Perubahan Regulasi pada Tk. Badan Pangan Nasional, dimana Beras Varietas Lokal menjadi kewenangan Dinas Pangan Tk. Provinsi	Mengikuti Arahan dan Rujukan secara Vertikal
				Sub Kegiatan Penyediaan Saranan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- 1 Paket	- 1 Paket	NIHIL	NIHIL
				Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	- Terlaksananya Rapat Koordinasi sebanyak 2 Kali	- 2 Kali	NIHIL	NIHIL

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Pangan pada Dinas Pangan. Alokasi dana dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, secara umum realisasi fisik mencapai 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan.

3.1.2.4. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, tapi pada Tahun 2025 tidak ada alokasi anggaran untuk urusan pertanahan.

3.1.2.4.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Perangkat Daerah utama/pendukung pelaksana urusan Pertanahan, namun pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan ini.

3.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7.532.024.857 dan realisasi keuangan Rp7.183.573.664 atau 95,37%.

3.1.2.5.1. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan OPD utama pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan melaksanakan 7 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi pada APBD 2025 terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	7.532.024.857	7.183.573.664
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		4.437.241.239

	KABUPATEN/KOTA	4.754.264.462	
2.11.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.333.000	4.444.000
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.333.000	4.333.000
2 11 01 2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.345.484.365	4.040.112.647
2 11 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.345.484.365	4.040.112.647
2 11 01 2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.955.000	6.954.000
2 11 01 2.02 0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.955.000	6.954.000
2 11 01 2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	129.744.100	129.138.858
2 11 01 2.06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.342.000	12.342.000
2 11 01 2.06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.741.100	29.624.100
2 11 01 2.06 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.400.000	10.399.000
2 11 01 2.06 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.400.000	10.399.800
2 11 01 2.06 0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.575.000	7.483.000
2 11 01 2.06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.286.000	58.890.958
2 11 01 2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	79.723.822	78.556.749
2 11 01 2.08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000
2 11 01 2.08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.723.822	31.556.749
2 11 01 2.08 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000
2 11 01 2.08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	42.000.000
2 11 01 2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.024.175	178.145.085
2 11 01 2.09 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.100.000	118.993.910
2 11 01 2.09 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.924.175	59.151.175
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	109.969.000	109.919.000
2 11 02 2.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	109.969.000	109.919.000
2 11 02 2.01 0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	109.969.000	109.919.000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	134.745.988	134.617.789
2 11 03 2.01	KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	134.745.988	134.617.789

	KABUPATEN/KOTA		
2 11 03 2.01 0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	11.162.060	11.067.000
2 11 03 2.01 0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	14.619.000	14.589.000
2 11 03 2.01 0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	108.964.928	108.961.789
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	6.949.607	6.874.000
2 11 06 2.01	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA/KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.949.607	6.874.000
2 11 06 2.01 0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6.949.607	6.874.000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	606.234.600	594.161.310
2 11 08.2.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	606.234.600	594.161.310
2 11 08 2.01 02	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	600.000.000	587.938.310
2 11 08 2.01 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	6.234.600	6.223.000
2 11 10.2.01	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	7.814.000	7.807.000
2 11 10 2.01 02	KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	7.814.000	7.807.000
2 11 10 2.01 0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	7.814.000	7.807.000
2 11 11.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.155.694.000	1.155.256.534
2 11 11 2.01 02	Kegiatan Pengelolaan Sampah	1.155.694.000	1.155.256.534
2 11 11 2.01 0020	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.155.694.000	1.155.256.534

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.333.000 dan realisasi keuangan Rp4.330.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai berikut:
- Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 - Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
 - Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran.
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.
 - Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
 - Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah.
 - Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah/LKJIP.
 - Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi.
 - Laporan LKPI, LPPD dan EKPPD.
 - Laporan Periodik Monitoring Risiko Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.345.484.365 dan realisasi keuangan Rp4.040.112.647 atau 92,97% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN yang harus dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) ASN dan pembayaran Honorarium pengelola kegiatan OPD, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.955.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.954.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 (dua) laporan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.342.000 dan realisasi keuangan Rp12.342.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 (satu) paket, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya penerangan kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.741.100 dan realisasi keuangan Rp29.624.100 atau 99,61% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 (paket) dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Administrasi Perkantoran.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.400.500 dan realisasi keuangan Rp10.399.000 atau 99,61% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 1 (satu) paket, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.400.000 dan realisasi keuangan Rp10.399.800 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,99%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penggandaan dan pencetakan barang kantor sebanyak 1 (satu) paket, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Administrasi Perkantoran.
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.575.000 dan realisasi keuangan Rp7.483.000 atau 98,79% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adalah laporan penyediaan makanan dan minuman untuk tamu sebanyak 4 (empat) laporan, dengan capaian kinerja berupa terlayannya makan dan minum rapat dan tamu.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.286.000 dan realisasi keuangan Rp58.890.958 atau 99,33% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah, dengan capaian kinerja berupa terjalinnya hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Lainnya dan Pemerintah Pusat.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000 dan realisasi keuangan Rp2.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terkirimnya surat dan

dokumen administrasi perkantoran, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya komunikasi antar instansi dan umum.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.723.822 dan realisasi keuangan Rp31.556.749 atau 96,43% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tercapainya Jasa Telepon, Air, dan Listrik, dengan capaian kinerja berupa lancarnya kegiatan administrasi.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000 dan realisasi keuangan Rp3.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan capaian kinerja berupa lancarnya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp42.000.000 atau 100% serta realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor, salah satunya penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Kebersihan kantor (*cleaning service*).

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.100.000 dan realisasi keuangan Rp118.993.910 atau 99,91% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pajak kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja berupa lancarnya sarana dan prasarana aparatur.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.924.175 dan realisasi keuangan sebesar Rp59.151.175 atau 98,71% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 (satu) unit.

II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.969.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp109.919.000 atau 99,95%

serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten yang Disusun sebanyak 1 (satu) dokumen.

III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.162.060 dan realisasi keuangan Rp11.067.000 atau 99,15% dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan terhadap badan air, air permukaan, udara emisi dan udara ambien dengan sasaran kinerja kegiatan adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan, Pengendalian Emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.619.000 dan realisasi keuangan Rp14.589.000 atau 99,79% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan pendukung program kampung iklim di 1 (satu) lokasi dan tersedianya dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan pendukung program kampung iklim.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp108.964.928 dan realisasi keuangan Rp108.961.789 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen, dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen mutu lingkungan.

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.949.607 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.874.000 atau 98,91% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran dari sub

kegiatan ini adalah Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) badan usaha.

V. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Derah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000 dan realisasi keuangan Rp594.161.310 atau 97,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam rangka PPLH terutama dalam pengelolaan sampah, serta terlaksananya pendampingan pembinaan Gerakan peduli lingkungan hidup, dengan capaian kinerja berupa telah terlaksananya pendampingan Gerakan peduli lingkungan hidup.
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.234.600 dan realisasi keuangan Rp6.223.000 atau 99,81% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan sekolah adiwiyata di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa telah terlaksananya penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.

VI. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.814.000 dan realisasi keuangan Rp7.807.000 atau 99,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani sebanyak 12 (dua belas) pengaduan.

VII. Program Pengelolaan Sampah

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- a. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.155.694.000 dengan realisasi keuangan Rp1.155.256.534 atau 99,96%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ton.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni: 100%	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni: 100%	Keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyediaan rumah korban bencana dan/atau korban relokasi program pemerintah	Optimalisasi sumber dana lain untuk intervensi Rumah Tidak Layak Huni korban bencana alam/relokasi program seperti dana Baznas, Dana Desa, CSR, Perantau dan Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan perundang undangan
			Peningkatan kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan Akhir sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sampah: 68% Pengurangan Sampah: 28%	Pengelolaan Sampah: 6,23% Pengurangan Sampah: 18,57%	Tidak tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang representatif di Kabupaten Lima Puluh Kota akibat ditutupnya TPA Regional di Payakumbuh pada medio Desember 2023, selain itu belum maksimalnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Durencanaan dilakukan pengadaan alat pembakar/ incinerator berkapasitas 3 ton per hari untuk mengurangi beban pengelolaan sampah Kota Sarilamak yang berada pada angka 10 ton / hari
			Peningkatan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Terhadap Ketentuan Izin Lingkungan dan Perundang-	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/ Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh	Persentase ketaatan Penanggung jawa usaha terhadap ketentuan peraturan	Jumlah Usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan: 15 Jumlah usaha/kegiatan	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkugnan Hidup/ PPLH (1 orang yang tidak sebanding dengan jumlah usaha/kegiatan	

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			undangan lingkungan Hidup.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	penundang undangan lingkungan hidup Target: 100%	taat: 3 Jumlah usaha/kegiatan tidak taat: 12 Persentase ketaatan Penanggung jawa usaha:20%	(202 usaha/kegiatan) yang harus dibina dan diawasi hal ini berdampak kepada tidak maksimalnya pembinaan/pengawasan dalam rangka pemahaman penanggung jawab usaha/kegiatan dalam melaksana	
			Peningkatan Kualitas Lingkungnan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut	IKLH:	IKLH:	Tercapai, pemantauan kualitas lingkungan telah dilakukan secara periodic dan terjadwal ditunjang dengan telah beroperasinya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Peningkatan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Terhadap Ketentuan Izin Lingkungan dan Perundang-undangan lingkungan Hidup.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/ Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan Penanggung jawa usaha terhadap ketentuan peraturan penundang undangan lingkungan hidup Target: 100%	Jumlah Usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan: 15 Jumlah usaha/kegiatan taat: 3 Jumlah usaha/kegiatan tidak taat: 12 Persentase ketaatan Penanggung jawa usaha:20%	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungnan Hidup/ PPLH (1 orang PPLH) yang tidak sebanding dengan jumlah usaha/kegiatan (202 usaha/kegiatan) yang harus dibina dan diawasi hal ini berdampak kepada tidak maksimalnya pembinaan/pengawasan dalam rangka pemahaman	

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							penanggung jawab usaha/kegiatan dalam melaksana	
			Peningkatan Kualitas Lingkuangan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut	IKLH:	IKLH:	Tercapai, pemantauan kualitas lingkungan telah dilakukan secara periodic dan terjadwal ditunjang dengan telah beroperasinya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Peningkatan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Terhadap Ketentuan Izin Lingkungan dan Perundang-undangan lingkungan Hidup.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan Penanggung jawa usaha terhadap ketentuan peraturan penundang undangan lingkungan hidup Target: 100%	Jumlah Usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan: 15 Jumlah usaha/kegiatan taat: 3 Jumlah usaha/kegiatan tidak taat: 12 Persentase ketaatan Penanggung jawa usaha:20%	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkugnan Hidup/ PPLH (1 orang PPLH) yang tidak sebanding dengan jumlah usaha/kegiatan (202 usaha/kegiatan) yang harus dibina dan diawasi hal ini berdampak kepada tidak maksimalnya pembinaan/pengawa san dalam rangka pemahaman penanggung jawab usaha/kegiatan dalam melaksana	Pemenuhan/ Pengadaan formasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sesuai analisis beban kerja dan Peta Jabatan

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025, secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran, realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan urusan lingkungan hidup didukung dengan pendanaan yang cukup memadai dalam rangka pencapaian target daerah yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Satu catatan yang perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 adalah pengelolaan sampah yang belum maksimal. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang representatif di Kabupaten Lima Puluh Kota akibat ditutupnya TPA Regional di Payakumbuh pada medio Desember 2023. Hal ini diperparah dengan terbatasnya sarana prasarana pengelolaan dan pengurangan sampah seperti TPS, Bank Sampah, PDU, TPS 3R dan TPST. Menyikapi hal tersebut, dengan terpaksa pelayanan sampah dilakukan penyesuaian dengan focus di area perkotaan (*urban*) Kota Sarilamak. Harapannya pengelolaan sampah pada daerah penyangga (*sub urban dan rural*) dapat dilakukan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah.

3.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.229.762.031 dan realisasi keuangan Rp4.947.510.653 atau 94,60%.

3.1.2.6.1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan OPD utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 20 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.229.762.031	4.947.510.653
01.00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.387.412.331	4.185.614.677
01.02.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.371.550	5.366.000
01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.371.550	5.366.000
01.02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.866.867.625	3.672.557.267
01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.866.867.625	3.672.557.267
01.02.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.519.000	248.091.500
01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.520.000	3.520.000
01.2.06.02.	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	224.340.500	219.967.800
01.2.06.0005.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.033.000	9.002.000
01.2.06.08.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.632.500	1.626.100
01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.984.000	13.975.600
01.02.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.666.000	147.570.799
01.2.08.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.000.000
01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.966.000	55.430.799
01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.200.000	91.140.000
01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.997.156	112.029.111
01.2.09.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.917.156	104.949.111
01.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.080.000	7.080.000
02.00	Program Pendaftaran Penduduk	132.725.350	131.359.000
02.02.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	132.725.350	131.359.000
02.2.01.04.	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	132.725.350	131.359.000
03.00	Program Pencatatan Sipil	424.648.650	350.594.500
03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	84.150.050	84.070.000
03.2.01.0001.	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	84.150.050	84.070.000
03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	8.540.000	8.490.000
03.2.2.0001.	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	8.540.000	8.490.000
03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	331.958.600	258.034.500
03.2.03.0004	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	331.958.600	258.034.500

04.00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	252.550.700	249.017.476
04.02.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	252.550.700	249.017.476
04.2.01.0001.	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	252.550.700	249.017.476
05.00	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32.425.000	30.925.000
05.02.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	32.425.000	30.925.000
05.2.01.0002.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	32.425.000	30.925.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.371.550 dan realisasi keuangan sebesar Rp5.366.000 atau 99,90% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun dengan capaian kinerja berupa Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.866.867.625 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.672.557.267 atau 94,97% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dan jumlah non ASN yang mendapatkan iuran jaminan/asuransi dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.520.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.520.000 atau 100% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.740.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp23.736.500 atau 99,98% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah

jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.033.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp9.002.000 atau 99,66% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.632.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.626.100 atau 99,61% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.984.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp13.975.600 atau 99,94% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.000.000 atau 66,67% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah buku cek dan materai yang dibayarkan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.966.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp55.430.799 atau 99,04% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan, Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan dan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp91.200.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp91.140.000 atau 99,93% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.917.156 dan realisasi keuangan sebesar Rp104.949.111 atau 98,16% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan roda dua yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya, Jumlah kendaraan roda empat yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya dan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.080.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp7.080.000 atau 100% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp132.725.350 dan realisasi keuangan sebesar Rp131.359.000 atau 98,97% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah KK yang diterbitkan, Jumlah KTP-el yang diterbitkan dan Jumlah Penerbitan KIA dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk

III. Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting, dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.150.050 dan realisasi keuangan sebesar Rp84.070.000 atau 99,90% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perkawinan dan Perceraian dengan capaian Kinerja Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan

dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.540.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp8.490.000 atau 99,41% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perkawinan dan Perceraian dengan capaian Kinerja Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp331.958.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp258.034.500 atau 77,73% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perkawinan dan Perceraian dengan capaian Kinerja Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil.

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian

Database Kependudukan

- a. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp252.550.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp249.017.476 atau 98,60% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengelolaan database kependudukan, tersedianya buku data agregat, terlaksananya koordinasi dan konsultasi, workshop, pelatihan dan rapat kerja pengelolaan data kependudukan ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat, tersedianya laporan kependudukan dengan capaian kinerja Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.425.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp30.925.000 atau 95,37% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pengelolaan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	1. Pendekatan Pelayanan Masyarakat melalui Jembatan Pelayan Online di Nagari (Jempol Nagari) dengan aplikasi Smart Dukcapil. 2. Jemput Bola pelayanan langsung ke Nagari dan Sekolah. 3. Kerjasama dengan instansi/ pihak terkait seperti: RS Bersalin Ibu dan Anak, Pengadilan, Kemenag dan Sekolah dsb. 4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas dan Pencatatan Sipil	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu			Pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik, namun belum berjalan dengan maksimal disebabkan karena terbatasnya sarana prasarana, SDM dan anggaran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyurati pihak terkait dalam bentuk usulan untuk tambahan sarana prasarana, SDM dan anggaran serta melakukan pembahasan bersama dengan DPRD kabupaten Lima Puluh Kota.

e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan
b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan
c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 unit	18 unit
b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit
2 Program Pendaftaran Penduduk		
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
a Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	50.000 dokumen	50.000 dokumen

3	Program Pencatatan Sipil		
	Kegiatan Pelayanan Sipil		
a	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	2550 dokumen	2550 dokumen
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
a	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	6 laporan	6 laporan
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
a	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 laporan	2 laporan
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		

				^a Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	50 dokumen	50 dokumen		
				5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
				Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan				
				^a Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	8 dokumen	8 dokumen		

D. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan pada OPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

- a. Pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik, namun belum berjalan dengan maksimal disebabkan karena terbatasnya Sarana Prasarana, SDM dan Anggaran.
- b. Masih rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat untuk mendapatkan dan update dokumen kependudukan.

Beberapa solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas adalah

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyurati pihak terkait dalam bentuk usulan untuk tambahan Sarana Prasarana, SDM dan Anggaran.
- b. Sudah dilakukan pembahasan bersama DPRD kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Telah dilakukan sosialisasi di media sosial terkait kependudukan dan pencatatan sipil.

3.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp5.357.870.634 dan realisasi keuangan Rp5.233.082.288 atau 97,67%.

3.1.2.7.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari

A. Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Sumber Dana, Alokasi dan Realisasinya pada APBD Tahun 2025 dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari	5.357.870.634	5.233.082.288

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.153.099.834	5.028.852.275
2.13.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.153.099.834	5.028.852.275
2.13.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.109.800	5.950.500
2.13.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.248.000	3.248.000
2.13.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.861.800	2.702.500
2.13.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	29.465.000	29.278.125
2.13.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	14.962.500
2.13.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	14.465.000	14.315.625
2.13.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.322.000	12.219.500
2.13.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.322.000	12.219.500
2.13.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	156.874.000	156.781.888
2.13.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.550.000	129.465.388
2.13.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.324.000	27.316.500
2.13.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	52.004.728	51.987.500
2.13.04.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	46.480.000	46.473.000
2.13.04.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.524.728	5.514.500
2.13.04.01.13	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1.339.474.400	1.302.992.805
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.339.474.400	1.302.992.805
2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.200.062.200	1.170.617.566
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	89.412.300	84.667.639
2.13.05.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	49.999.900	47.707.600
2.13.05.2.01.08	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5.357.870.634	5.233.082.288

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.153.099.834 dan realisasi keuangan Rp5.028.852.275 atau 97,59% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Administrasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.826.580 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.826.580 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan perlengkapan alat-alat listrik kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.861.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.702.500 atau 94,43% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya fasilitasi kunjungan tamu kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Administrasi Umum Pemerintah Daerah.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.845.750 dan realisasi keuangan Rp12.804.100 atau 99,67% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa penerangan dan sumber daya air yaitu listrik dan air 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000 dan realisasi keuangan Rp14.962.500 atau 99,75% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan mobiler

kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.465.000 dan realisasi keuangan Rp14.315.625 atau 98,97% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan peralatan kantor berupa satu paket sound system, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.322.000 dan realisasi keuangan Rp12.219.500 atau 99,17% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa penerangan dan sumber daya air yaitu listrik 12 bulan dan air 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.550.000 dan realisasi keuangan Rp129.465.388 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 99,94%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM, pembayaran STNK kendaraan dinas serta pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 unit dan roda dua sebanyak 10 unit, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.324.000 dan realisasi keuangan Rp27.316.500 atau 99,97% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan Teras Kantor, Loteng Ruangan Kepala Dinas dan Partisi Ruangan aula kantor dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah.

II. Program Administrasi Pemerintah Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.480.000 dan realisasi keuangan Rp46.473.000 atau 99,98% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi administrasi pemerintahan desa, dengan capaian

kinerja berupa terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.524.728 dan realisasi keuangan Rp5.514.500 atau 99,82% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

III. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.200.062.200 dan realisasi keuangan Rp1.170.617.566 atau 97,55% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Bimtek KP-SPAM, Bimtek KAN, Bimtek Dasawisma, Bimtek PKK, Coaching Klinik, Bimtek KPM, Bimtek Bumrag, Bimtek Bamus, Bimtek Prodeskel, Bimtek Pengelolaan Keuangan, Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN, Jambore PKK dan Ghatering PKK.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.412.300 dan realisasi keuangan Rp84.667.639 atau 94,69% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya TMMN di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.999.900 dan realisasi keuangan Rp47.707.600 atau 95,42% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pertemuan ISKADA.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
				1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Fasilitas Kunjungan Tamu				
				1.3 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
				1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
				2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				

						- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				
				3.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				3.1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten Kota				
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	79 Nagari 60 KPMD	79 Nagari 98 KPMD 144 Kelompok PKK 31 ASN 79 KAN		
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan Realisasi Keuangan atau Fisik Kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%) dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp9.754.919.322 dan realisasi keuangan Rp7.955.562.094 atau 81,55%.

3.1.2.8.1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan OPD pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 28 sub kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.754.919.322	7.955.562.094
02.14.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.630.277.322	4.497.656.923
02.14.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.331.189.417	4.214.024.550
02.14.01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.331.189.417	4.214.024.550
02.14.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.889.905	33.782.400
02.14.01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	1.800.000
02.14.01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.064.305	14.063.000
02.14.01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.350.100	5.349.400

02.14.01.2.06.06.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.128.000	1.125.000
02.14.01.2.06.08.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.550.000	2.550.000
02.14.01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.997.500	8.895.000
02.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.000.000	6.750.000
02.14.01.2.07.05.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	9.000.000	6.750.000
02.14.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.662.000	151.462.044
02.14.01.2.08.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000
02.14.01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.020.400	16.998.196
02.14.01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.641.600	133.463.848
02.14.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.536.000	91.637.929
02.14.01.2.09.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.300.000	82.850.629
02.14.01.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.180.000	7.731.300
02.14.01.2.09.09.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.056.000	1.056.000
02.14.02.	Program Pengendalian Penduduk	108.600.000	89.855.000
02.14.02.2.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	108.600.000	89.855.000
02.14.02.2.12.	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	48.600.000	44.600.000
02.14.02.2.13.	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000	45.255.000
02.14.03.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.262.842.000	1.886.250.171
02.14.03.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.503.200.000	743.020.171
02.14.03.2.01.10.	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	917.800.000	446.162.671
02.14.03.2.01.11.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000	165.445.000
02.14.03.2.01.12.	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	65.152.500
02.14.03.2.01.14	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.400.000	66.260.000
02.14.03.2.02.	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	601.200.000	266.100.000
02.14.03.2.02.04.	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	601.200.000	266.100.000
02.14.03.2.03.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	833.642.000	592.635.000
02.14.03.2.03.01.	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.400.000	14.315.000
02.14.03.2.03.03.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	699.242.000	471.760.000

02.14.03.2.03.05.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	111.000.000	106.560.000
02.14.03.2.04.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	324.800.000	284.495.000
02.14.03.2.04.06.	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	324.800.000	284.495.000
02.14.04.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.753.200.000	1.481.800.000
02.14.04.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	130.000.000	0
02.14.04.2.01.18.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	0
02.14.04.2.02.	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.623.200.000	1.481.800.000
02.14.04.2.02.05	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	734.000.000	592.600.000
02.14.04.2.02.06	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	889.200.000	889.200.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.331.189.417 dan realisasi keuangan Rp4.214.024.550 atau 97,29% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa 49 orang/bulan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.800.000 dan realisasi keuangan Rp1.800.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 1 paket.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.064.305 dan realisasi keuangan Rp14.063.000 atau 99,99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 2 paket.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.350.100 dan realisasi keuangan Rp5.349.400 atau 99,99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 2 paket.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.128.000 dan realisasi keuangan Rp1.125.000 atau 99,73% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 24 dokumen.
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.550.000 dan realisasi keuangan Rp2.550.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan fasilitas kunjungan tamu dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.997.500 dan realisasi keuangan Rp8.895.000 atau 88,97% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.000.000 dan realisasi keuangan Rp6.750.000 atau 75% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit pengadaan mebel dengan capaian kinerja berupa 10 unit.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.020.400 dan realisasi keuangan Rp16.998.196 atau 99,87% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp139.641.600 dan realisasi keuangan Rp133.463.848 atau 95,58% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian kinerja berupa 12 laporan.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp88.300.000 dan realisasi keuangan Rp82.850.629 atau 93,83% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian kinerja berupa 10 unit.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.180.000 dan realisasi keuangan Rp7.731.300 atau 94,51% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan capaian kinerja berupa 10 unit.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.056.000 dan realisasi keuangan Rp1.056.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi berupa 1 unit.

II. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.600.000 dan realisasi keuangan Rp44.600.000 atau 91,77% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan capaian kinerja berupa 26 laporan.
- b. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000 dan realisasi keuangan Rp45.255.000 atau 75,43% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB berupa 156 dokumen

III. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan alokasi anggaran sebesar Rp917.800.000 dan realisasi keuangan Rp446.162.671 atau 48,61% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 80%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dengan capaian kinerja berupa 130 laporan.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan alokasi anggaran sebesar Rp260.000.000 dan realisasi keuangan Rp165.445.000 atau 63,63% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 80%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan mekanisme Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan capaian kinerja berupa 82 laporan.
- c. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000 dan realisasi keuangan Rp65.152.500 atau 52,12% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 75%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang dengan capaian kinerja berupa 32 dokumen.
- d. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.400.000 dan realisasi keuangan Rp66.260.000 atau 33,06% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 90%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan capaian kinerja berupa 40 organisasi.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB):

- a. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp601.200.000 dan realisasi keuangan Rp266.100.000 atau 44,26% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 70%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan capaian kinerja berupa 697 orang.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.400.000 dan realisasi keuangan Rp14.315.000 atau 61,18% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan capaian kinerja berupa 26 laporan.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp699.242.000 dan realisasi keuangan Rp471.760.000 atau 67,47% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 70,5%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan capaian kinerja berupa 1.226 orang.
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp111.000.000 dan realisasi keuangan Rp106.560.000 atau 96% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan capaian kinerja berupa 1 dokumen.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp324.800.000 dan realisasi keuangan Rp284.495.000 atau 87,59% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kampung kampung keluarga berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dengan capaian kinerja berupa 58 kampung.

IV. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp130.000.000 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 0%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah

jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 0 unit.

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) dengan alokasi anggaran sebesar Rp734.000.000 dan realisasi keuangan Rp592.600.000 atau 80,74% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 80%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) dengan capaian kinerja berupa 130 laporan.
- b. Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) dengan alokasi anggaran sebesar Rp889.200.000 dan realisasi keuangan Rp889.200.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat penampingan dengan capaian kinerja berupa 130 laporan.

D. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%		
				1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	95%		
				-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/ bulan	49 orang/ bulan		
				2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	95%		
				-	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket		
				-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket		
				-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket		
				-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 dokumen	24 dokumen		
				-	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan		
				-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan.	12 laporan		
				3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	95%		
				-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	10 unit		

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95%		
				-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan		
				-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%		
				-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	10 unit		
				-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit		
				-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit		
				II.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,95			
				2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	70 %	70%		
				-	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	26 Laporan	26 laporan		

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				-	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	156 dokumen	156 dokumen		
				III.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	74,8 %			
				1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Promosi KKBPK terhadap keluarga dan Kampung KB	64 %	70%		
				-	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	130 laporan	130 laporan		
				-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	jumlah laporan mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130 laporan	82 laporan		
				-	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	60 dokumen	32 dokumen		
				-	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan	40 organisasi	40 organisasi		

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja				
				2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	37,97%	80%		
				-	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	697 orang	697 orang		
				3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penggunaan Kontrasepsi jangka panjang	27,5%			
				-	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26 laporan	26 laporan		
				-	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.743 orang	1.266 orang		
				-	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	1 dokumen	1 dokumen		
				4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	60 %	78 %		
				-	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKB di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan	58 Kampung	58 kampung		

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)				
				IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2,18			
				1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Aktif mengikuti kegiatan tribina	83 %			
				-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah unit sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang disediakan	10 unit	0 unit	Pemberitahuan spesifikasi barang diterima bulan Oktober, terjadi penggantian PPTK, sehingga pesanan barang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia sesuai waktu yang telah ditentukan	Koordinasi dengan pusat agar daerah dilibatkan lebih awal dalam penyusunan spesifikasi sehingga potensi keterlambatan dapat dikurangi
				2	Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	100%		
				-	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu	130 laporan	130 laporan		

NO	PD	URUSAN	KEBI-JAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		REALI-SASI	PERMA-SALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/ Balita)	Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/ Balita)				
				-	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	130 laporan	130 laporan		

E. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

- a. Permasalahan 1: Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 130.000.000, berupa Pengadaan BKB Kit sebanyak 10 unit tidak terlaksana disebabkan karena pengadaan baru mulai diproses pada bulan November 2025, karena surat pemberitahuan tentang spesifikasi barang baru diterima pada awal bulan Oktober 2025, disamping itu terjadi pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga pesanan barang yang dilakukan melalui *e catalog /e purchasing* tidak dapat dipenuhi oleh penyedia sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Permasalahan 2: Untuk pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, serapan anggaran biaya transport peserta sebagian besar tidak dapat direalisasikan karena peserta sebagian besar adalah ASN dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2024 tidak bisa dibayarkan.
- c. Permasalahan 3: Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) dimana bentuk kegiatan adalah pemberian pulsa Telkomsel kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) tidak terealisasi 100%. Hal ini disebabkan proses Perjanjian Kerjasama dilakukan dengan Telokomsel Pusat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, yang seharusnya proses pengisian pulsa kepada kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) bisa dilakukan pada bulan Maret (10 bulan), baru bisa dilakukan pada akhir bulan April (8 bulan)

Beberapa solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut diatas adalah:

- a. Solusi dan saran terhadap permasalahan 1: Koordinasi dengan pusat agar daerah dilibatkan lebih awal dalam penyusunan spesifikasi sehingga potensi keterlambatan dapat dikurangi
- b. Solusi dan saran terhadap permasalahan 2: Menyampaikan usulan Standar Anggaran Biaya (SAB).
- c. Solusi dan saran terhadap permasalahan 3: Untuk tahun 2026, proses PKS sudah dimulai sejak bulan Januari, sehingga diharapkan PKS bisa selesai pada akhir bulan Februari 2026 dan pengisian pulsa untuk kader TPK bisa dilakukan diawal bulan Maret (untuk 10 bulan).

3.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total anggaran sebesar Rp15.786.462.349 dan realisasi keuangan Rp14.942.086.814 atau 94,65%.

3.1.2.9.1. Dinas Perhubungan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan melaksanakan 2 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2.15	DINAS PERHUBUNGAN	15.786.462.349	14.942.086.814
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.763.974.499	13.014.140.966
2.15.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.797.552.232	5.450.780.765
2.15.01.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.782.552.232	5.435.782.765
2.15.01.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	14.998.000
2.15.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.308.000	118.638.200
2.15.01.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000
2.15.01.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000
2.15.01.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.428.000	33.428.000
2.15.01.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.001.000	21.996.000
2.15.01.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.365.000	3.886.800
2.15.01.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.514.000	42.327.400
2.15.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.000.000	30.174.649
2.15.01.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.000.000	30.174.649
2.15.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.484.699.210	7.152.849.118
2.15.01.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000
2.15.01.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.342.739.210	6.077.645.505
2.15.01.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.960.000	6.943.613

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2.15.01.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.133.000.000	1.066.260.000
2.15.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.415.057	261.698.234
2.15.01.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.415.057	261.698.234
2.15.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.022.487.850	1.927.945.848
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.511.118.066	1.430.589.968
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.511.118.066	1.430.589.968
2.15.02.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.992.000	2.880.000
2.15.02.04.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.992.000	2.880.000
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	334.798.000	328.855.980
2.15.02.2.05.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	261.600.000	258.159.500
2.15.02.2.05.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34.269.000	32.135.700
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	38.929.000	38.560.780
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	124.350.084	124.344.000
2.15.02.2.06.0017	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	124.350.084	124.344.000
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	9.797.000	7.755.000
2.15.02.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	9.797.000	7.755.000
2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	23.000.700	19.505.900
2.15.02.2.08.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan , Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	23.000.700	19.505.900
2.15.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	16.432.000	14.015.000
2.15.02.2.14.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	16.432.000	14.015.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.782.552.232 dan realisasi keuangan Rp5.435.782.765 atau 94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 79 Orang/bulan dengan rincian PNS 50 orang dan PPPK 29 orang, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000 dan realisasi keuangan Rp14.998.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 1 Dokumen, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.000.000 dan realisasi keuangan Rp7.000.000 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor seperti baterai jam, baterai remote, bola lampu dan kabel listrik untuk penunjang kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realisasi keuangan Rp10.000.000 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen peralatan dan perlengkapan kantor seperti ember plastik, gayung air plastik, kanebo, kapur barus gant. Merk dahlia ball, sapu lantai plastik dan lain-lain untuk penunjang kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.428.000 dan realisasi keuangan Rp33.428.000 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor seperti Binder clip, buku folio, isi stapler, kertas HVS A4 70 gram, map ordner, Pena dan lain-lain, untuk penunjang kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.001.000 dan realisasi keuangan Rp21.996.000 atau 99,98 % serta realisasi

fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya barang cetakan dan penggandaan seperti amplop dinas, blangko kwitansi, blangko STS, Jilid, Fotocopy dan lain-lain, untuk penunjang kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.

- e. Sub Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.365.000 dan realisasi keuangan Rp3.886.800 atau 52,77 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Realisasi keuangan presentasi kecil karena tamu yang datang ke dinas tidak banyak dan durasi bertamu hanya sebentar. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya belanja makanan dan minuman tamu untuk penunjang kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.514.000 dan realisasi keuangan Rp 42.327.400 atau 99,56 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pendukung perjalanan dinas guna melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya ketentuan-ketentuan, regulasi, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan dan tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.000.000 dan realisasi keuangan Rp30.174.649 atau 97,34 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) Unit Sound Sistem, 1 (satu) Unit Laptop dan 2 (dua) Unit Printer dengan capaian kinerja berupa tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah .

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000 dan realisasi keuangan Rp2.000.000 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat seperti materai 10.000 dengan capaian kinerja berupa tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.342.739.210 dan realisasi keuangan Rp6.077.645.505 atau 95,82 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya belanja tagihan air dan listrik (listrik kantor dan listrik PJU) selama 12 bulan, dengan capaian kinerja sebagai berikut tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.960.000 dan realisasi keuangan Rp6.943.613 atau 99,76 % serta realisasi fisik

kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor seperti, AC, komputer/laptop serta printer, dengan capaian kinerja sebagai berikut tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.133.000.000 dan realisasi keuangan Rp1.066.260.000 atau 94,11 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedia dan terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasa tenaga kontrak) selama 12 bulan serta belanja jasa outsourcing petugas jasa kebersihan selama 2 bulan, dengan capaian kinerja sebagai berikut tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 328.415.057 dan realisasi keuangan sebesar Rp 261.698.234 atau 79,69 % serta realisasi fisik mencapai 99%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta bahan bakar minyak (BBM) dan administrasi Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bus roda 4 untuk 2 unit, administrasi Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bus roda 4 realisasi 1 unit dikarenakan anggaran tidak cukup untuk 2 unit, hal ini disebabkan perbedaan tipe kedua bus roda 4, dimana salah satu bus roda 4 biaya administrasi Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatas Rp 40.000.000 dengan capaian kinerja berupa tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah.

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.511.118.066 dan realisasi keuangan Rp1.430.589.968 atau 94,67% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 96,38%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya lampu penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 475 unit, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus berupa Mobil Skylift PJU 1 Unit, Belanja alat untuk kegiatan kantor-Alat Listrik, Belanja Modal alat Kantor lainnya berupa Radio HT 5 Unit, dan Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin lainnya berupa Mesin Bor, Mesin Gerinda, dan Mesin Las dengan Capaian kinerja berupa meningkatkan persentase sarana keselamatan jalan guna mendukung penurunan rasio kecelakaan per 10.000 kendaraan.

2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar

Rp2.992.000 dan realisasi keuangan Rp2.880.000 atau 96.26% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah penyediaan 1 dokumen pengadaan karcis parkir yang terdiri dari 30 buku warna merah dan 150 buku warna kuning untuk mendukung operasional penyelenggaraan parkir dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pelaksanaan parkir.

3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp261.600.000 dan realisasi keuangan 258.159.500 atau 98.68% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak 5000 unit Smartcard dengan capaian kinerja berupa persentase angkutan umum dan barang laik jalan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.269.000 dan realisasi keuangan Rp32.135.700 atau 93.77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 1 (satu) orang melalui keikutsertaan pada Diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dengan capaian kinerja berupa persentase angkutan umum dan barang laik jalan
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.929.000 dan realisasi keuangan Rp38.560.780 atau 99.05% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Kalibrasi dan Maintenance Alat Uji sejumlah 9 unit dengan capaian kinerja berupa persentase angkutan umum dan barang laik jalan

4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp124.350.084 dan realisasi keuangan Rp124.344.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pam Lebaran, Pam Nataru serta pengamanan jalan pada titik rawan kecelakaan/kemacetan lalu lintas dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Titik PAM KETUPAT
 - a) Kantor Dinas Perhubungan
 - b) Simpang Sarilamak
 - c) Harau
 - d) Kelok 9
 - e) Taram

- f) Wilayah Hukum Polres Payakumbuh (Simpang Piladang)
- 2) Titik PAM NATARU
- a) Kantor Dinas Perhubungan
 - b) Simpang Sarilamak
 - c) Harau
 - d) Kelok 9
 - e) Taram
- 3) 34 titik rawan kecelakaan dan kemacetan yang teratasi (persimpangan dan sekolah) dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kecamatan Harau
 - 1. Simpang 4 Tanjung Pati
 - 2. SDN 01 Koto Tuo
 - 3. SDN 02 Koto Tuo
 - 4. SMPN 01 Harau
 - 5. SMAN 01 Harau
 - 6. Simpang Politani
 - 7. SD Full Day
 - 8. Simpang bawah kantor Bupati
 - 9. Bundaran Kantor Bupati
 - 10. Simpang KOMPI C
 - 11. Simpang Padang Rajo
 - b) Kecamatan Lareh, Luak
 - 1. Simpang 3 SMPN Luak\
 - 2. Simpang Andaleh
 - 3. Simpang denzipur
 - 4. Simpang MTS Gadut
 - 5. Simpang 4 SMPN 1 Lasahan
 - c) Kecamatan Situjuah Limo Nagari
 - 1. Simpang 4 Situjuah Gadang
 - 2. SMPN 1 Situjuah
 - 3. SMAN 1 Situjuah
 - 4. MTSN Situjuah
 - 5. Simpang 3 Tunga
 - d) Kecamatan Payakumbuh
 - 1. SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh
 - 2. SMPN 03 Koto Tengah Simalanggang
 - 3. Simpang Kayu Gadang

4. SMAN 01 Kecamatan Payakumbuh
5. Simpang Pakan Rabaa
6. SD Taeh Baruah
7. Simpang Koto Baru

e) Kecamatan Mungka

1. Simpang 3 Mungka
2. SD 01/03 Mungka
3. Simpang Padang Mungka
4. Simpang 2 Mungka (Sei Antuan)
5. SMA 1 Suliki

f) Kecamatan Pangkalan Koto Baru

1. SDN 01 Pangkalan
- 4) Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas
 - 5) Indeks kelancaran lalu lintas

5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.797.000 dan realisasi keuangan Rp7.755.000 atau 79,16 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi sebanyak 10 Laporan dengan capaian kinerja berupa persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota.

- ✓ Terlaksananya koordinasi dan study komperhensif andalalin sebanyak 3 kali
- ✓ Terlaksannya Monitoring dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan, Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.000.700 dan realisasi keuangan Rp19.505.900 atau 84,81% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan Pendampingan Kegiatan Pelajar Pelopor dan Sosialisasi Keselamatan sebanyak 8 Laporan dengan capaian kinerja berupa persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana.

- Terlaksananya kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dalam 3 hari pelaksanaan di The Axana Hotel Padang yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keselamatan di 8 sekolah yaitu:
 - 1) SMAN 1 Akabiluru
 - 2) SMPN1 Akabiluru
 - 3) SMAN 1 Suliki
 - 4) SMPN 2 Suliki,
 - 5) MTSN 2 Lima Puluh Kota
 - 6) SMAN 1 Halaban
 - 7) SMP IT RQ Ar-Rahman Halaban
 - 8) SMAN 3 Halaban

7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar 16.432.000 dan realisasi keuangan Rp14.015.000 atau 85.29% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 93%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data Perusahaan Angkutan dengan capaian kinerja sebagai berikut:
 - Terlaksananya kegiatan Abdi Yasa Teladan
 - Tersedianya data perusahaan angkutan AKAP
 - Tersedianya data perusahaan angkutan AKDP

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1.	DINAS PERHUBUNGAN	I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		15.786.462.349		14.942.086.814		
				I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		13.763.974.499		13.014.140.966		
				1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.797.552.232	100%	5.450.780.765		
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/Bulan	5.782.552.232	79 Orang/Bulan	5.435.782.765		
				b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	14.998.000		
				2.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	122.308.000	100%	118.638.200		
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	7.000.000	4 Paket	7.000.000		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.000.000		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASAL AHAN
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	33.428.000	4 Paket	33.428.000		
				d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	22.001.000	12 Paket	21.996.000		
				e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.365.000	12 Laporan	3.886.800		
				f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.514.000	12 Laporan	42.327.400		
				3.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	31.000.000	100%	30.174.649		
				a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	31.000.000	4 Unit	30.174.649		
				4.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.484.699.210	100%	7.152.849.118		
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6.342.739.210	12 Laporan	6.077.645.505		
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	6.960.000	12 Laporan	6.943.613		
				d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.133.000.000	12 Laporan	1.066.260.000		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASAL AHAN
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
				5.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	328.415.057	100%	261.698.234		
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 Unit	328.415.057	19 Unit	261.698.234		
				II. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2.022.487.850		1.927.945.848		
				1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	75%	1.511.118.066	75%	1.430.589.968		
				a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500 Unit	1.511.118.066	475 Unit	1.430.589.968		
				2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	2.992.000	100%	2.880.000		
				a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha	8 Dokumen	2.992.000	8 Dokumen	2.880.000		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASAL AHAN
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
				Terintegrasi secara Elektronik						
				3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95%	334.798.000	95%	328.855.980		
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Unit	261.600.000	5 Unit	258.159.500		
				b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Orang	34.269.000	1 Orang	32.135.700		
				c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 Unit	38.929.000	9 Unit	38.560.780		
				4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	124.350.084	100%	124.344.000		
				a. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	124.350.084	2 Laporan	124.344.000		
				5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	9.797.000	100%	7.755.000		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASAL AHAN
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
				a. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	6 Laporan	9.797.000	10 Laporan	7.755.000		
				6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	23.000.700	100%	19.505.900		
				a. Sub Kegiatan Pelaksanaan , Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	7 Laporan	23.000.700	8 Laporan	19.505.900		
				7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	16.432.000	100%	14.015.000		
				a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	1 Laporan	16.432.000	1 Laporan	14.015.000		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat tercapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik

3.1.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7.486.513.417 dan realisasi keuangan Rp7.044.986.308 atau 94,1%.

3.2.1.10.1 Dinas Komunikasi Dan Informatika

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan melaksanakan 3 Program, 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 24 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.710.245.017	
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	7.486.513.417	7.044.986.308
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.293.176.417	4.854.935.764
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.854.991.017	4.445.825.307
2.16.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.854.991.017	4.445.825.307
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.290.372	93.642.612
2.16.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.300.000	1.300.000
2.16.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.765.000	30.173.000
2.16.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.682.372	5.682.300
2.16.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.400.000	2.391.608
2.16.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.143.000	54.095.704
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.244.817	237.609.011
2.16.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.570.000	1.570.000
2.16.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	132.866.433	115.465.188
2.16.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.808.384	120.573.823

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.650.211	77.858.834
2.16.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.786.225	41.249.027
2.16.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.049.277	21.046.421
2.16.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.814.709	15.563.386
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	372.000.000	371.423.109
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	372.000.000	371.423.109
2.16.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Relasi Media	333.784.000	333.354.509
2.16.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	640.000	510.000
2.16.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	15.576.000	15.558.600
2.16.02.2.01.0021	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	22.000.000	22.000.000
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.821.337.000	1.818.627.435
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.821.337.000	1.818.627.435
2.16.03.2.02.0016	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	11.231.000	8.785.305
2.16.03.2.02.0020	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	755.000	491.130
2.16.03.2.02.0023	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	350.000	350.000
2.16.03.2.02.0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.809.001.000	1.809.001.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.854.991.017 dan realisasi keuangan sebesar Rp4.445.825.307 atau 92% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 51 orang dengan capaian Kinerja berupa tersedianya gaji dan tunjangan ASN.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.300.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.300.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian Kinerja berupa tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.765.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp30.173.000 atau 98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 12 paket dengan capaian Kinerja berupa tersedianya bahan logistik kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.682.372 dan realisasi keuangan sebesar Rp5.682.300 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, dengan capaian Kinerja berupa tersedianya barang cetak dan penggandaan.
- d. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.400.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu sebanyak 12 laporan dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya fasilitas kunjungan tamu.
- e. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp54.143.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp54.095.704 atau 99,9% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.570.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.570.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp132.866.433 dan realisasi keuangan sebesar Rp115.465.188 atau 86% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12

laporan dengan capaian Kinerja berupa tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

- c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.808.384 dan realisasi keuangan sebesar Rp120.573.823 atau 99,8% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan dengan capaian Kinerja berupa tersedianya jasa pelayanan umum kantor.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.786.225 dan realisasi keuangan sebesar Rp41.249.027 atau 84,5% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 5 unit dengan capaian Kinerja berupa tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.049.277 dan realisasi keuangan sebesar Rp21.046.421 atau 99,9% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 5 unit dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.814.709 dan realisasi keuangan sebesar Rp15.563.386 atau 82,7% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian Kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Sub Kegiatan Relasi Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp333.784.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp333.354.509 atau 99,8% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan jumlah laporan kegiatan Relasi media sebanyak 1 laporan dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya layanan Relasi media.
- b. Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp640.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp510.000 atau 79,6% serta realisasi fisik mencapai 100%.

Keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik sebanyak 25 dokumen dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pelayanan informasi publik.

- c. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.576.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp15.558.600 atau 99,8% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik sebanyak 12 dokumen dengan capaian Kinerja terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik.
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 22.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebanyak 12 dokumen dengan capaian Kinerja terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.231.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp8.785.305 atau 78,2% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah yang dikelola sebanyak 1 unit dengan capaian kinerja berupa terkelolanya pusat data Pemerintahan Daerah.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp755.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp491.130 atau 65% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini terselenggaranya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp350.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City sebanyak 1 dokumen dengan capaian Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.809.001.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.809.001.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah pada perangkat daerah dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah.

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

NO.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
I.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peningkatan pengawasan intern dokumen pertanggung jawaban.	PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD				
			Peningkatan Sumberdaya personil, pengawas intern dan dokumen peraturan pertanggung jawaban	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi evaluasi atas pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja tahunan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Evaluasi atas evaluasi internal meliputi evaluasi atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi kinerja tahunan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 51 orang	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 51 orang		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket	jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket		
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 12 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 12 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		
				Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12		

NO.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					laporan.	laporan.		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 5 unit	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 5 unit		

NO.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 12 unit	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 12 unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan sebanyak 1 paket	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan sebanyak 1 paket		
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan sebanyak 1 paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan sebanyak 1 paket		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			Peningkatan system dan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi publik yang transparan, terintegrasi, aman, terpadu, menyeluruh, andal dan mudah di akses masyarakat	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah laporan hasil pelaksanaan relasi media sebanyak 1 laporan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan relasi media sebanyak 1 laporan		
			Implementasi keterbukaan informasi Publik PPID serta mekanisme penanganan pengaduan dan fasilitasi penanganan sengketa informasi.	Sub kegiatan pelayanan informasi publik.	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik sebanyak 1 dokumen	jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik sebanyak 1 dokumen		
				Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		

NO.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					sebanyak 1 laporan	sebanyak 1 laporan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebanyak 12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebanyak 12 dokumen		
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah unit Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah yang dikelola sebanyak 1 unit	Jumlah unit Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah yang dikelola sebanyak 1 unit		
				Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City sebanyak 1	jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City sebanyak 1 dokumen dengan		

NO.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					dokumen dengan capaian Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.	capaian Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah sebanyak 43 Perangkat Daerah, 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 17 UPTD Puskesmas, dan 7 Sekolah Negeri	jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah sebanyak 43 Perangkat Daerah, 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 17 UPTD Puskesmas, dan 7 Sekolah Negeri		

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp4.955.446.795 dan realisasi keuangan Rp4.834.459.578 atau 97,56%.

3.1.2.11.1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD utama pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melaksanakan 6 Program dan 9 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.955.446.795	4.834.459.578
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.786.358.795	4.672.219.886
2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.377.726.695	4.266.900.429
2.17.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.377.726.695	4.266.900.429
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.686.100	62.640.766
2.17.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	995.000
2.17.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.375.000	26.375.000
2.17.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.860.100	9.860.100
2.17.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.740.000	1.740.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2.17.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.711.000	23.670.666
2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.726.000	229.567.261
2.17.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	500.000	500.000
2.17.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.730.000	82.583.800
2.17.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.496.000	146.483.461
2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.220.000	112.991.410
2.17.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.750.000	95.526.410
2.17.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.470.000	17.465.000
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10.776.000	10.771.670
2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	10.776.000	10.771.670
2.17.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	10.776.000	10.771.670
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6.200.000	6.139.646
2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000	6.139.646
2.17.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	6.200.000	6.139.646
2.17.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	85.912.000	80.948.864
2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.912.000	80.948.864
2.17.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	85.912.000	80.948.864
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	46.000.000	45.999.400
2.17.7.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	46.000.000	45.999.400
2.17.07.2.01.0014	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	46.000.000	45.999.400
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	20.200.000	18.380.112
2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	20.200.000	18.380.112
2.17.08.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	20.200.000	18.380.112

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.377.726.695 dan realisasi keuangan Rp4.266.900.429 atau 97,46% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Dinas sebanyak 42 orang/ bulan dengan capaian kinerja berupa tersedianya gaji dan tunjangan ASN.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan realisasi keuangan Rp995.000 atau 99,5% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, dengan capaian kinerja berupa tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.375.000 dan realisasi keuangan Rp26.375.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor dan Gedung PLUT selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa tersedianya bahan logistik kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.860.100 dan realisasi keuangan Rp9.860.100 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.740.000 dan realisasi keuangan Rp1.740.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah makan dan minum tamu rapat pegawai selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa tersedianya makan dan minum tamu.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.711.000 dan realisasi keuangan Rp23.670.666 atau 99,82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000 dan realisasi keuangan Rp500.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya benda-benda pos (Materai) sebanyak 50 lembar dengan capaian kinerja berupa terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.730.000 dan realisasi keuangan Rp82.583.800 atau 99,82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana pembayaran langganan telepon, listrik, air internet kantor selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp146.496.000 dan realisasi keuangan Rp146.483.461 atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya honor Tenaga Kontrak Biasa (tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga pengamanan kantor) selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa tersedianya jasa pelayanan umum kantor.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.750.000 dan realisasi keuangan Rp95.526.410 atau 96,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya BBM, pembayaran surat-surat kendaraan dinas selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.470.000 dan realisasi keuangan Rp17.465.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya AC, komputer, laptop dan printer selama 12 bulan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin lainnya.

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.776.000 dan realisasi keuangan Rp10.771.670 atau 99,95% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan

koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa meningkatnya kualitas koperasi.

III. Program Penilaian Kesehatan Koperasi

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp6.200.000 dan realisasi keuangan Rp6.139.646 atau 99,02% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja meningkatnya koperasi sehat.

IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan alokasi anggaran Rp85.912.000 dan realisasi keuangan Rp 80.948.864 atau 94,22% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi pengurus koperasi desa merah sebanyak 316 orang (8 angkatan), dengan capaian kinerja meningkatnya pemahaman, pengetahuan serta kapasitas dan kompetensi Pengurus Koperasi.

V. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.000.000 dan realisasi keuangan Rp45.999.400 atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya konsultan PLUT dalam pelaksanaan tugasnya dengan capaian kinerja berupa terfasilitasinya penyusunan basis data usaha mikro.

VI. Program Pengembangan UMKM

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- 
- a. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan alokasi anggaran Rp20.200.000 dan realisasi keuangan Rp18.380.112 atau 90,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring perkembangan UMKM dengan capaian kinerja meningkatnya pengembangan UMKM.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECILDAN MENEGAH	1.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%		
					1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
					a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/Bulan	42 orang/Bulan		
					2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
					a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		
					b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket		
					c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
					d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan		
					e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan		
					3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
					a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	12 laporan	12 laporan		
					b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
					c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		

NO.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
					a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 unit	29 unit		
					b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit		
				II.		PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	10%	10%		
					1.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Koperasi	60 Koperasi		
					a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah/Kabupaten	60 unit usaha	60 unit usaha		
				III.		PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	10%	10%		
					1.	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Koperasi	10 Koperasi		
					a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	10 unit usaha	10 unit usaha		
				IV.		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	15%	15%		
					1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	8 kegiatan	8 kegiatan		

NO.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						Kabupaten/Kota				
					a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	316 orang	316 orang		
				V.		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	30%	30%		
						Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	4 kegiatan	1 kegiatan		
						Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	100 unit usaha	100 unit usaha		
				VI.		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	30%	30%		
						Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	10 kegiatan	10 kegiatan		
						Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	69 unit usaha	69 unit usaha		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Alokasi dana dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, secara umum realisasi fisik 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan.

3.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total anggaran sebesar Rp4.053.802.030 dan realisasi keuangan Rp4.005.348.110 atau 98,80%.

3.1.2.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan OPD utama pelaksana urusan Urusan Penanaman Modal dengan melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan urusan Penanaman Modal. Rincian program dan kegiatan, anggaran dan realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26 Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota	3.996.054.430	3.947.610.810
2 18 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.027.000	14.912.000
2 18 01 2 01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.024.000	9.952.000
2 18 01 2.01 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.003.000	4.960.000
2 18 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.352.296.884	3.311.035.133
2 18 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.341.852.884	3.300.711.133
2 18 01 2.02 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.003.500	4.976.000
2 18 01 2.02 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.440.500	5.348.000
2 18 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.752.546	211.943.577
2 18 01 2.06 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.021.000	3.021.000
2 18 01 2.06 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.972.830	106.464.100
2 18 01 2.06 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6000.000	6000.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2 18 01 2.06 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6000.000	6000.000
2 18 01 2.06 0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.660.538	8.660.400
2 18 01 2.06 0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.267.250	7.235.000
2 18 01 2.06 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.830.928	74.563.077
2 18 01 2 0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.000.000	131.000
2 18 01 2 0 7 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.000.000	131.000
2 18 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.178.000	134.480.232
2 18 01 2.08 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	280.000	280.000
2 18 01 2.08 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.954.000	21.522.952
2 18 01 2.08 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.944.000	112.677.280
2 18 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.800.000	145.638.938
2 18 01 2 09 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.800.000	135.638.938
2 18 01 2.09 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	14.142.000	14.132.000
2 18 03 2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	14.142.000	14.132.000
2 18 03 2 01 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14.142.000	14.132.000
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	38.475.100	38.475.000
2 18 05 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.475.100	38.475.000
2 18 05 2.01 03	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	4.300.000	4.300.000
2 18 05 2.01 02	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	34.175.100	34.175.000
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanama Modal	5.130.500	5.130.300
2 18 06 2 01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.130.500	5.130.300
2 18 06 2 01 0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.130.500	5.130.300

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi keuangan, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.024.000 dan realisasi keuangan Rp9.952.000 atau 99,28% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja berupa Terealisasinya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.003.000 dan realisasi keuangan Rp4.960.000 atau 99,14% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Capaian Kinerja berupa Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.341.852.884 dan realisasi keuangan Rp3.300.711.133 atau 98,77% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Capaian Kinerja berupa Terealisasinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.003.500 dan realisasi keuangan Rp4.976.000 atau 99,45% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan Capaian Kinerja berupa Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Teralisasinya Laporan Keuangan Bulanan
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.440.500 dan realisasi keuangan Rp5.348.000 atau 98,30% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Teralisasinya Laporan Keuangan Bulanan dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya laporan keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran DPMPTSP yang akuntabel

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.021.000 dan realisasi keuangan Rp3.021.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan Capaian Kinerja berupa Terpenuhinya Penyediaan Listrik dan Penerangan Perkantoran.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.972.830 dan realisasi keuangan Rp106.464.100 atau 99,52% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan Capaian Kinerja berupa Terpenuhinya Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang siap digunakan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp6000.000 dan realisasi keuangan Rp6000.000 serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan Capaian Kinerja berupa Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga yang siap digunakan
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000 dan realisasi keuangan Rp6.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.660.538 dan realisasi keuangan Rp8.660.400 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya ADM Perkantoran yang Baik
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.267.250 dan realisasi keuangan Rp7.235.000 atau 99,56% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Capaian Kinerja berupa Terlaksananya Pelayanan Tamu Kantor
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.830.928 dan realisasi keuangan Rp74.563.077 atau 99,64% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Capaian Kinerja berupa Terlaksananya Pekerjaan yang Berkaitan dengan Instansi Baik di Dalam maupun di Luar

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.000.000 dan realisasi keuangan Rp131.000.000 atau 98,93 serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dengan Capaian Kinerja berupa Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp280.000 dan realisasi keuangan Rp280.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Capaian Kinerja berupa Terdistribusinya Surat Keluar dan Tercukupinya Benda Pos

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.954.000 dan realisasi keuangan Rp21.522.952 atau 93,77% dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan dengan Capaian Kinerja Lancarnya Penyediaan Telepon, Internet, Air dan Listrik
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.944.000 dan realisasi keuangan Rp112.677.280 atau 99,76% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan Capaian Kinerja Terwujudnya Jasa Pelayanan ADM Perkantoran yang Efektif dan Efisien.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.800.000 dan realisasi keuangan Rp135.638.938 atau 97,72% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dielihara dan dibayarkan Pajaknya, dengan Capaian Kinerja Terawatnya dan Terpeliharanya serta terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realisasi keuangan Rp10.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan Capaian Kinerja berupa Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor

II. Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.142.000 dan realisasi keuangan Rp14.132.000 atau 99,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dengan Capaian Kinerja berupa Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

III. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.300.000 dan realisasi keuangan Rp4.300.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Capaian Kinerja Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 1.770 Pelaku Usaha dalam 21 kali Sosialisasi
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.175.100 dan realisasi keuangan Rp34.175.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Capaian Kinerja berupa Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha sebanyak 240 Kegiatan Usaha.

IV. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.130.500 dan realisasi keuangan Rp5.130.300 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan dengan Capaian Kinerja Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja								
No	PD	URUSAN	KEBIJAKA N	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DPMPTSP	Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Permendagri 86 Tahun 2017	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				
1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	-	-
2				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan	-	-
3				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	-	-

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29 Unit	29 Unit		
4				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	-	-
5				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	20 Unit	-	-
				Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69 Unit	69 Unit		
II				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
6				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			-	-
				Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			-	-
				Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan BerusahaBerbasis Resiko				
7				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			-	-

				Sub Kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
III				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
8				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			-	-
IV				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
9				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintudibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20 %	20 %	-	-
V				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
10				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota				
				Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	6 kegiatan usaha	-	-
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			-	-
				Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha	46 kegiatan usaha	-	-

VI				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
11				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan diatas tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan dan realisasi keuangan / fisik kegiatan dapat dicapai dengan realisasi keuangan Persentase (98,80%) dan realisasi fisik (100%) , dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp10.310.211.788 dan realisasi keuangan Rp7.915.342.651 atau 76,77%.

3.1.2.13.1. Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.310.211.788	7.915.342.651
2.19.01.	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	4.848.554.208	4.073.786.422
2.19.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.197.750	63.186.000
2.19.01.2.01.01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	21.203.900	21.202.000
2.19.01.2.01.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.534.850	15.531.000
2.19.01.2.01.03.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.834.000	10.828.000
2.19.01.2.01.06.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	16.625.000	16.625.000
2.19.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.473.427.818	3.701.996.979
2.19.01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.463.289.804	3.691.868.979
2.19.01.2.02.05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKDP	10.138.014	10.136.000
2.19.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	71.108.340	71.005.760
2.19.01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.401.000	3.400.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2.19.01.2.06.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.533.000	7.520.000
2.19.01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	3.964.000
2.19.01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	7.334.340	7.334.000
2.19.01.2.06.08.	Sub Kegiatan Fasilitas Tunjangan Tamu	3.900.000	3.900.000
2.19.01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP	44.940.000	44.887.760
2.19.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.305.000	106.281.983
2.19.01.2.08.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.000.000	1.000.000
2.19.01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	40.305.000	38.281.983
2.19.01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.000.000	67.000.000
2.19.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.424.920	309.981.110
2.19.01.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	126.585.300	126.548.700
2.19.01.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.390.000	4.777.000
2.19.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	790.466.000	779.193.200
2.19.02.2.01.	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota	748.040.000	737.533.200
2.19.02.2.01.13	Sub Kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota	525.000.000	524.739.200
2.19.02.2.01.14.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi ,Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Tingkat Kab/Kota	110.000.000	106.431.000
2.19.02.2.01.15.	Sub Kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kab/kota	113.040.000	106.363.000
2.19.02.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	42.426.000	41.660.000
2.19.02.2.02.02.	Sub Kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kab/Kota	42.426.000	41.660.000
2.19.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.661.191.580	3.062.353.029
2.19.03.2.01.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.906.191.500	2.311.981.329
2.19.03.2.01.05.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan , pengadaan, pemanfaatan , pemeliharaan dan pengawasan Prasarana	3.906.191.500	2.311.981.329

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Olahraga di Kabupaten/Kota		
2.19.03.2.02.	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	614.999.980	612.274.500
2.19.03.2.02.04.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi even dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	614.999.980	612.274.500
2.19.03.2.03.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	55.000.100	53.950.200
2.19.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (sport science)	55.000.100	53.950.200
2.19.03.2.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	50.000.000	50.000.000
2.19.03.2.04.02.	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja sama Organisasi Olahraga Kab/Kota dengan Lembaga Terkait	50.000.000	50.000.000
2.19.03.2.05.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	35.000.000	34.147.000
2.19.03.2.05.06	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	35.000.000	34.147.000
2.19.04.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	10.000.000	-
2.19.04.2.01.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	10.000.000	-
2.19.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10.000.000	-

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi serta keluaran dan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.203.900 dan realisasi keuangan Rp21.202.000 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Renja Disparpora Tahun 2026 dan dokumen Renja Perubahan tahun 2025, Renstra Disparpora Tahun 2025-2029 dengan capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen perencanaan Disparpora tepat waktu.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.534.850 dan realisasi keuangan Rp15.531.000 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Finalisasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Parpora Tahun 2025 dan Penyusunan RKA Awal Tahun

2026 dengan capaian kinerja berupa tersusunnya RKA Dinas Parpora Tahun 2025 dan 2026.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.834.000 dan realisasi keuangan Rp10.828.000 atau 99,94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pergeseran tahun 2025, RKA Perubahan Dinas Parpora Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa tersusunnya RKA Pergeseran dan RKA Perubahan Dinas Parpora Tahun 2025.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.625.000 dan realisasi keuangan Rp15.625.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen LkjIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, dokumen SPIP Dinas Parpora Tahun 2025 , Dokumen Managemen Resiko Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja Dinas Parpora Tahun 2025 sebanyak 6 dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.463.289.804 dan realisasi keuangan Rp3.691.860.979 atau 82,72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembayaran gaji, TPP ASN Dinas Parpora Tahun 2025 sebanyak 41 Orang dan pembayaran honor pengelola kegiatan Dinas Parpora tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya Gaji, TPP ASN dan Honor pengelola kegiatan Disparpora Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.138.014 dan realisasi keuangan Rp10.136.000 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen laporan keuangan akhir tahun 2025 Dinas Parpora dengan capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Inventaris Barang Dinas Parpora Tahun 2025.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.401.000 dan realisasi keuangan Rp3.400.000 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyediaan Alat listrik untuk menunjang kelancaran pekerjaan Dinas Parpora Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa tersedianya peralatan listrik pada Dinas Parpora Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.533.000 dan realisasi keuangan Rp7.520.000 atau 99,82% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyediaan Alat Tulis Kantor dan

peralatan lainnya untuk menunjang kelancaran pekerjaan Dinas Parpora Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa tersedianya ATK pada Dinas Parpora Tahun 2025.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000 dan realisasi keuangan Rp3.964.000 atau 99,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta pembayaran retribusi sampah Dinas Parpora Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa tersedianya Dinas Parpora Tahun 2025.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.334.340.000 dan realisasi keuangan Rp7.334.000 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya foto copy, Penggandaan dan lain-lain untuk administrasi Dinas Parpora tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan terhadap cetak dan penggandaan.
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.900.000 dan realisasi keuangan Rp3.900.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu Dinas Parpora tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu Dinas Parpora.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.940.000 dan realisasi keuangan Rp44.887.760 atau 99,88% serta realisasi fisik 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan benda pos seperti materai dengan capaian kinerja berupa tersedianya benda pos untuk kelengkapan administrasi dinas tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.305.000 dan realisasi keuangan Rp38.281.983 atau 94,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembayaran rekening listrik, Air., Internet dan TV kabel Dinas Parpora 2025 dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam bekerja pada Dinas Parpora.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.000.000 dan realisasi keuangan Rp67.000.000 atau 98,53% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembayaran gaji tenaga kontrak

Dinas Parpora Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kontrak Dinas Parpora Tahun 2025.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp126.585.300 dan realisasi keuangan Rp126.548.700 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Pemeliharaan (BBM, suku cadang, servis dan pajak) kendaraan Dinas Parpora Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa Terpeliharanya dengan baik kendaraan Dinas Parpora Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.930.000 dan realisasi keuangan Rp4.777.000 atau 96,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Pemeliharaan peralatan dan mesin (Laptop, printer dan AC) Dinas Parpora Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa Terpeliharanya dengan baik peralatan mesin Dinas Parpora Tahun 2025.

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp525.000.000 dan realisasi keuangan Rp524.739.200 atau 99,95% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelatihan kepemimpinan bagi pemuda sebagai kader pembangunan bangsa 7 angkatan dengan jumlah peserta 301 orang dengan capaian kinerja berupa meningkatnya SDM pemuda di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi Pemenuhan Hak Setiap Pemuda di tingkat Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.000.000 dan realisasi keuangan Rp106.431.000 atau 96,75% dan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Penyuluhan narkoba bagi 53 orang pemuda dengan capaian kinerja berupa berkurangnya jumlah pemuda yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kab/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp113.040.000 dan realisasi keuangan Rp106.363.000 atau 94,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan adalah pelatihan kepeloporan bagi 35 orang pemuda serta terkirimnya 4 orang pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota pada pemilihan

pemuda pelopor tingkat nasional dengan capaian kinerja meningkatnya wawasan dan pemahaman pemuda sebagai kader pembangunan bangsa

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.426.000 dan realisasi keuangan Rp41.660.000 atau 98,19% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya peringatan hari Sumpah pemuda Tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian kinerja berupa aktifnya organisasi pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota.

III. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.906.191.500 dan realisasi keuangan Rp2.311.981.329 atau 59,19% serta realisasi fisik mencapai 59,19%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah lanjutan pemeliharaan sarana prasarana pendukung GOR Singa Harau selama 1 tahun, Dokumen perencanaan lapangan bola Koto Lamo Kapur IX, Pembangunan lapangan Bola Kaki Nagari Taram, Revitalisasi lapangan volley Sungai Kamuyang, Pembuatan pagar lapangan bola kaki Koto Tinggi dan terdapat penambahan inventaris 1 unit laptop dengan capaian kinerja berupa meningkatnya sarana prasarana Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Realisasi Keuangan rendah karena tidak terlaksananya pembangunan lapangan bola Koto lamo dengan alasan tidak cukupnya waktu pengerjaan yang tersedia.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp614.999.980 dan realisasi keuangan Rp612.274.500 atau 99,56% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kejuaraan dan pengiriman utusan Kabupaten Lima Puluh Kota pada event KEJURDA, KOSN, POPDA, PEPARDA di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian kinerja berupa meningkatnya prestasi atlit melalui keikutsertaan dalam event-event olahraga di kabupaten. propinsi. wilayah dan nasional.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi:

- a. Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.000.100 dan realisasi keuangan Rp53.950.200 atau 98,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan

ini adalah terlaksananya Pelatihan Atlet berprestasi kabupaten Lima Puluh Kota dengan peserta 10 perempuan perempuan dan 13 orang laki-laki yang juga merupakan kegiatan yang mendukung program Nasional Pengarusatamaan Gender (PUG) dimana 30% dari peserta pelatihan adalah perempuan, dengan capaian kinerja berupa peningkatan SDM tenaga keolahragaan.

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan lembaga terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000 dan realisasi keuangan Rp50.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi kegiatan organisasi olahraga Kabupaten lima puluh Kota (KONI) selama 1 tahun dengan capaian kinerja berupa terfasilitasiya kegiatan-kegiatan organisasi Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- a. Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisi dalam Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.000.000 dan realisasi keuangan Rp34.147.000 atau 97,56% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi kegiatan senam bersama masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota selama 1 tahun dengan capaian kinerja berupa terfasilitasiya kegiatan senam bersama masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

IV. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. Realisasi keuangan dan fisik adalah nol karena kepengurusan Kwarcab pramuka Kabupaten Lima Puluh Kota belum dikukuhkan sehingga pencairan anggaran tidak bisa direalisasikan

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja

N O	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATA SI PERMASAL AHAN
1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga		I PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA URUSAN DAERAH				
				Kegiatan Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahKegiatan				
			Sub Keg	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen		
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
				3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	15 dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Sub Keg	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	41 orang		
				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Sub Keg	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 tahun	1 tahun		
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun		
				3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun		
				4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun		
				5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	1 tahun		

		6	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat	1 tahun	1 tahun		
	Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Keg	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 tahun	1 tahun		
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	12 bulan		
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	12 bulan		
	Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Keg	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		21 kendaraan dinas roda 2 dan 6 kendaraan dinas roda 4	21 kendaraan dinas roda 2 dan 6 kendaraan dinas roda 4		
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 tahun	1 tahun		
	PROGRAM		PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN					
	Kegiatan		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
	Sub Keg	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota		301 orang	301 orang		
		2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pemenuhan Hak di tingkat kab/kota		53 orang pemuda	53 orang pemuda		
		3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kab/kota		- 4 org seleksi pemuda pelopor nasional - 35 or pelatihan	- 4 org seleksi pemuda pelopor nasional - 35 or pelatihan		

		Kegiatan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Keg	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		
		PROGRAM	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Keg	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5 lokasi	4 lokasi	Pembangunan Lapangan bola Koto Lamo tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan	
		Kegiatan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Keg	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	12 even	12 even		
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
		Sub Keg	1 Pemusatan latihan daerah , ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan	20 orang	23 orang		
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
		Sub Keg	1 Peningkatan kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan lembaga terkait	1 organisasi	1 organisasi		
		PROGRAM	PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
		Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
		Sub Keg	1 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 organisasi	-		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga tidak terlaksana 100% karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Lapangan Bola Kaki Koto Lamo Kecamatan Kapur IX sehingga persentase keuangan hanya sebesar 59,19 %

3.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Statistik tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp13.811.600 dan realisasi keuangan Rp12.055.862 atau 87,29%.

3.1.2.14.1. Dinas Komunikasi Dan Informatika

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan melaksanakan 1 Program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Sektoral dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	13.811.600	12.055.862
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	13.811.600	12.055.862
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13.811.600	12.055.862
2.20.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	9.625.000	8.339.086
2.20.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	4.186.600	3.716.776

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Sektoral yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.625.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp8.339.086 atau 86,6% serta realisasi

fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral sebanyak 4 dokumen dengan capaian kinerja terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral.

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.186.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.716.776 atau 88,7% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di daerah sebanyak 3 dokumen dengan capaian kinerja terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
I	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK		STATISTIK				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral sebanyak 4 dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral sebanyak 4 dokumen		
			Peningkatan penyediaan data statistik sektoral	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di daerah sebanyak 3 dokumen	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di daerah sebanyak 3 dokumen		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan bidang Statistik pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.2.15 Urusan Persandian

Urusan Persandian tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp209.920.000 dan realisasi keuangan Rp209.820.001 atau 99,95%.

3.1.2.15.1 Dinas Komunikasi Dan Informatika

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan OPD pelaksana Urusan Persandian dengan melaksanakan 1 Program 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29 Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	209.920.000	209.820.001
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	209.920.000	209.820.001
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.920.000	209.820.001
2.21.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	209.920.000	209.820.001

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/kota

- a. Sub kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp209.920.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp209.820.001 atau 99,95% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi sebanyak 43 Perangkat Daerah dengan capaian Kinerja Tersedianya layanan keamanan informasi untuk Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
I	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN		PERSANDIAN				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi sebanyak 43 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi sebanyak 43 Perangkat Daerah		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah tidak ditemui permasalahan. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total anggaran sebesar Rp3.700.466.400 dan realisasi keuangan Rp2.839.371.461 atau 76,73%.

3.1.2.16.1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

A. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan melaksanakan 4 program, 7 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Rincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, Alokasi dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian Urusan. Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.700.466.400	2.839.371.461
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	2.562.349.900	1.991.787.831
02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	254.958.100	165.310.305
02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	254.958.100	165.310.305
02.2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	707.266.800	270.543.078
02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	243.490.000	122.000.000
02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	463.776.800	148.543.078
02.2.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.600.125.000	1.555.934.448
02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	639.000.000	608.758.000
02.2.03.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	961.125.000	947.176.448

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	619.650.000	467.969.440
03.2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	619.650.000	467.969.440
03.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	619.650.000	467.969.440
5.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	406.816.500	304.889.190
05.2.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	231.071.800	162.922.190
05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	40.475.000	27.605.000
05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	190.596.800	135.317.190
05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	175.744.700	141.967.000
05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	26.999.700	26.682.000
05.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	148.745.000	115.285.000
6.	Program Pengelolaan Permuseuman	111.650.000	74.725.000
06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	111.650.000	74.725.000
06.2.01.0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	111.650.000	74.725.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Budaya

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp254.958.100 dan realisasi keuangan Rp165.310.305 atau 64,84% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 85%. Terdapatnya beberapa sisa anggaran karena perjalanan dinas luar provinsi yang tidak terlaksananya karena adanya tanggap darurat bencana. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebanyak 4 objek dengan capaian kinerja meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.490.000 dan realisasi keuangan Rp122.000.000

atau 50,10% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 85%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena Kegiatan Lomba Cabang Seni yang dianggarkan pada anggaran perubahan tidak diizinkan untuk dilaksanakan, karena adanya Tanggap Darurat Bencana. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya sebanyak 2 laporan objek dengan capaian kinerja meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.

- b. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp463.776.800 dan realisasi keuangan Rp148.543.078 atau 32,03% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 50%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena Kegiatan Penampilan Paket Seni Luar Provinsi yang di Anggarkan pada Anggaran Perubahan tidak mendapatkan izin karna adanya Tanggap Darurat Bencana. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pekan Budaya, Lomba Puisi Perjuangan Dan Paduan Suara dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional.

3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp639.000.000 dan realisasi keuangan Rp608.758.000 atau 95,27% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas niniak mamak dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp961.125.000 dan realisasi keuangan Rp947.176.448 atau 98,55% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat berupa pengadaan pakaian niniak mamak dan bundo kanduang sebanyak 4unit dengan capaian kinerja meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga adat.

II. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional

1. Kegiatan Pembinaan Keseniaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp619.650.000 dan realisasi keuangan Rp467.969.440 atau 75,52% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Realiasi anggaran tidak mencapai 100% karena kegiatan pelatihan kesenian yang dianggarkan pada anggaran perubahan, tidak mendapatkan izin untuk dilaksanakan karena terhubung adanya tanggap darurat bencana. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata

Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional sebanyak 7 laporan lembaga berupa pelatihan anyaman mansiang, pelatihan gita bahana, pelatihan talempong pacik, dan pengadaan alat musik beberapa kecamatan dengan capaian kinerja meningkatnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional.

III. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Sub Pendaftaran Objek Diduga Cagar dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.475.000 dan realisasi keuangan Rp27.605.000 atau 68,20% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Sub kegiatan tidak ter realisasi 100% karena kegiatan yang dianggarkan pada anggaran perubahan tidak diizinkan karena tanggap darurat bencana. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.596.800 dan realisasi keuangan Rp135.317.190 atau 71% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Perjalanan dinas luar provinsi pada sub kegiatan ini tidak terlaksana karena tanggap darurat bencana. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penetapan Cagar Budaya sebanyak 15 objek cagar budaya dengan capaian kinerja Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya.

2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.999.700 dan realisasi keuangan Rp26.682.000 atau 98,82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sebanyak 20 objek cagar budaya dengan capaian kinerja Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya.
- b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.745.000 dan realisasi keuangan Rp115.285.000 atau 77,51% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena rencana pengadaan kamera untuk dokumentasi tidak dilaksanakan sebab spesifikasi kamera yang ada di DPA tidak tersedia di pasaran. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya sebanyak 2 objek dengan capaian kinerja meningkatnya Pemanfaatan Cagar Budaya.

IV. Program Pengelolaan Permuseuman

1. Kegiatan Pengelolaan Museun Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp111.650.000 dan realisasi keuangan Rp74.725.000 atau 66,93% serta realisasi fisik kegiatan 0%. Realisasi anggaran tidak

mencapai 100% karena perencanaan awal kegiatan Two Day Trip yang akan dilaksanakan di Luar Provinsi, tidak mendapatkan izin sehingga kegiatan dialihkan ke dalam provinsi (Sawah Lunto). Capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	OPTIMALNYA PENDIDIKAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4 Objek	4 Objek	Perjalanan Dinas Luar Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Laporan Objek	2 Laporan Objek	Kegiatan Lomba Cabang Seni dianggarkan pada Anggaran Perubahan dan tidak diizinkan untuk dilaksanakan, karena adanya Tanggap Darurat Bencana	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal

				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	Kegiatan Penampilan Paket Seni Luar Provinsi di Anggarkan pada Anggaran Perubahan, akan tetapi pelaksanaan kegiatan di Luar Provinsi (Jakarta) tidak mendapatkan izin karena adanya Tanggapan Darurat Bencana	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	220 Orang	220 Orang		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	4 Unit	4 Unit		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	7 Laporan Lembaga	7 Laporan Lembaga	Kegiatan pelatihan kesenian dianggarkan pada anggaran perubahan, tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapatkan ijin untuk pelaksanaan dan berhubung adanya tanggapan darurat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	20 Objek	20 Objek	Kegiatan di anggarakan pada anggaran perubahan dan tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat Bencana	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
				Penetapan Cagar Budaya	15 Objek	15 Objek	Perjalanan Dinas Luar Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Tanggap darurat	Agar dapat dilaksanakan, anggaran kegiatan untuk dapat dianggarkan pada anggaran Awal
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
				Pelindungan Cagar Budaya	20 Objek	20 Objek		
				Pemanfaatan Cagar Budaya	2 Objek	2 Objek	Rencana pengadaan Kamera untuk dokumentasi tidak dilaksanakan, karena Spesifikasi kamera yang ada di DPA tidak tersedia di pasaran	Untuk dapat dilakukan survey spesifikasi terhadap barang yang akan diadakan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	40 Orang	40 Orang	Perencanaan awal kegiatan Two Day Trip dilaksanakan di Luar Provinsi, namun tidak mendapatkan izin sehingga kegiatan dialihkan ke dalam provinsi (Sawah Lunto)	Untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal sesuai dengan besaran anggaran yang direncanakan

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Ada beberapa sub kegiatan yang hanya terealisasi sebagian baik fisik maupun keuangannya seperti perjalanan dinas luar provinsi, kegiatan lomba cabang seni, dan kegiatan penampilan paket seni luar provinsi sebab tidak diizinkan pada perubahan anggaran karena adanya tanggap darurat bencana
2. Terdapat dua sub kegiatan yang realisasi fisik dan keuangannya dibawah 90%, Yaitu:
 - a. Sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kebudayaan, dimana sub kegiatan ini** dengan alokasi anggaran sebesar Rp243.490.000 dan realisasi keuangan Rp122.000.000 atau 50,10 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 85%, hal ini disebabkan oleh kegiatan lomba cabang seni yang dianggarkan pada anggaran perubahan tidak diizinkan pada anggaran perubahan karena adanya tanggap darurat bencana.
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional, **Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kebudayaan,** dalokasi anggaran sebesar Rp463.776.800 dan realisasi keuangan Rp148.543.078 atau 32,03% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 50%, Hal ini disebabkan karena Kegiatan Penampilan Paket Seni Luar Provinsi yang di Anggarkan pada Anggaran Perubahan tidak mendapatkan izin karena adanya Tanggap Darurat Bencana.

Solusi

Untuk Permasalahan yang disampaikan di atas, solusinya adalah:

1. Untuk tahun berikutnya akan dilakukan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan kegiatan direncanakan pada awal tahun anggaran, yaitu pada Tri Wulan II dan III, sehingga dapat dilaksanakan secepatnya.

3.1.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp5.069.836.405 dan realisasi keuangan Rp4.827.866.405 atau 95,23%.

3.1.2.17.1. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan OPD pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan. Rincian pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.069.836.405	4.827.866.405
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.549.836.405	3.358.948.196
2.23.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.762.400	2.762.400
2.23.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	1.277.000	1.277.000
2.23.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.485.400	1.485.400
2.23.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.273.643.435	3.089.964.133
2.23.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.269.726.159	3.086.466.933
2.23.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3.917.276	3.497.200
2.23.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	650.000	650.000
2.23.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	650.000	650.000
2.23.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.424.400	18.421.800
2.23.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.440.000	1.440.000
2.23.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.211.600	10.209.000
2.23.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.241.800	2.241.800
2.23.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.500.000	1.500.000
2.23.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.315.000	2.315.000
2.23.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	716.000	716.000
2.23.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.449.170	233.786.903
2.23.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000
2.23.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.949.170	71.566.903
2.23.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.000.000	161.720.000
2.23.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.907.000	13.362.960
2.23.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.817.000	11.272.960

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
2.23.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.090.000	2.090.000
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	1.455.000.000	1.404.903.969
2.23.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	506.749.000	482.542.110
2.23.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	79.650.000	77.098.905
2.23.02.2.01.0011	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.650.000	11.044.896
2.23.02.2.01.0012	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	21.550.000	16.158.009
2.23.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.500.000	27.175.000
2.23.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	37.904.000	37.889.000
2.23.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	35.000.000	34.561.000
2.23.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	273.816.300	261.936.800
2.23.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	16.678.700	16.678.500
2.23.02.2.02	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	948.251.000	922.361.859
2.23.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.500.000	14.482.500
2.23.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	66.150.000	65.876.000
2.23.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah	220.820.000	214.495.983
2.23.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	298.617.000	290.597.576
2.23.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	348.164.000	336.909.800
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	65.000.000	64.014.240
2.23.03.2.01	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.014.240
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	50.000.000	49.863.240
	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno	15.000.000	14.151.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.277.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.277.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen, dengan capaian kinerja berupa Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.485.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.485.400 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen, dengan capaian kinerja berupa Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.269.726.159 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.086.466.933 atau 94,40% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 420 Orang/bulan ASN, dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Keuangan.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.917.276 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.497.200 atau 89,28% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen, dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp650.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 3 dokumen dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.440.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.440.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.211.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp10.209.000 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 2 paket dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.241.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.241.800 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.500.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 Laporan dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan 2.315.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 716.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 716.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja berupa Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp500.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja berupa Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.949.170 dan realisasi keuangan sebesar Rp71.566.903 atau 96,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan dengan capaian kinerja berupa Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp162.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp161.720.000 atau 99,83% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan dengan capaian kinerja berupa Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.817.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp11.272.960 atau 71,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 7 unit dengan capaian kinerja berupa Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.090.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.090.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 4 unit dengan capaian kinerja berupa Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik.

II. Program Pembinaan Perpustakaan

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.650.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp77.098.905 atau 96,80% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan sebanyak 26 perpustakaan dengan capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.650.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp11.044.896 atau 94,81% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Perpustakaan Nasional di Wilayah Kewenangannya sebanyak 26 Perpustakaan dengan capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
- c. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.550.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp16.158.009 atau 74,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan

ini adalah Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi sebanyak 30 Layanan dengan capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp27.175.000 atau 89,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 3 orang dengan capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.904.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp37.889.000 atau 99,96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan sebanyak 1 Dokumen dengan capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp34.561.000 atau 98,75% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan sebanyak 300 Eksemplar dengan capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
- g. Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp273.816.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp261.936.800 atau 95,66% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Perpustakaan sebanyak 2 Eksemplar dengan capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
- h. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.678.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp16.678.500 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK sebanyak 1 Perpustakaan dengan capaian kinerja berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp14.482.500 atau 99,79% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub

kegiatan ini adalah Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya sebanyak 2 orang dengan capaian kinerja berupa Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.150.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp65.876.000 atau 99,59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sebanyak 13 Perpustakaan dengan capaian kinerja berupa Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.
- c. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.820.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp214.495.983 atau 97,14% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Perpustakaan, dengan capaian kinerja berupa Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.
- d. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dengan alokasi anggaran sebesar Rp298.617.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp290.597.576 atau 97,31% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota sebanyak 600 orang, dengan capaian kinerja berupa Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.
- e. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp348.164.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp336.909.800 atau 96,77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan sebanyak 60 Lokus, dengan capaian kinerja berupa Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.

III. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp49.863.240 atau 99,73% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno sebanyak 1

orang dengan capaian kinerja berupa Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dialihmediakan.

- b. Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp14.151.000 atau 99, 94,34% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan sebanyak 2 Eksemplar dengan capaian kinerja berupa Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dialihmediakan.

C. Analisis Kesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akuntabel	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				1.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				1.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	4 dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4 dokumen Renstra dan Renja yang disusun		
				1.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen evaluasi yang disusun	1 dokumen evaluasi yang disusun		
				1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan ASN Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan ASN Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
				1.02.02. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
				1.03. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				1.03.01. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
				1.04. Administrasi Umum Perangkat Daerah				

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
				1.04. 02. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 paket peralatan rumah tangga	2 paket peralatan rumah tangga		
				1.04. 02. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket Bahan Logistik Kantor Kantor	2 paket Bahan Logistik Kantor Kantor		
				1.04. 03. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket Barang Cetak dan Penggandaan		
				1.04. 04. Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan		
				1.04. 05. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				1.04. 06. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
				1.05. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
				1.05. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				1.05. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				1.05. 03. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
				1.06. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
				1.06.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	7 unit		
				1.06.02. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit		
			Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan	2.01. <i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	- 26 perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten - 11 orang Pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat - 10.982/ 26.275 judul/eksemplar Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	- 26 perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten - 9 orang Pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat - 11.734/ 27.341 judul/eksemplar Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah		
			Melaksanakan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	2.01.01 Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	26 perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan	26 perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan		
			Mengembangkan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah	2.01.02. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26 Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di	26 Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
					Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		
				2.01.03. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	30 Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	30 Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi		
				2.01.04. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3 orang Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	3 orang Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah		
				2.01.05. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen Data dan informasi Perpustakaan		
			• Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2.01.06. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	300 Eksemplar Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	299 Eksemplar Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
				2.01.07. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2 Eksemplar Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Eksemplar Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		
				2.0.08. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Layanan perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Layanan perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
				2.02. <i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	- 11.000 orang pengunjung perpustakaan per tahun -79,67 % Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	- 7. 572 orang pengunjung perpustakaan per tahun -..... % Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		
				2.02.01 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 orang Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 orang Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya		
			Melakukan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	2.02.02. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	13 layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	13 layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		
				2.02.03. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah	1 Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				2.02.04. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	600 Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	600 Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			• Melaksanakan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	2.02.05. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	60 Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	60 Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		
			Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno	3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				3.01. <i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	100% Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan	100% Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan		
			Melaksanakan Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	3.01.01. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 orang Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 orang Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		
				3.01.02. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan pada OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/ fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp12.258.000 dan realisasi keuangan Rp10.709.000 atau 87,36%.

3.1.2.18.1. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan melaksanakan 2 program, 3 kegiatan, 5 sub kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran dan realisasinya pada APBD 2025 terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	12.258.000	10.709.000
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	8.324.000	6.775.000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	5.584.000	5.028.000
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	3.884.000	3.884.000
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.700.000	1.144.000
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	2.740.000	1.747.000
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	1.190.000	1.190.000
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1.550.000	557.000
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	3.934.000	3.934.000
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	3.934.000	3.934.000
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip AkibatBencana	3.934.000	3.934.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Arsip

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.884.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.884.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan sebanyak 5.200 berkas dengan capaian kinerja berupa Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata.
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.700.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.144.000 atau 67,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 15 Laporan dengan capaian kinerja berupa Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata.

2. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.190.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp557.000 atau 35,94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN dan Digunakan sebanyak 10 Pengguna dengan capaian kinerja berupa Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata.
- b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kotadengan alokasi anggaran sebesar Rp1.550.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp557.000 atau 35,94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 15 Laporan dengan capaian kinerja berupa Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata.

II. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

1. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.934.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.934.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana sebanyak 45 Arsip dengan capaian kinerja berupa Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip.

C. Analisis Kesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Meningkatkan kepatuhan OPD/ Nagari terhadap kebijakan kearsipan	1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	37,70 % Persentase OPD atau Nagari yang menerapkan arsip secara baku	37,70 % Persentase OPD atau Nagari yang menerapkan arsip secara baku		
				1.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1 unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata	1 unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata		
			Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya	1.01.0	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	550 Berkas Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	550 Berkas Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		
				1.01.0	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
				1.01.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Instansi Penerapan E-arsip terintegrasi	1 Instansi Penerapan E-arsip terintegrasi		
				1.01.0	Penyediaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	10 pengguna Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	10 pengguna Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN		
				1.01.0	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	15 Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Meningkatnya OPD/ Nagari dan instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	100 % Persentase OPD/Nagari dan Instansi lainnya yang telh dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	100 % Persentase OPD/Nagari dan Instansi lainnya yang telh dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip		
				2.01. <i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</i>	8 Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	8 Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip		
				2.01.0 1 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	45 Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	45 Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan bidang kearsipan pada OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 urusan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp39.029.105.340 dan realisasi keuangan Rp37.500.861.730 atau 96,08%. Rincian OPD pelaksana urusan berikut alokasi dan realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2024

No	Urusan Dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.029.105.340	37.500.861.730	96,08
3.1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.505.734.496	6.296.372.862	96,78
1	Dinas Perikanan	6.505.734.496	6.296.372.862	96,78
3.2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	591.569.350	588.241.291	99,44
1	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	591.569.350	588.241.291	99,44
3.3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.819.179.049	26.576.703.879	95,53
1	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan	18.104.996.301	17.332.028.655	95,73
2	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	9.714.182.748	9.244.675.224	95,17
3.4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	67.786.400	67.194.170	99,13
1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67.786.400	67.194.170	99,13
3.5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.043.867.245	3.971.380.728	98,21
1	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	4.043.867.245	3.971.380.728	98,21
3.6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	968.800	968.800	100,00
1	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	968.800	968.800	100,00
	TOTAL	39.029.105.340	37.500.861.730	96,08

3.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total anggaran sebesar Rp6.505.734.496 dan realisasi keuangan Rp6.296.372.862 atau 96,78%.

3.1.3.1.1 Dinas Perikanan

A. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perikanan merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD Tahun 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS PERIKANAN	6.505.734.496	6.296.372.862
3.25..01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.553.883.937	4.382.463.623
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.605.000	20.570.000
3.25.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.605.000	20.570.000
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.187.984.312	4.025.374.283
3.25.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.187.984.312	4.025.374.283
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.411.200	49.983.252
3.25.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.303.000	1.295.000
3.25.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.923.500	18.721.564
3.25.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.800.000	1.791.300
3.2.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.700.200	6.700.100
3.25.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.082.000	1.920.000
3.25.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	38.500	38.500
3.25.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.564.000	19.516.788
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.413.425	123.125.644
3.25.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000
3.25.20.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.793.000	32.505.219
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.470.000	163.410.444

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.25.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.650.000	149.646.444
3.25.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.270.000	1.270.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.885.000.000	1.847.069.901
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.885.000.000	1.847.069.901
3.25.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.885.000.000	1.847.069.901
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	66.850.559	66.839.338
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	66.850.559	66.839.338
3.25.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	66.850.559	66.839.338

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp20.605.000 dan realisasi keuangan Rp20.570.000 atau 99,83% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp4.187.984.312 dan realisasi keuangan Rp4.025.374.283 atau 96,12 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran Rp1.303.000 dan realisasi keuangan Rp1.295.000 atau 99,39% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp18.923.500 dan realisasi keuangan Rp18.721.564 atau 98,93% serta realisasi fisik

- mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran Rp 1.800.000 dan realisasi keuangan Rp 1.791.300 atau 99,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan logistik Kantor
 - d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp 6.700.200 dan realisasi keuangan Rp 6.700.100 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terbayarnya Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp 2.082.000 dan realisasi keuangan Rp 1.920.000 atau 92,22% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran Rp 38.500 dan realisasi keuangan Rp 38.500 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp 19.564.000 realisasi keuangan Rp 19.516.788 atau 99,76% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran Rp 600.000 dan realisasi keuangan Rp 600.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya laporan jasa surat menyurat.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran Rp 40.793.000 dan realisasi keuangan Rp 32.505.219 atau 79,68% serta realisasi fisik 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terbayarnya tagihan telfon, air dan listrik.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran Rp 149.650.000 dan realisasi keuangan Rp 149.646.444 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp 1.270.000 dan realisasi keuangan Rp 1.270.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan alokasi anggaran Rp 1.885.000.000 dan realisasi keuangan Rp 1.847.069.901 atau 97,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya.

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- a. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dengan alokasi anggaran Rp 66.850.559 dan realisasi keuangan Rp 66.839.338 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Meningkatnya Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	DINAS PERIKANAN	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kunerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kunerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kunerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor	Bahan logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik Kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Barang Cetak dan	Terbayarnya Barang		

No.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu mencukupi	Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10.000	Tersedianya materai 10.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rutin tagihan telfon, air dan listrik	Terbayarnya tagihan telfon, air dan listrik		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah				

No.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan kecil	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Terlaksananya pengembangan kapasitas nelayan kecil		
				Program Perikanan Budidaya				
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada OPD Dinas Perikanan tidak terdapat permasalahan yang berarti. Persentase realisasi keuangan di Dinas Perikanan adalah 98,98% dari Alokasi anggaran dengan persentase realisasi fisik sebesar 99,8% . Capaian ini terkategori sangat tinggi

3.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp591.569.350 dan realisasi keuangan Rp588.241.291 atau 99,44%.

3.1.3.2.1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan OPD Utama pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan melaksanakan 2 Program, 4 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

KodeRekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	591.569.350	588.241.291
3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	504.258.800	501.290.391
3.26.02.2.02.	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota	333.258.800	333.400.491
3.26.02.2.02.04.	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	336.258.800	333.400.491
3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	168.000.000	167.889.900
3.26.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	168.000.000	167.889.900
3.26.05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonommi Kreatif	87.310.550	86.951.000
3.26.05.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	26.118.800	25.998.000
3.26.05.2.01.09.	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	26.118.800	25.998.000
3.26.05.2.02.	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	61.191.750	60.953.000
3.26.05.2.01.09.	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	61.191.750	60.953.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran dan realisasi serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp336.258.800 dan realisasi keuangan Rp333.400.491 atau 99,15% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah peningkatan sarana prasarana pariwisata Lembah Harau dengan capaian kinerja berupa peningkatan sarana prasarana wisata di objek wisata unggulan.

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp168.000.000 dan realisasi keuangan Rp167.889.900 atau 99,34% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Outsorsing Pemungut Retribusi Lembah Harau.

II. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.118.800 dan realisasi keuangan Rp25.998.000 atau 99,54% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemberdayaan kepariwisataan melalui event pariwisata yang melibatkan masyarakat pelaku wisata, dengan capaian kinerja berupa pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.191.750 dan realisasi keuangan Rp60.953.000 atau 99,61% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pelatihan pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota dengan peserta 25 orang dengan capaian kinerja berupa peningkatan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pariwisata		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
			Sub Keg	1 Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 lokasi	1 lokasi		
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
			Sub Keg	2 Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota				
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
			Sub Keg	1 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan		
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				
			Sub Keg	1 Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	25 orang	25 orang		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat dilaksanakan dengan baik dimana Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (99,44%).

3.1.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp27.819.179.049 dan realisasi keuangan Rp26.576.703.879 atau 95,53%.

3.1.3.3.1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan merupakan OPD pendukung pelaksana urusan pertanian dengan melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 36 Urusan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	18.104.996.301	17.332.028.655
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.751.903.901	15.177.431.980
3.27.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.411.700	76.607.700
3.27.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.194.000	11.194.000
3.27.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.468.000	4.468.000
3.27.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4.491.000	4.481.000
3.27.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.215.000	3.213.000
3.27.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3.587.000	3.585.000
3.27.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.260.700	21.260.700
3.27.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.196.000	28.406.000
3.27.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.636.138.701	14.104.674.174
3.27.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.619.918.773	14.088.482.574

3.27.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.018.390	11.006.600
3.27.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.780.180	1.780.000
3.27.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.328.998	2.328.000
3.27.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.092.360	1.077.000
3.27.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.339.000	4.304.000
3.27.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	850.000	815.000
3.27.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.489.000	3.489.000
3.27.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.107.500	1.070.000
3.27.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.107.500	1.107.500
3.27.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.055.000	4.900.000
3.27.01.2.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.445.000	2.340.000
3.27.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.610.000	2.560.000
3.27.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.064.500	309.738.562
3.27.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.078.000	11.505.360
3.27.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.300.000	9.617.369
3.27.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.724.000	56.088.594
3.27.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.759.500	17.691.562
3.27.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.990.000	3.928.400
3.27.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.213.000	210.907.277
3.27.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.025.500	20.146.500
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.025.500	20.146.500
3.27.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	464.400.000	447.890.744
3.27.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000
3.27.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.000.000	70.540.744
3.27.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.400.000	374.350.000
3.27.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215.362.000	208.100.300
3.27.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.400.000	169.776.300
3.27.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.590.000	22.437.000
3.27.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.372.000	15.887.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	729.189.000	687.927.719
3.27.02.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	722.783.500	681.557.719
3.27.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	718.927.500	677.736.719

3.27.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.856.000	3.821.000
3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6.405.500	6.370.000
3.27.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6.405.500	6.370.000
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	747.451.300	615.574.956
3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	507.451.300	377.573.948
3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B di Kabupaten/Kota	75.000.000	38.660.244
3.27.03.2.01.17	Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	432.451.300	338.913.704
3.27.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	240.000.000	238.001.008
3.27.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	240.000.000	238.001.008
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	109.298.500	107.816.000
3.27.05.2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	109.298.500	107.816.000
3.27.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	104.648.500	103.171.000
3.27.05.2.01.02	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4.650.000	4.645.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.442.500	4.442.500
3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.442.500	4.442.500
3.27.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	4.442.500	4.442.500
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	762.711.100	738.835.500
3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	762.711.100	738.835.500
3.27.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	584.706.000	573.686.000
3.27.07.2.01.05	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	178.005.100	165.149.500

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran hasil penyelenggaraan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.194.000 dan realisasi keuangan Rp11.194.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen Rencana Kerja Distanhortbun, 2 Dokumen Rencana Kerja Perubahan Distanhortbun.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.468.000 dan realisasi keuangan Rp4.468.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen RKA dinas tahun anggaran 2025.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.491.000 dan realisasi keuangan Rp4.481.000 atau 99,78% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen RKA perubahan tahun anggaran 2025.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.215.000 dan realisasi keuangan Rp3.213.000 atau 99,94% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen DPA dinas tahun anggaran 2025.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.587.000 dan realisasi keuangan Rp3.585.000 atau 99,94% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen DPA perubahan tahun anggaran 2025.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.260.700 dan realisasi keuangan Rp21.260.700 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKjIP), 1 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKPJ), dan 12 dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas .
- g. Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.196.000 dan realisasi keuangan Rp28.406.000 atau 97,29% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan database tahun 2025

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.619.918.773 dan realisasi keuangan Rp14.088.482.574 atau 96,36% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.018.390 dan realisasi keuangan Rp11.006.600 atau 99,89% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.780.180 dan realisasi keuangan Rp1.780.000 atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.328.998 dan realisasi keuangan Rp2.328.000 atau 99,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
- e. Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.092.360 dan realisasi keuangan Rp1.077.000 atau 98,59% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp850.000 dan realisasi keuangan Rp815.000 atau 95,88% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- b. Sub Kegiatan Penata usahaan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.489.000 dan realisasi keuangan Rp3.489.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaporan pengelolaan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.107.500 dan realisasi keuangan Rp1.070.000 atau 96,61% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.445.000 dan realisasi keuangan Rp2.340.000 atau 95,71% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tercapinya 1 dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.078.000 dan realisasi keuangan Rp11.505.360 atau 95,26% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

- b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.300.000 dan realisasi keuangan Rp9.617.369 atau 93,37% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 paket peralatan perlengkapan kantor.
- c. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.724.000 dan realisasi keuangan Rp56.088.594 atau 98,88% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 paket bahan logistik kantor.
- d. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.759.500 dan realisasi keuangan Rp17.691.562 atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 Paket barang catatan dan penggadaan.
- e. Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.990.000 dan realisasi keuangan Rp3.928.400 atau 98,46% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tercapinya 12 dokumen Laporan Fasilitasi kunjungan tamu.
- f. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp212.213.000 dan realisasi keuangan Rp210.907.277 atau 99,38% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 66 kali rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000 dan realisasi keuangan Rp3.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 laporan penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.000.000 dan realisasi keuangan Rp70.540.744 atau 81,08% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedinya 19 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp374.400.000 dan realisasi keuangan Rp374.350.000 atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 47 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor..

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.400.000 dan realisasi keuangan Rp169.776.300 atau 99,63% serta realisasi fisik

kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarkannya 161 unit pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara.

- b. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.590.000 dan realisasi keuangan Rp22.437.000 atau 95,11% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya 60 unit Peralatan dan mesin lainnya.
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.372.000 dan realisasi keuangan Rp15.887.000 atau 74,34% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya 19 gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- a. Sub kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dengan sumber dana APBD dan DBHCHT Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp718.927.500 dan realisasi keuangan Rp677.736.719 atau 94,27% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya:

1. Pengadaan Cultivator (DBHCHT) sebanyak 5 unit, yang dialokasikan untuk Kelompok Tani Puncak Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) unit, Kelompok Tani Tunas Permata Jaya Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan 1 (satu) unit, Kelompok Tani Berkat Yakin Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) unit, Kelompok Tani Pejuang Tani Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru 1 (satu) unit dan Kelompok Tani Piliang Tobiang Nagari Situjuah Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari 1 (satu) unit.
2. Pengadaan Saprodi Tembakau (DBHCHT) sebanyak 10 paket, terdiri dari benih tembakau, pupuk NPK, pupuk kompos, fungisida (dithane M 45) dan insektisida (curacron) yang dialokasikan untuk Kelompok Tani Puncak Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Tunas Permata Jaya Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Berkat Yakin Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Pejuang Tani Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru 1 (satu) paket, Kelompok Tani Piliang Tobiang Nagari Situjuah Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari 1 (satu) paket, Kelompok Tani Bundo Saiyo Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari 1 (satu) paket, Kelompok Tani Harapan Indah Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Mustika Alam Nagari Baruah Gunuang

Kecamatan Bukik Barisan 1 (satu) paket, KWT Sinar Baru Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan 1 (satu) paket, Kelompok Tani Bina Tani Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh 1 (satu) paket.

3. Pengadaan bantuan benih kakao sebanyak 140.000 biji dan saprodi benih kakao melalui UPTD Perbenihan kepada mitra Penagkar berupa polybag ukuran 15 x 21 sebanyak 650 kg, paranet 3000 meter, pupuk kompos 60.000 kg, Fungisida (Dithane M-45 70 bungkus ukuran 500 gr atau 35 kg).
 4. Pengadaan bantuan benih kakao yang bersumber dari dana DAU untuk mendukung kegiatan The Central of Agro melalui UPTD Perbenihan diberikan sebanyak 140.000 biji, dialokasikan untuk 10 Kelompok tani mitra penangkar yang tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya yaitu: Keltan Pejuang Tani Nagari Suayan Kec. Akabiluru (150.000 biji), PT.Syahdu Farm Avocado (10.000 biji), Keltan Taram Sejahtera Nagari Taram Kec. Harau (10.000 biji), Keltan Saiyo Sakato Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban (30.000 biji, Gapoktan Subaladuang Nagari Sei. Kamuyang Kec. Luak (10.000 biji), Keltan Subrata Mandiri Nagari Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari (6.000 biji), Keltan Bintang Nagari Andiang Kec. Suliki (19.000 biji), KWT Sarugo Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh (20.000 biji), Keltan Harapan Jaya Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh (10.000 biji), dan Keltan Tunas Permata Jaya Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan (10.000 biji).
 - b. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.856.000 dan realisasi keuangan Rp3.821.000 (99,09%), serta realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penunjang kegiatan monitoring dan pengawasan alsintan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme**
Kewenangan Kabupaten/Kota
- a. Sub kegiatan pemanfaatan SDG hewan/tanaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.405.500 dan realisasi keuangan Rp6.370.000 (99,45%) serta realisasi fisik kegiatan 100% Keluaran kegiatan ini adalah berupa penyediaan benih penjenis (BS) varietas junjuang 20 kg, varietas banang pulau 20,kg dan benih dasar (BD) varietas junjuang 80 kg, varietas banang pulau 80 kg

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B di Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000 dan realisasi keuangan Rp38.660.244 atau 51,55 % serta realisasi fisik sub kegiatan

mencapai 100 % Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LC2B yang dikelola.

- b. Sub kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp432.451.300 dan realisasi keuangan Rp338.913.704 atau 78,37 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 2 Dokumen yaitu Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2029 dan Peta Kesesuaian Lahan Komoditi “The Central Of Agro” di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.000.000 dan realisasi keuangan Rp238.001.008 atau 99,17 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbangunnya 4 unit jalan usaha tani di Kelompok Tani Semoga Berkah Nagari Kurai Kecamatan Suliki, Kelompok Tani Tunas Permata Jaya Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan, Kelompok Tani Pucuk Mudo Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, Kelompok Tani Saiyo Sakato Nagari Bukit Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban, dengan capaian kinerja berupa Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas.

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.648.500 dan realisasi keuangan Rp103.171.000 atau 98.58% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan dengan capaian kinerja Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Gerakan/Penerapan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan yang dilaksanakan di Kelompok Tani Batu Kudo Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak dan Kelompok Tani Tapian Mandi Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak pada komoditi tanaman padi.
- b. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.650.000 dan realiasi keuangan Rp4.645.000 atau 99.89% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan dengan capaian kinerja sebagai berikut: Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Kegiatan yang dilakukan berupa Bimbingan Teknis Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) di Kelompok Wanita Tani Sejahtera Nagari Gurun Kecamatan Harau pada komoditi pertanian

V. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian dengan Alokasi anggaran sebesar Rp4.442.500 dan realisasi keuangan Rp4.442.500 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi dengan capaian kinerja sebagai berikut: Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian. Kegiatan yang dilakukan berupa Sosialisasi Perizinan Usaha Pertanian di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

VI. Program Penyuluhan

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- a. Sub kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp586.706.000 dan realisasi keuangan Rp573.686.000 atau 98,12% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 13 Kecamatan untuk 125 Orang Penyuluh Pertanian dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP)
Pembayaran Biaya Operasional penyuluh sebanyak 125 orang penyuluh di 13 kecamatan dengan alokasi dana sebesar 570.000.000 dan realisasi keuangan Rp560.180.000 atau 98,28% realisasi keuangan serta realisasi fisik mencapai 100%
 - b) Pembayaran Honor THL-TBPP.
Pembayaran Honor THL-TBPP sebanyak 1 orang dengan alokasi dana sebesar Rp.14.400.000 dan realisasi keuangan Rp.13.200.000 atau 91,67% realisasi keuangan serta realisasi fisik 100%.
 - c) Pembayaran iuran Jaminan /Asuransi.
Pembayaran iuran Jaminan /Asuransi sebanyak 1 orang dengan alokasi dana sebesar Rp.306.000 dan realisasi keuangan Rp306.000 atau 100% realisasi keuangan serta realisasi fisik mencapai 100%.

- b. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp178.005.100 dan realisasi keuangan Rp165.145.500 atau 92.78% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi sebanyak 7 Unit dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekolah Lapang GAP Bawang Merah

Keltan/ Petani/ Penerima		Alamat		
		Jorong	Nagari	Kecamatan
1	Lereng Sago Sepakat		Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari



SL GAP Bawang Merah KT Lereng Sago Sepakat Kec.Situjuh Limo Nagari

2. Sekolah Lapangan GAP Jagung

Keltan/ Petani/ Penerima		Alamat		
		Jorong	Nagari	Kecamatan
1	Subur Berkah		Jopang Manganti	Mungka
2	Bundo Saiyo		Balai Panjang	Lareh Sago Halaban
3	Sakek Perintis		Guguak VIII Koto	Guguak
4	Berkah		Koto Tuo	Harau
5	Saiyo Sakato		Bukik Sikumpa	Lareh Sago Halaban



SL GAP Jagung KT Subur Berkah Kec. Mungka



SL GAP Jagung Bundo Saiyo Kec. Lareh Sago Halaban



SL GAP Jagung KT Sakek Perintis Kec. Guguak VIII Koto



SL GAP Jagung Poktan Berkah Kec. Harau



SL GAP Jagung KT Saiyo Sakato Kec. Lareh Sago
Halaban

3. Sekolah Lapangan GAP Padi

Keltan/ Petani/ Penerima		Alamat		
		Jorong	Nagari	Kecamatan
1	Tarantang Saiyo		Tarantang	Bukit Barisan



SL GAP Padi Kelompok Tani Tarantang Saiyo Kec. Bukit Barisan

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Pertanian		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen Renja: 1 Dokumen - Dokumen Renja Perubahan: 1 Dokumen	- Dokumen Renja: 1 Dokumen - Dokumen Renja Perubahan: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	- RKA Dinas: 1 Dokumen	- RKA Dinas: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	- Perubahan RKA Dinas: 1 Dokumen	- Perubahan RKA Dinas: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	- DPA Dinas: 1 Dokumen	- DPA Dinas: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	- Perubahan DPA Dinas: 1 Dokumen	- Perubahan DPA Dinas: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKjIP): 1 Dokumen - Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKPJ): 1 Dokumen - Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas: 12 Dokumen	- Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKjIP): 1 Dokumen - Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKPJ): 1 Dokumen - Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas: 12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Database: 1 Dokumen	- Dokumen Database: 1 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Fasilitas Gaji dan Tunjangan ASN: 1 Tahun	- Fasilitas Gaji dan Tunjangan ASN: 1 Tahun		

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas: 1 Dokumen	- Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Dokumen Tanggapan Pemeriksaan: 1 Dokumen	- Dokumen Tanggapan Pemeriksaan: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Laporan Keuangan Bulanan: 12 Dokumen	- Laporan Keuangan Bulanan: 12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan Prognosis: 2 Dokumen	- Laporan Prognosis: 2 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan Barang Milik Daerah: 1 Dokumen	- Laporan Barang Milik Daerah: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Penatausahaan Barang Milik Daerah: 1 Tahun	- Penatausahaan Barang Milik Daerah: 1 Tahun		
				Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Laporan penilaian Kinerja Pegawai: 1 Dokumen	- Laporan penilaian Kinerja Pegawai: 1 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Laporan dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian: 1 Dokumen	-Laporan dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian: 1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah: 1 dokumen	- Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah: 1 dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan perlengkapan gedung kantor /	Tersedianya sarana dan perlengkapan gedung kantor / kebutuhan kantor		

					kebutuhan kantor			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK untuk dinas dan BPP di 13 Kecamatan	Tersedianya ATK untuk dinas dan BPP di 13 Kecamatan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlayannya tamu pada Distanhortbun	Terlayannya tamu pada Distanhortbun		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik ke dalam daerah maupun keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik ke dalam daerah maupun keluar daerah		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya: 1 unit Komputer dan 2 unit Printer	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya: 1 unit Komputer dan 2 unit Printer		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos / materai untuk kebutuhan kantor	Tersedianya benda pos / materai untuk kebutuhan kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik untuk kantor Distanhortbun dan BPP di 13 Kecamatan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik untuk kantor Distanhortbun dan BPP di 13 Kecamatan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 bagi perorangan dan kendaraan dinas jabatan berupa pajak, suku cadang dan service	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 bagi perorangan dan kendaraan dinas jabatan berupa pajak, suku cadang dan service		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan mesin kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan mesin kantor		

				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Distanhortbun dan kantor BPP di 13 Kecamatan	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Distanhortbun dan kantor BPP di 13 Kecamatan		
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
				Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian				
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebanyak 1 laporan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebanyak 1 laporan		
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian sebanyak 1 Laporan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian sebanyak 1 Laporan		
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	-	-		
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen		
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
				Kegiatan pengembangan prasarana pertanian				
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B di Kabupaten/Kota	1 Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B	1 Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B		
				Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	2 Dokumen Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-1 Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2029 -1 Dokumen Peta Kesesuaian Lahan Komoditi "The Central Of Agro"		

				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian				
				Sub Kegiatan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4 unit Jalan Usaha Tani	4 unit Jalan Usaha Tani		
				Program pengendalian dan penanggulan bencana pertanian				
				Kegiatan pengendalian dan penanggulan bencana pertanian				
				Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Ha	Luas serangan OPT yang dikendalikan 2 Ha		
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Ha	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 1 Ha		
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				KEGIATAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Sub KegiatanPembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 Laporan	Tersusunnya laporan izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan		
				Program penyuluhan pertanian				
				Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian				
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	13 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 13Kecamatan untuk 125 orang Penyuluh Pertanian		
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	7 Unit	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi sebanyak 7 Unit		

D. Permasalahan dan Solusi

Ditahun 2025 semua program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terlaksana 100 % dan tidak ada permasalahan yang dihadapi.

3.1.3.3.2. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan OPD pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian dengan melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 37 Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.714.182.748	9.244.675.224
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.533.827.210	9.072.358.078
3.27.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.760.800	17.648.800
3.27.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.760.800	17.648.800
3.27.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.158.268.810	8.701.492.269
3.27.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.158.268.810	8.701.492.269
3.27.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.123.200	83.463.200
3.27.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.093.000	33.083.000
3.27.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.882.200	17.292.200
3.27.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	240.000	240.000
3.27.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.908.000	32.848.000
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.463.840	22.120.000
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.463.840	22.120.000
3.27.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.002.100	116.030.549
3.27.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000
3.27.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.902.100	35.930.549
3.27.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.600.000	79.600.000
3.27.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.208.460	131.603.260
3.27.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	120.056.160	119.488.260

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
3.27.01.2.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.152.300	12.115.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	110.931.800	108.175.050
3.27.02.2.03	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kab/Kota	110.931.800	108.175.050
3.27.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	110.931.800	108.175.050
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	24.269.550	18.988.000
3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan , penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit menular dalam daerah kabupaten/kota	23.769.050	18.487.500
3.27.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.769.050	18.487.500
3.27.04.2.04	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat Veteriner	500.500	500.500
3.27.04.2.04.10	Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	500.500	500.500
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	500.000	500.000
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	500.000	500.000
3.27.06.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	500.000	500.000
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	44.654.188	44.654.096
3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan penyuluh pertanian	44.654.188	44.654.096
3.27.07.2.01.05	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/Kota	1.654.188	1.654.096
3.27.07.2.01.09	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomidan Inovasi Pertanian	43.000.000	43.000.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp17.760.800 dan realisasi keuangan Rp17.648.800 atau 99,37% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi laporan capaian kinerja

dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, LKJIP, PMPRB, SAKIP dan SPIP.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.158.268.810 dan realisasi keuangan Rp8.701.492.269 atau 95,01% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan honor pegawai dengan capaian kinerja berupa tersedianya gaji dan tunjangan ASN, dan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.093.000 dan realisasi keuangan Rp33.083.000 atau 94,27% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor dengan capaian kinerja berupa tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.882.200 dan realisasi keuangan Rp17.292.200 atau 96,70% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa tersedianya bahan cetak dan penggandaan untuk kelengkapan administrasi.
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.000 dan realisasi keuangan Rp240.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan makan minum tamu dengan capaian kinerja berupa tersedianya makan minum tamu.
- d. Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.908.000 dan realisasi keuangan Rp32.848.000 atau 99,82% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dengan capaian kinerja berupa terlaksananya perjalanan dinas biasa dan tersedianya makan dan minum rapat.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.463.840 dan realisasi keuangan Rp22.120.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 98,47%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jumlah paket mebel dengan capaian kinerja berupa tersedianya jumlah paket mebel.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000 dan realisasi keuangan Rp500.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai

100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja berupa tersedianya benda pos materai 10.000.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.902.100 dan realisasi keuangan Rp35.930.549 atau 97,37% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya belanja jasa kantor dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembayaran tagihan telepon, tagihan air dan tagihan listrik.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.600.000 dan realisasi keuangan Rp79.600.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja berupa tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja berupa tersedianya belanja jasa administrasi.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar dan realisasi Rp120.056.160 dan realisasi keuangan Rp119.488.260 atau 99,53% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembayaran jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.152.300 dan realisasi keuangan Rp12.115.000 atau 99,69% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dengan capaian kinerja berupa pemeliharaan asset tetap lainnya.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.931.800 dan realisasi keuangan Rp108.175.050 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 97,51%. Sisa Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp2.756.750 . sisa anggaran tersebut karena harga pembelian N2 Cair dibawah harga satuan di DPA dan tidak bias melakukan perubahan harga komponen pada waktu input RKA Perubahan. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Tersedianya rozen semen sebanyak 7.593 dosis.
 - Tersedianya N2 Cair sebanyak 1.375 liter.

- Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain selama 6 bulan

III. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Pemberantasan penyakit Hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.769.050 dan realisasi keuangan Rp18.487.500 atau 77,78% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Sisa anggaran Rp5.281.550. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah menurunnya kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam satu daerah kabupaten/kota.

2. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner:

- a. Sub kegiatan Pengawasan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.500 dan realisasi keuangan Rp500.500 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik.

IV. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

- a. Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.500 dan realisasi keuangan Rp500.500 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan.

V. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan Pelaksana Penyuluh Pertanian

- a. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.654.188 dan realisasi keuangan Rp1.654.096 atau 99,99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Melaksanakan kegiatan penunjang dan operasional lainnya untuk kelancaran monitoring kelompok penerima kegiatan Sekolah Lapang Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomidan Inovasi Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.000.000 dan realisasi keuangan Rp43.000.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Melaksanakan kegiatan sayembara desain logo, Lima Puluh Kota The Central of Agro untuk mendapatkan desain logo terbaik yang akan menjadi ikon, simbol, citra dan identitas

visual yang melekat, mudah diaplikasikan melalui berbagai media cetak atau elektronik yang mampu mendeskripsikan Kabupaten Lima Puluh kota sebagai pusat agrobisnis dan agroindustri.

- Melaksanakan launching logo dengan melakukan sosialisasi dan publikasi pemakaian logo Lima Puluh Kota The Central of Agro secara resmi kepada seluruh stake holder terkait dan masyarakat luas, sehingga diharapkan secara bersama-sama dapat berperan aktif dalam mempromosikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat agrobisnis dan agroindustri dengan berbagai produk unggulan daerah.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan							
		URUSAN PILIHAN						
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1.1				Kegiatan Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.1.1				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-		
1.1.5				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-		
1.1.6				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
1.2				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.2.1				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/ bulan	92 Orang/ bulan		
1.2.4				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-		
1.3				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	-	-		
1.4				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.4.1				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-		
1.4.2				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket		

1.4.3				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
1.4.4				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		
1.4.5				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		
1.4.6				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	28 unit	28 unit		
1.6				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.6.1				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
1.6.2				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan		
1.6.3				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
1.7				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.7.1				Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	58 Unit	58 Unit		
1.7.2				Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30Unit	30 Unit		
2				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
2.2				Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kab/Kota				
2.2.1				Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaen/Kota				

				Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak	-	-		
				Sub Kegiatan Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	-	-		
2.4				Kegiatan Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain				
2.4.1				Sub Kegiatan Pengadaan benih ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-		
3				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
3.1				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian				
3.1.1				Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	-	-		
4				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
4.1				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan , penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit menular dalam daerah kabupaten/kota				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	-		
				Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota				
4.1.2				Sub Kegiatan Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	-	-		
4.3				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat Veteriner				

4.3.1				Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan produk Hewan	-	-		
				Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha		
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				
				Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	1 Laporan	1 Laporan		
6				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
6.1				Kegiatan Pelaksanaan penyuluh pertanian				
6.1.2				Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit		
				Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomidan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan Bidang Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak terdapat permasalahan yang berarti Alokasi Anggaran dan realisasi keuangan/ fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksanan dengan baik.

3.1.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp67.786.400 dan realisasi keuangan Rp67.194.170 atau 99,13%.

3.1.3.4.1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Perangkat Daerah utama pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan melaksanakan 2 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 38 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	67.786.400	67.194.170
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	54.330.400	54.277.670
3.30.04.2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.956.000	19.927.000
3.30.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	19.956.000	19.927.000
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	34.374.400	34.350.670
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	34.374.400	34.350.670
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	13.456.000	12.916.500
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	13.456.000	12.916.500

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	13.456.000	12.916.500

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.956.000 dan realisasi keuangan Rp19.927.000 atau 99,85% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% . Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dengan capaian kinerja tersedianya laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.

2. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.374.400 dan realisasi keuangan Rp34.350.670 atau 99,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pasar murah 2 (dua) kali dengan capaian kinerja berupa tersedianya laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan .pasar khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota.

II. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.456.000 dan realisasai keuangan Rp12.916.500 atau 95,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP dengan capaian kinerja berupa meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	Perangkat Daerah	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		I.		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	20%	20%	
					1.	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9 sembako	9 sembako	
					a.	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	240 laporan	240 laporan	
					2.	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	4 kali	2 kali	
					b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	
				III.		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100%	100%	
					1.	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	13 kecamatan	13 kecamatan	
					a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100 unit	264 unit	

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Alokasi dana dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, secara umum realisasi fisik 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan.

3.1.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp4.043.867.245 dan realisasi keuangan Rp3.971.380.728 atau 98,21%.

3.1.3.5.1 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan Pilihan Perindustrian. Dengan melaksanakan 3 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub. Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan perindustrian. Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 39 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan,Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Alokasi Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
3 31 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.921.613.845	3.849.570.493
3 31 01 2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000
3 31 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000
3 31 01 2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.723.783.273	3.654.998.902
3 31 01 2.02 0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.722.783.273	3.654.011.902
3 31 01 2.02 0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.000.000	987.000
3 31 01 2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	992.000
3 31 01 2.05 0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1.000.000	992.000
3 31 01 2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.567.984	31.369.600
3 31 01 2.06 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.497.000	2.480.000
3 31 01 2.06 0004	Penyediaan bahan logistik kantor	7.433.000	7.332.000

3 31 01 2.06 0005	Penyediaan barang cetakan dan penggaandaan	3.204.984	3.204.600
3 31 01 2.06 0008	Fasilitasi kunjungan tamu	3.480.000	3.400.000
3 31 01 2.06 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	14.953.000	14.953.000
3 31 01 2.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.800.000	4.800.000
3 31 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.	4.800.000	4.800.000
3 31 01 2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.375.400	125.612.391
3 31 01 2.08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.063.400	41.672.703
3 31 01 2.08 0004	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	84.312.000	83.939.688
3 31 01 2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.087.188	30.797.600
3 31 01 2.09 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26.487.166	25.197.600
3 31 01 2.09 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.850.000	4.850.000
3 31 01 2.09 0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	750.022	750.000
3 31 02	Program: Perencanaan dan pembangunan industri	14.801.700	14.791.292
3 31 02 2.01	Kegiatan; Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kab/Kota	14.801.700	14.791.292
3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	731.000	731.000
3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	6.908.200	6.902.592
3 31 02 2.01 0006	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	7.162.500	7.157.700
3 31 04	Program: Pengelolaan sistem informasi industri nasional	107.451.700	107.018.943
3 31 04 2.01	Kegiatan: Penyediaan Informasi untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabuatrn/Kota	107.451.700	107.018.943
3 31 04 2.01 0001	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	6.166.000	6.151.000
3 31 04 2.01 0002	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SIINas	101.285.700	100.867.943

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,98%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersediannya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen.

2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.723.783.273 dan realisasi keuangan Rp3.654.998.902 atau 98,15% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK), adapun jumlah PNS sebanyak 36 orang dan PPPK sebanyak 7 orang, dengan capaian kinerja berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan realisasi keuangan Rp.987.000 atau 98,70%,. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja berupa jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000 dan realisasi keuangan Rp1.992.000 atau 99,60% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yaitu 1 dokumen.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.497.000 dan realisasi keuangan Rp2.480.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,32%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi pelayanan umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan yaitu 1 paket.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.433.000 dan realisasi keuangan Rp7.323.000 atau 98,64% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik kantor, dengan capaian kinerja berupa jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yaitu 1 paket.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.204.984 dan realisasi keuangan Rp3.204.600 atau 99,99% serta realisasi fisik

kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan kantor, dengan capaian kinerja berupa jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yaitu 1 paket.

- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.480.000 dan realisasi keuangan Rp.3.400.000 atau 97,70% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi pelayanan kunjungan tamu, dengan capaian kinerja berupa jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yaitu 1 laporan.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.953.000 dan realisasi keuangan Rp14.953.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi pelayanan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja berupa jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu 1 laporan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000 dan realisasi keuangan Rp.4.800.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja berupa jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yaitu unit.

6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.063.400 dan realisasi keuangan Rp.41.672.703 atau 96,77 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yaitu terbayarnya telpon/internet dan Listrik selama 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yaitu 1 laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.312.000 dan realisasi keuangan Rp.83.939.668 atau 99,56 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor yaitu terbayarnya honor THL selama 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan yaitu 1 laporan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.487.166 dan realisasi keuangan Rp.25.197.600 atau 95,13% serta realisasi fisik

kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yaitu BBM kendaraan dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan serta suku cadang kendaraan dinas. dengan capaian kinerja berupa jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yaitu sebanyak 2 unit roda 4 dan 14 unit roda 2.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.850.000 dan realisasi keuangan Rp4.850.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya, dengan capaian kinerja berupa jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yaitu AC, Komputer dan Printer.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000 dan realisasi keuangan Rp.750.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 25,08%. Keluaran sub kegiatan ini adalah terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja berupa jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yaitu 2 unit.

II. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.731.000 dan realisasi keuangan Rp.731.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 36,95%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya penyusunan dan evaluasi Pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industry yaitu 1 Dokumen.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.908.200 dan realisasi keuangan Rp.6.902.592 atau 99,92% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya penyusunan dan evaluasi Pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industry yaitu 1 Dokumen.
- c. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.162.500 dan realisasi keuangan Rp.7.157.700 atau 99,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya penyusunan dan evaluasi Pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh

Kota, dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan industri yaitu 1 Dokumen

III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.166.000 dan realisasi keuangan Rp.6.151.000 atau 99,76%% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen hasil desiminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas yaitu 1 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Data Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp101.285.700 dan realisasi keuangan Rp100.867.943 atau 99,59% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,85%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya dukungan kegiatan Dekranasda Kab. Lima Puluh Kota berupa terikutinya promosi/pameran produk IKM Kabupaten Lima Puluh Kota di Dalam Daerah dan Luar Daerah, dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen hasil desiminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas yaitu 1 dokumen.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASLAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Penyusunan Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen		
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	43 org/ 14 bulan	43 org/ 14 bulan		
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan		
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1 dokumen		
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan bahan logistik kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan barang cetakan dan penggaandaan	1 paket	1 paket		
				Fasilitasi kunjungan tamu	1 paket	1 paket		
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan		
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah				

				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.	1 unit	1 unit		
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	1 laporan		
				Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	1 laporan	1 laporan		
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	5 unit		
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 unit	30 unit		
				Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit		
				Program: Perencanaan dan pembangunan industri				
				Kegiatan; Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kab/Kota				
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 dokumen	1 dokumen		
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 dokumen	1 dokumen		

				Program: Pengelolaan sistem informasi industri nasional				
				Kegiatan: Penyediaan Informasi untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabuatrn/Kota				
				Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	1 dokumen	1 dokumen		
				Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SIINas	1 dokumen	1 dokumen		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp968.800 dan realisasi keuangan Rp968.800 atau 100%.

3.1.3.6.1. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan transmigrasi. Dengan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan transmigrasi. Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 40 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Alokasi Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
3.32.04	Program Pengembangan kawasan transmigrasi	968.800	968.800
3.32.04.2.01	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	968.800	968.800
3.32.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	968.800	968.800

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian

- Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp968.800 dan realisasi Rp968.800 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman..

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				
				Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian				
				Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	20 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	Pemotongan Anggaran	

D. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat sedikit permasalahan yaitu pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi anggaran yang mengakibatkan realisasi jauh dibawah dari target awal yang ditetapkan. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 urusan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp76.983.872.054 dan realisasi keuangan Rp71.435.058.873 atau 92,79%. Rincian OPD pelaksana urusan berikut anggaran dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 41 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No	Urusan Dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	76.983.872.054	71.435.058.873	92,79
4.1.	SEKRETARIAT DAERAH	40.971.527.809	36.865.532.295	89,98
1	Sekretariat Daerah	40.971.527.809	36.865.532.295	89,98
4.2.	SEKRETARIAT DPRD	36.012.344.245	34.569.526.578	95,99
1	Sekretariat DPRD	36.012.344.245	34.569.526.578	95,99

3.1.4.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan OPD pendukung pelaksana Urusan Pemerintahan. Dengan melaksanakan 3 Program, 20 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan. Dengan total alokasi anggaran sebesar Rp40.971.527.809 dan realisasi keuangan Rp36.865.532 295 atau 89,98%.

3.1.4.1.1 Bagian Pemerintahan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bagian Pemerintahan merupakan OPD penunjang pelaksana Urusan Sekretariat Daerah yang pada DPA tahun 2025 melaksanakan 1 Program, 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 42 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	BAGIAN PEMERINTAHAN	245.178.500	230.971.795
02.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	245.178.500	230.971.795
02.2.01.	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	127.378.900	118.056.118
02.2.01.01.	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	29.326.800	25.976.200
02.2.01.02.	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15.397.500	10.876.000
02.2.01.03.	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	82.654.600	81.203.918
02.2.04.	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	117.799.600	112.915.677
02.2.04.01.	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	98.695.900	94.912.350
02.2.04.03.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	19.103.700	18.003.327

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana, serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

I. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Administrasi Pemerintahan

- a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.326.800 dan realisasi keuangan Rp25.976.200 atau 88,57% serta realisasi sub kegiatan fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.397.500 dan realisasi keuangan Rp10.876.000 atau 70,63% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya Koordinasi Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar daerah;
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.654.600 dan realisasi keuangan Rp81.203.918 atau 98,24 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya Fasilitas Kegiatan EPPD, Penyusunan LKPD dan LPPD;
 - Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
 - Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM

2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.695.900 dan realisasi keuangan Rp94.912.350 atau 96,16% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terasilitasinya Kerjasama antar Daerah;
 - Terasilitasinya Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - Terasilitasinya kesepakatan bersama.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.103.700 dan realisasi keuangan Rp18.003.327 atau 94,24% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Tersusunnya laporan Evaluasi Kerja Sama;
 - Terlaksananya Rapat Evaluasi Kerja Sama.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Bagian Pemerintahan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah.	Urusan Sekretariat Daerah				
				I. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
				1. Kegiatan Administrasi Pemerintahan				
				a. Penataan Administrasi Pemerintahan	- 4 Kali Rapat Koordinasi	- 3 Kali Rapat Koordinasi		
				b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Koordinasi Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar daerah	Terlaksanannya Koordinasi Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar daerah		
				c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- 1 dokumen LKpJ Kepala Daerah - 1 Dokumen LPPD - 1 Dokumen SPM - 1 Dokumen RLPPD	- 1 dokumen LKpJ Kepala Daerah - 1 Dokumen LPPD - 1 Dokumen SPM - 1 Dokumen RLPPD		
				1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah				
				a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	- Nota Kesepakatan Bersama - Kegiatan APKASI Expo	- Terfasilitasinya pelaksanaan kerja sama daerah sebanyak 38		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
						kerjasama, yaitu: a) 2 Kesepakatan bersama b) 1 Nota Kesepakatan c) 32 Perjanjian Kerja Sama d) 3 Rencana Kerja - Terbayarnya iuran APKASI		
				b. Evaluasi Kerjasama Daerah	- Laporan Evaluasi Kerja Sama	- 1 Laporan		

D. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bagian Pemerintahan tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/ fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang. Ini berarti semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Namun untuk lebih maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Pemerintahan perlu didukung lagi dengan penambahan alokasi anggaran.

3.1.4.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bagian Kesejahteraan rakyat merupakan OPD pelaksanaan Urusan Sekretariat Daerah dengan melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran dan realisasi dana APBD 2025 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 43 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.373.295.283	9.948.015.759
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.373.295.283	9.948.015.759
4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.373.295.283	9.948.015.759
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11.373.295.283	9.948.015.759

B. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan unsur pendukung pemerintahan Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.373.295.283 dan realisasi keuangan Rp9.948.015.759 atau 87,47% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Keikutsertaan kafilah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Event MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke 41 di Kota Bukittinggi. Dengan Jumlah Kafilah 122 Orang yang terdiri dari pendamping, Official dan Peserta. Pada event ini Kafilah Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh Peringkat Juara Umum dari 19 Kab/Kota se- Sumatera Barat.

- Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang terlaksana dan terfasilitasi sebanyak 4 kegiatan.
- Jumlah guru TPQ, MDTA, Surau serta Iman dan Gharin masjid yang terfasilitasi sebanyak 3314 orang.
- Jumlah guru tahfizh yang terfasilitasi dan terbina sebanyak 105 orang.
- Jumlah rumah tahfizh yang dibina 65 unit.
- Indeks ABS-SBK Tahun 2025 sebesar 2,31
- Jumlah jemaah haji yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya sebanyak 218 orang.
- Jumlah masjid yang dikunjungi oleh tim safari ramadhan sebanyak 35 Masjid

Dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA-LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Urusan Sekretariat Daerah		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terkoordinirnya perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kebijakan ruang lingkup Kesejahteraan Rakyat	87,47%	-	-
				a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Keikutsertaan kafilah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam even MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan Jumlah Kafilah 122 Orang yang terfasilitasi	122 orang		
					2. Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang terfasilitasi: 3 kali	4 kali		
					3. Jumlah guru Surau, TPQ, MDTA dan Imam serta Gharin Masjid yang difasilitasi: 3314 orang	3314 orang		
					4. Indeks ABS-SBK: 2.1	2.31		
					5. Jumlah rumah Tahfizh: 65 unit	65 unit		
					6. Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan Kabupaten: 35 masjid	35 Masjid		
					7. Jumlah Jamaah Haji dan TPHD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya: 200 orang	218 orang		
					8. Tersedianya hibah untuk Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan	1 Tahun		

Dari tabel di atas target kinerja program pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, maka target kinerja kegiatan pada bagian Kesejahteraan Rakyat adalah terkoordinirnya perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kebijakan ruang lingkup Kesejahteraan Rakyat dengan target 90%.

Untuk pencapaian target kinerja tersebut di tindaklanjuti dengan 1 Sub Kegiatan, output dari masing-masing sub kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi Keikutsetaan kafilah Kabupaten Lima Puluh Kota pada gelaran event MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke 41 di Kota Bukittinggi dimana pada even tersebut Kafilah Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 122 orang yang terdiri dari Pendamping, Official dan Peserta dan Alhamdulillah Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan peringkat Juara Umum pada event tersebut.
 - b. Melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam dan bekerjasama dengan PHBI Kabupaten dan juga melibatkan lembaga-lembaga keagamaan di Kabupaten seperti MUI, FKDT, DMI dan lembaga terkait lainnya, adapun peringatan hari besar yang difasilitasi adalah pelaksanaan Isra' Mi'raj, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan Peringatan Tahun Baru Hijriyah.
 - c. Memberikan insentif dalam bentuk honor kepada guru Surau, TPQ, MDTA dan Iman serta Gharin sebanyak 3314 orang dengan besaran Rp100.000 per orang perbulan, selanjutnya kepada lembaga tersebut diminta laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing.
 - d. Melaksanakan pembinaan Rumah Tahfizh sebanyak 65 unit rumah tahfizh dengan 105 orang guru tahfizh yang diberi insentif..
 - e. Melaksanakan penilaian indeks ABS-SBK, dimana Indeks ABS SBK ini merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana penerapan agama, adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2025 target Indeks ABS-SBK 2,1 dengan realisasi 2,31.
 - f. Memfasilitasi pemberangkatan jemaah haji ke Embarkasi Padang dan pemulangan dari Debarkasi Padang ke Kab. Lima Puluh Kota. Jumlah jemaah haji yang difasilitasi pada tahun 2025 sebanyak 218 orang.

- g. Fasilitas terhadap Tim Ramadhan Kabupaten untuk mengunjungi masjid-masjid di Kab. Lima Puluh Kota, Pada tahun 2025 jumlah masjid yang dikunjungi sebanyak 35 Masjid.
- h. Memberikan hibah kepada Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan, dimana pada tahun 2025 diberikan hibah untuk Masjid/Mushalla, BAZNAS, MUI dan lembaga keagamaan masyarakat seperti Majelis Taklim.

D. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 tidak ada permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dimana realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 87,47%. Ini berarti semua kegiatan relatif dapat terlaksana dengan baik.

3.1.4.1.3 Bagian Hukum

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bagian Hukum merupakan Perangkat Daerah pelaksanaan Urusan Sekretariat Daerah dengan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 44 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum

KodeRekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	BAGIAN HUKUM	220.206.500	207.746.952
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	220.206.500	207.746.952
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	120.361.000	118.497.410
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	88.179.000	80.638.684
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	11.666.500	8.610.894

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.361.000 dan realisasi keuangan Rp118.497.410 atau 98,45% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terwujudnya produk Hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan capaian kinerja berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp88.179.000 dan realisasi keuangan Rp80.638.684 atau 91,45% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan bantuan hukum terhadap kasus atau permasalahan hukum pemerintah daerah, dengan capaian kinerja berupa terwujudnya penyelesaian sengketa/kasus/permasalahan hukum Pemerintah Daerah.
- c. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.666.500 dan realisasi keuangan Rp8.610.894 atau 73,81% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terwujudnya produk hukum yang dapat diakses aparatur dan masyarakat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan capaian kinerja berupa tersedianya produk hukum yang telah ditetapkan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	Bagian Hukum	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Sub Kegiatan Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Produk hukum daerah yang disusun sebanyak 66 dokumen	Tersusunnya Produk Hukum Daerah sebanyak 341 dokumen, dengan rincian: -5 Peraturan Daerah -42 Peraturan Bupati -294 Keputusan Bupati	-	-
				b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Sub Kegiatan Meningkatkan pelayanan bantuan hukum terhadap kasus atau perkara Pemerintah Daerah	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum adalah 1 kasus	7 kasus permasalahan hukum yang diberi konsultasi hukum		
				c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Sub Kegiatan Meningkatkan Penyuluhan Hukum terhadap Aparatur dan Masyarakat	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang di dokumentasikan adalah 66 dokumen	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang di dokumentasikan yang di upload pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah 90 dokumen.		

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.4.1.4 Bagian Perekonomian Dan SDA

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan OPD Urusan Sekretariat Daerah yang pada DPA Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 1 Program, 2 kegiatan, dan 6 Sub Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 45 Urusan Pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan SDA

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	205.507.800	175.699.451
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	205.507.800	175.699.451
2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	121.984.800	102.158.000
2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD	23.197.000	23.075.000
2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	68.039.800	52.221.500
2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil	30.748.000	26.861.500
2.04	Kegiatan Pemantauan Sumber Daya Alam	83.523.000	73.541.451
2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	52.437.000	51.664.451
2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	31.086.000	21.877.000
2.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air	-	-

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana, serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA adalah sebagai berikut:

I. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perkonomian

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.197.000 dan realisasi keuangan Rp23.075.000 atau 99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- terselenggaranya rapat koordinasi triwulanan Perumda Tirta Luak Nan Bungsu, BLUD Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis
- Pembinaan terhadap Perumda Tirta Luak Nan Bungsu, BLUD Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis dan BPR yang ada penyertaan modal dari Pemerintah Daerah melalui Rakor Teknis Triwulanan.
- Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi dan Kementrian terkait pembinaan BUMD.

Capaian kinerja meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD, BLUD dan Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR.

- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.039.800 dan realisasi keuangan Rp52.221.500 atau 76% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- terlaksananya fasilitasi sebagai Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam pelaksanaan kegiatannya. Seperti pertemuan rutin TPID dari Januari sampai dengan akhir Desember setiap hari Senin bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Daerah se Indonesia didampingi oleh Forkopimda beserta perangkat daerah yang tergabung dalam TPID melalui Zoom Meeting.
- *High Level Meeting* (HLM) Pengendalian Inflasi TPID Kabupaten dan Provinsi.
- *Capacity Building* untuk Personil pelaporan TPID Kabupaten Lima Puluh Kota dan TPID Provinsi Sumatera Barat ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Penginputan pada Aplikasi Informasi Harga Barang Pokok setiap hari kerja
- Koordinasi terkait Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kab/Kota di Sumatera Barat dan Kabupaten Kampar.

Capaian kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian adalah meningkatnya koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian.

- c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.748.000 dan realisasi keuangan Rp26.861.500 atau 87,36% serta realisasi fisik mencapai 100%.

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan berupa sosialisasi kepada (tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan kelompok ekonomi potensial/UMKM dengan Narasumber dari OJK.
- Sosialisasi kepada Pengurus Koperasi Merah Putih bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan nara sumber dari Bank Himbara
- Rapat koordinasi Persiapan Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)

Capaian kinerja berupa peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada TPAKD, Pengurus Koperasi Merah Putih dan , Kelompok ekonomi potensial/UMKM serta terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

2. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.713.500 dan realisasi keuangan Rp64.113.927 atau 98 % serta realisasi fisik mencapai 100%.

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500.4.7.14/348/BUP-LK/IX/2024 tentang Dokumen *Master Plan Integrated Area Development* Harau Taram Terintegrasi dan Adaptif (IAD HATTA) melalui kegiatan Perhutanan Sosial kerjasama dengan *Strengtening Social Forestry (SSF) Project* dengan Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Kabupaten lima Puluh Kota banyak manfaat/keuntungan yang dirasakan seperti:
 - o Adanya dana hibah skala kecil (*small grant*) yang diarahkan untuk memberikan stimulant bagi perwujudan rencana aksi yang tercantum di dokumen *Master Plan* dalam rangka meningkatkan investasi usaha perhutanan sosial, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
 - o dilaksanakan Gelar Karya Perhutanan Sosial yang dipusatkan di Lembah Harau dengan tema “Aka Basamo, Kolaborasi Pembangunan Perhutanan Sosial Berkelanjutan” yang dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni. Gelar Karya ini merupakan salah satu langkah *Exit Strategy* dari *SSF Project* yang berakhir pada tahun 2025. Pada acara gelar karya ini dilakukan beberapa kegiatan seperti pelepasan ekspor perdana kopi dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Penyerahan dokumen legalitas (Badan Hukum) KUPS *Enterprise* berupa 13 koperasi dan 4 berbentuk Perusahaan Terbatas (PT)
 - o Melalui Perhutanan Sosial kita diundang untuk acara berskala nasional diantaranya mengikuti *knowledge sharing visit* ke lokasi *Integrated Area Development (IAD)*

Lumajang Jawa Timur, Perayaan Keberhasilan (*Celebration of Our Achievements*) yang dilanjutkan dengan *Diseminasi Masterplan Integrated Area Development* Kabupaten/Kota Lokasi Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Jakarta serta audiensi yang diikuti oleh Ketua Pokja PS/Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan kementerian dan lembaga terkait yang difasilitasi oleh PT Kata Data Indonesia di Jakarta

- o Untuk rencana aksi yang tercantum di dokumen Master Plan dalam rangka meningkatkan investasi usaha perhutanan sosial, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, juga telah dilakukan audiensi dengan *OLEIFERA International LTD* Malaysia sebuah perusahaan global terkemuka yang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan, berkantor pusat di Dubai dan mempunyai cabang di Malaysia. Perusahaan ini berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam proyek pembangunan sistem pertanian yang bertujuan /berorientasi ekspor dan konservasi alam yang ramah lingkungan.
- Menjadi bagian Tim penilai proposal Hibah Skala Kecil (*Small Grant*) *SSF Project*.
- Koordinasi pelaksanaan DBHCHT tahun 2025 dengan alokasi DBHCHT tahun 2025 sebesar Rp461.026.235 yang dilaksanakan melalui kegiatan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebesar 50% (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan), Bidang Penegakan Hukum sebesar 10% (Satpol PP) serta Bidang Kesehatan 40% (Dinas Kesehatan).
- Fasilitasi kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) melalui Rakor Triwulanan dan Monitoring ke Lapangan.
- Berpartisipasi aktif dalam program Strategis Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Ketahanan Pangan

Capaian kinerja berupa meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup alokasi anggaran sebesar Rp31.086.000 dan realisasi keuangan Rp21.877.000 atau 70,38% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Usulan wilayah pertambangan rakyat se Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilengkapi peta akan dibahas bersama Forum Penataan Ruang Daerah dan dikirimkan ke Dinas EDSM Provinsi.
 - Dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan pembahasan tambang rakyat Manggani yang ditindaklanjuti dengan konsultasi tentang perubahan status kawasan konservasi suaka margasatwa

menjadi hutan lindung ke Kementerian Kehutanan dan konsultasi terkait potensi sumber daya mineral ke Kementerian ESDM di Jakarta.

- Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya hutan, berkolaborasi dengan KKI WARSI telah dilakukan Workshop Penguatan Perhutanan Sosial dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat serta Pelatihan Digital Marketing Bagi KUPS, selain itu juga melaksanakan konsultasi ke Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera Kementerian LH/BPLH di Pekanbaru
- Koordinasi tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan mengikuti kegiatan *Workshop* Nasional Sinergi Mengelola Sumber Daya Alam, Suara Komunitas untuk Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
- Koordinasi dengan Badan Geologi Bandung terkait potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bias diupdate melalui aplikasi GEORIMA.

Capaian kinerja berupa meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pertambangan dan lingkungan hidup.

- c. Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp0 dan realisasi keuangan Rp0 .Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya koordinasi dan pemenuhan data energi dan air yaitu berupa data Jorong/Rumah Tangga belum berlistrik yang disampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
- Terlaksananya koordinasi tentang usulan kuota LPG 3 kg dan Usulan kuota BBM JBT dan JBKP dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Surat Edaran Bupati tentang Rencana Uji Coba Penerapan Kewajiban BBM JBKP dengan menggunakan QR Code.
- Terlaksananya koordinasi bersama perangkat daerah penerbit rekomendasi pada aplikasi X Star dengan BPH Migas.
- Tersedianya data sumber air baku yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota
- Fasilitasi Surat Wali Nagari Situjuh Banda Dalam tentang Permohonan penambahan saluran air bersih kepada Perumda Tirta Sago Kota Payakumbuh dengan memanfaatkan sumber air baku Sungai Dareh
- Mengikuti Forum Investasi Ketenagalistrikan Sumatera Barat

Capaian kinerja berupa meningkatnya koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 1.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				-
				a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	a. Terlaksananya koordinasi dan pengawasan terhadap BUMD, BUMN dan BPR. b. Tersedianya rekapitulasi laporan BPR penyertaan modal tahun 2024 1 (satu) laporan c. Laporan Pembinaan Triwulanan dan Tahunan Perumda air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dan BLUD Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis d. Konsultasi dan Koordinasi pembinaan BUMD dan BLUD	a. 8 lembaga b. 1 (Satu) Laporan c. 4 (empat) Dokumen d. 2 (dua) kegiatan		
				b.Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	a.Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan TPID (Zoom Meeting) dan Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam Pengendalian Inflasi b.Terinputnya pada aplikasi tentang Informasi Harga	a. 49 kali Zoom Meeting b. 12 (dua belas) Laporan Harga	Rapat belum dihadiri secara lengkap oleh semua anggota Tim	Meningkatkan Kinerja TPID untuk optimalisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengendalian Inflasi

					Barang Pokok c. HLM dan Capacity Building TPID	Barang Pokok c. 2 (dua) kali dan 2 (dua) kali		
				c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	a. Terlaksananya literasi dan inklusi keuangan terhadap TPAKD dan Kelompok Usaha ekonomi potensial/UMKM b. Terlaksananya sosialisasi literasi Keuangan kepada Pengurus Koperasi Merah Putih c. Terlaksannaya rakor Persiapan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)	a. 1 (satu) Kali b. 1 (satu) kali c. 1 kali	Belum optimalnya fungsi TPAKD Program Strategis Nasional yang masih baru	Perlunya peningkatan pemahaman terkait literasi dan inklusi keuangan pada seluruh stakeholders Perlu dilakukan pembinaan lebih intensif oleh Dinas terkait.
				2. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				
				a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	a. Terlaksananya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dana DBHCHT b. Koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi 2 (dua) kali pemantauan c. Terfasilitasinya kegiatan Pokja Percepatan Pelaksanaan Perhutanan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota bersama SSF dalam melaksanakan rencana aksi yang terdapat dalam dokumen Masterplan IAD	a. 6 (enam)) laporan b. 3 (tiga) kali monev c. 5 (lima) kali koordinasi dan konsultasi	a. Anggaran DBHCHT yang semakin berkurang setiap tahunnya b. Tidak tersedia anggaran untuk mendukung pelaksanaan monev ke lapangan.	a. Perlu upaya peningkatan DBHCHT melalui pemenuhan target kinerja DBH-CHT. b. Perlu peningkatan pelaksanaan pemantauan dan alokasi anggaran pada OPD teknis

				b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	a. Terlaksananya koordinasi, konsultasi terkait pertambangan ke Dinas ESDM provinsi dan pemenuhan data terkait WPR b. kolaborasi dengan KKI WARSI dalam upaya kelestarian lingkungan hidup serta konsultasi ke Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera Kementerian LH/BPLH	3 (tiga) kali koordinasi 2 (dua) kali pertemuan dan 1(Satu) kali konsultasi	Lambatnya menghimpun data dari seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	Agar disediakan datanya di dalam Daerah Dalam Angka yang didata oleh Statistik
				a.Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	a. Terlaksananya koordinasi dan pemenuhan data terkait energi dan air	3 (tiga) laporan	a. Tahun ini tidak ada anggaran	a. Perlunya Perangkat Daerah menyediakan data terkait energi dan air.
					b.Terlaksananya fasilitasi rapat pembahasan permohonan Wali Nagari Situjuh Banda Dalam tentang penambahan saluran air dengan sumber air baku Sungai Dareh	b. 1 laporan		b. Perlunya koordinasi lebih efektif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kotadengan Kota Payakumbuh dalam Kerja Sama pengelolaan sumber air baku

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdapat beberapa permasalahan diantaranya belum lengkapnya kehadiran seluruh anggota tim dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap minggu,, belum optimalnya fungsi TPAKD, data yang tersedia kurang akurat dan lambatnya proses penghimpunan data serta terkait alokasi anggaran yang mendukung beberapa kegiatan berkurang dari tahun sebelumnya, sehingga tidak semua program dan kegiatan terfasilitasi secara optimal. Diharapkan adanya peningkatan dan pemahaman kinerja setiap anggota tim dan koordinasi yang lebih efektif dengan perangkat daerah/instansi/lembaga yang terkait dan peningkatan alokasi anggaran pada tahun berikutnya agar kinerja Bagian Perekonomian dan SDA makin meningkat dan kegiatan dapat terlaksana dengan lebih optimal.

3.1.4.1.5 Bagian Administrasi Pembangunan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan OPD penunjang Urusan Sekretariat Daerah dengan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan, dan 3 Sub Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 46 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4.01.03.	Program Perekonomian dan Pembangunan	162.560.900	154.483.805
4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	162.560.900	154.483.805
03.2.02.01.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	41.898.000	39.803.555
03.2.02.02.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	56.945.900	55.477.600
03.2.02.03.	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	63.717.000	59.202.650

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

I. Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.898.000 dan realisasi keuangan Rp39.803.555 atau 95% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan dengan capaian kinerja berupa 1 (satu) dokumen Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.

Sedangkan kegiatan lain yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Memverifikasi Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; serta
 - Melaksanakan koordinasi dengan Biro Administrasi Pembangunan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat terkait pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang sesuai aturan.
- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.945.900 dan realisasi keuangan Rp55.477.600 atau 97,42% serta realisasi fisik kegiatan 100%. Pada tahun 2025 ini, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan melaksanakan Registrasi Kontrak, dimana kegiatan ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan. Keluaran dari kegiatan ini adalah
- Tersedianya Laporan Rekapitulasi Data Kontrak Perangkat Daerah;
 - Tersedianya Laporan Pelaksanaan Registrasi Kontrak;
 - Tersedianya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan; serta
 - Koordinasi dengan OPD dan Instansi serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang sesuai aturan.

Sedangkan capaian kinerja pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa:

- 1 (satu) buah laporan rekapitulasi Data Kontrak Perangkat Daerah;
- 1 (satu) buah laporan Pelaksanaan Registrasi Kontrak; dan
- 1 (satu) buah laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Registrasi Dokumen Kontrak;
- Melaksanakan rekapitulasi Laporan Data Kontrak Perangkat Daerah;

- Melaksanakan pengendalian terhadap proyek-proyek strategis Daerah; serta
- Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan *sharing* informasi dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota lain.

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.717.000 dan realisasi keuangan Rp59.202.650 atau 92,91% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen/himpunan rekapitulasi capaian program/kegiatan OPD per bulan sebanyak 30 buku. Selain menghimpun rekapitulasi program dan kegiatan dalam bentuk buku, Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan juga melaksanakan kegiatan penginputan laporan realisasi fisik dan keuangan OPD ke dalam aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) versi 4 milik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap bulan. Capaian kinerja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan adalah berupa 30 buku dokumen rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) per bulan serta 1 (satu) buah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Adapun kegiatan lain yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Aparatur Perangkat Daerah yang membidangi pelaporan;
- Mengikuti Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan; serta
- Koordinasi dengan OPD dan Instansi serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang sesuai aturan.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Kegiatan, Bagian Administrasi Pembangunan juga melakukan koordinasi, konsultasi dan *sharing* informasi dengan Biro Administrasi Pembangunan dan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat maupun di luar Provinsi Sumatera Barat.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA-LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASA-LAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bagian Administrasi Pembangunan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan				
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya 1 (satu) dokumen Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan.	Terlaksananya penyusunan 1 (satu) dokumen Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.		
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tersusunnya 1 (satu) Laporan rekapitulasi Data Kontrak Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan 1 (satu) laporan rekapitulasi Data Kontrak Perangkat Daerah		
					Tersusunnya 1 (satu) Laporan Pelaksanaan Registrasi Kontrak	Terlaksananya registrasi dari Kontrak yang dilaksanakan di OPD dan direkapitulasi dalam bentuk 1 (satu) laporan pelaksanaan Registrasi Kontrak.		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya 30 buku dokumen rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) per bulan.	Tersedianya dokumen/himpunan rekapitulasi capaian kemajuan program/kegiatan OPD per bulan sebanyak 30 buku.		
					Tersusunnya 1 (satu) dokumen Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan.	Terlaksananya penyusunan 1 (satu) dokumen Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%) dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.4.1.6 Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan penunjang pelaksana Urusan Sekretariat Daerah. Dengan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 47 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan		
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	163.661.500	152.662.426
4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	41.775.500	37.312.294
4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	40.596.000	38.892.267
4.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	81.290.000	76.457.865

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

I. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.775.500 dan realisasi keuangan Rp37.312.294 atau 89,32% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses pemilihan penyedia barang/jasa di UKPBJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan capaian kinerja berupa 1 (satu) dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.596.000 dan realisasi keuangan Rp38.892.267 atau 95,80% serta realisasi fisik sub kegiatan fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terumumkannya RUP seluruh SKPD melalui aplikasi SIRUP dan terlaksananya fasilitasi proses pemilihan penyedia barang/jasa, dengan capaian kinerja berupa:
- 1 (satu) dokumen rekapitulasi data SKPD yang telah mengumumkan RUP melalui Aplikasi SIRUP.
 - 1 (satu) dokumen rekapitulasi data paket proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui SPSE.
- c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.290.000 dan realisasi keuangan Rp76.457.865 atau 97,69%, serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan advokasi kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui bimtek dan pelayanan advokasi pengadaan barang/jasa dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Katalog Elektronik versi 6 kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

A. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	Perangkat Daerah	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Urusan Sekretariat Daerah		Program Perekonomian dan Pembangunan				
				Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1 (satu) dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	1 (satu) dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak ada	
				Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 (satu) dokumen rekapitulasi data SKPD yang telah mengumumkan RUP melalui Aplikasi SIRUP	1 (satu) dokumen rekapitulasi data SKPD yang telah mengumumkan RUP melalui Aplikasi SIRUP	Tidak ada	
					1 (satu) dokumen rekapitulasi data paket proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui SPSE	1 (satu) dokumen rekapitulasi data paket proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui SPSE	Tidak ada	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Sosialisasi Katalog Elektronik versi 6 kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang	Kegiatan Sosialisasi Katalog Elektronik versi 6 kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang	Tidak ada	

B. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.4.1.7 Bagian Umum

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bagian Umum merupakan OPD pelaksanaan Urusan Sekretariat Daerah dengan melaksanakan 1 program, 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sumber dana lokasi dana, serta realisasi pada APBD 2025 terhadap penyelenggaraan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 48 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Umum

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Bagian Umum	10.169.862.400	9.039.256.647
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.169.862.400	9.039.256.647
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.284.600	19.864.500
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.284.600	19.864.500
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.142.446.500	925.184.674
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	105.850.000	104.943.740
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.479.900	60.208.216
4.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	594.577.600	427.787.928
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.539.000	280.398.640
4.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis	55.000.000	51.846.150
4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	962.046.000	882.121.470
4.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	962.046.000	882.121.470
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.276.968.700	3.125.432.129
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	705.000.000	691.610.104

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.345.000	96.527.870
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.469.623.700	2.332.294.155
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.132.348.200	2.728.086.884
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.850.000	229.342.312
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.052.475.000	1.050.309.623
4.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.840.000	17.800.000
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.541.300	69.498.875
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535.497.000	269.534.327
4.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.024.000	249.027.940
4.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	853.217.000	837.128.607
4.01.01.2.09.12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Tanah	5.903.900	5.445.200
4.01.01.2.11	Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	195.120.000	178.112.068
4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	195.120.000	178.112.068
4.01.01.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	1.439.648.400	1.180.454.922
4.01.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumag Tangga Kepala Daerah	491.580.200	401.826.776
4.01.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumag Tangga Wakil Kepala Daerah	312.473.200	249.280.272
4.01.01.2.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	635.595.000	529.347.874

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Umum adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.284.600 dan realisasi keuangan Rp19.864.500 atau 99,33% serta

realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa terciptanya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp105.850.000 dan realisasi keuangan Rp104.943.740 atau 99,14% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor dengan capaian kinerja berupa terciptanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dan rumah dinas.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.479.900 dan realisasi keuangan Rp60.208.216 atau 99,55% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang percetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.594.577.600 dan realisasi keuangan Rp427.787.928 atau 71,95 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kunker pejabat negara departemen/lembaga pemerintah non departemen /luar negeri dengan capaian kinerja berupa terselenggaranya koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp326.539.000 dan realisasi keuangan Rp280.398.640 atau 85,87% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah dengan capaian kinerja berupa terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah dengan capaian kinerja berupa terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah.
- e. Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.000.000 dan realisasi keuangan Rp51.846.150 atau 94,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penataan Arsip Dinamis dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penataan Arsip Dinamis dengan capaian kinerja berupa terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp962.046.000 dan realisasi keuangan Rp882.121.470 atau 91.69% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000 dan realisasi keuangan Rp5.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya dengan capaian kinerja berupa terpenuhi kebutuhan administrasi umum.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp705.000.000 dan realisasi keuangan Rp691.610.104 atau 98,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dengan capaian kinerja berupa terpenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.345.000 dan realisasi keuangan Rp96.527.870 atau 99,16% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.469.623.700 dan realisasi keuangan Rp2.332.294.155 atau 94,44% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp237.850.000 dan realisasi keuangan Rp229.342.312 atau 96,42% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terpenuhinya Pembayaran Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terlaksananya Pembayaran Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.052.475.000 dan realisasi keuangan Rp1.050.309.623 atau 99,79% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan dan terpenuhinya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan capaian kinerja

berupa terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan dan terlaksannya pembayaran pajak serta perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.840.000 dan realisasi keuangan Rp17.800.000 atau 85,41% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pemeliharaan Mebel kantor, rumah jabatan/dinas dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pelayanan Pemeliharaan Mebel perkantoran, rumah dinas/jabatan secara tertib dan lancar.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.541.300 dan realisasi keuangan Rp69.498.875 atau 45,86% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp535.497.000 dan realisasi keuangan Rp269.534.327 atau 50,33% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja berupa tercapainya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp275.024.000 dan realisasi keuangan Rp249.027.940 atau 90,55% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja berupa tercapainya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp853.217.000 dan realisasi keuangan Rp837.128.607.000 atau 98,11% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja berupa tercapainya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.903.900 dan realisasi keuangan Rp5.445.200 atau 92,23% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah dengan capaian kinerja berupa tercapainya Tanah.

6. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp195.120.000 dan realisasi keuangan Rp178.112.068 atau 91,28% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan capaian kinerja berupa tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

7. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp491.580.200 dan realisasi keuangan Rp401.826.776 atau 81,74% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp312.473.200 dan realisasi keuangan Rp249.280.272 atau 79,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp635.595.000 dan realisasi keuangan Rp529.347.874 atau 83,28% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA-LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASA-LAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bagian Umum	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	3 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	12 paket		
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
				Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis	10 Dokumen	10 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan		

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72 Unit	72 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	18 Unit	18 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30 unit	30 unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitas Tanah	10 Ha	10 Ha		
				Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %		
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 paket	20 paket		
				Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3 paket	3 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2 paket	2 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2 paket	2 paket		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bagian Umum tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang yaitu 88,88% untuk realisasi keuangan dan 100% untuk realisasi fisik dengan artian sebagian besar dapat terlaksana dengan baik.

3.1.4.1.8 Bagian Organisasi

A. Program dan Kegiatan

Bagian Organisasi merupakan OPD pendukung pelaksanaan Urusan Sekretariat Daerah dengan melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 49 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Organisasi

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	BAGIAN ORGANISASI	141.338.100	139.097.680
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	141.338.100	139.097.680
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	141.338.100	139.097.680
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	27.692.200	26.156.940
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	27.347.600	27.309.800
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	24.852.400	24.819.500
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.102.400	37.569.640
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	23.343.500	23.241.800

B. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan unsur pendukung pemerintahan daerah pada Bagian Organisasi sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Penataan Organisasi

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.692.200 dan realisasi keuangan Rp26.156.940 atau 94,46% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Peta Jabatan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen Peta Jabatan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan BKN No.9 Tahun 2022, terlaksananya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, tersusunnya Perbup kelas jabatan dan Perubahan nama jabatan pelaksana sebagai dasar pembayaran TPP ASN di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, terpenuhinya kebutuhan fungsional tertentu di dinas terkait sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pembinaan dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.347.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp27.309.800 atau 99,86% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, Laporan Forum Konsultasi Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, OPD yang melaksanakan Inovasi pelayanan publik dan meningkatnya Standar Pelayanan Publik setiap OPD.
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.852.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp24.819.500 atau 99,87% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen komponen Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja berupa Nilai komponen Reformasi Birokrasi.
- d. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.102.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp37.569.640 atau 98,60% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Laporan PEKPPP Mandiri dan Nasional dengan capaian kinerja berupa Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.343.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp23.241.800 atau 99,56% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terverifikasinya dokumen LKjIP Perangkat Daerah dan tersusunnya dokumen LKjIP Kabupaten dengan capaian kinerja berupa Nilai AKIP Pemerintah Daerah.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Bagian Organisasi	Pemerintahan	Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Kegiatan Penataan Organisasi a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan b. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana e. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	- Peta Jabatan Perangkat Daerah - Perbup Kelas Jabatan - Dokumen laporan SKM - Dokumen Laporan FKP - OPD yang melaksanakan Inovasi pelayanan publik - OPD yang menyusun Standar Pelayanan Dokumen komponen Reformasi Birokrasi Dokumen Laporan PEKPPP Mandiri - Dokumen LKjIP Pemerintah Daerah - Dokumen LKjIP Perangkat Daerah - Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati - Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Dokumen Peta Jabatan sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 - Nilai IKM kabupaten Lima Puluh Kota - Dokumen laporan FKP - Keikutsertaan OPD dalam inovasi pelayanan publik - Dokumen SP OPD Nilai komponen reformasi birokrasi Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Nilai AKIP Pemerintah Daerah	nihil nihil nihil nihil nihil	

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bagian Organisasi tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%) dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.4.1.9. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Merupakan Urusan Sekretariat Daerah dengan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Realisasi pada APBD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 50 Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Urusan: Sekretariat Daerah		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1.524.553.300	1.374.553.205
4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.524.553.300	1.374.553.205
4.01.01.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	1.347.633.000	1.200.275.759
4.01.01.2.14.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	57.805.300	56.961.500
4.01.01.2.14.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	119.115.000	117.315.946

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.347.633.000 dan realisasi keuangan Rp1.200.275.759 atau 89,06 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan KDH dan WKDH baik di dalam daerah maupun luar daerah sesuai dengan aturan keprotokolan yang berlaku, dengan capaian kinerja berupa terselenggaranya kegiatan Bupati / Wakil Bupati sesuai aturan dan tata keprotokolan yang berlaku.

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.805.300 dan realisasi keuangan Rp56.961.500 atau 98,54% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya penyampaian informasi dan penjelasan yang bersifat penting dan mendesak dari Bupati/Wakil Bupati kepada pihak terkait dan Menyusun naskah sambutan/pidato Bupati / Wakil Bupati, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya komunikasi dan penyampaian informasi dari Bupati / Wakil Bupati kepada pihak terkait dengan baik dan lancar.
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.115.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp117.315.946 atau 98,48% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumentasi kegiatan Bupati / Wakil Bupati di dalam maupun luar daerah, dengan capaian kinerja berupa terdokumentasinya kegiatan Bupati/Wakil Bupati di dalam maupun di luar daerah.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				
				a. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
				1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah pelaksanaan kegiatan KDH dan Wakil KDH sesuai dengan aturan keprotokolan yang berlaku 360 kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan KDH dan Wakil KDH sesuai dengan aturan keprotokolan yang berlaku 360 kegiatan		
				2) Sub kegiatan Komunikasi Pimpinan.	Jumlah pelaksanaan kegiatan KDH/ WKDH sesuai aturan baik dalam maupun luar daerah 360 kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan KDH dan Wakil KDH sesuai dengan aturan keprotokolan yang berlaku 360 kegiatan		
				3) Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi kegiatan KDH/ WKDH 360 kegiatan	Jumlah Dokumentasi kegiatan KDH/ WKDH 360 kegiatan		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian realisasi keuangan dan fisik yaitu 90,16% dan 100 %, realisasi keuangan yang tidak tercapai sebesar 9,84 %. Namun pada pelaksanaannya kegiatan ini terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan di DPAP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2025.

3.1.4.1.10. Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan 1 Program, 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran dan realisasi dana APBD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 51 Urusan Sekretariat Daerah Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
4.01.01	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	16.765.363.526	15.443.044.575
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	16.765.363.526	15.443.044.575
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.121.500	235.539.336
01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	169.124.000	162.340.626
01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	74.997.500	73.198.710
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.810.512.830	14.552.748.972
01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	15.638.110.430	14.420.355.614
01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.163.500	72.526.496
01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.743.000	9.727.750
01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56.554.900	47.198.112
01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.941.000	2.941.000
4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	710.729.196	654.756.267

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
5.1.01.0005	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	253.189.194	209.530.167
01.2.11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	47.227.000	34.913.100
01.2.11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	410.313.002	410.313.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp169.124.000 dan realisasi keuangan Rp162.340.626 atau 95,99% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Capaian Realisasi Kinerja dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota, yaitu: Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Sekretariat Daerah dimana capaian kinerja pada sub. Kegiatan ini sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.997.500 dan realisasi keuangan Rp73.198.710 atau 97,60% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Capaian Realisasi Kinerja dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dengan anggaran sebesar Rp15.638.110.430 dan realisasi keuangan Rp14.420.355.614 atau 92,21% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Capaian Realisasi Kinerja dari sub kegiatan ini adalah dapat dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN pada Sekretariat Daerah tepat pada waktunya sebanyak 12 bulan.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp103.163.500 dan realisasi keuangan Rp72.526.496 atau 70,30% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya

- kegiatan ini tepat waktu, dengan capaian kinerja berupa terwujudnya penatausahaan yang tertib guna lancarnya administrasi keuangan di Sekretariat Daerah. Sedangkan Capaian Realisasi kinerja adalah terwujudnya 12 dokumen verifikasi dan penatausahaan dokumen.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.743.000 dan realisasi keuangan Rp9.727.750 atau 99,84% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Tahun 2025 yang tersusun tepat waktu, dengan capaian kinerja berupa terwujudnya 1 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sekretariat Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.554.900 dan realisasi keuangan Rp47.198.112 atau 83,46% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun tepat waktu, dengan capaian kinerja berupa terwujudnya 12 dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD Sekretariat Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.941.000 dan realisasi keuangan Rp2.941.000 atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah yang tepat dan selesai sesuai waktu yang ditentukan.

3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp253.189.194 dan realisasi keuangan Rp209.530.167 atau 82,76% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dibayar tepat waktu sebagaimana mestinya dengan Capaian Kinerja adalah terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/ Wakil KDH sebanyak 12 bulan, serta pembayaran kompensansi gaji KDH dan Wakil KDH periode 2021-2026.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.227.000 dan realisasi keuangan Rp34.913.100. Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% hal ini melihat kondisi kesehatan KDH/Wakil KDH yang dirasa sehat dan Urgensinya cukup disesuaikan dengan kebutuhan KDH pada akhir Tahun 2025 ini.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp410.313.002 dan realisasi keuangan Rp410.313.000 atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Capaian Kinerja dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dibayar tepat waktu selama 12 bulan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Urusan Sekretariat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen Perencanaan	5 Dokumen Perencanaan		
				b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen Perubahan DPA		
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk 12 bulan kerja	12 bulan	-	-
				a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen BKU dan SPJ fungsional	12 dokumen	-	-
				b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen	-	-

				c.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen Laporan Realisasi anggaran dan RFK	12 dokumen	-	-
				d.Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pragnosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen Prognosis dan Laporan Keuangan Semester I	1 dokumen	-	-
				3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH untuk 12 bulan kerja	12 bulan	-	
				b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terbayarnya Biaya Medical Check Up KDH/ WKD	100%	-	
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pembayaran dana penunjang operasional KDH/ WKDH untuk 12 bulan kerja	12 bulan	-	

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Sekretariat Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan tidak terdapat permasalahan yang berarti, pada bagian Perencanaan dan Keuangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan/Fisik Kegiatan dapat dicapai secara berimbang yaitu 92,11 %, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Khusus pada Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan ini dengan anggaran Rp47.227.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp34.913.100 atau dengan persentase 73,93% hal ini karena biaya pemeriksaan dan kelengkapan terlaksananya Medical Check Up ini menyesuaikan dengan harga satuan dan pelayanan pada Rumah Sakit yang ditunjuk, namun sub kegiatan dapat berjalan dengan baik dengan capaian fisik sebesar 100%

3.1.4.2 Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2025 dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total anggaran sebesar Rp36.012.344.245 dan realisasi keuangan Rp34.569.526.578 atau 95,99%.

2.1.4.2. 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2025 merupakan OPD penunjang pelaksana Urusan Sekretariat DPRD dengan melaksanakan 2 program, 16 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran serta realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 52 Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
4.02	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	36.012.344.245	34.569.526.578
4.02.01	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.094.716.045	22.181.600.831
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.838.295	33.150.000
4.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5.441.295	4.888.000
4.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.252.000	4.888.000
4.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.229.000	4.726.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
4.02.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.229.000	5.144.000
4.02.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.229.000	4.726.000
4.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD	5.229.000	4.888.000
4.02.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.229.000	3.890.000
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.058.844.509	3.737.097.959
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.135.572.748	2.961.727.389
4.02.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	860.158.520	716.057.670
4.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.511.900	40.509.900
4.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.278.341	4.679.000
4.02.01.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.046.000	4.888.000
4.02.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.453.000	5.587.000
4.02.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.824.000	3.649.000
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.059.200	11.805.480
4.02.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	559.200	0
4.02.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.500.000	11.805.480
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.333.131.900	1.188.436.034
4.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	966.123.400	843.224.950
4.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.939.500	32.446.700
4.02.01.2.06.008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	277.624.000	257.074.076
4.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.445.000	55.670.308
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.393.730.000	2.351.310.000
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	2.289.120.000	2.261.500.000
4.02.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.610.000	89.810.000
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705.371.600	614.318.550
4.02.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	0
4.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.999.600	170.348.551
4.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.872.000	443.969.999

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	903.038.000	763.586.346
4.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	389.600.000	296.495.717
4.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	113.850.000	100.816.500
4.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	383.838.000	356.408.629
4.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.750.000	9.865.500
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.387.329.341	13.233.755.462
4.02.01.2.15.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.051.399.341	12.910.753.462
4.02.01.2.15.0002	Sub Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	283.430.000	278.152.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	52.500.000	44.850.000
4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	263.373.200	248.141.000
4.02.01.2.16.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	6.120.000	4.464.000
4.02.01.2.16.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD	7.290.200	4.796.000
4.02.01.2.16.0003	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	249.963.000	238.881.000
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.917.628.200	12.387.925.747
4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.493.596.500	1.484.782.190
4.02.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	491.000	467.000
4.02.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.448.919.000	1.448.195.290
4.02.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	364.000	346.000
4.02.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	32.470.500	26.942.800
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	11.352.000	8.831.100
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	108.109.800	59.495.500
4.02.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	20.000.000	16.700.000
4.02.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.000.000	11.200.000
4.02.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	20.000.000	6.975.000
4.02.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	20.000.000	6.975.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
4.02.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	3500.000	3.425.000
4.02.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	24.609.800	14.218.500
4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	31.5050.300	28.482.716
4.02.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	26.501.000	24.831.716
4.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	73.800	0
4.02.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	33.000	0
4.02.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.458.500	595.000
4.02.02.2.03.0005	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	52.500	0
4.02.02.2.03.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.027.500	1.962.000
4.02.02.2.03.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	52.500	0
4.02.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.306.509	1.094.000
4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	1.583.561.400	1.171.458.349
4.02.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	1.103.729.800	698.539.749
4.02.02.2.04.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	105.000	0
4.02.02.2.04.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	229.155.000	229.080.600
4.02.02.2.04.0006	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.772.000	2.772.000
4.02.02.2.04.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	183.000	0
4.02.02.2.04.0008	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	247.616.600	241.066.000
4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	789.826.500	743.922.900
4.02.02.2.05.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30.991.100	18.429.100
4.02.02.2.05.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	758.835.400	725.493.800
4.02.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	7.079.000	5.012.000
4.02.02.2.05.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	1.814.000	1.796.000
4.02.02.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	5.265.000	3.216.000
4.02.02.2.07	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	13.896.700	13.790.700
4.02.02.2.07.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	8.820.700	8.716.700
4.02.02.2.07.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5.076.000	5.074.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	8.890.053.000	8.880.983.392
4.02.02.2.08.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.384.372.000	7.383.780.857
4.02.02.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4.830.000	0
4.02.02.2.08.0003	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	21.112.000	18.072.000
4.02.02.2.08.0004	Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	1.479.739.000	1.479.130.535

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran serta realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.441.295 dan realisasi keuangan Rp4.888.000 atau 89,83% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.252.000 dan realisasi keuangan Rp4.888.000 atau 93,07 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dan terkoordinasinya dokumen RKA-SKPD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.229.000 dan realisasi keuangan Rp4.726.000 atau 90,38 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dan terkoordinasinya dokumen perubahan RKA-SKPD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.229.000 dan realisasi keuangan Rp5.144.000 atau 98,37 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dan terkoordinasinya RKA-SKPD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.229.000 dan realisasi keuangan Rp4.726.000 atau 90,38 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dan terkoordinasinya perubahan RKA-SKPD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.229.000 dan realisasi keuangan Rp4.888.000 atau 93,48 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dan terkoordinasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Anggaran 5.229.000 dengan realisasi Rp3.890.000 atau 74,39 % serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terevaluasinya kinerja perangkat daerah di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.135.572.784 dan realisasi keuangan Rp2.961.727.389 atau 94,46% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tingkat kepuasan pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan, dengan capaian kinerja berupa Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp860.158.520 dan realisasi keuangan Rp716.057.670 atau 83.25% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya pembayaran Honorarium THL dan Pembayaran Belanja Lembur, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.511.900 dan realisasi keuangan Rp40.509.900 atau 97.59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Verifikasi SPJ Keuangan dalam 1 Tahun, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.278.341 dan realisasi keuangan Rp4.679.000 atau 97.59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersampainya laporan keuangan akhir tahun di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.046.000 dan realisasi keuangan Rp4.888.000 atau 97.59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya bahan tanggapan pemeriksaan di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi Anggaran 6.453.000 dengan realisasi Rp5.587.000 serta realisasi

fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

- g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi Anggaran 4.824.000 dengan realisasi Rp3.649.000 serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya laporan Analisis Prognosis di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp559.200 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0,00% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan Bimtek ASN dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.500.000 dan realisasi keuangan Rp11.805.480 atau 94,44% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan Bimtek ASN dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp966.123.400 dan realisasi keuangan Rp843.224.950 atau 87,28% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.939.500 dan realisasi keuangan Rp32.466.700 atau 98,56% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp277.624.000 dan realisasi keuangan Rp257.074.076 atau 92,60% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu dan Pembayaran Honor THL dengan capaian kinerja berupa Terfasilitasinya Kunjungan Tamu dan terbayarkannya Honor THL di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.445.000 dan realisasi keuangan Rp55.670.308 atau 98,63% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Rapat Internal, Konsultasi Ke Pemerintah Lebih Tinggi dan Koordinasi dan Sharing Informasi

dengan Sekretariat DPRD Daerah Lain dengan capaian kinerja berupa Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp2.289.120.000 dan realisasi keuangan Rp2.261.500 atau 98,79% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan adalah telah terlaksananya pengadaan mobil dinas sebanyak 3 unit di sekretariat DPRD Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Anggaran Sebesar Rp104.610.000 dan realisasi keuangan Rp89.810.000 atau 85,85% serta realisasi fisik mencapai 100% adalah tidak terlaksananya kegiatan tersebut Tahun 2025.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0.00% serta realisasi fisik mencapai 0%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp204.999.600 dan realisasi keuangan Rp170.348.551 atau 83,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Internet, Tagihan tv Berlangganan dengan capaian kinerja berupa terbayarkannya Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Internet, Tagihan tv Berlangganan di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp497.872.000 dan realisasi keuangan Rp443.969.999 atau 89,17% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih, penyediaan jasa cleaning servis mesin potong rumput dengan capaian kinerja berupa tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih , penyediaan jasa cleaning servis mesin potong rumput di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp389.600.000 dan realisasi keuangan Rp296.495.717 atau 76,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan sebanyak 16 Unit dalam 1 Tahun dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 16 Unit di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp113.850.000 dan realisasi

keuangan Rp100.816.500 atau 88,55% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan sebanyak 14 Unit dalam 1 Tahun, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan sebanyak 14 Unit di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp383.838.000 dan realisasi keuangan Rp356.408.629 atau 92,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendraan Operasional Sebanyak 2 Unit dalam 1 Tahun dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendraan Operasional Sebanyak 2 Unit di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.750.000 dan realisasi keuangan Rp9.865.500 atau 62,64% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dalam 1 Tahun, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.051.399.341 dan realisasi keuangan Rp12.910.753.462 atau 98,92% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD dengan capaian kinerja berupa terbayarnya Gaji dan Tunjangan DPRD di Sekretariat DPRD Tahun 2025.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp283.430.000 dan realisasi keuangan Rp278.152.000 atau 98,14% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dan atribut DPRD tahun 2025.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp52.500.000 dan realisasi keuangan Rp44.850.000 atau 85,43% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dan atribut DPRD tahun 2025.

9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.120.000 dan realisasi keuangan Rp4.464.000 atau 72,94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya Administrasi pada keanggotaan DPRD tahun 2025.

- b. Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.290.200 dan realisasi keuangan Rp4.796.000 atau 65,79% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pada fraksi DPRD tahun 2025.
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.963.000 dan realisasi keuangan Rp238.881.000 atau 95,57% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan Rapat AKD, pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Pembayaran Honor THL, dengan capaian kinerja berupa terfasilitasinya Rapat AKD, pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Pembayaran Honor THL di Sekretariat DPRD Tahun 2024.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Kegiatan Daerah dan Peraturan DPRD

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program dan Pembentukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp491.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp467.000 atau 95,11% serta realisasi fisik mencapai 100%.
- b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.448.919.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.448.195.290 atau 99,95% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan rancangan peraturan daerah yang dibahas dalam satu tahun sebanyak 11 (sebelas) Ramperda.
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan alokasi anggaran sebesar Rp364.000 realisasi keuangan sebesar Rp346.000 atau 95,05% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.470.500 dan realisasi keuangan Rp26.942.800 atau 82,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah yang disusun dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan naskah akademik peraturan daerah yang disusun sebanyak 3 (tiga) dokumen.
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD alokasi anggaran sebesar Rp11.352.000 realisasi keuangan sebesar Rp8.831.100 atau 77,79% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan Tata Tertib DPRD yang dibahas dalam sekali Lima tahun.

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

- a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000 dan realisasi keuangan Rp16.700.000 atau 83,50% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS akan tetapi belanja makan minum untuk sub kegiatan pembahasan KUA dan PPAS.
- b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp11.200.000 atau 56,00% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Nota Kesepakatan perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS sebanyak 6 (enam) dokumen.
- c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000 dan realisasi keuangan Rp6.975.000 atau 34,88% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Nota Kesepakatan APBD dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan Nota Kesepakatan APBD sebanyak 2 (dua) dokumen.
- d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000 dan realisasi keuangan Rp6.975.000 atau 34,88% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Nota Kesepakatan Perubahan dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan nota kesepakatan perubahan APBD sebanyak 2 (dua) dokumen.
- e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.500.000 dan realisasi keuangan Rp3.425.000 atau 97,86% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Nota Kesepakatan Laporan Semester, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan nota kesepakatan semesteran sebanyak 2 (dua) dokumen.
- f. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.609.800 dan realisasi keuangan Rp14.218.500 atau 57,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya catatan atas laporan pertanggung jawaban APBD, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan nota catatan atas laporan pertanggung jawaban APBD sebanyak 5 (lima) dokumen.

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.501.000 dan realisasi keuangan Rp24.831.716 atau 93,70% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya koordinasi dan konsultasi pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum dengan

capaian kinerja berupa tercapainya laporan koordinasi dan konsultasi pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan hukum sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

- b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.800 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0,00% serta realisasi fisik mencapai 0%.
- c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.000 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0,00% serta realisasi fisik mencapai 0%.
- d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.458.500 dan realisasi keuangan Rp595.000 atau 40,80% serta realisasi fisik mencapai 100%.
- e. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp52.500 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0,00% serta realisasi fisik mencapai 0%.
- f. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.027.500 dan realisasi keuangan Rp1.962.000 atau 96,77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah telah di tindakn lanjuti.
- g. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp52.500 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0,00% serta realisasi fisik mencapai 0%.
- h. Sub Kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.306.500 dan realisasi keuangan Rp1.094.000 atau 83,74% serta realisasi fisik mencapai 100%.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

- a. Sub Kegiatan Pendalam Tugas DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.103.729.800 dan realisasi keuangan Rp698.539.749 atau 63,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimtek Dalam Provinsi, Bimtek Luar provinsi dan capaian kinerja berupa terpenuhinya laporan Bimtek dalam Provinsi, Bimtek Luar Provinsi dan Majalah Buletin DPRD.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp105.000 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0,00% serta realisasi fisik mencapai 0%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp229.155.000 dan realisasi keuangan Rp229.080.600 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi, dengan capaian kinerja berupa tercapainya Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 8 orang/bulan.

- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.772.000 dan realisasi keuangan Rp2.772.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Komperensi Pers, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan Komperensi Pers sebanyak 6 (enam) kali.
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp183.000 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%.
- f. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp247.616.600 dan realisasi keuangan Rp241.066.000 atau 97,35% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya langganan koran dan langganan majalah Nasional, dengan capaian kinerja berupa tercapainya tingkat pembayaran langganan koran 40EKS.

5. Kegiatan Penyerapanan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.991.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp18.429.100 atau 59,47% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya hearing dialog dalam satu tahun, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan hearing dialog dalam satu tahun sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan alokasi anggaran sebesar Rp758.835.400 dan realisasi keuangan Rp729.493.800 atau 96,61% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Reses DPRD dalam satu tahun, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan Reses DPRD dalam satu tahun.

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.814.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.796.000 atau 99,01% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Kode Etik dalam satu tahun, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan hearing dialog dalam satu tahun sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.265.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.216.000 atau 61,08% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Kode Etik dalam satu tahun, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan hearing dialog.

7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah alokasi anggaran sebesar Rp8.820.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp8.716.700 atau 98,82% serta realisasi fisik mencapai 100%.

- b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi alokasi anggaran sebesar Rp5.076.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp5.074.000 atau 99,96% serta realisasi fisik mencapai 100%.

8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.384.372.000 dan realisasi keuangan Rp7.383.780.857 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kunker Komisi dalam Provinsi, Kunker Komisi Luar Provinsi, Konsultasi Komisi dalam Provinsi, Konsultasi Komisi luar Provinsi, Konsultasi Bamus Luar Provinsi, Konsultasi Banggar dalam Provinsi, Konsultasi Banggar luar Provinsi, Konsultasi Bapemperda dalam Provinsi, Konsultasi Bapemperda luar Provinsi, Konsultasi BK dalam Provinsi, Konsultasi BK luar Provinsi, Konsultasi Pimpinan DPRD dan kunjungan Kerja/konsultasi lainnya Anggota DPRD, dengan capaian kinerja berupa tercapainya laporan Kunker Komisi dalam Provinsi sebanyak 4 (empat) kali, Kunker Komisi luar Provinsi sebanyak 4 (empat) kali, Konsultasi Komisi dalam Provinsi sebanyak 4 (empat) kali, Konsultasi Komisi luar Provinsi sebanyak 4 (empat) kali, konsultasi Bamus luar Provinsi sebanyak 2 (dua) kali, Konsultasi Banggar dalam Provinsi sebanyak 2 (dua) kali, Konsultasi Banggar luar Provinsi sebanyak 2 (dua) kali, konsultasi Bapemperda dalam Provinsi sebanyak 2 (dua) kali, konsultasi Bapemperda luar Provinsi sebanyak 2 (dua) kali, Konsultasi BK dalam Provinsi sebanyak 2 (dua) kali, Konsultasi BK luar Provinsi sebanyak 2 (dua) kali, Konsultasi Pimpinan DPRD sebanyak 14 (empat belas) kali dan kunjungan Kerja/konsultasi lainnya Anggota DPRD sebanyak 8 (delapan) kali.
- b. Sub Penyusunan Laporan Kinerja DPRD alokasi anggaran sebesar Rp4.830.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0%
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah alokasi anggaran sebesar Rp21.112.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp18.072.000 atau 85,60% serta realisasi fisik mencapai 100%.
- d. Sub kegiatan Fasilitasi Tugas pimpinan DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.479.739.000 dan realisasi keuangan Rp1.479.130.535 atau 99,96% serta realisasi fisik 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tidak terlaksananya sub kegiatan disebabkan oleh intensitas pekerjaan yang tinggi, dengan capaian kinerja berupa tercapainya Laporan Konsultasi Pimpinan DPRD sebanyak 14 (empat belas) kali.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIAT DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorium THL dan belanja Lembur	Terlaksananya Pembayaran honorium THL dan belanja Lembur	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Verifikasi SPJ Keuangan dalam 1 Tahun	Tersusunnya Verifikasi SPJ Keuangan dalam 1 Tahun	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Buah dokumen Penyiapan bahan tanggap Pemeriksaan dalam satu tahun	1 Buah dokumen Penyiapan bahan tanggap Pemeriksaan dalam satu tahun	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Buah dokumen Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Buah dokumen Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Buah dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Buah dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- 140 stel Pakaian daerah	- Terlaksananya 140 stel Pakaian daerah	-	-
				Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- org ASN yang mengikuti Bimtek	Terlaksananya - org ASN yang mengikuti Bimtek	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pena 958 bh - Spidol 23 bh - Stabilo 10 bh - Binder Clip 40 bh - Penghapus / tip x 25 bh - Buku Tulis 34 bh - Buku Agenda 30 bh - MapBiasa 2070 bh - Map Box File 31 bh - Map Spring File 31bh - Pengaris / Rol Besi 5 bh - Penggaris / Rol Plastik 3 bh - Pisau Cutter 12 bh - Lakban 16 bh - Lem 7 bh - Stepler 20 bh - Stepler 10 HD 24 bh - Stepler 30 HD 6 bh - Isi Hekter 30 DH 13 kotak - Isi Hekter 10 HD 40 Kotak - Gunting 33 bh - Bantalan Stempel 24 bh - Stempel Tiktok 4 bh - Pelubang Kertas 3 bh	- Pena 958 bh - Spidol 23 bh - Stabilo 10 bh - Binder Clip 40 bh - Penghapus / tip x 25 bh - Buku Tulis 34 bh - Buku Agenda 30 bh - MapBiasa 2070 bh - Map Box File 31 bh - Map Spring File 31bh - Pengaris / Rol Besi 5 bh - Penggaris / Rol Plastik 3 bh - Pisau Cutter 12 bh - Lakban 16 bh - Lem 7 bh - Stepler 20 bh - Stepler 10 HD 24 bh - Stepler 30 HD 6 bh - Isi Hekter 30 DH 13 kotak - Isi Hekter 10 HD 40 Kotak - Gunting 33 bh - Bantalan Stempel 24 bh - Stempel Tiktok 4 bh - Pelubang Kertas 3 bh	-	-

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					- Kertas HVS Folio 149 bh - Kertas HVS Kwarto 52 bh - Kwitansi 254 bh - Amplop Putih 110 60 bh - Amplop Putih 90 25 bh - Amplop Kwarto 23 bh - Materai 960 bh - Buku Cek 1 bh - Tinta Printer Botol 21 bh - Tinta Printer Epson 93 bh - Tinta Printer Brozer 23 bh - Flashdisk 16 Gb 63 bh - Mouse 7 bh - Stikinote 30 bh - Stempel 4 bh	- Kertas HVS Folio 149 bh - Kertas HVS Kwarto 52 bh - Kwitansi 254 bh - Amplop Putih 110 60 bh - Amplop Putih 90 25 bh - Amplop Kwarto 23 bh - Materai 960 bh - Buku Cek 1 bh - Tinta Printer Botol 21 bh - Tinta Printer Epson 93 bh - Tinta Printer Brozer 23 bh - Flashdisk 16 Gb 63 bh - Mouse 7 bh - Stikinote 30 bh - Stempel 4 bh		
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Bahan yang dicetak - Penggandaan plakat	- Terlaksananya Bahan yang dicetak - Penggandaan plakat	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-
				Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Penyediaan makanan dan minuman tamu - pembayaran honor THL	Terlaksananya: - penyediaan makanan dan minuman tamu - pembayaran honor THL	-	-
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Rapat Internal sebanyak 7 kali - Konsultasi ke Pemerintahan yang lebih tinggi sebanyak 12 kali - Koordinasi dan sharing informasi dengan Sekretariat DPRD Daerah lain sebanyak 4 kali	Terlaksananya kegiatan - Rapat Internal sebanyak 7 kali - Konsultasi ke Pemerintahan yang lebih tinggi sebanyak 12 kali - Koordinasi dan sharing informasi dengan Sekretariat DPRD Daerah lain sebanyak 4 kali	-	-

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Alat listrik - Perlengkapan dinas - BM kebutuhan kantor	tersedianya - Alat listrik - Perlengkapan dinas - BM kebutuhan kantor	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Tersedianya materai	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tagihan telepon - Tagihan air - Tagihan listrik - Tagihan internet - Tagihan TV berlangganan 12 bulan	Terlaksananya pembayaran - Tagihan telepon - Tagihan air - Tagihan listrik - Tagihan internet - Tagihan TV berlangganan 12 bulan	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Penyediaan alat kebersihan dan bahan kebersihan - Penyediaan jasa Cleaning Service Mesin potong rumput	Terlaksananya kegiatan pengadaan - Penyediaan alat kebersihan dan bahan kebersihan - Penyediaan jasa Cleaning Service Mesin potong rumput	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	- Kendaraan dinas pimpinan 3 Unit - Kendaraan dinas Sekwan 1 Unit - Kendaraan dinas eselon III 3 Unit - Kendaraan eselon IV 9 Unit - Pembayaran pajak 1 kali	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas: - Kendaraan dinas pimpinan 3 Unit	-	-

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dinas Jabatan		- Kendaraan dinas Sekwan 1 Unit - Kendaraan dinas eselon III 3 Unit - Kendaraan eselon IV 9 Unit - Pembayaran pajak 1 kali		
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pelumas - Perabotkantor - Alatlistrik - Pemeliharaan alat kantor - Paket pengerjaan pemeliharaan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
				Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	- Pembayaran gaji dan tunjangan DPRD sebanyak 12 bulan	- Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan DPRD sebanyak 12 bulan	-	-
				Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	- PSH DPRD - PSR DPRD - PDH DPRD - Pin DPRD 35 pasang	Terlaksananya pengadaan - PSH DPRD - PSR DPRD - PDH DPRD - Pin DPRD 35 pasang	Disini kegiatan terlaksana sedangkan realisasi keuangan 0	-
				Kegiatan Layanan Administrasi DPRD				
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	-	-
				Sub kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD	Makan minum Fraksi	Terpenuhinya Makan minum Fraksi	-	-
				Sub kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	- Pelaksanaan rapat AKD - Pelaksanaan rapat paripurna Pembayaran honor THL	Terlaksananya kegiatan - Pelaksanaan rapat AKD - Pelaksanaan rapat paripurna		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- Pembayaran honor THL		
				Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	- Pengadaan computer - ATK - Perlengkapandinas - Televisi - Lemariarsip	Terlaksananya - Pengadaan computer - ATK - Perlengkapandinas - Televisi - Lemari arsip	-	-
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
				Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan Propemperda sebanyak 1 kali	Terlaksananya Penyusunan Propemperda sebanyak 1 kali		
				Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun, sebanyak 11 kali	Terlaksananya pembahasan Peraturan Daerah dalam satu tahun, sebanyak 11 kali		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang di Kaji sebanyak - kali	Terlaksananya Pengkajian Perundang-Undangan sebanyak - kali		
				Sub Kegiatan Fasilitasi PenyusunanPenjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Naskah Akademik Peraturan Daerah yang disusun 3 buah	Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah 3 buah		
				Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tatib sebanyak 1 dokumen	Tersusunnya dokumen Tata Tertib DPRD sebanyak 1 dokumen		
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				
				Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS sebanyak 9 dokumen	Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS sebanyak 9	Terbukukan ke dalam	

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PPAS		dokumen	Sub Kegiatan Pembahasan laporan semester	
				Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 6 dokumen	Tersusunnya Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 6 dokumen		
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Nota Kesepakatan APBD sebanyak 2 dokumen	Tersusunnya Nota Kesepakatan APBD sebanyak 2 dokumen		
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Nota Kesepakatan Perubahan APBD sebanyak 1 dokumen	Tersusunnya Nota Kesepakatan Perubahan APBD sebanyak 1 dokumen		
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Nota Kesepakatan Laporan Semester sebanyak 2 dokumen	Tersusunnya Nota Kesepakatan Laporan Semester sebanyak 2 dokumen		
				Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	- Catatan atas Laporan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 5 dokumen	Tersusunnya Catatan atas Laporan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 5 dokumen		
				Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum selama 12 bulan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum selama 12 bulan		
				Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	- Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 1 dokumen	- Tersusunnya Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 1 dokumen	Telah di tindak lanjuti	

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebanyak 1 dokumen	Tersusunnya Laporan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebanyak 1 dokumen		
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Bimtek dalam Provinsi dan Bimtek Luar Provinsi Anggota DPRD sebanyak 2 kali	Terlaksananya Bimtek dalam Provinsi dan Bimtek Luar Provinsi Anggota DPRD 2 sebanyak kali		
				Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	- Majalah/buletin DPRD - Langganan Koran - LanggananMajalah Nasional selama 12 bulan	Terlaksananya pengadaan - Majalah/buletin DPRD - Langganan Koran - Langganan Majalah Nasional selama 12 bulan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	- Pembayara Honorium Jasa Tenaga Ahli Fraksi selama 8 bulan	- Terbayarnya Honorium Jasa Tenaga Ahli Fraksi selama 8 bulan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Komperensi Pers sebanyak - kali	Terlaksananya kegiatan Komperensi Pers sebanyak - kali		
				Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
				Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hearing/dialog dalam satu tahun Kecamatan sebanyak 3 kali	Terlaksananya Hearing/ dialog dalam satu tahun sebanyak 3 kali		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Reses DPRD dalam satu tahun sebanyak 2 kali	Terlaksananya Reses DPRD dalam satu tahun sebanyak 2 kali		
				Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
				Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD Kecamatan sebanyak 1 kali	Tersusunnya dokumen Kode Etik DPRD sebanyak 1 kali		

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALA -LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kasus Pelanggaran Kode Etik yang diselesaikan sebanyak - kali	Tersusunnya Laporan Kasus Pelanggaran Kode Etik yang diselesaikan sebanyak - kali		
				Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	- Kunker Komisi dalam dan Luar Provinsi sebanyak 4kali - Konsultasi Komisi dalam dan Luar Prov.sebanyak 4 kali - Konsultasi Bamus dalam dan Luar Prov. 2 kali - Konsultasi Banggar Dalam dan Luar Prov.sebanyak 2 kali - Konsultasi Bapemperda dalam dan Luar Prov.sebanyak 2 kali - Konsultasi BK dalam dan Luar Prov. 2 kali - Kunker/Konsultasi Lainnya Anggota DPRD sebanyak 8 kali - Konsultasi Pimpinan DPRD sebanyak 14 kali	Terlaksananya pelaksanaan - Kunker Komisi dalam dan Luar Provinsi sebanyak 4 kali - Konsultasi Komisi dalam dan Luar Prov.sebanyak 4 kali - Konsultasi Bamus dalam dan Luar Prov.sebanyak 1 kali - Konsultasi Banggar Dalam dan Luar Prov.2 kali - Konsultasi Bapemperda dalam dan Luar Prov sebanyak 2kali - Konsultasi BK dalam dan Luar 2 Prov. - Kunker/Konsultasi Lainnya Anggota DPRD sebanyak 8 kali - Konsultasi Pimpinan DPRD sebanyak 14 kali		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	- Konsultasi Pimpinan DPRD sebanyak 14 kali	- Terlaksananya Konsultasi Pimpinan DPRD sebanyak 14 kali		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretriari DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, akan lebih berdaya guna apabila ada evaluasi secara bertahap dari pelaksanaan kegiatan sehingga di tahun-tahun mendatang dapat direncanakan kegiatan pendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan dalam usaha pencapaian sasaran yang diinginkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 urusan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp220.261.032.879 dan realisasi keuangan Rp206.530.839.507 atau 93,77%. Rincian OPD pelaksana urusan berikut anggaran dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No	Urusan Dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	220.261.032.879	206.530.839.507	93,77
5.1.	URUSAN PERENCANAAN	6.034.175.131	5.750.015.711	95,29
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.034.175.131	5.750.015.711	95,29
5.2.	URUSAN KEUANGAN	208.522.833.284	195.184.306.884	93.60
1	Badan Keuangan	208.522.833.284	195.184.306.884	93.60
5.3.	URUSAN KEPEGAWAIAN	5.673.741.464	5.566.233.912	98,11
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.673.741.464	5.566.233.912	98,11
5.4.	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	30.283.000	30.283.000	100,00
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	30.283.000	30.283.000	100,00
	TOTAL	220.261.032.879	206.530.839.507	93,77

3.1.5.1. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp6.034.175.131 dan realisasi keuangan Rp5.750.015.711 atau 95,29%.

3.1.5.1.1. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan OPD penunjang pelaksana Urusan Perencanaan dengan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 54 Urusan Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.034.175.131	5.750.015.711
5.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.632.024.471	5.407.622.320
5.01.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.538.156	72.859.478
5.01.01.2.01.01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.732.000	12.940.000
5.01.01.2.01.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.802.000	4.510.000
5.01.01.2.01.03.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.703.000	5.896.000
5.01.01.2.01.04.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.212.000	3.212.000
5.01.01.2.01.05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.568.000	183.000
5.01.01.2.01.06.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.719.156	43.258.478
5.01.01.2.01.07.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.802.000	2.860.000
5.01.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.459.764.744	4.312.642.080
5.01.01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.432.648.824	4.286.219.458
5.01.01.2.02.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.156.920	9.467.622
5.01.01.2.02.05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.608.000	5.608.000
5.01.01.2.02.07.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.802.000	5.798.000
5.01.01.2.02.08.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.549.000	5.549.000
5.01.01.2.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.860.000	12.022.000
5.01.01.2.03.06.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.860.000	12.022.000
5.01.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.907.120	221.400.324
5.01.01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.660.000	10.651.500
5.01.01.2.06.03.	Sub Kegiatan Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	11.030.000	10.575.000
5.01.01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.790.000	37.613.750
5.01.01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.381.120	55.495.884
5.01.01.2.06.06.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	4.800.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
5.01.01.2.06.08.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	21.005.000	20.311.250
5.01.01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.641.000	81.952.940
5.01.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.800.000	11.456.000
5.01.01.2.07.06.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.800.000	11.456.000
5.01.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.947.000	310.689.683
5.01.01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.947.000	68.289.683
5.01.01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.000.000	242.400.000
5.01.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.207.451	466.552.755
5.01.01.2.09.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.700.000	225.472.591
5.01.01.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	25.600.000	15.188.110
5.01.01.2.09.09.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.907.451	225.892.054
5.01.02.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	165.258.500	126.892.836
5.01.02.2.01.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	148.504.500	115.120.902
5.01.02.2.01.03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	5.990.000	5.990.000
5.01.02.2.01.05.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	15.640.000	15.604.500
5.01.02.2.01.07.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	126.874.500	93.526.402
5.01.02.2.02.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	16.754.000	11.771.934
5.01.02.2.02.01.	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	16.754.000	11.771.934
5.01.03.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	206.609.160	191.570.905
5.01.03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85.246.610	84.986.905
5.01.03.2.01.01.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.132.110	19.130.347
5.01.03.2.01.08.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.114.500	65.856.558
5.01.03.2.02.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	57.483.000	52.370.716
5.01.03.2.02.01.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.367.000	29.401.901
5.01.03.2.02.05.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.116.000	22.968.815
5.01.03.2.03.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	63.879.550	54.213.284
5.01.03.2.03.04.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	34.512.775	26.725.400
5.01.03.2.03.08.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	29.366.775	27.487.884

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Bidang Kewilayahan		

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.732.000 dan realisasi keuangan Rp12.940.000 atau 82,25% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.802.000 dan realisasi keuangan Rp4.510.000 atau 77,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.703.000 dan realisasi keuangan Rp5.896.000 atau 67,75% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.212.000 dan realisasi keuangan Rp3.212.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.568.000 dan realisasi keuangan Rp183.000 atau 2,42% serta

realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.

- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.719.156 dan realisasi keuangan Rp43.258.478 atau 96,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.802.000 dan realisasi keuangan Rp2.860.000 atau 49,29% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.432.648.824 dan realisasi keuangan Rp4.286.219.458 atau 96,70% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.156.920 dan realisasi keuangan Rp9.467.622 atau 93,21% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.608.000 dan realisasi keuangan Rp5.608.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.802.000 dan realisasi keuangan Rp5.798.000 atau 99,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.549.000 dan realisasi keuangan Rp5.549.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.860.000 dan realisasi keuangan Rp12.022.000 atau 93,48% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.660.000 dan realisasi keuangan Rp10.651.500 atau 99,92% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.030.000 dan realisasi keuangan Rp10.575.000 atau 95,87% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.790.000 dan realisasi keuangan Rp37.613.750 atau 99,53% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan

Logistik Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

- d. Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.381.120 dan realisasi keuangan Rp55.495.884 atau 96,71% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.400.000 dan realisasi keuangan Rp4.800.000 atau 57,14% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan.
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.005.000 dan realisasi keuangan Rp20.311.250 atau 96,70% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.641.000 dan realisasi keuangan Rp81.952.940 atau 96,82% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.800.000 dan realisasi keuangan Rp11.456.000 atau 97,08% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.947.000 dan realisasi keuangan Rp68.289.683 atau 80,39% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp252.000.000 dan realisasi keuangan Rp242.200.000 atau 96,19% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp236.700.000 dan realisasi keuangan Rp225.472.591 atau 95,26% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.600.000 dan realisasi keuangan Rp15.188.110 atau 59,33% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp225.907.451 dan realisasi keuangan Rp225.892.054 atau 99,99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.990.000 dan realisasi keuangan Rp5.990.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.640.000 dan realisasi keuangan Rp15.604.400 atau 99,77% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara

Musrenbang Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp126.874.500 dan realisasi keuangan Rp93.526.402 atau 73,72% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) dengan capaian kinerja berupa ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.132.110 dan realisasi keuangan Rp19.130.347 atau 99,99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.114.500 dan realisasi keuangan Rp65.856.558 atau 99,61% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dengan capaian kinerja berupa terlaksananya sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam):

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.367.000 dan realisasi keuangan Rp29.401.901 atau 90,84% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.116.000 dan realisasi keuangan Rp22.968.815 atau 91,45% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.512.775 dan realisasi keuangan Rp26.725.400 atau 77,44% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.366.775 dan realisasi keuangan Rp27.487.884 atau 93,60% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	• Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan • Meningkatnya Evaluasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Bappelitb angka BB	BB		
			• Meningkatkan Penyusunan, Pelaporan dengan Analisa Keuangan Perangkat Daerah • Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun • Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD • Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai IRB Bappelitb angka 64,17 (CC)	Menunggu hasil dari Bagian Organisasi		
			• Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Perencanaan • Meningkatkan Penyusunan Perencanaan Evaluasi, Pelaporan Kepegawaian	c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD d. Administrasi Umum Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai IKM Bappelitb angka 93,96	85,11	Untuk target IKM Bappelitb angka Tahun 2025 sebesar 85 berdasarkan Renstra	

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Perangkat Daerah	• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Tahun 2025-2029	
			• Meningkatkan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Meningkatkan Analisis Data Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik • Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Perencanaan sebesar 80	87,51		

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			• Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah • Meningkatnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan • Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan • Meningkatnya Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) • Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur • Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.				

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Perencanaan pada Bappelitbangda. Alokasi dana dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, secara umum realisasi fisik mencapai 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan.

3.1.5.2. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total anggaran sebesar Rp208.522.833.284 dan realisasi keuangan Rp195.184.306.884 atau 93,60%.

3.1.5.2.1. Badan Keuangan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Keuangan merupakan OPD penunjang pelaksana urusan keuangan dengan melaksanakan 4 Program, 14 Kegiatan dan 79 Sub Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 55 Urusan Keuangan pada Badan Keuangan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	BADAN KEUANGAN	208.522.833.284	195.184.306.884
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.802.978.446	24.265.441.151
01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.951.500	102.035.750
01.2.01.0001.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.297.000	14.062.000
01.2.01.0002.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.919.000	12.509.250
01.2.01.0003.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.100.500	15.152.000
01.2.01.0004.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.188.000	12.190.000
01.2.01.0005.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	18.100.000	15.383.500
01.2.01.0006.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.353.000	13.252.000
01.2.01.0007.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.994.000	19.487.000
01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.325.397.346	22.124.870.895
01.2.02.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.192.609.346	22.063.214.895
01.2.02.0005.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.457.000	18.637.000

01.2.02.0007.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	77.500.000	35.497.000
01.2.02.0008.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.831.000	7.522.000
01.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.500.000	29.162.200
01.2.05.0002.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.000.000	22.222.200
01.2.05.0011.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.500.000	6.940.000
01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.363.600	220.827.191
01.2.06.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.755.000	11.826.000
01.2.06.0002.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.524.000	1.385.200
01.2.06.0003.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.976.800	3.850.000
01.2.06.0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.178.800	51.652.000
01.2.06.0005.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.226.000	19.971.500
01.2.06.0008.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	52.015.000	41.026.500
01.2.06.0009.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.688.000	91.115.991
01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	605.775.000	528.233.850
01.2.07.0001.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.860.000	60.578.300
01.2.07.0005.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	85.100.000	76.345.800
01.2.07.0006.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	445.815.000	391.309.750
01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.576.300	674.579.581
01.2.08.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.041.000	3.490.000
01.2.08.0002.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.999.980	124.004.675
01.2.08.0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.535.320	547.084.906
01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.414.700	585.731.684
01.2.09.0002.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	424.525.000	363.511.074
01.2.09.0006.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.689.700	22.080.220
01.2.09.0009.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.200.000	200.140.390
02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	181.036.015.256	169.574.918.928
02.2.01.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.173.831.700	1.098.233.500
02.2.01.0001.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	151.457.800	136.803.500
02.2.01.0002.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	136.752.000	136.721.000
02.2.01.0003.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72.650.000	67.864.000
02.2.01.0004.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	110.850.000	110.661.000
02.2.01.0005.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	67.523.000	66.881.000
02.2.01.0006.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	138.456.000	127.748.000

02.2.01.0007.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	202.932.900	191.929.400
02.2.01.0008.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	202.724.000	171.754.800
02.2.01.0009.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	90.486.000	87.870.800
02.2.02.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	294.888.000	263.625.100
02.2.02.0001.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	57.248.000	52.732.000
02.2.02.0003.	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	11.540.000	8.643.000
02.2.02.0004.	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	40.000.000	39.510.000
02.2.02.0005.	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	14.996.000	7.396.000
02.2.02.0006.	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	39.000.000	37.111.000
02.2.02.0007.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17.437.000	12.010.000
02.2.02.0008.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20.000.000	19.570.000
02.2.02.0009.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	49.500.000	48.599.200
02.2.02.0010.	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	45.167.000	38.053.900
02.2.03.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	259.261.200	204.741.612
02.2.03.0002.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	21.200.000	15.151.000
02.2.03.0003.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19.242.200	13.259.900
02.2.03.0004.	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40.150.000	39.301.000
02.2.03.0005.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	58.025.000	48.765.800
02.2.03.0009.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	17.323.000	8.310.000

02.2.03.0011.	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	103.321.000	79.953.912
02.2.04.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	179.100.186.356	167.833.819.666
02.2.04.0008.	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	163.446.958.300	159.294.916.828
02.2.04.0009.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.771.614.748	2.040.328.994
02.2.04.0010.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.881.613.308	6.498.573.844
02.2.05.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	207.848.000	174.499.050
02.2.05.0002.	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	118.224.000	107.482.050
02.2.05.0003.	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	89.624.000	67.017.000
03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	536.314.300	375.892.189
03.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	536.314.300	375.892.189
03.2.01.0001.	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	59.418.000	59.261.900
03.2.01.0003.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.814.000	29.245.500
03.2.01.0005.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	79.256.000	18.355.000
03.2.01.0007.	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	224.611.000	128.643.000
03.2.01.0011.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	54.725.200	52.923.789
03.2.01.0012.	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	88.490.100	87.463.000
04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.723.757.950	1.618.617.726
04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.723.757.950	1.618.617.726
04.2.01.0001.	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	40.000.050	35.501.771
04.2.01.0002.	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	155.605.000	135.099.907
04.2.01.0003.	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	216.176.000	213.310.851
04.2.01.0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	305.820.400	303.323.300
04.2.01.0005.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	103.364.200	98.075.600
04.2.01.0006.	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	45.000.000	38.536.700
04.2.01.0007.	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	179.717.100	175.489.260
04.2.01.0008.	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	99.847.750	96.648.799
04.2.01.0009.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12.000.000	6.571.000
04.2.01.0010.	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.643.550	86.154.500
04.2.01.0011.	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	216.152.000	203.247.565
04.2.01.0013.	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	177.613.000	149.891.000
04.2.01.0014.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	38.818.900	35.822.400
04.2.01.0015.	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	45.000.000	40.945.073

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana, serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan keuangan adalah sebagai berikut

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.297.000 dan realisasi keuangan Rp14.062.000 atau 86,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1 Dokumen Renja 2026, 1 Dokumen Renja Perubahan 2025, 1 Dokumen Rencana Aksi 2025, 1 Rencana Tindak Pengendalian tahun 2026);
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.919.000 dan realisasi keuangan Rp12.509.250 serta realisasi keuangan kegiatan mencapai 89,87% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (1 Dokumen RKA 2026);
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.100.500 dan realisasi keuangan Rp15.152.000 atau 94,11% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKP (1 Dokumen Perubahan RKA);
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.188.000 dan realisasi keuangan Rp12.190.000 atau 75,30% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.100.000 dan realisasi keuangan Rp15.383.500 atau 84,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;

- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.353.000 dan realisasi keuangan Rp13.252.000 atau 59,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.255.000 dan realisasi keuangan Rp19.487.000 atau 77,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.192.609.346 dan realisasi keuangan Rp22.063.214.895 atau 95,13% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.457.000 dan realisasi keuangan Rp18.637.000 atau 47,23% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp77.500.000 dan realisasi keuangan Rp35.497.000 atau 45,80% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.000.000 dan realisasi keuangan Rp22.222.200 atau 82,30% serta

realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;

- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.500.000,- dan realisasi keuangan Rp6.940.000 atau 55,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.755.000 dan realisasi keuangan Rp11.826.000 atau 92,72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.524.000 dan realisasi keuangan Rp1.385.200 atau 21,23% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.976.800 dan realisasi keuangan Rp3.850.000 atau 64,42% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Peralatan Rumah Tangga;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.178.800 dan realisasi keuangan Rp51.652.000 atau 90,33% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Bahan Logistik Kantor;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.226.000 dan realisasi keuangan Rp19.971.500 atau 89,86% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan;
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp52.015.000 dan realisasi keuangan Rp41.026.500 atau 78,87% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu;

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp133.688.000 dan realisasi keuangan Rp91.115.991 atau 68,16% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.860.000 dan realisasi keuangan Rp60.578.300 atau 80,92% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya kendaraan dinas perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.100.000 dan realisasi keuangan Rp76.345.800 atau 89,71% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Pengadaan Mebel;
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp445.815.000 dan realisasi keuangan Rp391.309.750 atau 87,77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya;

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.041.000 dan realisasi keuangan Rp3.490.000 atau 49,57% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp153.999.980 dan realisasi keuangan Rp124.004.675 atau 80,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum alokasi anggaran sebesar Rp577.535.320 dan realisasi keuangan Rp547.084.906 atau 94,73% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Jasa Pelayanan Umum;

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp424.525.000 dan realisasi keuangan Rp363.511.074 atau 85,63% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.689.700 dan realisasi keuangan Rp22.080.220 atau 43,56% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.200.000 dan realisasi keuangan Rp200.140.390 atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.457.800 dan realisasi keuangan Rp136.803.500 atau 90,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun, dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya KUA dan PPAS;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp136.752.000 dan realisasi keuangan Rp136.721.000 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun, dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp72.650.000 dan realisasi keuangan Rp67.864.000 atau 93,41% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp110.850.000 dan realisasi keuangan Rp110.661.000 atau 99,83% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perubahan

- RKA-SKPD yang diverifikasi, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.523.000 dan realisasi keuangan Rp66.881.000 atau 99,05% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.456.000 dan realisasi keuangan Rp127.748.000 atau 92,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang di verifikasi, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp202.932.900 dan realisasi keuangan Rp191.929.400 atau 94,58% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp202.724.000 dan realisasi keuangan Rp171.754.800 atau 84,72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.486.000 dan realisasi keuangan Rp87.870.800 atau 97,11% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.248.000 dan realisasi keuangan Rp52.732.000 atau 92,11% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.540.000 dan realisasi keuangan Rp8.643.000 atau

74,90% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;

- c. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000 dan realisasi keuangan Rp39.510.000 atau 98,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.996.000 dan realisasi keuangan Rp7.396.000 atau 49,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.000.000 dan realisasi keuangan Rp37.111.000 atau 95,16% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.437.000 dan realisasi keuangan Rp12.010.000 atau 68,88% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai

Optimalisasi Kas dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000 dan realisasi keuangan Rp19.570.000 atau 97,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;

- h. Sub Koordinasi Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.500.000 dan realisasi keuangan Rp48.599.200 atau 98,18% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
- i. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.167.000 dan realisasi keuangan Rp38.053.900 atau 84,25% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.200.000 dan realisasi keuangan Rp15.151.000 atau 71,47% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.242.200 dan realisasi keuangan Rp13.259.900 atau 68,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;

- c. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.150.000 dan realisasi keuangan Rp.39.301.000 atau 97,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp58.025.000 dan realisasi keuangan Rp48.765.800 atau 84,04% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.323.000 dan realisasi keuangan Rp8.310.000 atau 47,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- f. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp103.321.000 dan realisasi keuangan Rp79.953.912 atau 77,38% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp163.446.958.300 dan realisasi keuangan Rp159.294.916.828 atau 97,46% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada 79 Nagari;

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.771.614.748 dan realisasi keuangan Rp2.040.328.994 atau 23,26% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan capaian kinerja berupa Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.881.613.308 dan realisasi keuangan Rp6.498.573.844 atau 94,43% serta realisasi fisik mencapai 40%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja berupa Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota.

5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp118.224.000 dan realisasi keuangan Rp107.482.050 atau 90,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.624.000 dan realisasi keuangan Rp67.017.000 atau 74,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.418.000 dan realisasi keuangan Rp59.261.900 atau 99,74% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Standar Harga yang disusun, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Standar Harga;
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.814.000 dan realisasi keuangan Rp29.245.500 atau 98,09% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;

- c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.256.000 dan realisasi keuangan Rp18.355.000 atau 23,16% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp224.611.000 dan realisasi keuangan Rp128.643.000 atau 57,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah;
- e. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp54.725.200 dan realisasi keuangan Rp52.923.789 atau 96,71% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- f. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp88.490.100 dan realisasi keuangan Rp87.463.000 atau 98,84% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun, dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah;

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- a. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.000.156 dan realisasi keuangan Rp22.693.000 atau 88,75% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp74.903.000 dan realisasi keuangan Rp32.171.100 atau 42,95% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah;

- c. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp77.308.026 dan realisasi keuangan Rp77.063.565 atau 99,68% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp231.535.000 dan realisasi keuangan Rp220.210.900 atau 95,11% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- e. Sub Kegiatan Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.110.100 dan realisasi keuangan Rp27.084.000 atau 99,90% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah;
- f. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.162.000 dan realisasi keuangan Rp8.356.600 atau 37,71% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- g. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp128.775.000 dan realisasi keuangan Rp128.149.264 atau 99,51% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya dengan capaian kinerja berupa Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya.
- h. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.112.000 dan realisasi keuangan Rp30.912.000 atau 99,36% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah;
- i. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.875.000 dan realisasi keuangan Rp3.750.400 atau 76,93% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah;

- j. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.370.000 dan realisasi keuangan Rp132.378.624 atau 91,69% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- k. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp263.610.000 dan realisasi keuangan Rp210.913.560 atau 80,01% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah;
- l. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.347.000 dan realisasi keuangan Rp28.105.303 atau 77,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah;
- m. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.715.000 dan realisasi keuangan Rp16.161.600 atau 65,39% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Laporan Retribusi Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- n. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.703.000 dan realisasi keuangan Rp30.104.700 atau 79,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA-LAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1.	BADAN KEUANGAN	KEUANGAN	Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15	I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	Nihil	Nihil
				1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	WTP	WTP	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				d. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				d. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	Nihil	Nihil
				f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	Nihil	Nihil
				g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	Nihil	Nihil

				2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD (WTP)	Opini BPK Terhadap LKPD (WTP)	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	172 Dokumen	172 Dokumen	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18 Dokumen	18 Dokumen	Nihil	Nihil
				f. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Laporan	4 Laporan	Nihil	Nihil
				g. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Peraturan	1 Peraturan	Nihil	Nihil
				3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD (WTP)	Opini BPK Terhadap LKPD	Nihil	Nihil

						(WTP)		
				a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	2 Dokumen	2 Dokumen	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Kali	4 Kali	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43 Laporan	43 Laporan	Nihil	Nihil
				d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	Tidak tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRT sehingga Perd Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak ditetapkan	Sesuai peraturan perundang-undangan maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD di tetapkan menggunakan Peraturan Kepala Daerah
				e. Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil

				f. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah baru berbentuk draf	Akan dilanjutkan penyusunan kebijakan dana panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025
				g. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Kali	4 Kali	Nihil	Nihil
				4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD (WTP)	Opini BPK Terhadap LKPD (WTP)	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	79 Nagari	79 Nagari	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13 Kecamatan	3 Kecamatan	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	79 Nagari	79 Nagari	Nihil	Nihil
				5 Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengeloaan Keuangan Daerah secara elektronik (95%)	95%	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang KeuanganDaerah	12 Bulan	12 Bulan	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	86 Orang	96 Orang	Nihil	Nihil

				II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD (WTP)	Opini BPK Terhadap LKPD (WTP)	Nihil	Nihil
				1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah (100%)	100%	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Pensil Sertifikat,	72 Pensil Sertifikat,	Nihil	Nihil
				e. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 Buah	80 Buah	Nihil	Nihil
				f. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20 Buku	20 Buku	Nihil	Nihil
				g. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20 Buku	20 Buku	Nihil	Nihil
				III. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (8,53%)	0.8%	Nihil	Nihil
				1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (8,53%)	0.8%	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil

				c. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 kali	4 Kali	Nihil	Nihil
				d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Nihil	Nihil
				e. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				f. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen, 1 Laporan	1 Dokumen, 1 Laporan	Nihil	Nihil
				g. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100 OP	100 OP	Nihil	Nihil
				h. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Nihil	Nihil
				i. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40 Layanan	40 Layanan	Nihil	Nihil
				j. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Nihil	Nihil
				k. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Nihil	Nihil
				l. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Nihil	Nihil
				m. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 kali	12 kali	Nihil	Nihil
				n. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	100%	100%	Nihil	Nihil
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	85	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	4 Dokumen	Nihil	Nihil

				Daerah				
				b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	85		
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	64 orang/bulan	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	Nihil	Nihil
				3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	85	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Kali	7 Kali	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	1 kali	Nihil	Nihil
				4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85	85	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	1 Paket	1 Paket	Nihil	Nihil

				dan Perlengkapan Kantor				
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Nihil	Nihil
				d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Nihil	Nihil
				e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Nihil	Nihil
				f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	Nihil	Nihil
				g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	Nihil	Nihil
				5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	17 Unit	Nihil	Nihil
				6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Nihil	Nihil
				7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Nihil	Nihil
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	33 Unit	Nihil	Nihil
				b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65 Unit	65 Unit	Nihil	Nihil

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan keuangan pada Badan Keuangan tidak terdapat permasalahan yang berarti, alokasi anggaran dan realisasi keuangan serta fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang dengan artian secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena lebih memprioritas kegiatan yang wajib dan mendesak serta untuk efisiensi penggunaan anggaran.

3.1.5.3. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.673.741.464 dan realisasi keuangan Rp5.566.233.912 atau 98,11%.

3.1.5.3.1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan OPD penunjang pelaksana urusan Kepegawaian dengan melaksanakan 3 Program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD tahun 2025 terhadap penyelenggaraan urusan kepegawaian, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 56 Urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.673.741.464	5.566.233.912
3.xx.3.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.299.720.464	5.217.348.691
3.xx.3.xx.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.930.706.864	4.870.160.635
3.xx.3.xx.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.930.706.864	4.870.160.635
3.xx.3.xx.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.151.100	119.126.973
3.xx.3.xx.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.130.000	7.884.500
3.xx.3.xx.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.330.000	21.200.010
3.xx.3.xx.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.817.100	26.954.826
3.xx.3.xx.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.250.000	18.881.625

3.xx.3.xx.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.624.000	44.206.012
3.x.3.xx.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.162.500	136.077.079
3.xx.3.xx.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000
3.xx.3.xx.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.962.500	25.877.079
33.xx.3.xx.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.200.000	107.200.000
3.xx.3.xx.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.700.000	91.984.004
3.xx.3.xx.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.700.000	91.984.004
3.xx.3.xx.02	PROGAM KEPEGAWAIAN DAERAH	340.521.000	315.475.221
3.xx.3.xx.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	20.106.000	19.744.761
3.xx.3.xx.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	13.368.000	13.106.800
3.xx.3.xx.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6.738.000	6.637.961
3.xx.3.xx.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	243.615.000	232.335.960
3.xx.3.xx.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	6.550.000	1.105.000
3.xx.3.xx.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	7.960.000	7.606.800
3.xx.3.xx.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN PNS	229.105.000	223.624.160
3.xx.3.xx.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	59.331.000	53.814.500
3.xx.3.xx.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	59.331.000	53.814.500
3.xx.3.xx.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.469.000	9.580.000
3.xx.3.xx.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12.469.000	4.940.000
3.xx.3.xx.02.2.04.07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	5.000.000	4.640.000
3.xx.3.xx.02	PROGAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33.500.000	33.410.000
3.xx.3xx.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	33.500.000	33.410.000
3.xx.3.xx.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	33.500.000	33.410.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi, serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.930.706.864 dan realisasi keuangan Rp4.870.160.635 atau 98,77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN di Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran Rp8.130.000 dan realisasi keuangan Rp7.884.500 atau 96,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga dengan capaian kinerja berupa alat alat kebersihan seperti sapu, kemoceng, tempat sampah dll serta tersedianya bahan-bahan pembersih seperti pembersih lantai, pengharum ruangan dll.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.330.000 dan realisasi keuangan Rp21.200.010 atau 94,94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan penyediaan ATK.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.817.100 dan realisasi keuangan Rp26.954.826 atau 96,90% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa tersedianya dana guna penggandaan atau fotocopi bahan ataupun berkas-berkas dan dokumen administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.250.000 dan realisasi keuangan Rp18.881.625 atau 88,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitas kunjungan tamu pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian kinerja berupa peningkatan pelayanan tamu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.624.000 dan realisasi keuangan Rp44.206.012 atau 96,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya

penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah..

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000 dan realisasi keuangan Rp3.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya benda pos dan terkirimnya surat/paket dengan capaian kinerja berupa tersedianya benda-benda pos untuk keperluan kantor seperti materai, buku cheque dan juga terbayarkannya jasa untuk pengiriman surat ke instansi berikut.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.962.500 dan realisasi keuangan Rp25.877.079 atau 95,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dengan capaian kinerja berupa terbayarkannya jasa penggunaan telepon untuk koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp107.200.000 dan realisasi keuangan Rp107.200.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja berupa terlaksananya proses penatausahaan keuangan program/kegiatan dan terbayarkannya honor pelaksana program/kegiatan di BKPSDM.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.700.000 dan realisasi keuangan Rp91.984.004 atau 86,21% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian kinerja berupa tersedianya dana perbaikan/servis, BBM dan terpeliharanya 5 unit kendaraan roda 4 dan 14 unit kendaraan roda 2.

II. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.368.000 dan realisasi keuangan Rp13.106.800 atau 98,05% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS, PPPK dan PPPK paruh waktu dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembagian SK CPNS sebanyak 259 orang, PPPK tahan 1 sebanyak 295 orang dan PPPK tahap II sebanyak 199 orang dan PPPK paruh waktu sebanyak 1.316 orang

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.738.000 dan realisasi keuangan Rp6.637.961 atau 98,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pelaksana administrasi pemberhentian dengan capaian kinerja berupa penetapan SK KP pengabdian dan pensiun dengan rincian, pensiun dengan batas usia pensiun sebanyak 331 orang, pensiun atas permintaan sendiri sebanyak 10 orang dan pensiun janda/duda sebanyak 23 orang

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.550.000 dan realisasi keuangan Rp1.105.000 atau 11,57% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah dengan capaian kinerja data penempatan ASN dan pelantikan tanggal 28 April 2025 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional ASN (PPPK) sebanyak 399 orang, tanggal 22 Oktober 2025 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ASN (PPPK) sebanyak 199 orang dan 1 PNS, tanggal 31 Oktober pelantikan dan pengambilan sumpah pejabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak 17 orang, pejabat administrator sebanyak 66 orang, pejabat pengawas sebanyak 34 orang dan jabatan fungsional sebanyak 2 orang. Pada tanggal 29 Desember 2025 pelantikan PPPK paruh waktu sebanyak 1.316 orang
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.960.000 dan realisasi keuangan Rp7.606.800 atau 76,37% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN dengan capaian kinerja kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode bulan Februari 2025 golongan IV sebanyak 21 orang, golongan III sebanyak 57 orang, golongan II sebanyak 7 orang. Kenaikan pangkat periode bulan April 2025 golongan IV sebanyak 81 orang, golongan III sebanyak 324 orang, golongan II sebanyak 28 orang, golongan I sebanyak 1 orang. Kenaikan pangkat periode bulan Juni 2025 golongan IV sebanyak 54 orang, Golongan III sebanyak 160 orang, golongan II sebanyak 7 orang. Kenaikan pangkat periode Agustus 2025 golongan IV sebanyak 86 orang, golongan III sebanyak 118 orang, golongan II sebanyak 4 orang. Kenaikan pangkat periode bulan Oktober 2025 golongan IV sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak 74 orang, golongan II sebanyak 9 orang. Kenaikan pangkat periode bulan November 2025 golongan IV sebanyak 1 orang. Kenaikan pangkat periode bulan Desember 2025 golongan IV sebanyak 24 orang, golongan III sebanyak 55 orang, golongan II sebanyak 1 orang
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp229.105.000 dan realisasi keuangan Rp223.624.160 atau 97,61% serta realisasi fisik mencapai 100%.

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan pengembangan promosi ASN dengan capaian kinerja berupa pelaksanaan job-pit pada bulan September dan Oktober 2025 dengan peserta sebanyak 25 orang dan pelaksanaan seleksi terbuka pada bulan Nopember dan Desember 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang.

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.331.000 dan realisasi keuangan Rp53.814.500 atau 90,70% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan sub ini adalah terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah tahun 2025 sebanyak 75 orang dengan rincian hasil sebanyak 57 orang lulus, tidak lulus sebanyak 14 orang dan tidak hadir ujian 4 orang.

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.469.000 dan realisasi keuangan Rp4.940.000 atau 39,62% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan capaian kinerja berupa capaian penginputan kualifikasi dimensi IP ASN tahun 2024 dengan indeks sebesar 78,55 dengan kategori sedang dari 5.040 PNS dan indeks PPPK sebesar 78,11 dengan kategori sedang dari 1.359 PPPK
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000 dan realisasi keuangan Rp4.640.000 atau 92,80% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan disiplin ASN dengan capaian kinerja berupa pelaksanaan pembinaan melalui monitoring berupa pelaksanaan Apel Gabungan sebanyak 12 kali, ASN yang mendapatkan sanksi karena melanggar disiplin berupa pemberhentian sementara terhadap 2 PNS dan 1 orang PPPK, juga penurunan jabatan lebih rendah terhadap 1 PNS.

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

- a. Sub Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.500.000 dan realisasi keuangan Rp33.410.000 atau 99,73% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan pengiriman peserta Latsar bagi CPNS Kabupaten Lima Puluh Kota yang berasal dari Alunmi Sekolah Kedinasan (STTD dan IPDN) pengangkatan tahun 2024 Potensi dan Kompetensi ASN melalui program Profilling ASN di UPT BKN Padang dari tanggal 21 Desember sampai 24 Desember 2025.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	BKPSDM	Kepegawaian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA				
				Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 orang/bulan	60 orang/bulan		
				Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	20 paket	20 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	50 paket	50 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 paket	10 paket		
				Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	4000 laporan	4000 laporan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	200 laporan		
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	160 laporan	160 laporan		

				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	28 laporan	28 laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 unit	23 unit		
				KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	10.000 dokumen	2.169 dokumen	Realisasi koordinasi dan fasilitasi disesuaikan dengan jumlah orang yang di terima PNS, PPPK dan PPPK paruh waktu	
				Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	200 dokumen	364 dokumen	Realisasi koordinasi pelaksanaan adminitrasi pemberhentian ASN disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun	
				Kegiatan Mutasi dan promosi ASN				
				Sub Kegiatan Pengelolaan mutase ASN	6,500 orang	2.030 orang	Realisasi disesuaikan dengan jumlah orang pejabat struktural dan pejabat administrator, pengawas dan fungsional yang dilantik sepanjang tahun 2025	
				Sub Kegiatan Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1.500 orang	1.131 orang	Realisasi pengelolaan kenaikan pangkat disesuaikan dengan jumlah ASN yang memenuhi syarat naik pangkat	

				Sub Kegiatan Pengelolaan promosi ASN	400 dokumen	61 dokumen	Realisasi disesuaikan dengan jumlah ASN yang mengikut job-pit dan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama	
				Kegiatan Pengembangan kompetensi ASN				
				Sub Kegiatan Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	250 orang	75 orang	Realisasi disesuaikan dengan ASN yang mendaftar untuk mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah	
				Kegiatan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	6.500 orang	5.040 orang	Realisasi berdasarkan penginputan kualifikasi dimensi IP ASN	
				Sub Kegiatan Pembinaan disiplin ASN	24 orang	4 orang	Realisasi pembinaan disiplin ASN disesuaikan dengan ASN yang mendapatkan sanksi disiplin	
				PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Kegiatan Pengembangan kompetensi teknis				
				Sub Kegiatan Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan Admnistrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	350 orang	389 orang	Realisasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan disesuaikan dengan jumlah yang mengikuti Latsar dan mengikuti program profiling BKN	

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang dimana realisasi keuangan mencapai 98,11 % dan realisasi fisik 100 %, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.5.4. Urusan Penelitian Dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp30.283.000 dan realisasi keuangan Rp30.283.000 atau 100%.

3.1.5.4.1. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan OPD penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 57 Urusan Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	30.283.000	30.283.000
5.05.02.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.283.000	30.283.000
5.05.02.2.01.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	30.283.000	30.283.000
5.05.02.2.01.12.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	30.283.000	30.283.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.283.000 dan realisasi keuangan Rp23.929.640 atau 79,02% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pemenuhan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Menigkatkan koordinasi dengan OPD, pihak terkait dan lembaga peneliti terhadap kajian penelitian pembangunan	1. Program Penelitiaan dan Pengembangan Daerah a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Inovasi Daerah Sebanyak 95	92	Data realisasi masih memakai data tahun 2024, karena saat ini aplikasi inovasi tidak bisa diakses	

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda. Realisasi fisik mencapai 100%, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan, Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan. Namun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan telah mencapai target.

3.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 urusan. Rincian OPD pelaksana urusan berikut anggaran dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 58 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No	Urusan Dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
6.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.696.311.155	11.862.048.578	93,43
6.1.	INSPEKTORAT DAERAH	12.696.311.155	11.862.048.578	93,43
1	Inspektorat	12.696.311.155	11.862.048.578	93,43

3.1.6.1 Inspektorat Daerah

Urusan Inspektorat Daerah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.696.311.155 dan realisasi keuangan Rp11.862.048.578 atau 93,43%.

3.1.6.1.1 Inspektorat

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Inspektorat merupakan OPD pendukung pelaksana urusan pengawasan tahun 2025 melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 59 Urusan Pengawasan pada Inspektorat

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	INSPEKTORAT	12.696.311.155	11.862.048.578
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.499.057.836	9.928.586.047

2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.825.300	52.937.600
01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.060.000	14.942.500
02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	11.014.000	10.817.500
03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.599.000	602.100
04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.392.300	6.295.000
05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.466.000	0
07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.093.000	8.091.000
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.655.016.845	8.251.263.717
01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.632.227.845	8.227.319.717
02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	8.671.000	8.624.000
03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.652.000	2.652.000
04	Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.800.000	3.800.000
05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	7.666.000	7.608.000
2.03	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.485.000	378.757.712
01	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	411.950.000	376.857.712
02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.535.000	1.900.000
2.04	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.542.788	467.712.440
01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.210.000	16.202.100
02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.711.888	192.202.888
03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.230.000	4.216.000
04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.990.000	35.984.161
05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.306.900	25.306.850
06	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.070.000	28.802.100
07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.024.000	164.998.341
2.05	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.980.000	195.679.690
01	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	155.900.000	154.599.690
02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.080.000	41.080.000
2.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.317.324	267.361.646
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	1.006.000
02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.976.770	41.813.190
03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.390.554	224.542.456
2.07	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.890.579	314.873.242

01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.598.579	161.866.678
02	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.232.000	145.170.200
03	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.060.000	7.836.364
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.808.940.000	1.710.346.325
2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.530.540.000	1.488.781.325
01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	67.350.000	63.000.000
02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	531.150.000	527.550.000
03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	379.650.000	379.350.000
04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	21.600.000	21.600.000
05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	214.500.000	204.450.000
06	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	109.320.000	89.922.425
07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	206.970.000	202.908.900
2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	278.400.000	221.565.000
01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.800.000	0
02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	261.600.000	221.565.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	388.313.319	224.376.206
2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	139.253.319	73.950.000
01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	127.135.000	73.950.000
02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	12.118.319	0
2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	249.060.000	150.426.206
01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	51.150.000
02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75.479.000	15.300.000
03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	109.531.000	79.926.206
04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	4.050.000	4.050.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran hasil penyelenggaraan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.060.000,00 dan realisasi keuangan Rp14.942.500,00 atau 70,95% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen

perencanaan Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya renja Inspektorat Daerah.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.014.000,00 dan realisasi keuangan Rp10.817.500,00 atau 98,22% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen RKA Inspektorat Daerah dan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD, dengan capaian kinerja berupa dokumen Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.599.000,00 dan realisasi keuangan Rp602.100,00 atau 9,12% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen perubahan RKA Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen perubahan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.392.300,00 dan realisasi keuangan Rp6.295.000,00 atau 98,48% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen DPA Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.466.000,00 dan realisasi keuangan Rp0,00 atau 0,00%, realisasi fisik tetap mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen perubahan DPA Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen perubahan DPA Inspektorat Daerah.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp8.093.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp8.091.000,00 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya laporan realisasi kinerja Inspektorat Daerah.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.201.000,00 dan realisasi keuangan Rp12.190.000,00 atau 99,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen laporan evaluasi Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya dokumen laporan evaluasi Inspektorat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.632.227.845,00 dan realisasi keuangan Rp8.227.319.717,00 atau 95,31% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dibayarnya gaji dan tunjangan

ASN Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.671.000,00 dan realisasi keuangan Rp8.624.000,00 atau 99,46% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa dokumen penatausahaan dan dokumen yang diverifikasi.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.652.000,00 dan realisasi keuangan Rp2.652.000,00 atau 100,00% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan keuangan tahunan Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya laporan keuangan tahunan Inspektorat Daerah.
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.800.000- dan realisasi keuangan Rp3.800.000 atau 100,00% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan sebagai dokumen tindak lanjut.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.666.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.608.000,00 atau 99,24% serta fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran, dengan capaian kinerja tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Inspektorat Daerah.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp411.950.000,00 dan realisasi keuangan Rp376.857.712,00 atau 91,48% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas beserta atribut bagi ASN Inspektorat Daerah.
- b. Sub Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.535.000,00 dan realisasi keuangan Rp1.900.000,00 atau 53,75% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.210.000,00 dan realisasi keuangan Rp16.202.100,00 atau 99,95% serta realisasi fisik mencapai 100,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Inspektorat Daerah,

dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp192.711.888,00 dan realisasi keuangan Rp192.202.888,00 atau 99,74% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Inspektorat Daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengadaan atau tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.230.000,00 dan realisasi keuangan Rp4.216.000,00 atau 99,67% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan peralatan rumah tangga, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengadaan atau tersedianya peralatan rumah tangga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.990.000,00 dan realisasi keuangan Rp35.984.161,00 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan atau penyediaan bahan logistik kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengadaan atau tersedianya bahan logistik kantor untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.306.900,00 dan realisasi keuangan Rp25.306.850,00 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan barang cetak dan penggandaan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.070.000,00 dan realisasi keuangan Rp28.802.100,00 atau 99,08% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan makanan, minuman dan snack tamu, dengan capaian kinerja berupa terlayannya setiap tamu yang berkunjung ke Inspektorat Daerah.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp185.024.000,00 dan realisasi keuangan Rp164.998.341,00 atau 89,18% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat, koordinasi dan konsultasi ke Provinsi Sumatera Barat / BPKP Perwakilan Sumatera Barat, BPK Perwakilan Sumatera Barat dan Instansi lainnya, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya rapat/koordinasi/konsultasi Inspektorat Daerah dengan Instansi terkait.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp154.599.690,00 atau 99,17% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan mebel, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengadaan mebel untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.080.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp41.080.000,00 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengadaan sarana prasarana gedung kantor.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.950.000,00 dan realisasi keuangan Rp1.006.000,00 atau 51,59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya materai dan jasa pengiriman melalui pos, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengiriman surat dan dokumen administrasi dengan menggunakan jasa pos serta tersedianya materai dalam administrasi kegiatan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.976.770,00, dan realisasi keuangan Rp41.813.190,00 atau 74,70% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dibayarnya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp235.390.554,00 dan realisasi keuangan Rp224.542.456,00 atau 95,39% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah dibayarnya jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa tenaga administrasi kantor dan sopir kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa tenaga administrasi kantor dan sopir kantor untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp204.598.579,00 dan realisasi keuangan Rp161.866.678,00 atau 79,11% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya

pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.232.000,00 dan realisasi keuangan Rp145.170.200,00 atau 93,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya atau terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.060.000,00 dan realisasi keuangan Rp7.836.364,00 atau 43.39% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya atau terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.350.000,00 dan realisasi keuangan Rp63.000.000,00 atau 93,54% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan pengawasan kinerja terhadap objek pengawasan yang sudah ditetapkan dalam PKPT tahun 2025, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengawasan kinerja terhadap objek pengawasan yang sudah tertuang dalam PKPT 2025, terbinanya objek pengawasan sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp531.150.000,00 dan realisasi keuangan Rp527.550.000,00 atau 99,32% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan pengawasan keuangan terhadap objek pengawasan yang sudah ditetapkan dalam PKPT tahun 2025, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengawasan keuangan terhadap objek pengawasan yang sudah tertuang dalam PKPT 2025, terbinanya objek pengawasan sebagai upaya menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.
- c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp379.650.000,00 dan realisasi keuangan Rp379.350.000,00 atau 99,92% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan hasil reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh kota, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya reviu laporan kinerja OPD dan reviu laporan kinerja lainnya di Kabupaten

Lima Puluh Kota, terbinanya OPD sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

- d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.600.000,00 dan realisasi keuangan Rp21.600.000,00 atau 100,00% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh kota, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, terpenuhinya instruksi BPK sebelum melakukan audit atas LKPD.
- e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp214.500.000,00 dan realisasi keuangan Rp204.450.000,00 atau 95,31% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan pengawasan Desa/Nagari, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengawasan Pemerintahan Desa/Nagari yang sudah ditetapkan dalam PKPT tahun 2025, terbinanya Pemerintahan Desa/Nagari.
- f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.320.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp89.922.425,00 atau 82,26% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini dokumen kesepakatan pengawasan internal dengan capaian kinerja berupa terbentuknya kesepakatan pengawasan internal.
- g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dengan alokasi anggaran sebesar Rp206.970.000,00 dan realisasi keuangan Rp202.908.900,00 atau 98,04% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah evaluasi TLHP, Laporan Monev dengan capaian kinerja berupa ditindak lanjutnya rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Objek Pemeriksaan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.800.000,00 dan realisasi keuangan Rp0,00 atau 0,00% serta realisasi fisik mencapai 0,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya penyelesaian kerugian Negara/Daerah oleh TPKD.
- b. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp261.600.000,00 dan realisasi keuangan Rp221.565.000,00 atau 84,70% serta realisasi fisik mencapai 97,30%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan pemeriksaan khusus/kasus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeriksaan kasus/khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp127.135.000,00 dan realisasi keuangan Rp73.950.000,00 atau 58,17% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan, dengan capaian kinerja berupa tersusunnya rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan.
- b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.118.319,00 dan realisasi keuangan Rp0,00, realisasi fisik sub kegiatan ini mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan, dengan capaian kinerja tersusunnya rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp51.150.000,00 atau 85,25% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan dan terdampingi pihak Eksternal dalam melaksanakan pengawasan di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa terlaksana pendampingan terhadap OPD dan Pihak Eksternal dalam kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.479.000,00 dan realisasi keuangan Rp15.300.000,00 atau 20,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.531.000,00 dan realisasi keuangan Rp79.926.206,00 atau 72,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pencegahan korupsi melalui LHKPN, LHKASN dan MCP KPK, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pelaporan harta kekayaan ASN melalui LHKPN dan LHKASN, serta pemenuhan dokumen MCP KPK.
- d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakkan Integritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.050.000,00 dan realisasi keuangan Rp4.050.000,00 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah konsultasi dan koordinasi agar terbentuknya WBK, WBBM dan ZI di Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi pembentukan WBK, WBBM dan ZI di Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	PD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA- LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	INSPEKTORAT	PENGAWASAN		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		.		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan Inspektorat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA Inspektorat Daerah	tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Inspektorat Daerah	tersusunnya dokumen perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Inspektorat. Daerah		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA Inspektorat Daerah	tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	dokumen perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA Inspektorat Daerah	tersusunnya dokumen perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen laporan evaluasi kinerja	tersusunnya dokumen laporan evaluasi kinerja		

					Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dibayarnya gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Inspektorat Daerah	tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan tahunan dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan tahunan Inspektorat Daerah	tersusunnya laporan keuangan tahunan dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan tahunan Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	tersusunnya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan bulanan/triwulan/semesteran	Tersusunnya laporan bulanan/triwulanan/semesteran		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	diikutinya pendidikan dan pelatihan bagi ASN Inspektorat	terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi ASN Inspektorat		
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	diikutinya pendidikan dan pelatihan bagi ASN Inspektorat Daerah	terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi ASN Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				

				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pada Inspektorat Daerah	terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Inspektorat Daerah	terlaksananya pengadaan atau tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	pengadaan peralatan rumah tangga	terlaksananya pengadaan atau tersedianya peralatan rumah tangga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	pengadaan atau penyediaan bahan logistik kantor	terlaksananya pengadaan atau tersedianya bahan logistik kantor untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pengadaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya pengadaan barang cetakan dan pengadaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	dokumen laporan fasilitas kunjungan tamu	tersusunnya dokumen laporan fasilitas kunjungan tamu		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	tersusunnya dokumen laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pada	terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat		

					Inspektorat Daerah	Daerah		
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya dokumen laporan penyediaan jasa surat menyurat		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersusunnya dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersusunnya dokumen laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	terpeliharanya atau terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah		

				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	terpeliharanya atau terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah		
				Program Penyelenggaraan Pengawasan				
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
				Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan pengawasan kinerja terhadap objek pemeriksaan yang sudah ditetapkan dalam PKPT tahun 2023	terlaksananya pengawasan kinerja terhadap objek pemeriksaan yang sudah tertuang dalam PKPT 2023, terbinanya objek pemeriksaan sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik		
				Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan pengawasan keuangan terhadap objek pemeriksaan yang sudah ditetapkan dalam PKPT tahun 2023	terlaksananya pengawasan keuangan terhadap objek pemeriksaan yang sudah tertuang dalam PKPT 2023, terbinanya objek pemeriksaan sebagai upaya menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik		
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	laporan hasil reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	terlaksananya reviu laporan kinerja (LKJIP) semua OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota, terbinanya OPD sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik		
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	laporan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	terlaksananya reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, terpenuhinya instruksi BPK		

					kota	sebelum melakukan audit atas LKPD		
				Sub Kegiatan Pengawasan Desa	laporan pengawasan desa	terlaksananya pengawasan Pemerintahan Nagari yang sudah ditetapkan dalam PKPT tahun 2023, terbinanya Pemerintahan Nagari		
				Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Dokumen kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Terbentuknya kesepakatan pengawasan internal		
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP		
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
				Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	terlaksananya penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Tidak adanya pengaduan kehilangan barang milik daerah / kejadian yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah yang diproses oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKD)	-
				Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	terlaksananya pemeriksaan kasus/khusus		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan				

				dan Asistensi				
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
				Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan		
				Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan		
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				
				Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	pendampingan dan asistensi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pendampingan dan asistensi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota		
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Aplikasi SIHARKA tidak dapat diakses	Inspektorat Daerah akan koordinasi dengan Kemendagri terkait pelaporan LHKASN
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas		

D. Permasalahan dan Solusi

Pada LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 terdapat rekomendasi DPRD kepada Inspektorat Daerah agar dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan agar lebih mengutamakan pembinaan dan mampu untuk membina seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun perangkat nagari sehingga maksud dan tujuan dalam serapan anggaran pada OPD selaras dengan kegiatan dan anggaran, Inspektorat Daerah juga diminta untuk bisa membantu DPRD dalam melakukan tugas pengawasan serta menganalisis terkait mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal ini Inspektorat Daerah telah melaksanakan pembinaan kepada semua OPD, Pemerintahan Nagari, Puskesmas dan Sekolah melalui rekomendasi hasil pengawasan. Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah telah melaksanakan pengawasan berupa reviu sebanyak 71 jenis penugasan, evaluasi sebanyak 18 jenis penugasan, pemantauan sebanyak 65 jenis penugasan, audit ketaatan sebanyak 3 jenis penugasan, audit kinerja sebanyak 3 jenis penugasan, probity audit sebanyak 2 jenis penugasan, asurans atas GRC sebanyak 1 penugasan, audit investigasi sebanyak 8 jenis penugasan, audit dengan tujuan tertentu sebanyak 28 jenis penugasan, pendampingan/asistensi sebanyak 7 jenis penugasan, serta asurans lainnya sebanyak 9 jenis penugasan. Selain itu Inspektorat Daerah juga aktif dalam memenuhi permintaan sebagai Pemateri pada kegiatan yang diadakan oleh OPD, Pemerintahan Nagari dan Sekolah, dan juga melayani setiap Unit Instansi yang hadir ke kantor Inspektorat Daerah dalam rangka konsultasi/diskusi terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.1.7. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 urusan. Rincian OPD pelaksana urusan berikut anggaran dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 60 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Kewilayahan Tahun 2024

No	Urusan Dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	22.651.890.799	22.651.890.799	95,55
7.1.	KECAMATAN	22.651.890.799	22.651.890.799	95,55
1	Kecamatan Gunuang Omeh	1.357.328.222	1.156.350.794	85,19
2	Kecamatan Bukik Barisan	1.580.461.739	1.526.236.018	96,57

3	Kecamatan Suliki	1.760.368.606	1.670.988.755	94,92
4	Kecamatan Guguk	1.772.509.061	1.730.149.266	97,61
5	Kecamatan Mungka	1.346.799.872	1.278.576.091	94,93
6	Kecamatan Akabiluru	1.717.660.283	1.664.482.388	96,90
7	Kecamatan Payakumbuh	2.295.525.335	2.166.188.434	94,37
8	Kecamatan Luak	1.913.110.357	1.841.238.402	96,24
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	1.741.544.437	1.655.375.923	95,05
10	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	1.672.449.369	1.603.777.977	95,89
11	Kecamatan Harau	1.885.045.774	1.838.944.446	97,55
12	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.674.722.349	1.653.323.611	98,72
13	Kecamatan Kapur IX	1.934.365.395	1.858.503.257	96,08
	TOTAL	22.651.890.799	22.651.890.799	95,55

3.1.7.1. Urusan Kecamatan

Urusan Kecamatan tahun 2025 dilaksanakan oleh Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.651.890.799 dan realisasi keuangan Rp22.651.890.799 atau 95,55%.

3.1.7.1.1. Kecamatan Gunuang Omeh

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Gunuang Omeh merupakan OPD pelaksana urusan Kecamatan dengan melaksanakan 4 Program, 9 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 61 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Gunuang Omeh

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN GUNUANG OMEH	1.357.328.222	1.156.350.794
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.315.953.222	1.115.475.794
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.342.000	1.342.000
01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.196.000	2.196.000
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.167.342.202	970.191.201
01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.072.693.855	1.055.112.682
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.335.020	50.884.684
01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	0	0

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
02.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.150.000	15.150.000
04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.832.000	6.440.000
05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.712.100	3.712.100
09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.740.000	25.405.000
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.814.000	20.165.009
02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.574.000	1.925.009
04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.240.000	18.240.000
7.01.01.2.09	Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.120.000	72.892.900
01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.350.000	63282900
06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.510.000	2.350.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7.260.000	7.260.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	0	0
03.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.500.000	13.500.000
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.500.000	13.500.000
01.	Sub Kegiatan Peningkatan Parisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.500.000	13.500.000
06.	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0
03.2.06.07	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	0	0
05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.875.000	27.375.000
05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.875.000	27.375.000
04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.875.000	27.375.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Alokasi dan Realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.196.000 dengan realisasi keuangan Rp2.196.000 (100%) dan realisasi fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dengan capaian kinerja berupa Pembuatan Dokumen Renstra, Renja RKA, Perubahan RKA.DPA dan Perubahan DPA Perencanaan perangkat Daerah untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gunuang Omeh.

2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.072.693.855 dan realisasi keuangan Rp1.055.152.682 dengan realisasi keuangan Rp1.055.152.682 (98,3%) dan realisasi fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN. Dengan capaian kinerja berupa Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gunuang Omeh.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan penyediaan Bahan Logistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.729.500 dan realisasi keuangan Rp6.640.000 dengan realisasi keuangan Rp6.640.000 (100%) dan realisasi fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pelayanan berupa Alat Tulis Kantor untuk Keperluan kebutuhan di Kecamatan Gunuang Omeh.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.702.000 dengan realisasi keuangan Rp2.702.000 (100 %) dan realisasi fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan, dengan capaian kinerja berupa adanya laporan-laporan dan surat-surat dinas yang telah diperbanyak dan digandakan di Kecamatan Camat Gunuang Omeh.
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.662.000 dengan realisasi keuangan Rp38.778.35 (100%) dan realisasi fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk semua kegiatan dan makan minum rapat di Kecamatan Camat Gunuang Omeh dan terlaksananya pembinaan ke nagari-nagari se-Kecamatan Gunuang Omeh dengan baik.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.574.000 dengan realisasi keuangan Rp2.108.732 (81,9 %) dan realisasi fisik 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kinerja berupa terbayarnya tagihan air dan listrik di Kecamatan Camat Gunuang Omeh.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.385.220 dengan realisasi keuangan Rp25.385.220 (100 %) dan realisasi fisik 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa K3 kantor dan Operator Komputer dengan capaian kinerja berupa terjaganya kebersihan dan tersedianya peralatan bahan pembersih oleh satu orang dan terlaksananya kegiatan laporan bagi operator komputer di Kecamatan Gunuang Omeh.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.875.000 dengan realisasi keuangan Rp61.875.000 (100%) dan realisasi fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian kinerja berupa Suku cadang, service BBM dan Pajak Kendaraan di Kecamatan Gunuang Omeh.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.250.000 dengan realisasi keuangan Rp2.250.000 (100%) dan realisasi fisik 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa terjaganya pemeliharaan alat kantor di Kecamatan Gunuang Omeh

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.240.000 dengan realisasi Keuangan Rp2.240.000 dengan realisasi fisik 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan capaian kinerja berupa terlaksananya musrenbang Kecamatan Gunuang Omeh.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.250.000 dengan realisasi keuangan Rp61.250.000 (100%) dan realisasi fisik 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peringatan Hari Besar Negara (PHBN) dan Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten.

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.000000 dan realisasi keuangan Rp27.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pelaksanaan rapat dan monitoring, dengan capaian kinerja berupa Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Gunung Omeh.

C. Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KECAMATAN GUNUANG OMEH	Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	67		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA,Perubahan RKA, DPA, Perubahan DPA	Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, RKA,Perubahan RKA, DPA, Perubahan DPA		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan	Terbayarnya Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya Barang Cetak dan Penggandaan		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum harian PNS di Kecamatan Gunuang Omeh	Terbayarnya Makan dan Minum harian PNS di Kecamatan Gunuang Omeh		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rutin pembayaran tagihan Rekening Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan Rekening Air dan Listrik		

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor petugas kebersihan kantor dan Operator Komputer serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terbayarnya Honor petugas kebersihan kantor dan Operator Komputer serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
				Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua,sevice,suku cadang dan pajak Kendaraan Dinas.	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua ,sevice,suku cadang dan pajak Kendaraan Dinas.		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin Kecamatan Gunuang Omeh	Terbayarnya Pemeliharaan Peralatan dan mesi Kecamatan Gunuang Omeh		
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua,sevice,suku cadang dan pajak Kendaraan Dinas.	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua ,sevice,suku cadang dan pajak Kendaraan Dinas.		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Parisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nilai AKIP	67		
				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat dan Kelurahan				
				Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Terlaksananya kegiatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Renstra, Renja, RKA,Perubahan RKA, DPA, Perubahan DPA	Terlaksananya Penysunan Renstra, Renja, RKA,Perubahan RKA, DPA, Perubahan DPA		
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terbayarnya Honorarium Forkofinca Kecamatan Gunung Omeh		

D. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gunuang Omeh diatas tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik bahkan banyak yang mencapai 100%.

3.1.7.1.2. Kecamatan Bukik Barisan

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Bukik Barisan merupakan OPD pelaksanan Urusan Kecamatan dengan melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 22 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 62 Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan Pada Kecamatan Bukik Barisan

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN BUKIK BARISAN	1.580.461.739	1.526.236.018
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.497.575.739	1.446.350.018
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.810.000	16.810.000
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.512.000	3.512.000
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA_SKPD	1.180.000	1.180.000
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.970.000	1.970.000
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.940.000	1.940.000
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.208.000	8.208.000
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.349.956.139	1.301.892.091
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.343.256.139	1.295.192.091
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	6.700.000	6.700.000
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	8.040.000	8.040.000
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.040.000	8.040.000
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.186.600	17.595.600
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	4.340.100	4.340.100
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor	2.201.500	2.201.500
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kantor	3.600.000	3.600.000
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.045.000	7.874.000
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	31.968.000	31.908.002

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin kantor Lainnya	31.968.000	31.908.002
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.135.000	2.045.825
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.135.000	2.045.825
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.480.000	69.478.500
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	68.750.000	68.748.500
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	730.000	730.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39.000.000	36.000.000
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	39.000.000	36.000.000
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.000.000	36.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.386.000	11.386.000
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.736.000	7.736.000
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2.216.000	2.216.000
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.520.000	5.520.000
7.01.03.2.06.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.650.000	3.650.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.500.000	27.500.000
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.500.000	27.500.000
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.500.000	27.500.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000
7.01.03.2.06.01.17	Sub Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	5.000.000

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Alokasi dan Realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Kecamatan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.512.000 dan realisasi keuangan Rp3.512.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Renstra dan Renja

- Kec. Bukik Barisan dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan RAK, Aliran Kas dan Renja dan Renstra.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.180.000 dan realisasi keuangan Rp1.180.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah RKA Kec. Bukik Barisan dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.970.000 dan realisasi keuangan Rp1.970.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen DPA-SKPD Kec. Bukik Barisan dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.940.000 dan realisasi keuangan Rp1.940.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah DPA Kec. Bukik Barisan dengan capaian kinerja berupa tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.208.000 dan realisasi keuangan Rp8.208.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Perubahan DPA Kec. Bukik Barisan dengan capaian kinerja berupa tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.343.256.139 dan realisasi keuangan Rp1.295.192.09 atau 96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 98% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa tercapainya kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.700.000 dan realisasi keuangan Rp6.700.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Jumlah Dokumen SPJ di Verifikasi dengan capaian kinerja berupa tercapainya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.040.000 dan realisasi keuangan Rp6.620.000 atau 82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Kartu Kendali

Barang dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.340.000 dan realisasi keuangan Rp4.340.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat tulis kantor dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.201.500 dan realisasi keuangan Rp2.201.500 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat tulis kantor dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyediaan bahan Logistik Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.600.000 dan realisasi keuangan Rp3.600.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat tulis kantor dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.045.000 dan realisasi keuangan Rp7.840.000 atau 98% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Makan Minum dan Koordinasi antar OPD dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.968.000 dan realisasi keuangan Rp31.908.002 atau 99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat tulis kantor dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.135.000 dan realisasi keuangan Rp2.045.285 atau 65% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 66%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran biaya tagihan Listrik dan jasa air Kantor Camat dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.750.000 dan realisasi keuangan Rp68.748.500 atau 99,9% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran

- dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan 1 unit Kendaraan dinas roda empat dan 8 unit kendaraan dinas roda dua dengan capaian kinerja berupa tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp730.000 dan realisasi keuangan Rp730.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan 2 Komputer, 2 Laptop, dan 3 Printer dengan capaian kinerja berupa tercapainya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.000.000 dan realisasi keuangan Rp36.000.000 atau 92% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 95%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelayanan administrasi kependudukan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa tercapainya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.216.000 dan realisasi keuangan Rp2.216.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan capaian kinerja berupa tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.520.000 dan realisasi keuangan Rp5.520.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan pemberdayaan PKK, LKAA, Bundo Kandung, PHBI, PHBN serta MTQ Kabupaten dengan capaian kinerja berupa tercapainya Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- c. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan Bermasyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.650.000 dan realisasi keuangan Rp3.650.000 atau 100% serta realisasi fisik

kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan pemberdayaan PKK, Bundo Kandung dengan capaian kinerja berupa tercapainya Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.500.000 dan realisasi keuangan Rp27.500.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya tugas koordinasi ke daerah dengan unsur FORKOPINCA dengan capaian kinerja berupa tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000 dan realisasi keuangan Rp5.000.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya tugas koordinasi ke daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan dengan capaian kinerja berupa tercapainya Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan di Kecamatan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KECAMATAN BUKIK BARISAN	Pemerintahan	Meningkat	Program Penunjang Urusn Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksana sesuai rencana	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan Renja	Terlaksananya Penyusunan RAK, Renstra dan Renja		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	RKA	Terlaksananya Penyusunan RKA		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Perubahan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	DPA Kecamatan Gunuang Omeh	Terlaksananya Penyusunan DPA Kecamatan Bukik Barisan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	DPA Perubahan	Terlaksananya Penyusunan DPA Perubahan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan	Terbayarnya Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD		

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Laporan Keuangan, Aset, LKPI, LKJIP		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah				
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada SKPD	Tercapainya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada SKPD	Tercapainya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada SKPD		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya Barang Cetak dan Penggandaan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	Terbayarnya Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rutin pembayaran tagihan rekening air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening air dan listrik		

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terbayarnya Honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor untuk menunjang urusan Pemerintahan		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan				
				Sub Kegiatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya	Persentase Nagari yang meningkat partisipasi		

						masyarakatnya		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wil. Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wil. Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wil. Kecamatan		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara cukup berimbang dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik..

3.1.7.1.3. Kecamatan Suliki

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Suliki merupakan OPD pelaksana urusan Kecamatan dengan melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dan 14 sub kegiatan Urusan Kecamatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 63 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Suliki

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN SULIKI	1.760.368.606	1.670.988.755
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.716.823.606	1.631.303.755
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.557.566.106	1.388.514.911
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.557.566.106	1.482.568.893
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.573.100	61.195.359
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.125.000	24.500.000
5.1.02.01.010027	Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000
5.1.02.01.010029	Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625.000	600.000
5.2	BELANJA MODAL	24.300.000	23.700.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.300.000	23.700.000
5.2..02.10	Belanja Modal Komputer	24.300.000	23.700.000
5.2.02.10.01.0002	Sub Kegiatan Belanja Modal Personal Komputer	15.100.000	14.500.000
5.2.02.10.02.0005	Sub Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya	9.200.000	9.200.000
7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor/ATK	7.107.000	7.100.000
7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.083.000	2.074.500
7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.172.500	19.455.000
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.700.000	36.272.862
7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	4.500.000	2.072.862
7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.200.000	34.200.000
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.070.000	59.332.500
7.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.345.000	57.932.500
7.01.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.725.000	1.400.000

	Lainnya		
7.01.03	Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.715.000	1.610.000
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.170.000	890.000
7.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.170.000	890.000
7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.545.000	720.000
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.545.000	720.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.830.000	38.075.000
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.830.000	38.075.000
7.01.05.2.01.000	Sub Kegiatan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.830.000	5.825.000
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.000.000	32.250.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suliki dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.557.566.106 dan realisasi keuangan Rp1.482.568.893 atau 95,29% serta realisasi fisik mencapai 95,38%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki dengan capaian kinerja berupa Honor Pengelola Keuangan, Pembayaran Gaji dan Tambahan penghasilan ASN.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.125.000 dan realisasi keuangan Rp24.500.000 atau 97,51% serta realisasi fisik mencapai 98,10% yang terdiri dari Belanja Modal Personal Komputer dan Peralatan Komputer Lainnya Rp. 24.300.000 dan Realisasi Keuangan Rp.23.700.000 atau 97,53% realisasi fisik mencapai 98,14%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki dengan capaian kinerja berupa tersediannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Belanja Modal.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.107.000 dan realisasi keuangan Rp7.100.000 atau 99,90% serta realisasi fisik mencapai

- 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki dengan capaian kinerja berupa tersedianya Alat Tulis Kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.083.000 dan realisasi keuangan Rp2.074.500 atau 99,59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Suliki dengan capaian kinerja berupa tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.172.500 dan realisasi keuangan Rp19.455.000 atau 77,29% serta realisasi fisik mencapai 77,31%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.500.00 dan realisasi keuangan Rp2.072.862 atau 46,06% serta realisasi fisik mencapai 46,79%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembayaran Air dan Listrik.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.200.000 dan realisasi keuangan Rp34.200.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki dengan capaian kinerja berupa adanya Peralatan Kebersihan dan honorarium tenaga kebersihan Kantor

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.345.000 dan realisasi keuangan Rp57.932.500 atau 97,62% serta realisasi fisik mencapai 98,33%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki dengan capaian kinerja berupa BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.725.000 dan realisasi keuangan Rp1.400.000 atau 81,16% serta realisasi fisik mencapai 81,49%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki dengan capaian kinerja berupa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.170.000 dan realisasi keuangan Rp.890.000 atau 28,08% serta realisasi fisik mencapai 28,08%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- a. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Kelaurga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.545.000- dan realisasi keuangan Rp.720.000 atau 46,60% serta realisasi fisik mencapai 47,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan TP-PKK Kecamatan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.830.000 dan realisasi keuangan Rp5.825.000 atau 99,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.000.000 dan realisasi keuangan Rp32.250.000 atau 97,73% serta realisasi fisik mencapai 97,83%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi Forkopimca Kecamatan Suliki.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMAS A-LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN SULIKI	Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan di Kecamatan, meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja Kec. Suliki	Tersedianya Dokumen Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya dokumen LKJiP, LKPJ dan Laporan Semester		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan (12 Bulan)	Terbayarnya Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan (12 Bulan)		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (12 Bulan)	Tersedianya alat tulis kantor (12 Bulan)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	Terbayarnya Makan dan Minum peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		

					(12 Bulan)	(12 Bulan)		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Rutin pembayaran tagihan rekening air dan listrik (12 Bulan)	Terbayarnya tagihan rekening air dan listrik (12 Bulan)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan dan bahan Kebersihan serta honor petugas kebersihan	Tersedianya Peralatan dan bahan Kebersihan serta terbayarnya honor petugas kebersihan (12 bulan)		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua (12 Bulan)	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua (12 Bulan)		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya (1 Kali)	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan (1 Kali)		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Peringatan HUT RI		
				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
				Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Kegiatan PPK Kecamatan (12 bulan)	Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan (12 bulan)		

				dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi dan sesuai peraturan perundang-undangan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimca (12 bulan)	Terlaksananya Koordinasi Forkopimca (12 bulan)		

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Kecamatan pada Kecamatan Suliki, Anggaran dan realisasi keuangan cukup berimbang, secara umum realisasi fisik mencapai 94,92% dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.7.1.4. Kecamatan Guguak

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Guguak merupakan OPD pelaksana urusan Kecamatan dengan melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 64 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Guguak

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN GUGUAK	1.772.509.061	1.730.149.266
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.735.379.561	1.696.294.766
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.022.000	2.000.0000
01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.001.000	1.000.000
01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.021.000	1.000.000
01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.591.637.061	1.554.105.271
01.2.02.01	Sub Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.591.637.061	1.554.105.271
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.490.500	38.265.500
01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	2.000.000	2.000.000
01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	2.400.000	2.400.000
01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor	6.996.000	6.996.000
01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.724.500	5.724.500
01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.370.000	21.145.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
01.07.06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
01.07.06.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.680.000	32.495.195
01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000
01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.080.000	1.895.195
01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	30.000.000
01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.550.000	69.428.800
01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	64.900.000	64.778.800
01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4.650.000	4.650.000
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.355.000	1.355.000
02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.355.000	1.355.000
02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.355.000	1.355.000
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.774.500	6.499.500
03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.375.000	2.100.000
03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4.375.000	2.100.000
03.2.01.03	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4.399.500	4.399.500
03.2.01.03.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4.399.500	4.399.500
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000	26.000.000
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.000.000	26.000.000
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000	26.000.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguak dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.001.000 dan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau 99,90% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya penyusunan dokumen perencanaan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen Renstra dan Renja di Kecamatan Guguak.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.021.000 dan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau 97,94% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya penyusunan dokumen perencanaan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen Laporan RFK, Laporan LKPJ, Laporan LKjIP di Kecamatan Guguak.

c. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.591.637.061 dan realisasi keuangan Rp1.554.105.271 atau 97,64% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi keuangan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan Guguak.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000 dan realisasi keuangan Rp2.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi umum, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Alat-alat Listrik di Kecamatan Guguak.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.400.000 dan realisasi keuangan Rp. 2.400.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan perlengkapan kantor di Kecamatan Guguak.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.996.000 dan realisasi keuangan Rp6.996.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi umum, dengan capaian kinerja berupa tersedianya alat-alat tulis kantor di Kecamatan Guguak.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.724.500 dan realisasi keuangan Rp5.724.500 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi umum, dengan capaian kinerja berupa tersedianya penggandaan surat-surat dinas, penjiiditan dan Cetak Spanduk di Kecamatan Guguak.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.370.000 dan realisasi keuangan Rp21.145.000 atau 99,88% serta realisasi fisik mencapai 99,89%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi umum, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Makan Minum dan Koordinasi antar OPD di Kecamatan Guguak.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000 dan realisasi keuangan Rp600.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Materai Dinas.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.802.000 dan realisasi keuangan Rp1.811.500 atau 98,26% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya pembayaran biaya tagihan Listrik Rumah Dinas Camat dan Kantor di Kecamatan Guguak.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000 dan realisasi keuangan Rp30.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Alat Kebersihan dan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan Guguak.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp64.900.000 dan realisasi keuangan Rp64.778.8000 atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 99,98%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas roda empat dan 8 unit kendaraan dinas roda dua.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.650.000 dan realisasi keuangan Rp4.650.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan barang milik daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan 7 Komputer dan 5 printer di Kecamatan Guguak.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.335.000 dan realisasi keuangan Rp1.355.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pelayanan administrasi kependudukan Masyarakat di Kecamatan Guguak.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.375.000 dan realisasi keuangan Rp2.100.000 atau 90% serta realisasi fisik mencapai 90%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Guguak.
- b. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.399.500 dan realisasi keuangan Rp4.399.500 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pemberdayaan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.000.000 dan realisasi keuangan Rp27.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Kecamatan Guguak.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000 dan realisasi keuangan Rp. 26.000.000 atau 99.99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99.99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Kecamatan Guguak.

C. Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KECAMATAN GUGUAK	Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80%	97,75%	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	97.64%	-	-
				Sub Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	15 orang	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1 paket	1 paket	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1 paket	1 paket	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor	1 paket	1 paket	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 laporan	1 laporan	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	-	-

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 laporan	1 laporan	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 unit	7 unit	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 unit	9 unit	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	1 laporan	1 laporan	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	74.07%	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	74.07%	-	-

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 nagari	5 nagari	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50 Peserta	50 Peserta		
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	80%	80%	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80%	80%	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 laporan	1 laporan	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Monitoring Dana Desa 5 Nagari	Terlaksananya Monitoring Dana Desa 5 Nagari		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				

D. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas tidak terdapat permasalahan yang berarti, dimana semua kegiatan dan/atau sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik, bahkan mencapai 100%. Meskipun secara agregatif, realisasi anggaran pada Perangkat Daerah Kecamatan Guguk relatif tinggi atau mencapai 97,61% dari total alokasi anggaran, namun jika ditelisik lebih lanjut, ditemukan program, kegiatan, sub kegiatan dengan tingkat realisasi yang rendah. Permasalahan yang mengemuka dari hal tersebut adalah lemahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, dan tak kalah pentingnya tidak ada kemampuan kecamatan untuk melakukan pengadaan perangkat komputer dan sejenisnya untuk mendukung maksimalnya pekerjaan.

Pasca diberlakukannya aturan perihal penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Penatausahaan (SIPD-Penatausahaan) secara menyeluruh dalam penatausahaan keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, tanpa diikuti dengan pembekalan dan/atau bimbingan teknis yang cukup, serta sarana dan prasarana maka aktor keuangan pada Perangkat Daerah kami merasa kesulitan dalam pekerjaan, dalam hal ini operasional komputer dan perangkat lunak (*software*) serta faktor jaringan internet yang masih belum optimal.

Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan penambahan jumlah personil atau pengadaan ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan kualifikasi penguasaan komputer dan perangkat lunak (*software*) yang baik. Selain itu, perbaikan terhadap jaringan internet juga merupakan urgensi mengingat kebijakan strategis pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mendorong digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

3.1.7.1.5. Kecamatan Mungka

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Mungka merupakan OPD pelaksana Urusan Kecamatan dengan melaksanakan 3 Program, 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 65 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Mungka

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN MUNGKA	1.346.799.872	1.278.576.091
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.346.799.872	1.278.576.091
01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.196.406.872	1.130.447.111
01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.196.406.872	1.130.447.111

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
5.1.01.03.	Sub Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.080.000	14.460.000
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.757.000	38.618.000
01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.290.000	1.290.000
01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.265.000	14.265.000
01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.962.000	4.958.000
01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.240.000	18.105.000
01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.886.000	41.907.728
01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.300.000	8.321.728
01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.586.000	33.586.000
01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.750.000	67.604.152
01.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.750.000	67.604.152
03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.475.000	3.472.500
03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.475.000	3.472.500
03.2.01.01.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.475.000	3.472.500
04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.562.000	26.812.000
04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27.562.000	26.812.000
04.2.02.01.	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27.562.000	26.812.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mungka dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.196.406.872 dan realisasi keuangan Rp1.130.447.111 atau 95,27% serta realisasi fisik mencapai 99,96%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

- b. Sub Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Belanja Honorarium Pengelola Keuangan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.080.000 dan realisasi keuangan Rp14.460.000 atau 89,93% serta realisasi fisik mencapai 99,98%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Belanja Honorarium ASN Kantor Camat Mungka, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Belanja Honorarium

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.290.000 dan realisasi keuangan Rp1.290.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Penerangan Kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya penunjang urusan kantor di Kecamatan Mungka.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.265.000 dan realisasi keuangan Rp14.265.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya alat-alat tulis kantor di Kecamatan Mungka.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.962.000 dan realisasi keuangan Rp4.958.000 atau 99,92% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang cetak dan Penggandaan Kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya penggandaan surat-surat dinas, penjiilidan dan Cetak Spanduk di Kecamatan Mungka.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.240.000 dan realisasi keuangan Rp18.105.000 atau 99,26% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Koordinasi dan Konsultasi, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Makan Minum dan Koordinasi antar OPD di Kecamatan Mungka.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.300.000,- dan realisasi keuangan Rp8.321.728 atau 74,47% serta realisasi fisik mencapai 74,48%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian kinerja berupa tersedianya pembayaran biaya tagihan Listrik Rumah Dinas Camat dan Kantor di Kecamatan Mungka
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.586.000 dan realisasi keuangan Rp33.586.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Administrasi Umum dan alat Kebersihan Kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Alat Kebersihan dan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan Mungka.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.750.000 dan realisasi keuangan Rp67.604.152 atau 99,78% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan dan BBM Kendaraan Dinas, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Pemeliharaan 1 unit Kendaraan dinas roda empat dan 11 unit kendaraan dinas roda dua di Kecamatan Mungka.

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.475.000 dan realisasi keuangan Rp.3.472.500 atau 99,93% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Musrembang dengan hadirnya utusan delegasi Nagari dan Pemangku Kepentingan OPD Dinas Instansi Terkait, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Mungka.

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.562.000 dan realisasi keuangan Rp26.812.000 atau 72,79% serta realisasi fisik mencapai 73,13%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan dan perundang-undangan di Kecamatan Mungka. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mungka, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Mungka.

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN MUNGKA	Pemerintah Umum dan Kecamatan	DPA Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan	Terbayarnya Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan		
				Sub Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Tersedianya Honorarium PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Kantor Camat Mungka		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barang listrik penerangan kantor	Tersedianya barang listrik penerangan kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Terbayarnya Barang Cetakan dan Penggandaan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	Terbayarnya Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

				Sub Kegiatan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Belanja Modal berupa Lap top	Terbayarkannya pembelian 1 unit Lap top		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Map, kwitasni, materai dan ceque	Tersedianya map kwitansi materai dan ceque kantor Camat Mungka		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rutin pembayaran tagihan rekening air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening air dan listrik		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terbayarnya Honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 1 unit dan roda dua 11 unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Camat Mungka	Tersedianya Peralatan Gedung kantor Camat Mungka		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		

				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya	Persentase Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari		
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Perjalanan dinas ke Nagari Kecamatan Mungka	Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi dengan pemerintahan Nagari se-Kecamatan Mungka. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mungka.		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan				

				dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan-laporan Pertanggungjawaban Nagari	Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi dengan pemerintahan Nagari se-Kecamatan Mungka. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mungka.		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Perjalanan dinas ke Nagari Kecamatan Mungka	Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi dengan pemerintahan Nagari se-Kecamatan Mungka. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mungka.		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Monitoring Dana Desa 5 Nagari	Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi dengan pemerintahan Nagari se-Kecamatan Mungka. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mungka.		

D. Permasalahan dan solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan diatas tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik bahkan banyak yang mencapai 100%.

3.1.7.1.6.Kecamatan Akabiluru

A.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Akabiluru merupakan OPD pelaksana Urusan Kecamatan dengan melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 66 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Akabiluru

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN AKABILURU	1.658.442.147	1.481.900.812
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.717.660.283	1.664.482.388
01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.676.000	3.676.000
01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.562.000	2.562.000
01.2.01.06.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.114.000	1.114.000
01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.446.361.147	1.277.024.612
01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.444.505.147	1.275.168.612
01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Validasi Keuangan SKPD	1.856.000	1.856.000
01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	562.000	562.000
01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	562.000	562.000
01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.130.000	1.130.000
01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.130.000	1.130.000
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.859.000	35.859.000
01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.280.000	1.280.000
01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.564.000	6.564.000
01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.635.000	4.635.000
01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.380.000	23.380.000
01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.000.000	19.116.100
01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	19.116.100
01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	33.292.000	32.655.500

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Pemerintah Daerah		
01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000
01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.762.000	5.082.000
01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	18.000.000
01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.350.000	59.195.000
01.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.900.000	62.859.100
01.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000	3.450.000
02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	930.000	930.000
02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	930.000	930.000
02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	930.000	930.000
03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.502.000	16.502.000
03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.030.000	3.030.000
03.2.01.01.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	700.000	700.000
03.2.01.06.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.330.000	2.330.000
03.2.06.	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13.472.000	13.472.000
03.2.06.07	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13.472.000	13.472.000
05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.850.000	34.850.000
05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.850.000	34.850.000
05.2.01.02.	Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.100.000	7.100.000
05.2.01.08.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.750.000	27.750.000
06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.960.00	2.560.00
06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.960.000	2.560.000
06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Desa	2.330.000	930.000
06.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.630.000	1.630.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Akabiluru dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.562.000 dan realisasi keuangan Rp2.562.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya ATK, biaya foto copy dan jilid untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan di Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembelian ATK, pengadaan dan jilid dokumen perencanaan Kecamatan Akabiluru.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.446.361.147 dan realisasi keuangan Rp1.277.024.612 atau 88,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN yang ada di Kecamatan Akabiluru.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp562.000 dan realisasi keuangan Rp562.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan adanya biaya perjalanan dinas ASN di Kecamatan Akabiluru.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.130.000 dan realisasi keuangan Rp1.130.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya belanja ATK dan biaya perjalanan dinas ASN di Kecamatan Akabiluru.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.280.000 dan realisasi keuangan Rp1.280.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor di Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembelian peralatan listrik dan penerangan kantor di Kecamatan Akabiluru.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.564.000 dan realisasi keuangan Rp9.564.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Logistik Kantor di

Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembelian alat tulis kantor di Kecamatan Akabiluru.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.635.000 dan realisasi keuangan Rp4.635.500 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa foto copy dan jilid dokumen kantor di Kecamatan Akabiluru.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.380.000 dan realisasi keuangan Rp23.380.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya biaya konsumsi rapat dan biaya perjalanan dinas untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk kegiatan di Kecamatan Akabiluru dan terlaksananya monitoring serta pembinaan ke nagari-nagari yang ada di wilayah Kecamatan Akabiluru.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.000.000 dan realisasi keuangan Rp19.116.100 atau 91,03% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Kendaraan roda dua Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembelian sepeda motor perorangan atau kendaraan dinas jabatan di Kecamatan Akabiluru

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub kegiatan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran Rp500.000 dan realisasi keuangan Rp500.000 atau 100% serta realisasi fisik 100%, keluaran dari sub kegiatan ini adalah materai di Kantor Camat Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembelian materai.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.762.000 dan realisasi keuangan Rp5.082.000 atau 75,16% serta realisasi fisik mencapai 100,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembayaran rekening listrik di Kecamatan Akabiluru.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.000.000 dan realisasi keuangan Rp18.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana honorarium 2 (dua) orang THL berupa Tenaga Administrasi dan Petugas Kebersihan serta tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih di Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembayaran honorarium THL dan pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih di Kecamatan Akabiluru.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.900.000 dan realisasi keuangan Rp62.659.100 atau 98,06% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pembelian BBM, suku cadang, service dan pembayaran pajak perpanjangan STNK kendaraan dinas berupa 1 unit mobil dan 7 unit sepeda motor yang ada di Kecamatan Akabiluru.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.450.000 dan realisasi keuangan Rp3.450.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan capaian kinerja berupa pemeliharaan komputer dan lapto, printer serta AC yang ada di Kecamatan Akabiluru.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Sub kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp930.000 dan realisasi keuangan Rp930.000 atau 100% serta realisasi fisik 100%, keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya ATK dan bahan cetak (Foto copy dan spanduk) dengan capaian kinerja berupa pembelian ATK dan bahan cetak.

III. Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000 dan realisasi keuangan Rp700.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Akabiluru.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.330.000 dan realisasi keuangan Rp2.330.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk ATK, makanan dan minuman serta bahn cetak dengan capaian kinerja pembelian ATK dan bahan cetak Kecamatan Akabiluru.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan:

- a. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.472.000 dan realisasi keuangan Rp13.472.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan TP-PKK Kecamatan dengan capaian kinerja berupa pelaksanaan pertemuan TP-PKK tingkat Kecamatan Akabiluru.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah:

- a. Sub Kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.100.000 dan realisasi keuangan Rp7.100.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk bahan cetak, makan minum rapat dan lapangan dengan capaian kinerja berupa dan untuk pelaksanaan rapat dan lapangan
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.750.000 dan realisasi keuangan Rp27.750.000 atau 96,52% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya honor untuk tim Forkopimca, biaya makan dan minum rapat, biaya perjalanan dinas untuk koordinasi, konsultasi serta monitoring dalam rangka Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Akabiluru dengan capaian kinerja berupa koordinasi dan konsultasi dengan Unsur Pimpinan Kecamatan Akabiluru.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.330.000 dan realisasi keuangan Rp930.000 atau 39,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk ATK, bahan cetak dan makan minum rapat dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen fasilitasi Pemerintahan Desa.

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

N o	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN AKABILURU	Pemerintah Umum dan Kecamatan	DPA Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya ATK, foto copy, jilid	1 kegiatan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya ATK, foto copy, jilid dan biaya perjalanan dinas	1 Kegiatan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai	14 orang/bulan		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya foto copy dan jilid	1 paket		

N o	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Roda Dua	1 unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 10.000	50 lembar		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik kantor	12 bulan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor THL dan kebersihan kantor	12 bulan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Service kendaraan dinas, pembelian BBM, penggantian suku cadang dan pembayaran pajak	8 unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaank komputer, laptop, printer dan AC	5 unit		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	1 Laporan		

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya ATK, Bahan cetak dan Dana makan Minum rapat	1 kegiatan		
				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
				Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Kegiatan TP-PKK Kecamatan	12 bulan		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi)	Terlaksananya Kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	1 kegiatan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersedianya honor Forkopimca, terlaksananya rapat-rapat dan monitoring	12 bulan		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Desa	Tersedianya Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		

D. Permasalahan dan solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Akabiluru tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/ fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik bahkan banyak yang mencapai 100%.

3.1.7.1.7.Kecamatan Payakumbuh

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Payakumbuh merupakan OPD pelaksana urusan Kecamatan dengan melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 67 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Payakumbuh

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN PAYAKUMBUH	2.295.525.335	2.166.188.434
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.253.812.335	2.124.985.434
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000
01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	2.500.000	2.500.000
01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan	2.500.000	2.500.000
01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.104.128.335	1.979.362.783
01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.104.128.335	1.979.362.783
01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.752.000	31.752.000
01.2.06.001	Sub Kegiatan Penediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.428.000	1.428.000
01.2.06.004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.728.000	11.728.000
01.2.06.005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.451.000	2.451.000
01.2.06.008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000
01.2.06.009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.145,000	11.145,000
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.182.000	42.135.451
01.2.08.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.662.000	3.615.451
01.2.08.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.520.000	38.520.000

01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.750.000	66.735.000
01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.750.000	66.735.000
02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.270.000	5.270.000
02.2.01.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	3.570.000	3.570.000
02.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.570.000	3.570.000
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	1.700.000	1.700.000
02.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.700.000	1.700.000
03	Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.755.000	5.755.000
03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.100.000	2.100.000
03.2.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.100.000	2.100.000
03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.655.000	3.655.000
03.2.06.0007	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peeningkatan drajat kesehatan keluarga dan lingkungan denan menerapkan prilaku sehat	3.655.000	3.655.000
05.	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.750.000	28.750.000
05.2.01	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	28.750.000	28.750.000
05.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan	28.750.000	28.750.000
06.	Program Pembinaan dan pengawasan Pemeritahan Desa	1.938.000	1.938.000
05.2.01	Fasilitasi Rekomendasi Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	1.938.000	1.938.000
05.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.938.000	1.938.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000 dan realisasi keuangan Rp2.500.000 atau 100% serta realisasi fisik 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyusunan Refisi Renstra Kecamatan Payakumbuh, Penyusunan Renja Kecamatan Payakumbuh
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000 dan realisasi keuangan Rp5.000.000 atau 100% serta realisasi fisik 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen LKPj, Dokumen LKJIP dan LPPD Kecamatan Payakumbuh

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.104.128.335 dan realisasi keuangan Rp1.979.362.783 atau 94,07% serta realisasi fisik 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembayaran gaji PNS dan tambahan penghasilan pegawai dan honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan tahun 2025, laporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional), Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, dan Laporan Prognosis, dengan capaian kinerja berupa tersedianya pembayaran Gaji ASN dan Tambahan Penghasilan ASN untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Payakumbuh.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.428.000 dan realisasi keuangan Rp1.428.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembelian komponen instalasi listrik kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.728.000 dan realisasi keuangan Rp11.728.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembelian kebutuhan alat tulis kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.451.000 dan realisasi keuangan Rp 2.451.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan penggandaan surat-surat dinas dan publikasi, dengan capaian kinerja berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Payakumbuh.

- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000 dan realisasi keuangan Rp 5.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.145.000 dan realisasi keuangan Rp11.145.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk semua kegiatan, dengan capaian kinerja berupa adanya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan terlaksananya pembinaaan ke nagari-nagari se-Kecamatan Payakumbuh dengan baik.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.662.000 dan realisasi keuangan Rp3.615.451 atau 54,27% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan pembayaran tagihan listrik, air dan telepon, dengan capaian kinerja berupa tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Camat Payakumbuh.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.520.000 dan realisasi keuangan Rp38.520.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya Honor PHL 3 orang, dan jumlah paket penyediaan peralatan kebersihan kantor.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.750.000 dan realisasi keuangan Rp66,735.000 atau 98,50% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya berkala roda dua dan roda empat, dengan capaian kinerja berupa tersedianya pelaksanaan pembayaran pajak dan pemelihara rutin.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.570.000 dan realisasi keuangan Rp3.570.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan rapat-rapat monitoring dan pelaporan di nagari dengan capaian kinerja berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Payakumbuh

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.700.000 dan realisasi keuangan Rp1.700.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan rapat-rapat monitoring dan pelaporan di nagari dengan capaian kinerja berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Payakumbuh.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.100.000 dan realisasi keuangan Rp2.100.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa terlaksana rapat PKK, pelaksanaan musrenbang dengan capaian kinerja berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Payakumbuh.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- a. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.655.000 dan realisasi keuangan Rp3.655.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa terlaksana rapat PKK, pelaksanaan musrenbang dengan capaian kinerja berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Payakumbuh.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.750.000 dan realisasi keuangan Rp28.750.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pelaksanaan rapat dan monitoring, dengan capaian kinerja berupa Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Payakumbuh.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi tata Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.938.000 dan realisasi keuangan Rp1.928.000 atau 99,48% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pelaksanaan rapat dan monitoring, Administrasi Tata Pemerintahan yang ada di nagari.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KECAMATAN PAYAKUMBUH	Kecamatan		Program Penunjang Urusn Pemerintahan Daerah Kabupaten				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan Renja	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	RKA	Terlaksananya Penyusunan RKA		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Perubahan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	DPA Kecamatan Payakumbuh	Terlaksananya Penyusunan DPA Kecamatan Payakumbuh		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	DPA Perubahan	Terlaksananya Penyusunan DPA Perubahan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKPJ, LKJIP,LPPD, SPIP,SAKIP dan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LKPJ, LKJIP,LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan	Terbayarnya Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Laporan SPJ Fungsional, Laporan Keuangan, Laporan	Terlaksananya Penyusunan Laporan SPJ Fungsional, Laporan		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Realisasi Fisik, dan Laporan Prognosis	Keuangan, Laporan Realisasi Fisik, dan Laporan Prognosis		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah				
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RKBMD, RKPBBMD, pemanfaatan asset dan laporan BMD	Terlaksananya Penyusunan RKBMD,RKPBB MD, pemanfaatan asset dan laporan BMD		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu,Taspen, NPWP,Rekomendasi Kepegawaian	Terlaksananya penyusunan DUK, Karis, Karsu,Taspen, NPWP,Rekomendasi Kepegawaian		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barang listrik penerangan kantor	Tersedianya barang listrik penerangan kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan	Tersedianyabahan bacaan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Terbayarnya Barang Cetakan dan Penggandaan		
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu mencukupi	Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	Terbayarnya Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		
				Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pembelian kursi eselon IV	Terlaksananya pembelian kursi eselon IV		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matrai 10.000,			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rutin pembayaran tagihan rekening air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening air dan listrik		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terbayarnya Honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan	Peralatan	Tersedianya		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Peralatan dan Mesin Lainnya	Gedung kantor Camat Payakumbuh	Peralatan Gedung kantor Camat Payakumbuh		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung kantor Camat	Terlaksananya Rehab gedung kantor Camat		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
				Sub Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Monitoring dan evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi		
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	PATEN	Terlaksananya pelaksanaan Paten		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rapat PKK, Musrenbang	Terlaksananya rapat PKK dan Musrenbang		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Nagari	perangkat Nagari		
				Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan /atau kepolisian negara RI	Monitoring ketertiban umum dan masyarakat	Telaksananya kegiatan Monitoring ketertiban umum dan masyarakat		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah				
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Daerah	Monitoring dan Sosialisasi	Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Monitoring dan rapat	Terlaksananya Monitoring dan Pelaksanaan rapat		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Kecamatan pada Kecamatan Payakumbuh. Alokasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, secara umum realisasi fisik mencapai 100% dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.7.1.8. Kecamatan Luak

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Luak merupakan OPD pelaksana Urusan Kecamatan dengan melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 68 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Luak

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN LUAK	1.913.110.357	1.841.238.402
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.840.542.357	1.768.670.237
01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.716.543.757	1.646.995.237
01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.716.543.757	1.646.995.237
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.234.600	34.182.740
01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1.117.840	1.117.840
01.2.06.03.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	1.500.000
01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.615.860	12.614.000
01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.550.900	2.550.900
01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.450.000	16.400.000
01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.100.000	12.100.000
01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.100.000	12.100.000
01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.204.000	15.251.842
01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.764.000	11.811.842
01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.440.000	3.440.000
01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.460.000	60.140.583
01.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.100.000	58.780.583
01.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan	1.360.000	1.360.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Mesin Lainnya		
02.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	40.188.000	40.188.000
01.2.02.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.188.000	40.188.000
01.2.02.03.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.188.000	40.188.000
05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.380.000	32.380.000
05.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.380.000	32.380.000
05.2.01.03.	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.100.000	5.100.000
05.2.01.08.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.280.000	27.280.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Luak dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.716.543.757 dan realisasi keuangan Rp1.646.995.237 atau 95,95% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tahun 2025 dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.117.840 dan realisasi keuangan Rp1.117.840 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kebutuhan alat komponen listrik kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000 dan realisasi keuangan Rp1.500.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kebutuhan alat rumah tangga dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.615.860 dan realisasi keuangan Rp12.614.000 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kebutuhan alat tulis kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.550.900 dan realisasi keuangan Rp2.550.900 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan penggandaan surat-surat dinas dan publikasi dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.450.000 dan realisasi keuangan Rp16.400.000 atau 99,70% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.100.000 dan realisasi keuangan Rp12.100.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.764.000 dan realisasi keuangan Rp11.811.842 atau 92,54% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.440.000 dan realisasi keuangan Rp3.440.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan alat – alat kebersihan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.100.000 dan realisasi keuangan Rp58.780.583 atau 97,80% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pembayaran pajak dan pemeliharaan rutin/berkala roda dua dan roda empat dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.360.000 dan realisasi keuangan Rp1.360.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pembayaraneliharaan rutin/berkala Laptop, PC, Printer dan Air Conditioner (AC) dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.188.000 dan realisasi keuangan Rp40.188.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Honor 3 orang Tenaga Kontrak Biasa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.100.000 dan realisasi keuangan Rp5.100.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Negara dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.280.000 dan realisasi keuangan Rp27.280.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KECAMATAN LUAK	Pemerintahan	Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan	Terbayarnya Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat komponen listrik kantor	Tersedianya alat-alat komponen listrik kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya Barang Cetak dan Penggandaan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	Terbayarnya Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Personal	Tersedianya Personal		

					Computer	Computer		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rutin pembayaran tagihan rekening air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening air dan listrik		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
				Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Laptop, PC, Printer dan Air Conditioner (AC)	Pemeliharaan Laptop, PC, Printer dan Air Conditioner (AC)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Biasa	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Biasa		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN				

				UMUM				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urursan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Negara	Terlaksananya Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Negara		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		

D. Permasalahan dan solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat di capai secara cukup berimbang (96,24%) dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.7.1.9. Kecamatan Lareh Sago Halaban

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Lareh Sago Halaban merupakan OPD pelaksana urusan Kecamatan dengan melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD Tahun 2025 terhadap penyelenggaraan urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 69 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Lareh Sago Halaban

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	1.741.544.437	1.655.375.923
7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.689.324.437	1.603.177.352
7.01.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.745.404	6.688.500
7.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.578.000	1.560.000
7.01.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.333.338	1.124.000
17.01.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.389.328	1.384.000
7.01.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.618.000	1.501.500
7.01.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.026.738	1.019.000
7.01.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.517.455.524	1.436.153.145
7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.517.455.524	1.436.153.145
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.104.595	65.984.854
7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.900.000	31.806.854
7.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.560.000	2.560.000
7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.138.662	7.138.000
7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.130.000	7.130.000
7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.375.000	16.350.000
7.01.01.2.07.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.778.914	46.723.508
7.01.01.2.07.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000
7.01.01.2.07.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	4.278.914	2.055.406

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
7.01.01.2.07.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	44.000.000	44.000.000
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.250.000	47.627.345
7.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.250.000	44.639.345
7.01.02.03.02.0036	Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Angkut – Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	30.100.000	28.733.945
7.01.02.03.02.0038	Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Angkut – Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Beroda Dua	14.250.000	14.242.000
7.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.988.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.440.500	10.440.000
7.01.03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.440.000	2.440.000
7.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2.440.000	2.440.000
7.01.03.2.01.0003	Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	8.000.000	8.000.000
7.01.03.2.03	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	8.000.000	8.000.000
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.212.500	3.212.500
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.000.000	39.000.000
01.05.2.01.0003	Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12.000.000	11.978.571
7.01.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000	27.000.000
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.780.000	2.780.000
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.780.000	2.780.000
7.01.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	2.780.000	2.780.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp1.578.000 dan Realisasi Keuangan Rp1.560.000 atau 98,85 % realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini terlaksananya Kegiatan Lembur

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.133.000 dan realisasi keuangan Rp1.124.000 atau 99,385% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah RKA, dengan capaian kinerja berupa pembuatan dokumen RKA untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Lareh Sago Halaban
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.389.328 dan realisasi keuangan Rp1.384.000 atau 99,61% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah RKA, dengan capaian kinerja berupa pembuatan dokumen RKA untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.618.000 dan realisasi anggaran Rp1.601.000 atau 98,94% realisasi fisik mencapai 100%.Keluaran dari Sub Kegiatan ini terlaksananya kegiatan Lembur.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.026.738 dan realisasi anggaran Rp1.019.000 atau 99,24% realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini terlaksananya kegiatan Lembur..

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.517.445.524,00- dan realisasi keuangan Rp.1.436.153.146 atau 94,64 % serta realisasi fisik mencapai 94,78%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan Tahun 2025, dengan capaian kinerja berupa pencairan gaji dan tambahan penghasilan serta Honorarium Peananggung Jawab Pengelola Keuangan untuk ASN yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Alokasi sebesar Rp1.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya Peralatan Komponen Instalasi Listrik Kantor berupa Alat Alat Listrik seperti Kabel Ekstensi/Terminal dan Bola Lampu.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp31.900.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp31.806.000 atau 99,71% serta realisasi fisik mencapai 99,76%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Alokasi Anggaran Rp2.560.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.560.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai

- 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini tersedianya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih Kantor.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.138.562 dan realisasi keuangan Rp7.138.000 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, kebutuhan alat tulis kantor Camat Lareh Sago Halaban
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.130.933.000 dan realisasi keuangan Rp73.130.000 atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 96,71%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan penggandaan surat – surat dinas dan publikasi, dengan capaian kinerja berupa penggandaan surat- surat dinas dan dokumen laporan-laporan yang ada di kecamatan Lareh sago Halaban
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.375.000 dan realisasi keuangan Rp16.350.000 atau 99,85% serta realisasi fisik 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksannaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk semua kegiatan di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan terlaksananya pembinaan ke nagari-nagari se-Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan baik.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000 dan realisasi keuangan Rp500.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah materai dan buku cek di Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.278.914 dan realisasi keuangan Rp2.741.444 atau 64,06% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan surat kabar kantor, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya tagihan air dan listrik di Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.000.000 dan realisasi keuangan Rp44.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Honor PHL sebanyak 3 orang dengan capaian kinerja berupa pembayaran honor untuk 3 ornag PHL di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.250.000 dan realisasi keuangan Rp44.639.345 atau 94,78% serta realisasi fisik mencapai 96%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pembayaran pajak dan

peliharaan rutin / berkala roda dua dan roda empat, dengan capaian kinerja berupa Suku cadang, service BBM dan Pajak Kendaraan di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

II. Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.440.000 dan realisasi keuangan Rp2.440.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- b. Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.000.000 dan realisasi keuangan Rp8.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Program Imunisasi nsional dalam rangka Penurunan Angka Zero Doze di Kecamatan Lareh Sago

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Alokasi Anggaran Rp12.000.000 dan Realisasi Anggaran Rp11.978.571.000 atau 99,82% serta realisasi fisik mencapai 99,83%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Lareh Sago Halaban
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Koordinasi Pimpinan di Kecamatan alokasi anggaran sebesar Rp27.000.000 dan realisasi keuangan Rp27.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembayaran Honor Forkopimca di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Asset Desa Alokasi Anggaran Rp2.780.000 dan Realisasi Anggaran Rp2.780.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Workshop Percepatan APBNagari Kecamatan Lareh Sago Halaban

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan Renja	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	RKA	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA –SKPD	Perubahan RKA	Terlaksananya Penyusunan Perubahan RKA SKPD		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA –SKPD	DPA	Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Perubahan DPA	Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan	Terbayarnya Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya Dana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Dana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Tersedianya Dana	Terlaksananya Kegiatan		

				Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya Barang Cetak dan Penggandaan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	Terbayarnya Makan dan Minum harian PNS peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	Terpenuhi Materai		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dana Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor 3 Orang PHL Kantor Camat Lareh Sago Halaban	Terbayarnya Honor 3 Orang PHL Kantor Camat Lareh Sago Halaban		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia Dana Materai 10.000	Tersedianya Materai 10.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Dana Rutin pembayaran tagihan rekening air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening air dan listrik		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor 3 Orang PHL Kantor Camat Lareh Sago Halaban	Terbayarnya Honor 3 Orang PHL Kantor Camat Lareh Sago Halaban		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan		

				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	empat dan roda dua	dinas roda empat dan roda dua		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Dana Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Dana Kegiatan Musrenbang Kecamatan		
				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan	Tersedianya dana Sosialisasi Program Imunisasi Nasional dalam rangka Penurunan Zero Doze di Kecamatan Lareh Sago Halaban	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Program Imunisasi Nasional dalam rangka Penurunan Zero Doze di Kecamatan Lareh Sago Halaban		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tersedianya Dana Kegiatan HUT RI di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Tersedianya Dana untuk Honorarium Forkopimca	Terlaksananya untuk Honorarium Forkopimca		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah				
				Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa				
				Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset	Tersedia Dana Workshop Percepatan APB Nagari	Terlaksananya Workshop Percepatan APB Nagari		

D. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lareh Sago Halaban. Alokasi anggaran dan dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat di capai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik walaupun dengan Anggaran sangat Minim dan terbatas.

3.1.7.1.10. Kecamatan Situjuah Limo Nagari

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan OPD pendukung pelaksana urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan dengan melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran dan realisasi dana APBD 2024 terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 70 Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	1.672.449.369	1.603.777.977
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1.623.859.369	1.555.362.977
01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.487.223.369	1.419.547.377
01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.487.223.369	1.419.547.377
01.2.04.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.105.000	17.105.000
01.2.04.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000
01.2.04.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.7987.000	7.987.000
01.2.04.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.998.000	1.998.000
01.2.04.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.620.000	6.620.00000
01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.641.000	56.641.000
01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.531.000	6.531.000
01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.110.000	50.110.000
01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.890.000	59.229.600
01.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.050.000	59.228.600
01.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.840.000
03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22.090.000	21.915.000
03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.090.000	21.915.000

03.2.01.01.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.750.000	1.575.000
03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	20.340.000	20.340.000
05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.500.000	26.500.000
05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	26.500.000	26.500.000
05.2.01.08.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	26.500.000	26.500.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggarandan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.487.223.369 dan realisasi keuangan Rp1.419.547.377 atau 95,4% serta realisasi fisik mencapai 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN dengan capaian kinerja berupa pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN yang ada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000 dan realisasi keuangan Rp500.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Alat Listrik Kantor dengan capaian kinerja berupa pembelian alat-alat listrik di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.987.000 dan realisasi keuangan Rp7.987.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa pembelian Alat dan Bahan Kantor berupa Alat-Alat Tulis Kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.998.000 dan realisasi keuangan Rp1.998.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang cetak dan Penggandaan untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.dengan capaian kinerja berupa tersedianya bahan Cetak dan Foto Copy.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.620.000 dan realisasi keuangan Rp6.620.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Koordinasi dan

Konsultasi untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa biaya perjalanan dinas biasa dan biaya perjalanan dinas dalam kota.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.531.000 dan realisasi keuangan Rp6.531.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa pembayaran tagihan rekening telepon dan listrik.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.110.000 dan realisasi keuangan Rp50.110.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Administrasi Umum dan Operator Kantor untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa pembelian alat-alat untuk kebersihan kantor, pembayaran honorarium pengurus barang, operator komputer, dan tenaga kebersihan (tenaga harian lepas).

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.050.000 dan realisasi keuangan Rp59.228.600 atau 98,6% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan BBM Kendaraan Dinas untuk menunjang kegiatan Operasional yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa pembelian/pembayaran suku cadang, pelumas BBM, pajak-pajak kendaraan dinas roda empat dan roda dua.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.840.000 dan realisasi keuangan Rp2.840.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor berupa komputer-komputer unit personal computer untuk menunjang kegiatan operasional yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa pembayaran biaya perbaikan printer, komputer dan laptop.

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.750.000 dan realisasi keuangan Rp1.575.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Musrembang dengan hadirnya utusan delegasi Nagari dan

Pemangku Kepentingan OPD Dinas Instansi Terkait di Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa tersedianya bahan foto copy, spanduk, makan minum rapat, ATK Peserta Rapat, Honorarium Pembawa acara, Pembaca kalam ilahi, pembaca doa, pemimpin lagu dan uang saku peserta dalam musyawarah pembangunan tingkat kecamatan situjuh limo nagari.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.340.000 dan realisasi keuangan Rp20.340.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adalah terlaksananya Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa Biaya Makan Minum Rapat, Biaya Makan Minum Biasa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan.

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.500.000 dan realisasi keuangan Rp26.500.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dengan instansi Pimpinan Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan capaian kinerja berupa belanja Honorarium pimpinan kecamatan.

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

No	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1.	Kec. Situjuh Liman Nagari	Pemerintah Umum dan Kecamatan	DPA Kecamatan	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-
				2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		
				1)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya Dokumen SKPD	Tersedunya dokumen SKPD		
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	-	-	-
				1)Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PPK	Terbayarnya Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PPK	-	-
				3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-
				1)Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-	-
				2)Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan cetak dan Pengandaan	Tersedianya Bahan cetak dan Pengandaan	-	-

				3)Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	-
				4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya jasa urusan pemerintah yang telah dibayarkan	-	-	-
				1)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Matrai	Tersedianya Matrai	-	-
				2)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan rekening telepon dan listrik	Tagihan rekening telepon dan listrik		
				3)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan dan Peralatan Kebersihan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dan Peralatan Kebersihan		
				5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi barang milik daerah yang ber kondisi baik	-		
				1)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM, suku cadang, servis dan pajak kendraan dinas roda 4 dan roda 2	Tersedianya BBM, suku cadang, servis dan pajak kendraan dinas roda 4 dan roda 2		
				2)Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan printer, computer dan laptop	Terperbaikinya printer, computer dan laptop	-	-
				II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata nilai nilai swadaya masyarakat	-	-	-
				1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat, PHBN/PHBI Kegiatan Pemuda-pemudi, lomba PPK Pemberdayaan Perangkat Nagari, Lembaga Organisasi, Pemberdayaan	-	-	-

					Fasilitasi Pembinaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan tingkat nagari, bumrag dan musrenbang nagari dan kecamatan			
				1)Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	-	-
				2)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-	-
				2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-
				1)Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
				III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemeritnahan umum yang dilaksanakan di kecamatan	-	-	
				1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	Persentase terlaksananya urusa pemerintahan umum	-	-	
				1)Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan rapat dan monitoring	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan monitoring	-	

D. Permasalahan dan solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara cukup berimbang dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.7.1.11. Kecamatan Harau

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Harau merupakan OPD pelaksana urusan Kecamatan dengan melaksanakan 2 program, 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD Tahun 2025 terhadap penyelenggaraan urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 71 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Harau

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.61	KECAMATAN HARAU	1.885.045.774	1.838.944.446
7.01.0.00.0.00.61.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.883.184.774	1.837.083.446
7.01.0.00.0.00.61.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.851.000	7.831.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.01.0 1.2.01.01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.124.000	3.114.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.01.0 1.2.01.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.123.000	1.112.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.01.0 1.2.01.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0
7.01.0.00.0.00.61.01.2.01.0 1.2.01.04.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.594.000	1.576.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.01.0 1.2.01.05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.201.000	1.194.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.01.0 1.2.01.06.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.061.000	1.059.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.706.578.274	1.660.731.609
7.01.0.00.0.00.61.01.2.02.0 1.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.702.539.774	1.656.724.109
7.01.0.00.0.00.61.01.2.02.0 1.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	975.500	957.500
7.01.0.00.0.00.61.01.2.02.0 1.2.02.05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.186.000	1.181.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.02.0 1.2.02.07.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	944.000	942.000

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.61.01.2.02.0 1.2.02.08.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	933.000	927.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.104.000	1.103.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.03.0 1.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.104.000	1.103.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.016.000	1.014.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.05.0 1.2.05.03.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0
7.01.0.00.0.00.61.01.2.05.0 1.2.05.03.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.016.000	1.014.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.883.500	64.861.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.06.0 1.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.06.0 1.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.400.000	20.400.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.06.0 1.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.729.000	10.729.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.06.0 1.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.224.500	8.224.500
7.01.0.00.0.00.61.01.2.06.0 1.2.06.08.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	6.125.000	6.105.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.06.0 1.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.905.000	16.902.500
7.01.0.00.0.00.61.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0
7.01.0.00.0.00.61.01.2.08.0 1.2.08.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.08.0 1.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	5.340.000	5.211.995
7.01.0.00.0.00.61.01.2.08.0 1.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.460.000	32.460.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.200.000	63.146.842
7.01.0.00.0.00.61.01.2.09.0 1.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.050.000	61.006.842
7.01.0.00.0.00.61.01.2.09.0 1.2.09.02.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	2.140.000
7.01.0.00.0.00.61.01.2.09.0 1.2.09.06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	0	0
7.01.0.00.0.00.61.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.861.000	1.861.000

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.61.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	621.000	621.000
7.01.0.00.0.00.61.02.2.01.0 2.2.01.02.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	621.000	621.000
7.01.0.00.0.00.61.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	1.240.000	1.240.000
7.01.0.00.0.00.61.02.2.02.0 2.2.02.03.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.240.000	1.240.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Harau dengan rincian sebagai berikut:

I. Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.124.000 dan realisasi keuangan Rp3.114.000 atau 99,68%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa RENSTRA, RENJA.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.123.000 dan realisasi keuangan Rp1.112.000 atau 99,02%. dengan realisasi fisik mencapai 99,02%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa RKA.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp0 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0%. dengan realisasi fisik mencapai 0%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Perubahan RKA.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.594.000 dan realisasi keuangan Rp1.576.000 atau 98,87%. dengan realisasi fisik mencapai 98,87%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa DPA.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.201.000 dan realisasi keuangan Rp1.194.000 atau 99,42%. dengan realisasi fisik mencapai 99,42%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa PERUBAHAN DPA.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.061.000 dan realisasi keuangan Rp1.059.000 atau 99,81%. dengan realisasi fisik mencapai 99,81%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa LKJIP, LKPJ LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.702.539.774 dan realisasi keuangan Rp1.656.724.109 atau 97,31%. dengan realisasi fisik mencapai 97,49%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Honor Pengelola Keuangan dan Pembayaran Gaji dan Tambahan penghasilan PNS.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp975.500 dan realisasi keuangan Rp957.500 atau 98,15%. dengan realisasi fisik mencapai 98,15%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Jumlah Dokumen SPJ.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.186.000 dan realisasi keuangan Rp1.181.000 atau 99,58%. dengan realisasi fisik mencapai 99,58%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Laporan Keuangan.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp944.000 dan realisasi keuangan Rp942.000 atau 99,79%. dengan realisasi fisik mencapai 99,79%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Laporan Evaluasi Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan.
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp933.000 dan realisasi keuangan Rp927.000 atau 99,36%. dengan realisasi fisik mencapai 99,36%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Laporan Prognosis.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.104.000 dan realisasi keuangan Rp1.103.000 atau 99,91%. dengan realisasi fisik mencapai 99,91%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD.
- b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.016.000 dan realisasi keuangan Rp1.014.000 atau 99,80%. dengan realisasi fisik mencapai 99,81%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000 dan realisasi keuangan Rp2.500.000 atau 100%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Komponen Instalansi Listrik/penerangan Bangunan Kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.400.000 dan realisasi keuangan Rp20.400.000 atau 100%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.729.000 dan realisasi keuangan Rp10.729.000 atau 100%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Kebutuhan Alat Tulis Kantor.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.224.500 dan realisasi keuangan Rp8.224.500 atau 100%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Barang Cetak dan Foto Copy.
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.125.000 dan realisasi keuangan Rp6.105.000 atau 99,67%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Terfasilitasinya Tamu.

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.905.000 dan realisasi keuangan Rp16.902.500- atau 99,99%. dengan realisasi fisik mencapai 99,99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000 dan realisasi keuangan Rp500.000 atau 100%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Materai.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.340.000 dan realisasi keuangan Rp5.211.995 atau 97,60%. dengan realisasi fisik mencapai 97,62%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan pembayaran tagihan rekening Telepon, Air, Listrik dan Surat Kabar Kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.460.000 dan realisasi keuangan Rp32.460.000 atau 100%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Peralatan Kebersihan, Honor Tenaga Harian Lepas dan Honor Tenaga kebersihan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.050.000 dan realisasi keuangan Rp61.006.842 atau 99,93%. dengan realisasi fisik mencapai 99,93%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.150.000 dan realisasi keuangan Rp2.140.000 atau 99,53%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau dengan capaian kinerja berupa Pemeliharaan Komputer/PC, Laptop dan AC.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp621.000 dan realisasi

keuangan Rp621.000 atau 100%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Lomba Nagari dan Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Nagari.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang didanai melalui APBD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.240.000 dan realisasi keuangan Rp1.240.000 atau 100%. dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan PATEN.

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	KEC. HARAU	Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA	3.114.000		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	(2 Renja, Renstra)		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA	1.112.000		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	(1 RKA)		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen SAKIP	(1 RKPA)		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	1.656.724.109 (14 Bulan)		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ	957.500 (12 Dokumen SPJ)		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	1.181.000 (1 Dokumen Laporan Keuangan)		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)	942.000 (16 Laporan)		
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis	927.000 (1 Laporan)		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMD, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	1.103.000 (12 Bulan, 1 Laporan)		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	0 (22 stel)		
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP	1.014.000 (12 Bulan)		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	1.715.000 (Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan kantor 12 Bulan)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	16.931.250 (PC 1 unit. Router 1 unit Accespoint 2 unit)		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	12.331.400 (terpenuhinya ATK 12 Bulan)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	8.867.900 (terpenuhinya Penggandaan surat 12 bulan)		
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	8.745.000 Terpenuhinya fasilitas tamu 12 bulan)		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	21.790.000 (terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman 12 bulan)		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	0 (Unit)		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Meja dan kursi	0 (Unit)		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp10.000 -	500.000 Terpenuhinya materai 50 bh)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar	5.211.995 Terlaksananya Pembayaran Tagihan Rekening Air dan Listrik 12 bulan)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kontrak 4 (tiga) orang	32.460.000 (tersedianya peralatan kebersihan dan honor tenaga kontrak 12 bulan)		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	54.936.900 (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua 12 bulan)		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	3.430.000 (terpenuhinya perbaikan Printer, Komputer dan Laptop 12 bulan)		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Kantor Camat Harau	0 (unit)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	621.000 (Terlaksana Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi)		
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	1.240.000 (Terlaksananya PATEN Kecamatan)		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	3.750.000 (Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan)		

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring	1.690.000 (Terlaksananya Monitoring, Pembinaan ke Nagari, Kegiatan Baliak Basurau dan Kegiatan Keagamaan serta Pembinaan Kelembagaan)		
				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
				Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	965.000 (Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)		
				Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	2.195.000 (Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi, pembinaan terpadu	28.180.000 (Terlaksananya Koordinasi, pembinaan terpadu)		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	965.000(Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi)		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	1.115.000(Terlaksananya Pemilihan Bamus masing-masing Nagari, LKPJ Nagari, Rapat, Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan ke Nagari, dll)		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Supervisi dan pengawasan dana desa	1.237.000 (Terlaksananya Pencatatan Aset Nagari secara Tertib)		
				Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	1.237.000 (Terlaksananya Evaluasi APB Nagari)		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi	1.279.000 (Terlaksananya Rapat, Monitoring dan Evaluasi)		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	1.097.000 (Terlaksananya Koorinasi dengan Pemerintahan Nagari)		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada Kecamatan Harau. Alokasi anggaran sebesar Rp1.885.045.774 dengan realisasi keuangan Rp1.838.944.446 cukup berimbang, secara umum realisasi fisik mencapai 100% dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.7.1.12. Kecamatan Pangkalan Koto Baru

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan OPD pelaksana urusan Kecamatan dengan melaksanakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 22 sub kegiatan Urusan Kecamatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD 2025 terhadap penyelenggaraan Urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 72 Urusan Kecamatan Pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1.674.722.349	1.653.323.611
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.566.504.549	1.545.268.311
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.230.000	6.155.000
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.416.000	3.416.000
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	590.000	575.000
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.224.000	2.164.000
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.449.135.033	1.403.567.665
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.443.317.033	1.397.829.665
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.644.000	3.564.000
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.174.000	2.174.000
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.280.000	1.210.000
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.280.000	1.210.000
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.320.000	1.315.000
7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.320.000	1.315.000
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.493.800	47.063.800
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	550.000	550.000
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	9.000.000
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.212.000	6.212.000
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.331.800	4.331.800

7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.400.000	26.970.000
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.600.000	3.600.000
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	3.600.000	3.600.000
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.473.406	23.473.406
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	200.000
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	7.300.000	6.622.563
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.137.216	15.137.216
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.610.000	60.316.362
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.050.000	58.942.900
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.560.000	1.373.462
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.840.000	6.740.300
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.690.000	3.590.000
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.690.000	3.590.000
7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.150.000	3.150.000
7.01.03.2.06.07	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3.150.000	3.150.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.000.000	32.250.000
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.000.000	32.250.000
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.000.000	32.250.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.416.000 dan realisasi keuangan Rp3.416.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen Renja dan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp590.000 dan realisasi keuangan Rp575.000 atau 97,46% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen RKA Kecamatan Pangkalan Koto Baru

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.224.000 dan realisasi keuangan Rp2.164.000 atau 97,30% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.443.317.033 dan realisasi keuangan Rp1.397.829.665 atau 96,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Honor Pengelola Keuangan, Pembayaran Gaji dan Tambahan penghasilan ASN.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.644.000 dan realisasi keuangan Rp3.564.000 atau 97,80% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya penatausahaan keuangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.174.000 dan realisasi keuangan Rp2.174.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Pangkalan Koto Baru

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.280.000 dan realisasi keuangan Rp1.210.000 atau 94,53% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.320.000,- dan realisasi keuangan Rp1.315.000,- atau 99,62% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp550.000 dan realisasi keuangan Rp550.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedianya peralatan komponen instalasi listrik pada Kantor Camat Pangkalan Koto Baru.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.000.000 dan realisasi keuangan Rp9.000.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedianya peralatan Kantor berupa Laptop.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.212.000 dan realisasi keuangan Rp6.212.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedianya Alat Tulis Kantor.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.331.800 dan realisasi keuangan Rp4.331.800 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Barang Cetak dan Foto Copy.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.400.000 dan realisasi keuangan Rp26.970.000 atau 94,96% serta realisasi fisik mencapai 96,25%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.600.000 dan realisasi keuangan Rp3.600.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa tersedia Kursi Kerja Pejabat.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000 dan realisasi keuangan Rp200.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa Materai.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.300.000 dan realisasi keuangan Rp6.622.563 atau 90,72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pembayaran Air dan Listrik.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.137.216 dan realisasi keuangan Rp15.137.216 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa adanya Peralatan Kebersihan dan honorarium tenaga kebersihan Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.050.000 dan realisasi keuangan Rp58.942.900 atau 98,16% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.560.000 dan realisasi keuangan Rp1.373.462 atau 53,65% serta realisasi fisik mencapai 80%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan komputer, Laptop dan AC.

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.690.000 dan realisasi keuangan Rp3.590.000 atau 97,29% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan dengan capaian kinerja berupa Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- a. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.150.000 dan realisasi keuangan Rp3.150.000 atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan TP-PKK Kecamatan.

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.000.000 dan realisasi keuangan Rp32.250.000 atau 97,73% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi Forkopimca Pangkalan Koto Baru.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	Kecamatan	Meningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupeten/Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja Kec. Pangkalan Koto Baru	Tersedianya Dokumen Renja 2025 dan Renja Perubahan 2025 serta Renstra 2025-2029		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Kec. Pangkalan Koto Baru	Tersedianya Dokumen RKA 2026		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya dokumen LKJiP, LKPJ, Laporan RFK dan Laporan Semester		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, PPPK dan Tambahan Penghasilan (14 Bulan)	Terbayarnya Gaji PNS, PPPK dan Tambahan Penghasilan (14 Bulan)		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan, tersedianya Dokumen SPJ		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Kantor Camat pangkalan		

					Daerah	Koto Baru		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Tersedianya DUK, Benzeting dan Dokumen administrasi masing-masing pegawai		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya 1 unit laptop		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (12 Bulan)	Tersedianya alat tulis kantor (12 Bulan)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (12 Bulan)		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah (12 Bulan)	Terbayarnya Makan dan Minum peserta rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah (12 Bulan)		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Tersedianya 2 unit Kursi Kerja Pejabat		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matrai 10.000, (200 lembar)	Tersedianya matrai 10.000, matrei (200 lembar)		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Rutin pembayaran tagihan rekening air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening air dan listrik (12 Bulan)		

					(12 Bulan)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan dan bahan Kebersihan serta honor petugas kebersihan	Tersedianya Peralatan dan bahan Kebersihan serta terbayarnya honor petugas kebersihan (12 bulan)		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua (12 Bulan)	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua (12 Bulan)		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Komputer, Laptop dan AC		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya (1 Kali)	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan (1 Kali)		
				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
				Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kegiatan PPK Kecamatan (12 bulan)	Terlaksananya Kegiatan PPK Kecamatan (12 bulan)		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimca (12 bulan)	Terlaksananya Koordinasi Forkopimca (12 bulan)		

D. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Kecamatan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Anggaran sebesar Rp.1.635.146.049,- dan realisasi keuangan Rp.1.584.177.606,- cukup berimbang, secara umum realisasi keuangan mencapai 96,88% dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

3.1.7.1.13. Kecamatan Kapur IX

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Kapur IX merupakan OPD pelaksana urusan Kecamatan dengan melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD Tahun 2025 terhadap penyelenggaraan urusan urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73 Urusan Kecamatan pada Kecamatan Kapur IX

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.63.0000	KECAMATAN KAPUR IX	1.934.365.395	1.858.503.257
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.897.080.395	1.812.328.257
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.920.000	4.574.000
7.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.520.000	0
7.01.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	0
7.01.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.800.000	0
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	800.000	740.000
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.714.485.395	1.689.775.305
7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.711.365.395	1.689.775.305
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000	0
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	800.000	0
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.520.000	0
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	800.000	0
7.01.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	530.000	520.000
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	530.000	520.000
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.441.000	40.842.575
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.091.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	8.356.875
7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.390.000	2.725.200
7.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.800.000	382.000

7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.751.000	28.287.500
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.927.496	31.170.527
7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.254.000	5.586.743
7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.673.496	25.583.784
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.976.504	45.445.850
7.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.350.000	43.196.850
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000	2.249.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.146.504	0
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.090.000	13.370.000
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.590.000	1.000.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.590.000	1.000.000
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.500.000	12.370.000
7.01.02.2.02.0002	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.500.000	12.370.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.295.000	2.805.000
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.295.000	2.805.000
7.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1.975.000	1.805.000
7.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.320.000	1.000.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000	27.000.000
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.000.000	27.000.000
7.01.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000	27.000.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	3.000.000
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	3.000.000
7.01.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000	0
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	2.000.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kapur IX sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah alokasi anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp2.520.000 dengan realisasi keuangan Rp2.057.000 atau 81,63% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar Rp1.800.000 dengan realisasi keuangan Rp740.000 atau mencapai 41,11% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Dokumen DPA-SKPD. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebesar Rp1.800.000 dengan realisasi keuangan Rp1.037.000 atau 57,61% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD adalah Dokumen Perubahan DPA-SKPD. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp800.000 dengan realisasi keuangan Rp740.000 atau 92,50% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.711.365.395 dengan realisasi keuangan Rp1.689.775.305 atau mencapai 98,74% dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah ASN yang Menerima

Gaji dan Tunjangan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 17 orang dengan capaian target 17 orang.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp800.000 dengan realisasi keuangan Rp0 dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp800.000 dengan realisasi keuangan Rp0 dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebesar Rp1.520.000 dengan realisasi keuangan Rp 0 dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak 18 dokumen dengan capaian target 18 dokumen.

3. Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp800.000 dengan realisasi keuangan Rp0 atau dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan dengan capaian target 1 laporan.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp530.000 dengan realisasi keuangan Rp520.000 atau 98,11% dari jumlah alokasi anggaran

dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp1.500.000 dengan realisasi keuangan Rp1.091.000 atau 72,73% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian target 1 paket..
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp10.000.000 dengan realisasi keuangan Rp8.356.875 atau mencapai 83,57% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian target 1 paket.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.390.000 dengan realisasi keuangan Rp2.725.200 atau mencapai 80,39% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian target 1 paket.
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp1.800.000 dengan realisasi keuangan Rp382.000 atau 21,22% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan dengan capaian target 1 laporan.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp29.751.000 dengan realisasi keuangan Rp28.287.500 atau mencapai 95,08% dari

jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan dengan capaian target 1 laporan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp10.254.000 dengan realisasi keuangan Rp5.586.743 atau mencapai 54,48% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan dengan capaian target 1 laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp25.673.496 dengan realisasi keuangan Rp25.583.784 atau mencapai 99,65% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan dengan capaian target 1 laporan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp47.350.000 dengan realisasi keuangan Rp43.196.850 atau 91,23% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 8 unit dengan capaian target 7 unit.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp5.480.000 dengan realisasi keuangan Rp2.249.000 atau 41,04% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya adalah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 8 unit dengan capaian target 8 unit.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp 39.146.504 dengan realisasi keuangan Rp0 dan realisasi fisik sub kegiatan 0%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit. Sub kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 dan akhirnya tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh: (a) keterbatasan SDM yang mampu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeliharaan gedung kantor beserta dokumen pendukung lainnya, dan (b) jumlah Uang Persediaan (UP) Kecamatan Kapur IX yang terbatas, hanya Rp.20.000.000, sementara kebutuhan pendanaan untuk kegiatan dan sub kegiatan lain pada Triwulan IV tersebut masih banyak.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebesar Rp1.933.000 dengan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau 62,89% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebanyak 1 laporan dengan capaian target 1 laporan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp12.500.000 dengan realisasi keuangan Rp12.370.000 atau mencapai 98,96 % dari jumlah alokasi

anggaran dan realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 1 laporan dengan capaian target 1 laporan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.975.000 dengan realisasi keuangan Rp1.805.000 atau mencapai 91,39% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 7 lembaga kemasyarakatan dengan capaian target 7 lembaga kemasyarakatan.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp1.320.000 dengan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau mencapai 75,76% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 1 laporan dengan capaian target 1 laporan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebesar Rp27.000.000 dengan realisasi keuangan Rp27.000.000 atau mencapai 100% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah Dokumen

Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebesar Rp1.500.000 dengan realisasi keuangan Rp0 dan realisasi sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp1.500.000 dengan realisasi keuangan Rp1.000.000 atau 66,67% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebesar Rp2.000.000 dengan realisasi keuangan Rp2.000.000 atau mencapai 100% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN KAPUR IX	Kecamatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80%	77,46%	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	17 orang	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	-	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	-	-

				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	-	-
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	77,78%	-	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	7 unit	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	7 unit	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	-	Keterbatasan SDM dalam penyusunan RAB dan dokumen pendukung lainnya	Penambahan kuantitas dan kualitas ASN, utamanya yang memiliki kualifikasi teknis dalam pengelolaan aset serta pengadaan barang dan jasa
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80%	80%	-	-

				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80%	80%	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80%	80%	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80%	80%	-	-
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80%	80%	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80%	80%	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80%	80%	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	80%	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	80%	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	-	-

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas sebagian besar telah terlaksana dengan baik. Sub kegiatan yang tidak terlaksana adalah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang rencananya dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Kapur IX yang mampu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeliharaan gadung kantor beserta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, ketersediaan jumlah Uang Persediaan (UP) Kecamatan Kapur IX yang terbatas, hanya Rp.20.000.000, sementara kebutuhan pendanaan untuk kegiatan dan sub kegiatan lain pada Triwulan IV tersebut masih banyak.

Meskipun secara agregatif, realisasi anggaran pada Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX relatif tinggi atau mencapai 95,48% dari total alokasi anggaran, namun jika ditelisik lebih lanjut, masih terdapat kegiatan dan sub kegiatan dengan tingkat realisasi yang rendah. Permasalahan yang mengemuka dari hal tersebut adalah lemahnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki, utamanya terkait dengan penatausahaan keuangan. Pasca diberlakukannya aturan perihal penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Penatausahaan (SIPD-Penatausahaan) secara menyeluruh dalam penatausahaan keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, tanpa diikuti dengan pembekalan dan/atau bimbingan teknis yang cukup, maka aktor keuangan pada Perangkat Daerah kami, terutama Bendahara Pengeluaran yang sudah berusia 56 tahun sangat kesulitan dalam mengoperasikan sistem tersebut. Sementara itu, dukungan personil terhadap Bendahara Pengeluaran berupa Pembantu Bendahara Pengeluaran sangat sulit dilakukan karena jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kami miliki di Tahun 2025 sebanyak 17 orang pada umumnya telah berusia lebih dari 50 tahun. Hal yang menghawatirkan adalah tingkat penguasaan teknologi bagi pelaksana yang tergolong rendah, dalam hal ini operasional komputer dan perangkat lunak (*software*) serta faktor jaringan internet yang masih belum optimal.

Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan penambahan jumlah personil atau pengadaan ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan kualifikasi penguasaan komputer dan perangkat lunak (*software*) yang baik, dan ditunjang dengan kualifikasi teknis lainnya, utamanya dalam hal pengelolaan aset serta pengadaan barang dan jasa

3.I.8 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 urusan. Rincian OPD pelaksana urusan berikut anggaran dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 74 OPD, Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024

No	Urusan Dan OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.986.653.325	6.818.212.802	97,59
8.1.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.986.653.325	6.818.212.802	97,59
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.986.653.325	6.818.212.802	97,59
	TOTAL	6.986.653.325	6.818.212.802	97,59

3.1.8.1 Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total alokasi anggaran sebesar Rp6.986.653.325 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.818.212.802 atau 97,59%.

3.1.8.1.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 75 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.986.653.325	6.818.212.802
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.336.218.931	3.252.548.186
8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.834.000	28.669.000
8.01.01.2.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.834.000	28.669.000
8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.883.139.022	2.800.600.362
8.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.883.139.022	2.800.600.362
8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.770.409	154.679.329
8.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.100	6.090.000
8.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000	16.000.000

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
8.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.774.000	27.769.500
8.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.853.409	6.852.600
8.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.010.000	2.010.000
8.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.033.000	96.957.229
8.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.700.000	26.700.000
8.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	7.200.000	7.200.000
8.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	19.500.000
8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.260.500	120.534.820
8.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	750.000
8.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.510.500	11.784.820
8.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.000.000	108.000.000
8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.515.000	121.364.675
8.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.500.000	114.386.675
8.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.015.000	6.978.000
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	837.407.200	802.882.417
8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	837.407.200	802.882.417
8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	198.844.000	174.099.196
8.01.02.2.01.08	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	638.563.200	628.783.221
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.664.732.194	2.635.282.199
8.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.664.732.194	2.635.282.199
8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	1.621.510.000	1.609.620.008

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.043.222.194	1.025.662.191
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24.180.000	19.050.000
8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24.180.000	19.050.000
8.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	24.180.000	19.050.000
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	124.115.000	108.450.000
8.01.06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	124.115.000	108.450.000
8.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.375.000	58.625.000
8.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	64.740.000	49.825.000

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp28.834.000 dan realisasi keuangan Rp28.669.000 atau 99,43% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen perencanaan perangkatan daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.883.139.022 dan realisasi keuangan Rp2.800.600.362 atau 97,14% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol dengan capaian kinerja berupa tersedianya Gaji dan tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.100.000 dan realisasi keuangan Rp6.090.000 atau 99,84% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja berupa tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.000.000 dan realisasi keuangan Rp16.000.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya gorden dan komputer PC .
- c. Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.774.000 dan realisasi keuangan Rp27.769.500 atau 99,98% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor dan alat-alat kebersihan dengan capaian kinerja berupa tersedianya alat tulis kantor dan alat-alat kebersihan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.853.409 dan realisasi keuangan Rp6.852.600 atau 99,99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.010.000 dan realisasi keuangan Rp2.010.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman tamu dengan capaian kinerja berupa terfasilitasinya kunjungan tamu.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.033.000 dan realisasi keuangan Rp95.957.229 atau 99,92% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa terfasilitasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.200.000 dan realisasi keuangan Rp7.200.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 unit meja kerja pimpinan dengan capaian kinerja berupa tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000 dan realisasi keuangan Rp750.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya materai dengan capaian kinerja berupa materai.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.510.500 dan realisasi keuangan Rp11.784.820 atau 94,20% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja berupa dibayarkannya rekening listrik, air, telpon dan faximili.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp108.000.000 dan realisasi keuangan Rp108.000.000 atau 100% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium Tenaga Harian Lepas Badan Kesbangpol dengan capaian kinerja berupa tersedianya honorarium Tenaga Harian Lepas Badan Kesbangpol.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp114.500.000 dan realisasi keuangan Rp114.386.675 atau 99,90% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, BBM dan servis kendaraan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.015.000 dan realisasi keuangan Rp6.978.000 atau 99,47% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya pemeliharaan AC, komputer , printer dan laptop.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.844.000 dan realisasi keuangan Rp174.099.196 atau 87,56% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari bersejarah pada 7 (tujuh) titik lokasi rangkaian peringatan Hari Bela Negara dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka dengan alokasi anggaran sebesar Rp638.563.200 dan realisasi keuangan Rp628.783.221 atau 98,47% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbentuknya pasukan pengibar bendera merah putih, memperingati hari lahir pancasila dan peringatan HUT RI ke 80 dengan capaian kinerja berupa pembentukan paskibraka Kabupaten Lima Puluh Kota, dan peringatan hari lahir pancasila dan peringatan HUT RI ke 80.

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.621.510.000 dan realisasi keuangan Rp1.609.620.008 atau 99,27% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dana hibah untuk instansi vertikal (Polres 50 Kota, Polres Payakumbuh, Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru dan Kodim 0306/50 Kota) dan terlaksananya pendidikan politik bagi generasi muda (siswa/i SMA SMAN 1 Kecamatan Harau sebanyak 100 siswa) dengan capaian kinerja berupa terialisasinya hibah untuk instansi vertikal dan pendidikan politik bagi generasi muda.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.043.222.194 dan realisasi keuangan Rp1.025.662.191 atau 98,32% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran

dari sub kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan keuangan bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 10 partai politik dengan capaian kinerja berupa meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.180.000 dan realisasi keuangan Rp19.050.000 atau 78,78% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan terlaksananya rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebanyak 2 kali rapat dan sosialisasi tentang narkotika sebanyak 2 kali, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya kerukunan dan toleransi umat beragama.

V. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

1. Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.375.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp58.625.000 atau 98,74% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan/notulen/rekomendasi kepada kepala daerah sebanyak 4 (empat) kali, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya kewaspadaan dini pemerintah daerah dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp64.740.000 dan realisasi keuangan Rp49.825.000 atau 76,96% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebanyak 8 (delapan) kali rapat Forkopimda, dengan capaian kinerja berupa terciptanya harmonisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Umum		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85,00% (Persentase Terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	75,00%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85,00%	75,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 (tujuh) titik rangkaian peringatan Hari Bela Negara	5 (lima) titik yaitu 9 (sembilan) suhada, peristiwa situjuah, Koto Tuo Lautan Api, Upacara Hari Bela Negara dan PDRI di Halaban		-
				Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	4 (empat) kegiatan	4 (empat) kegiatan		
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80,00% (Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik)	72,5%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80,00%	72,5%		

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 (satu) kegiatan 5 (lima) untuk instansi vertikal	1 (satu) kegiatan 5 (lima) untuk instansi vertikal		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 (Sepuluh) partai politik	10 (sepuluh) partai politik		
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	82,00 % (Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat)	76,20%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	82,00 %	76,20%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 (dua) laporan	2 (dua) laporan		
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	80,00 % (Persentase	73,20 %		

NO	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sosial	Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah)			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80,00%	73,20%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 (empat) laporan rekomendasi/ notulens	4 (empat) laporan rekomendasi/ notulens		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	10 (sepuluh) kali rapat	8 (delapan) kali rapat		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik (97,95%), kegiatan dapat dicapai secara berimbang dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik (100%).

3.2 TANGGAPAN ATAS REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
1	Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan agar lebih mengutamakan pembinaan dan mampu untuk membina seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun perangkat nagari sehingga maksud dan tujuan dalam serapan anggaran pada OPD selaras dengan kegiatan dan anggaran, juga Inspektorat diminta untuk bisa membantu DPRD dalam melakukan tugas pengawasan serta menganalisis terkait mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan aturan yang berlaku.	- Inspektorat Daerah telah melaksanakan pembinaan kepada semua OPD, Pemerintahan Nagari, Puskesmas dan Sekolah melalui rekomendasi hasil pengawasan. - Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah telah melaksanakan pengawasan berupa reviu sebanyak 71 jenis penugasan, evaluasi sebanyak 18 jenis penugasan, pemantauan sebanyak 65 jenis penugasan, audit ketaatan sebanyak 3 jenis penugasan, audit kinerja sebanyak 3 jenis penugasan, probity audit sebanyak 2 jenis penugasan, asurans atas GRC sebanyak 1 penugasan, audit investigasi sebanyak 8 jenis penugasan, audit dengan tujuan tertentu sebanyak 28 jenis penugasan, pendampingan/asistensi sebanyak 7 jenis penugasan, serta asurans lainnya sebanyak 9 jenis penugasan. - Selain itu Inspektorat Daerah juga aktif dalam memenuhi permintaan sebagai Pemateri pada kegiatan yang diadakan oleh OPD, Pemerintahan Nagari dan Sekolah, dan juga melayani setiap Unit Instansi yang hadir ke kantor Inspektorat Daerah dalam rangka konsultasi/diskusi terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMDN), terkait permasalahan Wali Nagari Bukik Sikumpa kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan secara tuntas jangan ada nantinya permasalahan di belakang hari.	- Penyelesaian permasalahan Wali Nagari Bukik Sikumpa sudah selesai secara tuntas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 400.10.1/172/BUP-LK/VIII/2025 Tentang Pemberhentian Wali Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Periode 2022-2030. - Berdasarkan Laporan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 700.1.2.2/150/INSP-LK/LHP/2025 tanggal 22 Juli 2025, ditindaklanjuti dengan SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 400.10.1/172/BUP-LK/VIII/2025 Tentang Pemberhentian Wali Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Periode 2022-2030. - Untuk selanjutnya akan dilakukan Pemilihan Wali Nagari Defenitif Antar Waktu yang akan diinisiasi oleh Bamus sesuai kesiapan Nagari.
3	Sekretariat Daerah diharapkan dapat bekerja lebih maksimal, sehingga pada tahun anggaran 2025 tidak ada lagi bagian-bagian yang tingkat pencapaiannya rendah seperti pada tahun anggaran 2024.	Pada tahun 2025 ini telah diupayakan meningkatkan realisasi anggaran, misalnya dengan diadakannya monitoring dan evaluasi capaian realisasi keuangan, pendampingan dalam penatausahaan keuangan serta percepatan dalam pengajuan SPM, namun dengan adanya efisiensi yang terjadi pada tahun ini, maka dilakukan pengeluaran belanja secara efisien dan efektif, tanpa mengurangi pencapaian output yang tetap tercapai 100%.
4	Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Kesra di samping pembangunan Fisik diharapkan di tahun 2025 ke depannya untuk dapat mengakomodir pembangunan sumber daya manusia di lingkungan mesjid dan surau sehingga tercapailah pembangunan yang seimbang dan selaras.	Terima kasih DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota atas masukan tentang upaya peningkatan Sumber daya manusia (SDM). Insyaallah akan ditindaklanjuti dengan diadakannya pelatihan pelatihan di lingkungan masjid terutama untuk para Takmir Masjid sebagai upaya pencapaian

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
		pembangunan yang seimbang dan selaras.
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Terima kasih kepada BKPSDM beserta Jajaran yang telah sukses menyelenggarakan penerimaan P3K dan ASN dikabupaten Lima Puluh Kota semoga ke depannya akan lebih baik.	Terima kasih DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah mendukung Pelaksanaan Seleksi Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaksanaan seleksi penerimaan ASN telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya BKPSDM tetap memohon dukungan DPRD untuk pelaksanaan program dan kegiatan kepegawaian ke depannya, semoga ke depan akan lebih baik.
6	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tim SK4 yang sejak tahun 2019 tidak dianggarkan lagi dengan alasan keuangan, agar menjadi perhatian bagi kita bersama untuk ke depannya dapat mengalokasi anggaran yang memadai, mengingat pentingnya tim tersebut dalam menjaga dan penegak perda, keamanan dan ketertiban serta mewujudkan peningkatan Pedapatan asli Daerah (PAD).	Tahun 2024 Tim SK4 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sudah terbentuk dan terlaksana dengan baik, anggaran sudah tersedia tetapi belum fokus ke Peningkatan PAD, hanya fokus ke peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tahun 2025 Kegiatan SK4 tidak ada. Di Tahun 2026 anggaran sudah tersedia untuk kegiatan SK4 walaupun anggaran belum terpenuhi dengan baik.
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada pemerintah daerah terkait dengan kegiatan kegiatan yang tidak terlaksana yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan baik itu pemeliharaan, perawatan gedung dan Pengadaan, agar di tahun anggaran 2025 dilaksanakan.	Kegiatan-kegiatan mencakup pemeliharaan dan perawatan gedung, serta pengadaan sarana dan prasarana yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2024 telah diakomodir dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada akhir akhir ini kita lihat secara nyata kurangnya rasa kebangsaan bagi pemuda dan pemudi di lingkungan kita, kepada pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan dan mengalokasikan	- Pelaksanaan HUT RI di kecamatan sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan untuk penguatan lebih optimalnya acara HUT RI di tingkat kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan dana agar pelaksanaan HUT RI lebih meriah di masa yang akan datang.

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
	anggaran terkait HUT RI di kecamatan dan pembinaan/Bimtek terhadap pemuda pemudi sehingga dapat mewujudkan kembali rasa kebangsaan di lingkungan masyarakat.	- Untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda-pemudi diharapkan pemerintah juga melakukan optimalisasi anggaran terhadap kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang merupakan program nasional yang sampai saat ini belum di anggarkan oleh pemerintah daerah. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan merupakan wadah utama untuk memberikan pelatihan, pembinaan dan implimentasi nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di kalangan masyarakat terutama pemuda pemudi.
9	Sekretariat DPRD, diminta kepada pemerintah daerah untuk dapat merevisi peraturan Bupati terkait sebagai berikut: 1) Gaji Anggota DPRD 2) Bimtek anggota 3) Panjar Perjalanan Dinas Anggota DPRD 4) Perjalanan dinas DPRD. 5) Pengadaan Tablet anggota DPRD 6) Pengadaan Baju anggota DPRD 7) Pengadaan Pin anggota DPRD	Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan anggaran yang tersedia telah dipenuhi berupa tablet, pin emas baju, bimbingan teknis anggota serta perjalanan dinas.
10	Sekretariat DPRD, terkait silpa tahun 2024 berkisar 3,7 miliar tolong ke depannya sekretariat DPRD untuk dapat berkoordinasi dengan anggota DPRD, Fasilitas di kantor DPRD tolong dikondisikan seperti AC, air, mobiler, alat tulis dan lain-lainya.	- Untuk silpa kita koordinasikan dengan pimpinan dan anggota DPRD, serta pemenuhan kebutuhan air dan alat tulis sudah kita penuhi sesuai dengan anggaran yang tersedia di sekretariat DPRD - Sementara untuk AC masih belum tersedia anggaran untuk memenuhinya
11	Terkait dengan kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tidak selesai pengerjaannya yaitu pembangunan Jembatan Lubuak Nago dengan Progres Fisik 72% dan pembayaran keuangan	Sudah dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun 2025. Tahun 2025 kegiatan ini tidak terlaksana juga karena secara teknis, waktu efektif pelaksanaan hanya 35 hari kalender, dan di anggarkan kembali di Tahun 2026.

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
	57,50% di mana di sana terdapat sisa anggaran lebih kurang sebesar Rp. 1,6 Milyar, agar sisa Anggaran tersebut dapat dialokasikan kembali untuk penyelesaian pembangunan Jembatan Lubuak Nago tersebut.	
12	Terkait dengan program-program kegiatan yang sudah direncanakan berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan terutama untuk lokasi lokasi yang berkaitan erat dengan peningkatan dan penambahan Pendapatan asli Daerah (PAD), seperti jalan lingkung, jalan menuju pusat pertanian dan peternakan serta jalan menuju kawasan wisata, namun tidak terlaksana karena adanya proses <i>refocusing</i> anggaran, agar kegiatan tersebut dianggarkan dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.	Sudah dianggarkan pada tahun 2025, tapi karena adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga dilakukan efisiensi anggaran pada dinas PUPR sebesar Rp63.502.780.000 (DPA Awal Rp85.131.789.746 menjadi DPA Pergeseran Rp21.629.009.746).
13	Meminta kepada pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan terkait dengan pembangunan sarana prasarana irigasi, perbaikan jalan dan jembatan yang rusak serta fasilitas lainnya yang menyangkut dengan hajat hidup masyarakat.	- Untuk tahun 2025, karena adanya efisiensi oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengusulkan Daerah Irigasi dan dan jalan Kabupaten yang akan diperbaiki oleh Pemerintah Pusat. Untuk Daerah Irigasi, Pemda Lima Puluh Kota mendapatkan 9 lokasi Daerah Irigasi prioritas dalam 2 tahap, yakni tahap 2 dengan 6 lokasi dengan anggaran Rp420.209.400 dan Tahap 3 dengan 3 lokasi dengan anggaran Rp6.049.178.900 yang didanai oleh Pemerintah Pusat melalui Inpres Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Untuk mendukung swasembada pangan.

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
		- Terkait dengan ruas jalan kabupaten Lima Puluh Kota juga mendapatkan 1 ruas jalan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025 untuk Jalan Piobang-Koto Panjang sepanjang $\pm$ 1,5 KM.
14	Terkait dengan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap OPD yang tidak mampu memenuhi capaian targetnya yang menyebabkan kondisi keuangan daerah berada pada titik yang memprihatinkan agar dilakukan evaluasi dan penghitungan kembali potensi target PAD tersebut sehingga OPD benar benar bisa memenuhi capaian target tersebut.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing OPD pengelola pendapatan. Evaluasi tersebut meliputi analisis realisasi, identifikasi kendala pemungutan, serta penghitungan ulang potensi pajak dan retribusi daerah berbasis data aktual. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyesuaian target PAD yang lebih realistis, terukur, dan dapat dicapai, serta sebagai bahan penguatan perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah ke depan
15.	Dalam rangka memaksimalkan target dan pencapaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada Tim Terpadu atau Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan PAD yang sudah dibentuk yang melibatkan Aparat Penegak Hukum serta unsur unsur terkait, sehingga semua kendala dalam proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dimaksimalkan.	BPKPD mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu/Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan PAD melalui koordinasi lintas OPD serta sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan unsur terkait. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan data potensi pajak dan retribusi daerah, fasilitasi kegiatan pendataan dan penagihan di lapangan, serta penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kendala pemungutan serta mengoptimalkan penerimaan PAD secara berkelanjutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan Alokasi dan Dukungan Anggaran yang cukup kepada OPD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan	- Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran melalui pengalokasian anggaran secara

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
	funksinya bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat POL PP), sehingga keberadaan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang terjadi benar benar dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.	proporsional dan berbasis prioritas pada OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pengalokasian anggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan kehadiran Pemerintah Daerah dirasakan secara optimal oleh masyarakat. - Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran melalui pengalokasian anggaran secara proporsional dan berbasis prioritas pada OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pengalokasian anggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan kehadiran Pemerintah Daerah dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
17	Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, diharapkan Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan dan koordinasi antar OPD terkait; Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, BPJS Kesehatan dan OPD terkait lainnya dalam memberikan solusi terhadap setiap permasalahan kesehatan masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.	- Sudah ditindaklanjuti di Tahun 2025 dengan adanya komitmen dari kepala puskesmas untuk mendahulukan pelayanan poliklinik ke RSUD dr. Achmad Darwis. - RSUD dr. Achmad Darwis juga sudah menindaklanjuti jemput dan antar pasien poliklinik ke nagari
18	Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan pembayaran pelayanan kesehatan di RSUD maupun Puskesmas dapat dilakukan secara Digital, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.	Pembayaran pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Darwis sudah bisa dilakukan secara Digital melalui QRIS dan Transfer melalui Nomor Rekening RSUD dr. Achmad Darwis
19	Melihat perkembangan di masyarakat DTKS sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat sensitif, diminta kepada Pemerintah Daerah hal ini menjadi perhatian bersama.	Dengan Adanya perubahan kebijakan sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) maka DTKS tidak dipakai lagi, maka sambil berjalan Dinas Sosial tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap selalu mempelajari DTSEN yang baru disamping itu DTSEN merupakan kolaborasi kebijakan antara BPS, Bappenas, Kemensos, Kemendagri, dan BPJS
20	Mengenai pelaksanaan Program UHC yang merupakan program secara nasional, diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Daerah, sesuai informasi yang berkembang daerah tetangga Kota Bukittinggi dan Riau telah menetapkan peserta yang terdaftar akan mendapatkan pelayanan berobat gratis	- Program UHC sudah dicantumkan di Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029. - Terkait pernyataan bahwa daerah tetangga Bukittinggi dan Riau telah menetapkan peserta yang terdaftar akan mendapatkan pelayanan berobat gratis dengan persyaratan KTP itu juga sudah berlaku di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
	dengan persyaratan KTP.	bahwa peserta yang terdaftar sudah bisa untuk berobat di faskes dengan hanya membawa KTP karena Kartu Tanda Peserta BPJS Kesehatan sudah digantikan dengan KTP Peserta.
21	Berkenaan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah untuk mengsucceskan program nasional ini.	- Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan penyuluhan, pemberian izin usaha dan pembinaan terhadap 11 MBG yg beroperasi di tahun 2025 - Tim SATGAS Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500.1.1/177/BUP-LK/VIII/2025 yang bertugas mengawasi, Monev di Kabupaten Lima Puluh Kota - Melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui Kormil Badan Gizi Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota terkait progres pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di SPPG - Mengusulkan Lokasi Dapur MBG yang dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional di Kecamatan Pangkalan dan Lareh Sago Halaban - Memonitoring progres pembangunan dan SPPG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional
22	Berkenaan dengan pencapaian target pendapat daerah yang cenderung menurun, diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengarahkan dan menggerakkan OPD untuk menggali semua potensi yang ada dan berusaha seoptimal mungkin untuk memicu minat para investor agar berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Dalam rangka meningkatkan capaian pendapatan daerah, BPKPD berperan aktif mengarahkan dan mendorong OPD pengelola pendapatan untuk menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang tersedia. Selain itu, BPKPD melakukan penyederhanaan pelayanan administrasi perpajakan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian regulasi dan kemudahan layanan, sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
23	Berkenaan dengan terjadinya penurunan produksi pertanian, dampak dari kurang dan tidak meratanya pupuk subsidi untuk semua tanaman, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian dan selanjutnya dapat memberdayakan potensi (pupuk organik) yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.	Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pertanian tentang alokasi pupuk bersubsidi terutama untuk pupuk organik. Pada tahun 2024 belum ada alokasi pupuk organik bersubsidi, namun dalam tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi pupuk organik bersubsidi sebesar 353 Ton.
24	Dalam rangka menjamin dan memperkuat pembangunan pertanian Pemerintah Daerah diminta untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).	Distanhortbun pada tahun 2025 melalui APBD Perubahan, Distanhortbun melaksanakan updating data spasial LP2B dalam rangka Penyusunan Ranperda LP2B di tahun 2026. Sehingga memperkuat pembangunan pertanian tanaman pangan di tahun berikutnya.
25	Berkenaan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dari Pasar, berdasarkan pantauan di lapangan Pasar Danguang-Danguang sangat berpotensi dikelola secara maksimal, diharapkan potensi ini akan menjadi Pemerintah Daerah.	Setuju dengan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Pasar Danguang-Danguang perlu dilakukan langkah-langkah berikut: - Pendataan ulang potensi retribusi pelayanan pasar Danguang-Danguang. - Menyusun aturan tentang Pengelolaan dan Penataan Pasar, sehingga potensi pendapatan dapat diwujudkan. - Menjadikan Pasar Danguang-Danguang sebagai UPT, sehingga pengelolaan, penataan pendapatan dapat dikelola secara maksimal - Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pasar.
26	Mengenai Pajak Tenaga Kerja Asing yang ditargetkan 450 juta per tahun sampai saat belum terkelola secara maksimal, diharapkan hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah.	Retribusi Tenaga Kerja Asing pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2024 target PAD adalah sebesar Rp192.000.000 dengan realisasi sebesar Rp132.657.600 atau sebesar 69,1%, sedangkan Target PAD pada tahun 2025 adalah sebesar Rp414.119.844 dengan realisasi

NO	HASIL REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD TERKAIT
		sebesar Rp322.147.044 atau sebesar 77,79% terjadi peningkatan capaian target PAD dari tahun 2024 ke tahun 2025. Dapat disimpulkan bahwa Retribusi Tenaga Kerja Asing telah terkelola cukup baik.
27	Berkenaan dengan keresahan di masyarakat akibat dari maraknya pinjaman online sebagai dampak semakin buruknya ekonomi masyarakat, diharapkan Pemerintah daerah mampu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan mendorong dan mendukung berkembangnya usaha koperasi yang ada sebagai soko guru ekonomi masyarakat.	Setuju dengan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat dengan mendukung berkembangnya usaha koperasi yang ada sebagai soko guru ekonomi masyarakat dilakukan langkah-langkah berikut: 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa koperasi merupakan wadah yang dapat memberikan solusi untuk permasalahan ekonomi dengan meningkatkan SDM Pengelola Koperasi. 2. Mendorong Koperasi untuk meningkatkan modal usaha dengan bekerja sama dengan Lembaga Perbankan, sehingga koperasi dapat menyediakan akses mudah ke modal usaha, tempat menabung aman, dan layanan keuangan yang lebih fleksibel dari bank, serta mencegah jeratan rentenir, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan mendorong budaya menabung dan kewirausahaan melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya.

Sementara itu, asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem penugasan pemerintah kepada daerah, baik dari Pemerintah Pusat kepada daerah maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan tertentu. Pelaksanaan tugas pembantuan tersebut disertai dengan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi penugasan.

Pemberian anggaran tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pemberian tugas pembantuan antara lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas, membantu penyelesaian permasalahan tertentu, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuan merupakan urusan pemerintahan di luar enam urusan pemerintahan yang bersifat absolut atau mutlak.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum menerima Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan demikian, pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Secara umum, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, namun masih diperlukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah secara optimal. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, serta menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi DPRD guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perbaikan pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.